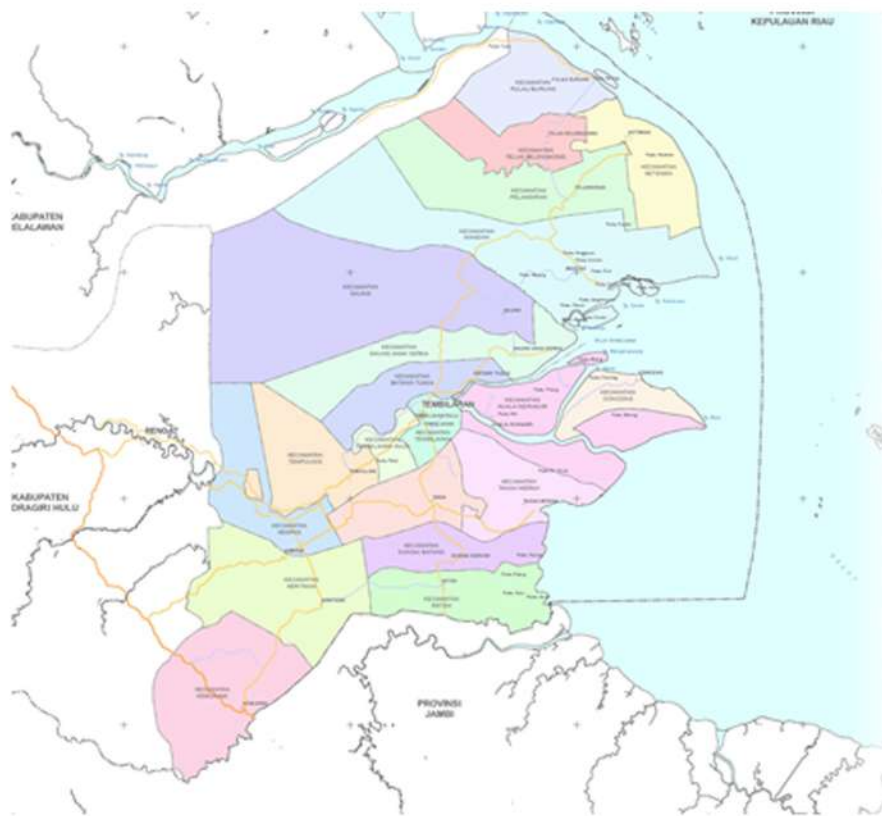




# **RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026**





**BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;
  - c. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) akan digunakan oleh Penjabat (pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2026

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
7. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026 merupakan program prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
19. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
21. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

## Pasal 2

RPD Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu Tahun 2024-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergi dan terpadu.

## Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

- b. pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **BAB II SISTEMATIKA**

### **Pasal 4**

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

### **Pasal 5**

RPD Tahun 2024-2026 yang disusun dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

## **BAB III SUMBER PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;

- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD; dan
- c. Evaluasi terhadap RPD.

(3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 28 April 2023  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



*[Handwritten signature]*

MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 28 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



*[Handwritten signature]*  
AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 4



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

## DAFTAR ISI

|                                                            | Halaman     |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>i</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                 | <b>x</b>    |
| <b>BAB I        PENDAHULUAN</b>                            | <b>I-1</b>  |
| 1.1    Latar Belakang .....                                | I-1         |
| 1.2    Dasar Hukum Penyusunan .....                        | I-4         |
| 1.3    Hubungan Antar Dokumen .....                        | I-9         |
| 1.4    Maksud dan Tujuan.....                              | I-11        |
| 1.5    Sistematika Penulisan .....                         | I-12        |
| <b>BAB II        GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>     | <b>II-1</b> |
| 2.1    Aspek Geografi Dan Demografi .....                  | II-1        |
| 2.1.1    Kondisi Geografi Wilayah.....                     | II-1        |
| 2.1.2    Wilayah Rawan Bencana .....                       | II-14       |
| 2.1.3    Kondisi Demografi .....                           | II-16       |
| 2.2    Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                | II-19       |
| 2.2.1.    Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... | II-19       |
| 2.2.1.1.    Pertumbuhan Ekonomi .....                      | II-19       |
| 2.2.1.2.    Inflasi .....                                  | II-24       |
| 2.2.1.3.    PDRB Per kapita .....                          | II-26       |
| 2.2.1.4.    Indeks Gini.....                               | II-27       |
| 2.2.1.5.    Kemiskinan.....                                | II-28       |
| 2.2.2.    Fokus Kesejahteraan Sosial .....                 | II-29       |
| 2.2.2.1.    Indeks Pembangunan Manusia.....                | II-30       |
| 2.2.2.2.    Harapan lama Sekolah .....                     | II-31       |
| 2.2.2.3.    Rata-Rata Lama Sekolah.....                    | II-31       |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|          |                                                                             |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.2.2.4. | Angka Harapan Hidup.....                                                    | II-32 |
| 2.2.2.5. | Pengeluaran Perkapita .....                                                 | II-33 |
| 2.2.2.6. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....                                    | II-34 |
| 2.2.3    | Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....                                         | II-34 |
| 2.2.3.1  | Seni Budaya.....                                                            | II-34 |
| 2.2.3.2  | Olahraga .....                                                              | II-66 |
| 2.3      | Aspek Pelayanan Umum.....                                                   | II-34 |
| 2.3.1.   | Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....        | II-67 |
| 2.3.1.1. | Pendidikan.....                                                             | II-67 |
| 2.3.1.2. | Kesehatan .....                                                             | II-70 |
| 2.3.1.3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....                                      | II-75 |
| 2.3.1.4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....                               | II-79 |
| 2.3.1.5. | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....             | II-82 |
| 2.3.1.6. | Sosial .....                                                                | II-83 |
| 2.3.2.   | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... | II-87 |
| 2.3.2.1. | Ketenaga Kerjaan.....                                                       | II-87 |
| 2.3.2.2. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....                           | II-89 |
| 2.3.2.3. | Pangan.....                                                                 | II-91 |
| 2.3.2.4. | Lingkungan Hidup .....                                                      | II-92 |
| 2.3.2.5. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....                         | II-93 |
| 2.3.2.6. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....                                       | II-94 |
| 2.3.2.7. | Komunikasi dan Informatika.....                                             | II-95 |
| 2.3.2.8  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....                           | II-98 |
| 2.3.2.9. | Perhubungan .....                                                           | II-98 |
| 2.3.2.10 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....                                     | II-99 |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|                |                                                  |              |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 2.3.2.11       | Penanaman Modal .....                            | II-100       |
| 2.3.2.12       | Kepemudaan dan Olahraga.....                     | II-100       |
| 2.3.2.13       | Statistik .....                                  | II-101       |
| 2.3.2.14       | Kebudayaan.....                                  | II-102       |
| 2.3.2.15       | Persandian.....                                  | II-102       |
| 2.3.2.16       | Perpustakaan.....                                | II-103       |
| 2.3.2.17       | Kearsipan .....                                  | II-104       |
| 2.3.3          | Layanan Urusan Pilihan .....                     | II-104       |
| 2.3.3.1.       | Kelautan dan Perikanan .....                     | II-104       |
| 2.3.3.2.       | Pariwisata .....                                 | II-105       |
| 2.3.3.3.       | Pertanian.....                                   | II-106       |
| 2.3.3.4.       | Perdagangan .....                                | II-109       |
| 2.3.3.5.       | Perindustrian.....                               | II-110       |
| 2.3.4.         | Pendukung Urusan Pemerintahan.....               | II-111       |
| 2.3.4.1        | Sekretariat Daerah .....                         | II-111       |
| 2.3.5.         | Penunjang Urusan pemerintahan .....              | II-114       |
| 2.3.5.1.       | Perencanaan .....                                | II-114       |
| 2.3.5.2.       | Keuangan.....                                    | II-115       |
| 2.3.5.3.       | Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ..... | II-115       |
| 2.3.5.4.       | Penelitian dan Pengembangan .....                | II-116       |
| 2.3.6.         | Pengawasan .....                                 | II-117       |
| 2.4            | Aspek Daya Saing Daerah .....                    | II-117       |
| 2.4.1          | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....             | II-118       |
| 2.4.2          | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....      | II-119       |
| 2.4.3.         | Fokus Iklim Berinvestasi .....                   | II-121       |
| 2.4.4.         | Fokus Sumber Daya Manusia.....                   | II-121       |
| <b>BAB III</b> | <b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>            | <b>III-1</b> |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|                 |                                                                          |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.1             | Kinerja Keuangan Masa Lalu .....                                         | III-2         |
| 3.1.1           | Kinerja Pelaksanaan APBD .....                                           | III-4         |
| 3.1.2           | Neraca Daerah .....                                                      | III-18        |
| 3.2             | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....                            | III-29        |
| 3.2.1           | Proporsi Penggunaan Anggaran.....                                        | III-29        |
| 3.2.2           | Analisis Pembiayaan .....                                                | III-34        |
| 3.3             | Kerangka Pendanaan.....                                                  | III-37        |
| 3.3.1           | Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .....                 | III-38        |
| 3.3.2           | Perhitungan Kerangka Pendanaan.....                                      | III-51        |
| <b>BAB IV</b>   | <b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>                              | <b>IV-1</b>   |
| 4.1             | Permasalahan Pembangunan Daerah.....                                     | IV-2          |
| 4.2             | Isu Strategis.....                                                       | IV-18         |
| 4.2.1           | Isu Strategis Internasional.....                                         | IV-18         |
| 4.2.2           | Isu Strategis Nasional .....                                             | IV-25         |
| 4.2.3           | Isu Strategis Regional .....                                             | IV-31         |
| 4.2.4           | Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir .....                            | IV-37         |
| <b>BAB V</b>    | <b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>                                           | <b>V-1</b>    |
| <b>BAB VI</b>   | <b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS .....</b>             | <b>VI-1</b>   |
| 6.1             | Strategi.....                                                            | VI-1          |
| 6.2             | Arah Kebijakan.....                                                      | VI-6          |
| 6.3             | Program Pembangunan Daerah.....                                          | VI-14         |
| 6.4             | Proyek Strategis Pembangunan Daerah .....                                | VI-28         |
| <b>BAB VII</b>  | <b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b> | <b>VII-1</b>  |
| 7.1             | Kerangka Pendanaan.....                                                  | VII-1         |
| <b>BAB VIII</b> | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>                    | <b>VIII-1</b> |
| 8.1             | Penetapan Indikator Kinerja Daerah .....                                 | VIII-1        |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|               |                                          |             |
|---------------|------------------------------------------|-------------|
| 8.1.1         | Indikator Kinerja Makro Pembangunan..... | VIII-1      |
| 8.1.2         | Indikator Kinerja Utama (IKU).....       | VIII-2      |
| 8.1.3         | Indikator Kinerja Daerah.....            | VIII-3      |
| <b>BAB IX</b> | <b>PENUTUP .....</b>                     | <b>IX-1</b> |
| 9.1           | Kaidah Pelaksanaan.....                  | IX-2        |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

### DAFTAR TABEL

|       |       |                                                                                                                                                  | Halaman |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel | II-1  | Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2022                                               | II-3    |
| Tabel | II-2  | Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                   | II-11   |
| Tabel | II-3  | Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022                                                              | II-12   |
| Tabel | II-4  | Bencana Alam Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022                                                                | II-15   |
| Tabel | II-5  | Nilai indeks risiko Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2021                                                                                  | II-15   |
| Tabel | II-6  | Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                                      | II-17   |
| Tabel | II-7  | Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Indragiri Hilir Tahun 2022                                                                      | II-18   |
| Tabel | II-8  | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2022 | II-21   |
| Tabel | II-9  | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022   | II-22   |
| Tabel | II-10 | Perkebangan Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                                                                | II-28   |
| Tabel | II-11 | Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022                                                                                    | II-30   |
| Tabel | II-12 | Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022                                                                           | II-35   |
| Tabel | II-13 | Kinerja keolahrgaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                                                                    | II-67   |
| Tabel | II-14 | Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                                                    | II-68   |
| Tabel | II-15 | Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                                                     | II-71   |
| Tabel | II-16 | Sebaran Tenaga Kesehatan di Indragiri Hilir tahun 2022                                                                                           | II-74   |
| Tabel | II-17 | Kinerja Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                             | II-75   |
| Tabel | II-18 | Panjang dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022                                                                             | II-76   |
| Tabel | II-19 | Capaian Pengurangan Kumuh Kabupaten Indragiri Hilir Sampai dengan 2022                                                                           | II-81   |
| Tabel | II-20 | Kinerja Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                              | II-82   |
| Tabel | II-21 | Kinerja Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                     | II-82   |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|       |       |                                                                                                                 |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel | II-22 | Rekapitulasi DTKS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022                                                          | II-86  |
| Tabel | II-23 | Kinerja Indikator Urusan Ketenaga kerjaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                             | II-89  |
| Tabel | II-24 | Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022 | II-91  |
| Tabel | II-25 | Kinerja Indikator Urusan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                       | II-92  |
| Tabel | II-26 | Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                             | II-93  |
| Tabel | II-27 | Wajib KTP, Memiliki KTP, dan Persentase Tahun 2019-2022 Kabupaten Indragiri Hilir                               | II-93  |
| Tabel | II-28 | Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022             | II-95  |
| Tabel | II-29 | Website OPD menurut Jenis Pengamanan Yang Di Gunakan Di Lingkungan Pemda Kab.Inhil Tahun 2022                   | II-96  |
| Tabel | II-30 | PPID Pembantu (OPD) dan PPID Desa Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022                                       | II-98  |
| Tabel | II-31 | Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022             | II-98  |
| Tabel | II-32 | Kinerja Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                  | II-99  |
| Tabel | II-33 | Kinerja Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022           | II-99  |
| Tabel | II-34 | Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                              | II-100 |
| Tabel | II-35 | Kinerja Indikator Urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                      | II-101 |
| Tabel | II-36 | Kinerja Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                   | II-102 |
| Tabel | II-37 | Pengamanan Dokumen Elektronik Sanapati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                | II-102 |
| Tabel | II-38 | Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                 | II-103 |
| Tabel | II-39 | Kinerja Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                    | II-104 |
| Tabel | II-40 | Kinerja Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                       | II-105 |
| Tabel | II-41 | Kinerja Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                   | II-105 |
| Tabel | II-42 | Kinerja Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                    | II-108 |
| Tabel | II-43 | Kinerja Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                  | II-109 |
| Tabel | II-44 | Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022 | II-111 |
| Tabel | II-45 | Implementasi Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                | II-113 |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|       |        |                                                                                                                                                                          |        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel | II-46  | Kinerja Indikator Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                                                                                  | II-115 |
| Tabel | II-47  | Kinerja Indikator Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022                                                                                                  | II-116 |
| Tabel | II-48  | Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022                                                                                  | II-117 |
| Tabel | II-49  | Kinerja Indikator Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                                                                                  | II-117 |
| Tabel | II-50  | Panjang dan Kondisi jalan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022                                                                                                        | II-120 |
| Tabel | II-51  | Panjang Jembatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022                                                                                                                 | II-120 |
| Tabel | II-52  | Hasil Akhir Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur                                                                                                                 | II-121 |
| Tabel | II-53  | Rekapitulasi Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022                                                                                     | II-123 |
| Tabel | II-54  | Capaian Indikator Sasaran RPJMD (Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020                                                                                    | II-133 |
| Tabel | II-55  | Inovasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                            | II-137 |
| Tabel | III-1  | Skala interval Otonomi Fiskal                                                                                                                                            | III-3  |
| Tabel | III-2  | Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                                                                   | III-4  |
| Tabel | III-3  | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                                                | III-10 |
| Tabel | III-4  | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                                                   | III-14 |
| Tabel | III-5  | Realisasi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan)                                                                                            | III-17 |
| Tabel | III-6  | Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                                                                        | III-20 |
| Tabel | III-7  | Rasio Lancar Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                                                                                     | III-24 |
| Tabel | III-8  | Rasio Hutang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)                                                                                                    | III-26 |
| Tabel | III-9  | Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                                                               | III-26 |
| Tabel | III-10 | Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)                                                                                   | III-27 |
| Tabel | III-11 | Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017- 2021 (dalam Jutaan)                                                                                  | III-28 |
| Tabel | III-12 | Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                                                    | III-30 |
| Tabel | III-13 | Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2022 (dalam Jutaan) | III-32 |
| Tabel | III-14 | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                                                                            | III-34 |
| Tabel | III-15 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)                                                                         | III-35 |
| Tabel | III-16 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)                                                                         | III-35 |
| Tabel | III-17 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)                                                                       | III-36 |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|       |          |                                                                                                                                                   |        |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel | III-18   | Proyeksi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam jutaan)                                                                      | III-42 |
| Tabel | III-19   | Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)                                                          | III-46 |
| Tabel | III-20   | Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah) | III-49 |
| Tabel | III-21   | Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)                                                                       | III-51 |
| Tabel | III-22   | Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)      | III-52 |
| Tabel | III-23   | Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)                                                              | III-53 |
| Tabel | III-24   | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                             | III-53 |
| Tabel | IV-1     | Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (tahun) Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022                                           | IV-6   |
| Tabel | IV-2     | Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                           | IV-15  |
| Tabel | V-1      | Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Nasional                                       | V-5    |
| Tabel | V-2      | Indikator Tujuan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                                                                        | V-6    |
| Tabel | V-3      | Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                        | V-9    |
| Tabel | V-4      | Keterkaitan (Cascading) IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 -2026                                                      | V-12   |
| Tabel | V-5      | Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 -2026                                                  | V-27   |
| Tabel | VI-1     | Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026                                    | VI-2   |
| Tabel | VI - 2   | Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026                          | VI-10  |
| Tabel | VI - 3   | Keselarasan program dengan Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                  | VI-19  |
| Tabel | VII - 1  | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam Juta)                                                      | VII-3  |
| Tabel | VII - 2  | Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                                                             | VII-7  |
| Tabel | VIII - 1 | Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                                                | VIII-2 |
| Tabel | VIII - 2 | Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                                                | VIII-2 |
| Tabel | VIII - 3 | Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                                               | VIII-4 |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

## DAFTAR GAMBAR

|                |                                                                                                                    | Halaman |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar I - 1   | Kerangka Logis Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026                                            | I-3     |
| Gambar I - 2   | Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya                                                             | I-10    |
| Gambar II - 1  | Peta Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                     | II-2    |
| Gambar II - 2  | Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau                                    | II-13   |
| Gambar II - 3  | Perkembangan Pertumbuhan PDRB Harga Konstan (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022 | II-19   |
| Gambar II - 4  | Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022                 | II-20   |
| Gambar II - 5  | Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2022                  | II-23   |
| Gambar II - 6  | Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021            | II-24   |
| Gambar II - 7  | Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2019 – 2022                     | II-25   |
| Gambar II - 8  | Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022                                           | II-25   |
| Gambar II - 9  | Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022     | II-26   |
| Gambar II - 10 | Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2022                                      | II-27   |
| Gambar II - 11 | Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022                                                  | II-29   |
| Gambar II - 12 | Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022                             | II-31   |
| Gambar II - 13 | Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022                         | II-32   |
| Gambar II - 14 | Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022                            | II-33   |
| Gambar II - 15 | Perbandingan pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir, Inhu, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022                   | II-33   |
| Gambar II - 16 | Perbandingan pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir, Inhu, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022                   | II-34   |
| Gambar III - 1 | Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                             | III-6   |
| Gambar III - 2 | Trend Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                    | III-8   |
| Gambar III - 3 | Realisasi Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)                                          | III-12  |
| Gambar IV - 1  | Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026               | IV-4    |
| Gambar IV - 2  | Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2022                                             | IV-5    |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|        |        |                                                                                  |      |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gambar | IV - 3 | Angka Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2022 | IV-7 |
| Gambar | IV - 4 | Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi RiaU Menurut Kota /Kabupaten Tahun 2022 | IV-8 |
| Gambar | IV - 5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Kabupaten /Kota Tahun 2022        | IV-9 |
| Gambar | IV - 6 | Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026               | VI-7 |
| Gambar | VI - 1 | Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi RiaU Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2022  | IV-8 |
| Gambar | VI-1   | Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026               | VI-7 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang melayani sebagai agen pembangunan untuk menghadirkan negara yang menyejahterakan masyarakat adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan. Menempatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah tujuan pembangunan daerah merupakan harapan yang besar dalam pembangunan daerah hal harus dipertanggungjawabkan segenap pemangku kepentingan (Pemerintah daerah, *stakeholder*, dan masyarakat) secara konsisten dan sungguh-sungguh. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang prima guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus mengupayakan cara paling efektif agar mampu menghasilkan sistem yang dapat membuat seluruh masyarakat mau dan mampu terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Perumusan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat harus



dituangkan dalam suatu dokumen rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan secara akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut menjadikan pembangunan daerah menjadi *starting point* bagi setiap tahapan kebijakan pembangunan daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2019-2023, **sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023.**

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa **untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.** Dengan demikian, Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati saat masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

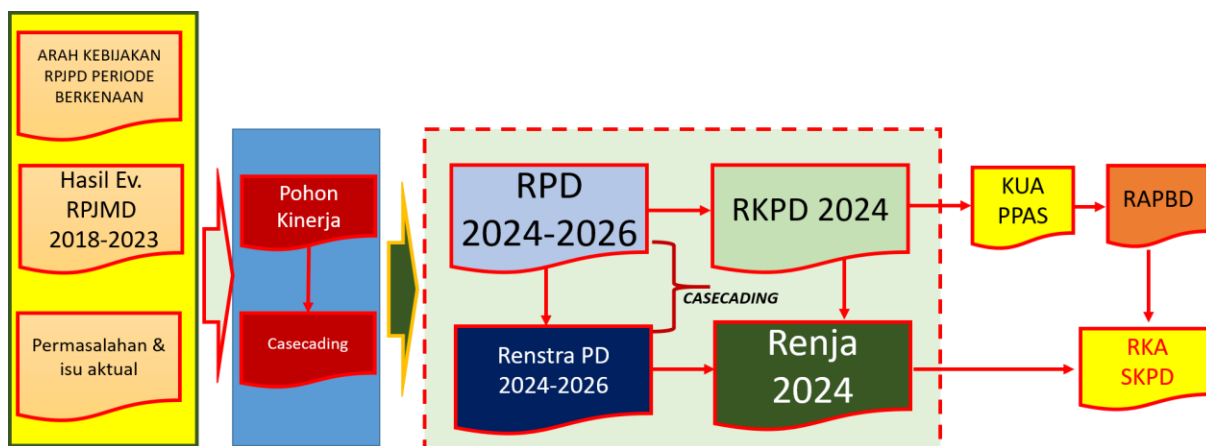
Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.



Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 merupakan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir adalah ***"INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025"***. Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi RPJMD dapat dirumuskan tujuan dan sasaran dalam rangkaian pohon kinerja dan cascading sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026 seperti yang digambarkan pada kerangka logis penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

**Gambar I.1**

**Kerangka Logis Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**



Dengan regulasi nasional yang terus berkembang, salah satunya ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Indragiri Hilir dan Renstra Kabupaten Indragiri Hilir.



Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mengimplementasikan RPJPD dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu RPD juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis bagi seluruh Perangkat Daerah. Dengan ini, penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga RPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan, Tahun 2024, 2025 dan 2026. Melalui RPD diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan demikian tujuan pembangunan dapat segera tercapai.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan



- Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
  10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);



23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan



- Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
36. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26); dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.



### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

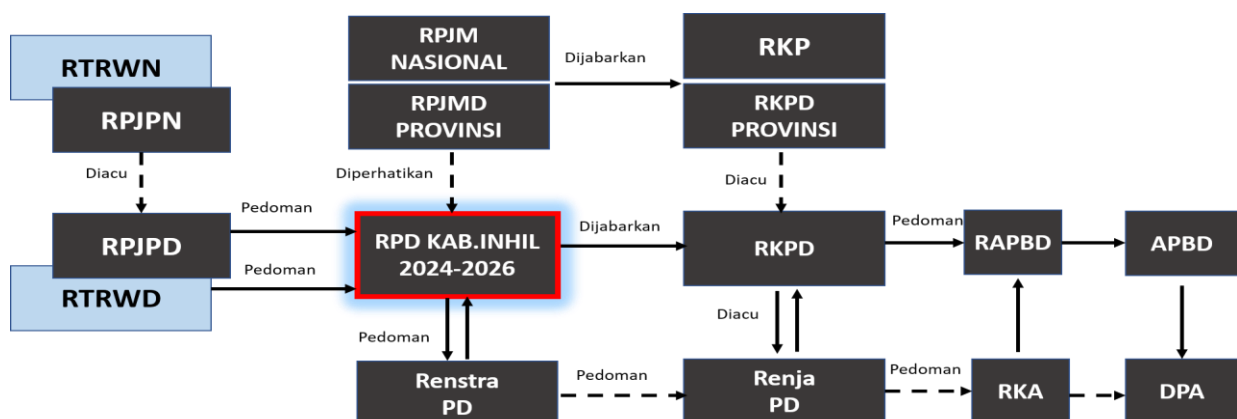
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 memperhatikan:

- 1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024;
- 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pada tahap keempat RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025;
- 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023;
- 4) Isu-isu strategis yang berkembang;
- 5) Kebijakan Nasional; dan
- 6) Regulasi yang berlaku.

Dalam implementasinya, dokumen RPD Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyelaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional. Sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan, adapun keterkaitan antara RPD dan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar I.2**

#### Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



#### ➤ Hubungan Antara RPD dan RPJMN

RPD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*,



prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

➤ Hubungan Antara RPD dan RPJMD Provinsi Riau

RPD Kabupaten Indragiri Hilir juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Riau sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi Tema, Sasaran serta Prioritas, arah kebijakan Pembangunan Provinsi Riau yang telah tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

➤ Hubungan Antara RPD dan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir

RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025 pada tahap keempat. RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan tahap akhir dalam rangka mencapai kondisi dokumen jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025. Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka Panjang dapat terlaksana dengan maksimal.

➤ Hubungan Antara RPD dengan Renstra OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Renstra OPD merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2024 hingga 2026. Implementasi dari RPD Kabupaten Indragiri Hilir dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah.



➤ Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, dan RKPD Tahun 2026. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

➤ Hubungan Antara RPD dan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir

Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir harus memperhatikan RTRWD Kabupaten Indragiri Hilir, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam RPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW. RTRWD sebagai pedoman dalam memperhatikan, menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah dengan berdasarkan potensi wilayahnya. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

#### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai jembatan bagi Kabupaten Indragiri Hilir yang masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di tahun 2023 untuk memberikan arahan bagi *stakeholders* dan Perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:



- a. Memberikan landasan dan pedoman Pj Bupati dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2024-2026
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu 2024 – 2026.
- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat; serta
- e. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Indragiri Hilir.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan.



#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

#### **BAB V TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

#### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

#### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta pagu anggaran setiap tahunnya

#### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

#### **BAB IX PENUTUP**

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026.



# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan gambaran tentang kondisi capaian pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada periode pembangunan sebelumnya. Gambaran umum tersebut merupakan acuan awal penyusunan rencana pembangunan daerah melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan pencapaian untuk pembangunan pada masa transisi sebelum pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun 2024 nanti.

### 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pembangunan daerah bertumpu pada kondisi kewilayahan daerah, aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2024-2026 dapat terpetakan dengan baik.

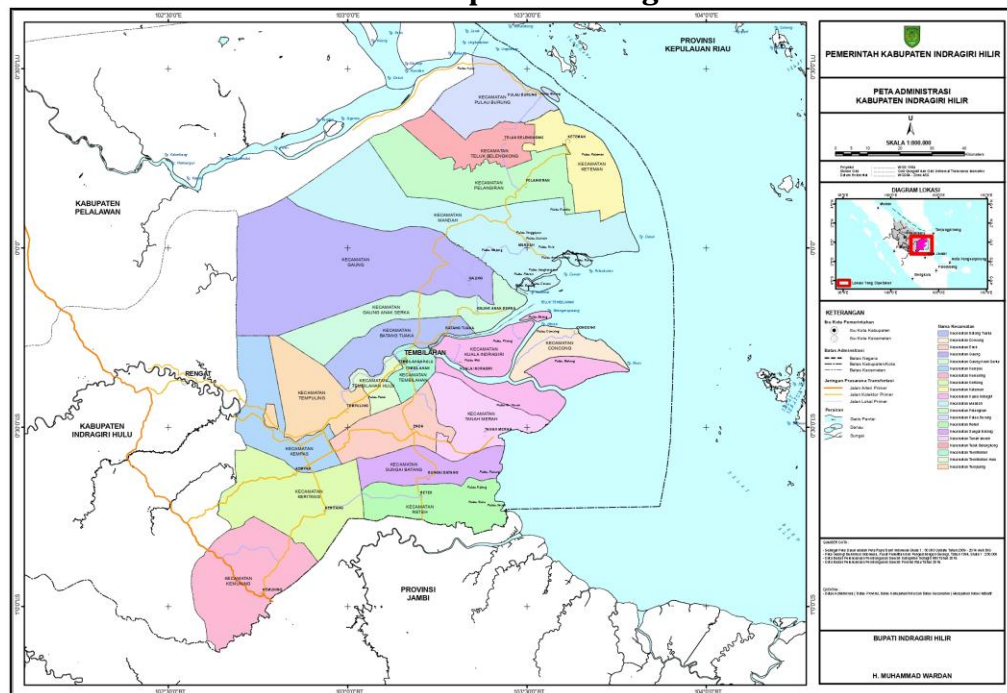
#### 2.1.1 Kondisi Geografi Wilayah

##### a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36' Lintang Utara – 1°07' Lintang Selatan dan 102°32' Bujur Timur – 104°10' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 13.525,10 KM<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau)

**Gambar II.1**  
**Peta Kabupaten Indragiri Hilir**



Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi oleh jalan Nasional Lintas Timur. Posisi Kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.



Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.1.

**Tabel II.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2022**

| No | Kecamatan        | Luas             |               | Jumlah     |           |
|----|------------------|------------------|---------------|------------|-----------|
|    |                  | Km <sup>2</sup>  | %             | Desa       | Kelurahan |
| 1  | Keritang         | 918,96           | 6,79          | 16         | 1         |
| 2  | Kemuning         | 907,17           | 6,71          | 11         | 1         |
| 3  | Reteh            | 529,29           | 3,91          | 11         | 3         |
| 4  | Sungai Batang    | 413,35           | 3,06          | 7          | 1         |
| 5  | Enok             | 457,76           | 3,38          | 10         | 4         |
| 6  | Tanah Merah      | 502,07           | 3,71          | 9          | 1         |
| 7  | Kuala Indragiri  | 814,34           | 6,02          | 7          | 1         |
| 8  | Concong          | 280,38           | 2,07          | 5          | 1         |
| 9  | Tembilahan       | 169,57           | 1,25          | -          | 8         |
| 10 | Tembilahan Hulu  | 148,71           | 1,10          | 4          | 2         |
| 11 | Tempuling        | 586,62           | 4,34          | 5          | 4         |
| 12 | Kempas           | 576,60           | 4,26          | 10         | 2         |
| 13 | Batang Tuaka     | 406,22           | 3,00          | 12         | 1         |
| 14 | Gaung Anak Serka | 671,48           | 4,96          | 9          | 3         |
| 15 | Gaung            | 2.093,52         | 15,48         | 15         | 1         |
| 16 | Mandah           | 1.747,39         | 12,92         | 16         | 1         |
| 17 | Kateman          | 491,90           | 3,64          | 8          | 3         |
| 18 | Pelangiran       | 865,16           | 6,40          | 15         | 1         |
| 19 | Teluk Belengkong | 412,92           | 3,05          | 13         | -         |
| 20 | Pulau Burung     | 531,68           | 3,93          | 14         | -         |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>13.525,10</b> | <b>100,00</b> | <b>197</b> | <b>39</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023)

#### **b. Kondisi Topografi**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), dan daerah hutan payau (*mangrove*). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun- kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula



selat- selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 – 3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh kemiringan 0 – 2 % seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0 – 8 %.

### **c. Kondisi Geologi**

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan tektonik bumi yang menyebar luas dan berbentuk morfologi pendataran. Morfologi pendataran ini biasanya memiliki bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari hulu ke hilir. Sedimen-sedimen tersebut akhirnya terperangkap bersama media air pada cekungan- cekungan. Tanah pada cekungan tersebut ditumbuhi oleh *mangrove* (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada ekosistem rawa dan hutan dataran rendah. Dalam jangka waktu skala geologi, cekungan- cekungan dan sumber daya hayati di atasnya mengalami



penurunan untuk mencari keseimbangan akibat adanya gaya-gaya tektonik dan pembenanan. Cekungan-cekungan ini tertutup kembali oleh sedimen yang terus memasoknya dimana kejadian ini berulang terus hingga sekarang.

Sumber daya hayati yang terperangkap dan tertutup sedimen pada masa muda akhirnya membentuk suatu endapan rawa pada tanah gambut. Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batu bara muda. Jadi gambut dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batubara. Endapan batubara yang mengalami pembebanan hingga jangka waktu skala geologi sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau *leaching*. Hasil pencucian ini akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran *alluvium* Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran *alluvium* tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran *alluvium* Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut dan akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang pantai wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus. Batuan yang tersingkap di permukaan kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jenis *alluvium*, endapan pantai (Qac) dan endapan rawa (Qs) yang keduanya mempunyai umur Kuartar. Tanah dan batuan yang tampak dipermukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada lumpur dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam, dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan *alluvium* dan endapan pantai (Qac) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal mencapai 5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur berwarna abu-abu (terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik, memiliki rekah kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10% dan nilai *unconfined strength* kurang dari 0.5 kg/cm<sup>2</sup>).



Dalam keadaan kering sifat lumpur sulit dibedakan dengan lempung. Lumpur abu-abu memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh dan stabil. Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter. Karena batuan dasar, diperkirakan satu-satunya batuan keras di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat ditafsirkan sebagai lapisan keras yang mampu menahan bangunan berat dan berada pada kedalaman lebih dari 60 meter. Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan endapan rawa (Qs) yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut. Tanah di kawasan ini terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu - abu dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

- **Lempung abu-abu**, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis, mengotori tangan/*sticky*, dan kadang - kadang mengandung bahan organik kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki nilai *unconfined strength* kurang dari 2 kg/cm<sup>2</sup>. Selain itu, dalam keadaan kering dapat mencapai 4 kg/cm<sup>2</sup> dan menjadi bersifat rapuh/*brittle* (Rajiyowiryo, 1986).
- **Pasir**, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur. Komposisi utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifat lepas.
- **Batuan dasar**, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40 meter.
- **Gambut**, bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90%) merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.



Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat delapan kecamatan yang berlokasi di wilayah pesisir atau wilayah kecamatan berada di wilayah pesisir, yang meliputi 50 Desa. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kateman, Pulau Burung, Mandah, Gaung Anak Serka, Kuala Indragiri, Tanah Merah, Sungai Batang dan Reteh. Kecamatan-kecamatan tersebut sebagian masih belum bisa disentuh melalui jalan darat seperti Pulau Burung, Kateman, Kuala Indragiri, sementara lima kecamatan lainnya sudah dapat dihubungi melalui jalan darat (roda 4 atau roda 2). Kompleknya permasalahan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan pembangunan pesisir daerah ini agak lambat. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah pesisir adalah keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan/jerambah, dermaga, air bersih, PLN dan telekomunikasi. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah perambahan/penebangan hutan *mangrove*, *illegal fishing* dan minimnya sarana prasarana penangkapan dan pengolahan hasil perikanan.

#### **d. Kondisi Hidrologi**

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir disamping terkenal dengan julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Parit. Sumber daya air di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined groundwater*. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumber daya



air terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah Utara, yaitu DAS Reteh Gangsal, DAS Indragiri Tuaka, DAS Gaung Anak Serka, DAS Batangtumu, dan DAS Guntung Kateman.

#### **e. Jenis Tanah**

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (80%) memiliki struktur tanah berupa tanah *Organosol (Histosol)*, yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Lapisan tanah gambut mencapai ketebalan lebih dari 100 cm. Tanah ini dominan di daratan rendah diantara aliran sungai. Jenis tanah ini berasal dari akumulasi humus atas permukaan hutan yang melapuk pada permukaan tanah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis tanah ini hampir menyebar di semua kecamatan.

Di sepanjang aliran sungai pada umumnya terdapat formasi tanggul alam *Natural River Leves* yang terdiri dari tanah-tanah *Aluvial (Entisol)* dan *Gley Humus (Inceptisol)*. Selain itu, juga terdapat jenis tanah Podsolik merah-kuning dan bahan induk batuan endapan dengan fisiografi dataran. Jenis ini hanya terdapat di bagian barat ke arah selatan (Kecamatan Keritang). Di samping itu, sebagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah muara sungai. Lapisan atas batuan permukaannya terdiri dari endapan *alluvial* lunak yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh sungai, sehingga sebagian besar lapisan permukaan tanah yang dilewati oleh aliran sungai adalah deposit sabuk *meander*. Secara teknis lapisan permukaan *alluvial* lunak (lapisan sabuk *meander*, organik dan gambut) mempunyai sifat kompresitasnya yang tinggi, sehingga menyebabkan mudahnya penurunan lapisan tanah.

Penurunan lapisan tanah diakibatkan oleh adanya aliran air pori menuju ke butir tanah karena pembebanan struktur yang bersifat konstan baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian akan diperlukan biaya yang lebih besar terutama dari material dan teknik pembangunan untuk mendapatkan struktur bangunan yang baik di atas tanah tersebut. Berdasarkan Peta Zonasi Kerentanan Tanah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber daya



Mineral, Zona Kerentanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (ZKGTSR) dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (ZKGTR). ZKGTSR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. ZKGTR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Daerah Indragiri Hilir bagian Selatan disekitar Kecamatan Keritang terdapat tanah *Podsolik* merah kuning (*Ultisol*). Potensi tanah *Orgasol* ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organik. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan gambut lebih dari 1 (satu) meter pada umumnya tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah-tanah *glei*humus dan *organosol* termasuk sedang sampai tinggi, sehingga tanah-tanah di daerah ini cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian dalam arti luas.

Nilai ekonomis tanah gambut untuk lahan pertanian ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut. Semakin tebal lapisan gambut, maka semakin kurang baik tanah itu untuk pertanian. PH tanah gambut sangat rendah, yaitu antara 3,5 – 6, sehingga bersifat asam. Di daerah Reteh, lapisan mineral di bawah gambut berwarna kelabu. Ditempat-tempat dengan tebal bahan organik 100 - 200 cm, pada umumnya telah ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, karet, kopi, buah-buahan dan tanaman-tanaman tahunan lainnya.

Tanah gambut yang tebal diidentifikasi memiliki bahan organiknya lebih dari 200 cm. Sampai dengan saat ini praktis belum terolah dan walaupun ada masih sangat terbatas luasnya. Karena masalah yang dihadapi dari tanah gambut, maka diperlukan adanya usaha reklamasi tanah dengan pembuatan drainase, akan tetapi berakibat bahwa akan terjadi aksinasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pembuatan parit harus



memperhatikan agar pengaturan kedalaman air tanah sampai pada batas yang dikehendaki sehingga tidak mempercepat terjadinya pengerutan tanah. Sebagaimana halnya dengan *glei*humus tanah *organosol* yang peka terhadap peristiwa penurunan atau pengerutan tanah, sehingga juga perlu usaha reklamasi.

**f. Daya Dukung Lahan**

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral yaitu tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan seperti tanah *latosol* (merah) dan tanah *andosol* (hitam). Sedangkan tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk tanah organik seperti tanah gambut. Keadaan fisiografi, bentuk wilayah dan sifat-sifat tanah menggambarkan karakteristik yang membedakan satuan lahan. Kualitas lahan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas jenis tanahnya yang juga sangat tergantung pada kondisi geologis, iklim maupun topografinya. Secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 5 (lima) kelompok satuan lahan fisiografi, yaitu: kelompok *marin*, kubah gambut, *alluvial*, dataran dan perbukitan.

1. Kelompok Marin, terletak disepanjang pantai dengan ini merupakan hasil proses sedimentasi dan secara jelas terlihat dengan adanya pelebaran pantai yang terjadi karena penambahan bahan endapan dan proses pengangkatan. Satuan lahan pada kelompok ini dapat dibedakan antara lain beting pasir, dataran pasang surut, rawa belakang pantai, dan endapan *delta*. Kelompok ini luasnya mencapai 17.09% dari luas lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan umumnya adalah berupa dataran pasang-surut dengan kemiringan lahan yang umumnya kurang dari 3%.
2. Kelompok Kubah Gambut, terbentuk dari endapan organik yang berasal dari endapan permukaan muda dan tua. Secara umum ketebalan gambut akan meningkat semakin jauh dari sungai. Dengan pengendalian tata air yang baik, daerah ini sebenarnya memiliki potensi untuk perkebunan. Namun miskinnya kandungan hara dapat menjadi penghambat utama. Tanah *organosol* atau tanah gambut ini merupakan jenis tanah yang paling dominan terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir,



mencapai 75.32% dari luas wilayahnya dan umumnya mempunyai ketebalan lebih dari 2 meter.

3. Kelompok *Alluvial*, terbentuk dari endapan *alluvial* sungai dan terletak di sepanjang jalur- jalur aliran sungai. Pada umumnya daerah ini cukup potensial untuk lahan persawahan, tentunya dengan memperhatikan jalur hijau yang harus dipertahankan. Kelompok ini merupakan satuan fisiografi yang terkecil di Indragiri Hilir, yaitu hanya sekitar 0.57% dari luas wilayah.

**Tabel II.2**  
**Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir**

| No    | Satuan Lahan | Luas (Ha) | Proporsi (%) | Keterangan                                                       |
|-------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | Marin        | 233.714   | 17,09        | Umumnya kelerengan < 3% dan sebagian kecil < 8%                  |
| 2     | Kubah Gambut | 1.030.039 | 75,32        | Didominasi oleh oligotrofik air tawar dengan kedalaman > 2 meter |
| 3     | Alluvial     | 7.795     | 0,57         | Umumnya Kelerengan < 3%                                          |
| 4     | Dataran      | 58.121    | 4,25         | Umumnya Kelerengan < 3% dan terdapat di bagian selatan           |
| 5     | Perbukitan   | 37.881    | 2,77         | Umumnya kelerengan 16-25% dan terdapat dibagian selatan          |
| Total |              | 1.367.551 | 100          |                                                                  |

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir

4. Kelompok Dataran, berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya <3%. Luasnya mencapai 4.25% dari luas wilayah.
5. Kelompok Perbukitan, seperti halnya kelompok dataran, kelompok perbukitan berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya 16-25%, terutama yang berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan provinsi Jambi (TNBT). Luasnya mencapai 2.77% dari luas total wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.



### g. Klimatologi

Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim. Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan curah hujan dan hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, *run off* dan infiltrasi. Sifat hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan antara 85 -115% terhadap rata-ratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Curah hujan normal sekitar 150 mm/bulan dengan kisaran antara 2.000 – 3.000 mm/tahun.

Selama periode 2015 - 2019, rata-rata hari hujan di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 93 - 149 hari hujan per tahunnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata hari hujan Kabupaten Indragiri Hulu yang berkisar antara 171 – 210 hari hujan per tahun. Rata-rata hari hujan menurun tajam pada tahun 2015 yang hanya sebanyak 93 hari hujan dengan curah hujan yang rendah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut kabut asap.

**Tabel II.3**  
**Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022**

| No.    | Bulan     | 2019            |                  | 2020            |                  | 2021            |                  | 2022            |                  |
|--------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|        |           | Hari Hujan (HH) | Curah Hujan (CH) | Hari Hujan (HH) | Curah Hujan (CH) | Hari Hujan (HH) | Curah Hujan (CH) | Hari Hujan (HH) | Curah Hujan (CH) |
| 1      | Januari   | 11              | 171.8            | 9               | 124.5            | 12              | 209.5            | 10              | 282              |
| 2      | Februari  | 9               | 138.2            | 7               | 98               | 4               | 22.1             | 16              | 323.1            |
| 3      | Maret     | 10              | 170              | 9               | 134              | 11              | 177.6            | 15              | 258.6            |
| 4      | April     | 12              | 188.7            | 12              | 198.9            | 13              | 291.3            | 13              | 239.4            |
| 5      | Mei       | 9               | 142.5            | 12              | 234.1            | 10              | 164.3            | 11              | 154.2            |
| 6      | Juni      | 8               | 88               | 9               | 154.2            | 9               | 114.8            | 11              | 169              |
| 7      | Juli      | 5               | 62.1             | 8               | 129.5            | 6               | 101.2            | 9               | 158.2            |
| 8      | Agustus   | 6               | 84.5             | 9               | 147.8            | 12              | 218.5            | 13              | 150.4            |
| 9      | September | 5               | 79.9             | 13              | 229.6            | 12              | 211              | 11              | 160              |
| 10     | Oktober   | 8               | 110.9            | 11              | 236.5            | 11              | 223.1            | 18              | 344.5            |
| 11     | November  | 11              | 169.7            | 13              | 263.2            | 12              | 236.2            | 13              | 218.9            |
| 12     | Desember  | 12              | 162.9            | 11              | 210.2            | 14              | 214.7            | 13              | 214.9            |
| Jumlah |           | 106             | 1569.2           | 123             | 2160.5           | 126             | 2184.3           | 153             | 2673.2           |

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2023

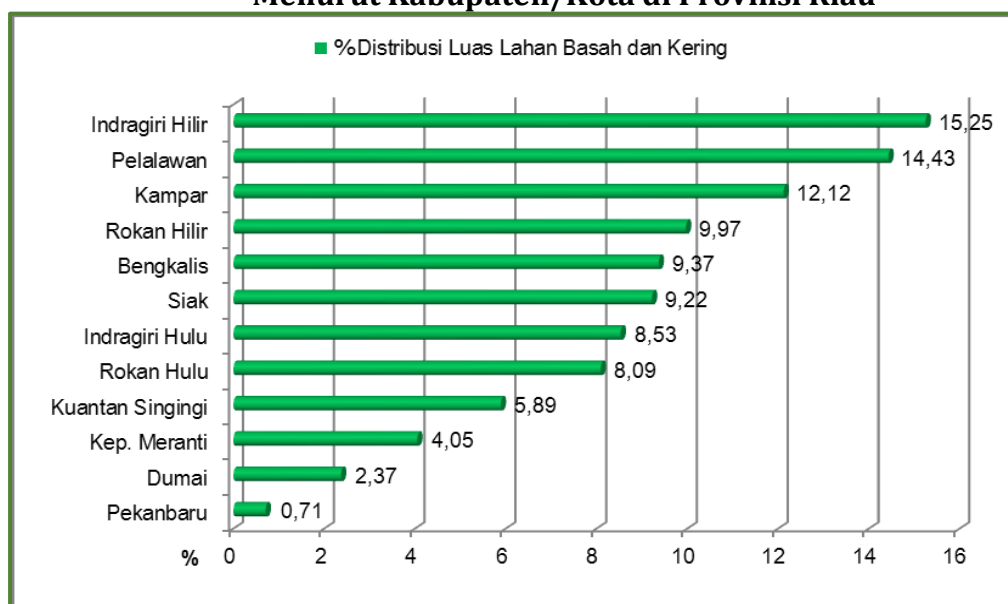


Selama periode 2019 – 2022, rata-rata hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi atau musim penghujan, umumnya mulai terjadi pada bulan Agustus hingga bulan Desember. Sejalan dengan hari hujan, curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir juga dibawah normal dengan kisaran sebesar 1.307 mm/tahun – 2.021 mm/tahun dengan rata-rata sebesar 1.744 mm/tahun, lebih rendah dibanding curah hujan di Kabupaten Indragiri Hulu yang rata-ratanya sebesar 2.292 mm/tahun.

#### **h. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi pengembangan pertanian khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki total luas lahan kering dan lahan basah Kabupaten Indragiri terluas di Riau yaitu seluas 1.355.095,84 hektar atau 15,25% dari total luas lahan kering dan lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lahan basah seluas 1.321.623,13 hektar atau 15,18% dari total lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki total luas lahan kering seluas 33,457,33 hektar atau 18,63% dari total lahan kering Provinsi Riau.

**Gambar II.2**  
**Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau**



Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2017)



Potensi lahan basah dan lahan kering yang sebagian telah dikembangkan menjadi perkebunan kelapa, kelapa sawit dan tanaman pangan. Produksi hasil perkebunan kelapa dan kelapa sawit ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh daerah.

#### **2.1.2. Wilayah Rawan Bencana**

Potensi bencana alam yang umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan. Bencana banjir di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi karena perubahan musim khususnya musim hujan yang disertai dengan gelombang pasang surut yang juga cukup besar. Bencana tanah longsor umumnya terjadi dikawasan tepi sungai yang merupakan kawasan sempadan sungai yang penggunaan untuk budidaya atau perumahan. Potensi bencana longsor di Kabupaten Indragiri Hilir berada di kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari rawa serta sebagian gambut dan berada di pinggiran sungai, termasuk daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti, tanah longsor/ abrasi, kebakaran hutan dan lahan, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Banjir. Daerah rawan Longsor berada pada sepanjang bantaran sungai Indragiri antara lain Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Kecamatan Kateman. Daerah rawan kebakaran Lahan adan Hutan berada pada daerah Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Keritang, Kemuning, Kempas, Tempuling, Gaung, Enok, Kateman, Gaung Anak Serka, Pelangiran, Concong, Reteh, dan Tanah Merah.

Bencana non alam yang rawan terjadi adalah epidemis dan wabah penyakit berupa *Covid-19* Selain itu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dengan heterogenitas suku, agama dan sosial budaya juga sangat rentan terhadap bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas. Pada pelaksanaan Penanggulangan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Indragiri Hilir Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam SK Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 341/III/HK-2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-*



19) Kabupaten Indragiri Hilir kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menjadi Sekretaris Umum Penanggulangan Pandemi *Covid-19* yang bertugas menyusun regulasi – regulasi pendukung dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran *Covid-19* seperti, SK Bupati, Instruksi Bupati, Keputusan Ketua Gugus Tugas, Surat Edaran dan lain-lain.

**Tabel II.4**  
**Bencana Alam Menurut Jenis Bencana**  
**di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022**

| Tahun  | Jenis Bencana   |                |        |                  |          |
|--------|-----------------|----------------|--------|------------------|----------|
|        | Longsor /Abrasi | Puting Beliung | Banjir | Gelombang Pasang | Karlahut |
| 2018   | 10              | 4              | -      | -                | 32       |
| 2019   | 4               | 2              | 3      | -                | 67       |
| 2020   | 10              | 6              | 3      | 1                | 51       |
| 2021   | 8               | 12             | 20     | 3                | 49       |
| 2022   | 15              | 9              | 18     | 1                | 23       |
| Jumlah | 58              | 33             | 44     | 6                | 226      |

Sumber : BPBD Indragiri Hilir

Dari tabel rekap kejadian bencana yang sering terjadi Kabupaten Indragiri Hilir terdapat kawasan – kawasan yang memiliki tingkat kerentanan terjadi nya bencana, seperti bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan, namun selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dapat memetakan kawasan tersebut di setiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dan hanya 4 kecamatan terdapat Peta daerah rawan bencana dari 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Kateman, Kecamatan Tempuling, dan Kecamatan Tanah Merah.

Berdasarkan data dari Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten yang masuk dalam kelas resiko bencana tinggi yakni pada tahun 2021 nilai IRB 168.40 poin. Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel II.5**  
**Nilai indeks risiko Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2021**

| Indragiri Hilir | Tahun  |        |        |        |        | Kelas Resiko |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|                 | 2018   | 2019   | 2019   | 2020   | 2021   |              |
|                 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | Tinggi       |

Sumber : Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Kebakaran Hutan, Longsor/Abarsi dan Banjir masih mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tahun 2021. Kultur masyarakat yang mendirikan bangunan ditepian sungai serta Keberadaan hutan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Indragiri Hilir, begitupun tumbuhan dan satwa liar yang menggantungkan hidupnya di kawasan hutan. Karena itu pengelolaan hutan sebaiknya memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan agar kesejahteraan manusia ikut terjamin.

### 2.1.3. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 654.909 jiwa yang terdiri atas 339.599 jiwa penduduk laki-laki dan 315.310 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,7. Kondisi ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 658.025 jiwa yang terdiri atas 315.310 jiwa penduduk laki-laki dan 317.111 jiwa penduduk perempuan atau naik 0,36 persen dari tahun 2020.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 mencapai 48,65 jiwa/Km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tembilahan sebesar 463,55 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Kecamatan Kuala Indragiri sebesar 18,05 jiwa/ Km<sup>2</sup>.

Kondisi lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir karena Kabupaten Indragiri Hilir “belum” menjadi ‘sasaran’ migrasi penduduk luar Provinsi Riau. Pada masa yang akan datang, dengan semakin berkembangnya perekonomian dan khususnya industri kelapa sawit dan kelapa, akan menarik migrasi penduduk ke Indragiri Hilir.

**Tabel II.6**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Orang) |        |        |        |
|----|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|
|    |           | 2019                    | 2020   | 2021   | 2022   |
| 1  | Keritang  | 61.203                  | 63.103 | 63.567 | 63.994 |
| 2  | Kemuning  | 35.893                  | 38.499 | 38.782 | 39.043 |
| 3  | Reteh     | 34.97                   | 35.974 | 36.006 | 36.015 |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Kecamatan                   | Jumlah Penduduk (Orang) |                |                |                |
|----|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                             | 2019                    | 2020           | 2021           | 2022           |
| 4  | Sungai Batang               | 10.098                  | 10.066         | 10.08          | 10.087         |
| 5  | Enok                        | 33.999                  | 33.846         | 33.959         | 34.051         |
| 6  | Tanah Merah                 | 24.916                  | 25.236         | 25.268         | 25.283         |
| 7  | Kuala Indragiri             | 14.345                  | 14.679         | 14.697         | 14.706         |
| 8  | Concong                     | 11.66                   | 11.764         | 11.78          | 11.788         |
| 9  | Tembilahan                  | 75.864                  | 77.862         | 78.605         | 79.309         |
| 10 | Tembilahan Hulu             | 45.781                  | 46.662         | 47.108         | 47.528         |
| 11 | Tempuling                   | 31.848                  | 31.633         | 31.866         | 32.080         |
| 12 | Kempas                      | 37.574                  | 38.671         | 38.955         | 39.217         |
| 13 | Batang Tuaka                | 26.727                  | 27.19          | 27.289         | 27.372         |
| 14 | Gaung Anak Serka            | 22.476                  | 22.591         | 22.744         | 22.883         |
| 15 | Gaung                       | 36.93                   | 38.367         | 38.407         | 38.422         |
| 16 | Mandah                      | 33.416                  | 34.531         | 34.578         | 34.603         |
| 17 | Kateman                     | 37.007                  | 39.284         | 39.32          | 39.331         |
| 18 | Pelangiran                  | 28.718                  | 35.318         | 35.354         | 35.367         |
| 19 | Teluk Belengkong            | 8.579                   | 9.229          | 9.237          | 9.239          |
| 20 | Pulau Burung                | 17.837                  | 20.404         | 20.423         | 20.429         |
|    | <b>Kab. Indragiri Hilir</b> | <b>740.598</b>          | <b>654.909</b> | <b>658.025</b> | <b>660.747</b> |

Sumber: <https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id> Kab. Indragiri Hilir dalam angka 2023

Selama periode 2019 – 2022, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurun yaitu dari 740.598 orang menjadi 666.747 orang dengan rata-rata Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 persen per tahun. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau pada periode yang sama yang masing-masingnya 2,23 persen per tahun, 2,77 persen per tahun dan 1,68 persen per tahun. Namun, pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 660.747 orang atau menurun 10,78 persen dari tahun 2019.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat kepadatannya pada tahun 2021 - 2022 berkisar antara 48.65 - 48,85 jiwa/Km<sup>2</sup> dan masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, penduduk terpadat menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat di kecamatan Tembilahan yang merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 467,70 jiwa/Km<sup>2</sup>



diikuti oleh Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 319,61 jiwa/Km<sup>2</sup>, Kecamatan Kateman dengan 79.96 jiwa/Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Keritang 69,64 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kuala Indragiri dan Kecamatan Gaung dengan 18 jiwa/Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan ini berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur data tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 69,40% terkategori umur produktif dan 30,60% terkategori tidak produktif. Hal yang mendapat perhatian adalah bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai mendapat '*baby boom*' yang ditunjukkan dari porsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) yang saat ini sedang sekolah yaitu sebesar 25,90%. Oleh karena itu, penguatan program keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pembukaan kesempatan bekerja dan berusaha harus lebih mendapat perhatian lebih dalam pembangunan ke depan.

**Tabel II.7**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Indragiri Hilir Tahun 2022**

| No.             | Kelompok Umur | Penduduk    |           |         |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|---------|
|                 |               | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah  |
| 1               | 0 - 4         | 27.979      | 26.539    | 54.518  |
| 2               | 5 - 9         | 28.809      | 27.606    | 56.415  |
| 3               | 10 - 14       | 29.708      | 28.440    | 58.148  |
| 4               | 15 - 19       | 28.655      | 27.014    | 55.669  |
| 5               | 20 - 24       | 30.017      | 28.078    | 58.095  |
| 6               | 25 - 29       | 28.599      | 26.334    | 54.933  |
| 7               | 30 - 34       | 27.946      | 25.898    | 53.844  |
| 8               | 35 - 39       | 26.287      | 25.047    | 51.334  |
| 9               | 40 - 44       | 25.499      | 24.361    | 49.860  |
| 10              | 45 - 49       | 23.214      | 21.726    | 44.940  |
| 11              | 50 - 54       | 19.337      | 18.082    | 37.419  |
| 12              | 55 - 59       | 15.328      | 13.964    | 29.292  |
| 13              | 60 - 64       | 12.187      | 10.935    | 23.122  |
| 14              | 65 - 69       | 9.325       | 7.641     | 16.966  |
| 15              | 70 - 74       | 5.722       | 4.457     | 10.179  |
| 16              | 75+           | 3.410       | 2.603     | 6.013   |
| Indragiri Hilir |               | 342.022     | 318.725   | 660.747 |

Sumber: Kab. Indragiri Hilir dalam angka 2023.



## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

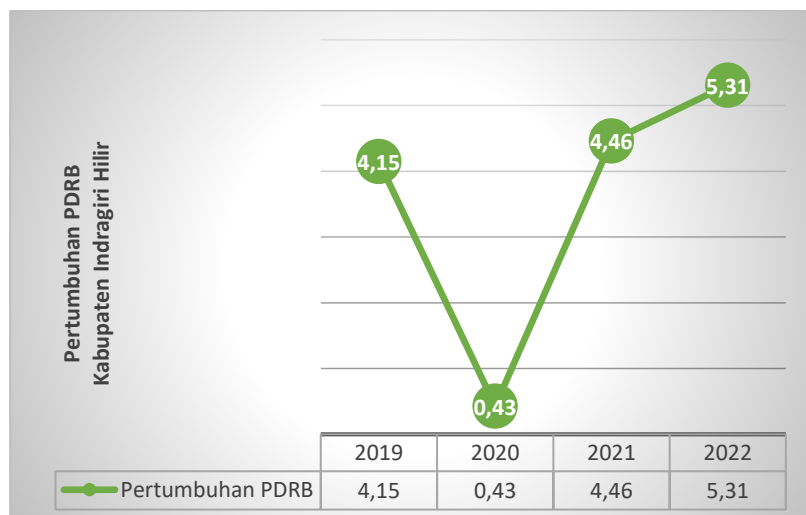
### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi difokuskan pada analisis terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat inflasi dan indikator-indikator kemiskinan.

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2019-2022, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga konstan dengan trend meningkat. Peningkatan pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yang erat kaitannya dengan kelembaban ekonomi dunia, diperparah oleh wabah *covid-19* pada tahun 2020 sehingga aktifitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat dan menurun pada tahun tersebut dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 ini.

**Gambar II.3**  
**Perkembangan Pertumbuhan PDRB Harga Konstan**  
**(Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2022**



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (*Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022*)

Pada tahun 2019 dan 2020, pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir lebih baik dibanding Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau. Pada tahun



2020, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari pandemi *COVID-19*. Hanya Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan yang mengalami pertumbuhan positif yaitu 0,34 persen dan 2,24 persen. Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi minus 0,12 persen dan minus 1,13 persen. Kabupaten Indragiri Hilir masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi 46,78 persen terhadap PDRB. Sedangkan Kabupaten Pelalawan ditopang oleh kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masing – masing sebesar 48,65 persen dan 40,62 persen. Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Indragiri Hilir kembali meningkat menjadi 5,31 persen, nilai ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau (4,55), Kabupaten Pelalawan ( 4,39) , serta Indragiri Hulu (4,63) persen.

**Gambar II.4**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022**



*Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir dan Riau Dalam Angka 2022*

Selama periode 2019 – 2022, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi. Lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi terbesar pada dengan tren kontribusinya semakin menurun yaitu dari 48,03% pada tahun 2017 menjadi 44,68% pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami peningkatan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

sebesar 47,54% pada 2021. Meski kontribusi lapangan usaha pertanian cenderung menurun pada tahun 2019 namun kontribusi pertanian yang besar telah menyakinkan semua pihak bahwa Pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga kembali meningkat di tahun 2021.

Penurunan kontribusi lapangan usaha pertanian yang seharusnya diimbangi dengan meningkatnya tren kontribusi industri pengolahan. Namun kenyataannya kontribusi industri pengolahan berfluktuatif menurun yaitu dari 23,65% pada tahun 2017 menurun menjadi 23,63% pada tahun 2019. Kondisi ini menggambarkan telah mulai terjadi kemunduran dalam transformasi ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir dari pertanian ke industri. Namun Pada tahun 2021 Industri pengolahan kembali meningkat menjadi 24,65%.

**Tabel II.8**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2022**

| Kategori Lapangan Usaha        |                                                                | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| a                              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 44.68  | 46.77  | 47.50  | 46.10  |
| b                              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0.96   | 0.83   | 1.12   | 2.41   |
| c                              | Industri Pengolahan                                            | 23.63  | 24.06  | 24.63  | 25.06  |
| d                              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0.06   | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
| e                              | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   |
| f                              | Konstruksi                                                     | 6.28   | 5.88   | 5.77   | 5.74   |
| g                              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 17.55  | 16.11  | 14.98  | 14.89  |
| h                              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1.15   | 0.93   | 0.90   | 0.94   |
| i                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 0.47   | 0.38   | 0.39   | 0.39   |
| j                              | Informasi dan Komunikasi                                       | 0.64   | 0.65   | 0.62   | 0.58   |
| k                              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 0.59   | 0.58   | 0.56   | 0.56   |
| l                              | Real Estate                                                    | 0.88   | 0.86   | 0.79   | 0.76   |
| m,n                            | Jasa Perusahaan                                                | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| o                              | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib | 1.76   | 1.66   | 1.53   | 1.41   |
| p                              | Jasa Pendidikan                                                | 0.63   | 0.62   | 0.57   | 0.53   |
| q                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0.16   | 0.18   | 0.18   | 0.16   |
| r,s,t,u                        | Jasa Lainnya                                                   | 0.54   | 0.42   | 0.39   | 0.40   |
| Produk Domestik Regional Bruto |                                                                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Selama periode 2017 – 2021, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan konstruksi yang merupakan lapangan usaha terbesar ketiga dan keempat pembentuk Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir. Relatif terbatasnya sumber -sumber lapangan usaha yang hanya mengandalkan pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi maka dipandang perlu upaya - upaya menggerakkan lapangan usaha potensial yang belum tersentuh dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel II.9**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022**

| Kategori |                                                                | Tahun |        |       |       |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|          |                                                                | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
| a        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 4.00  | 3.50   | 4.01  | 4.34  |
| b        | Pertambangan dan Penggalan                                     | 0.45  | -0.21  | 6.70  | 28.25 |
| c        | Industri Pengolahan                                            | 4.27  | 1.89   | 4.61  | 4.68  |
| d        | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0.28  | 6.98   | 7.25  | 9.38  |
| e        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 1.62  | 0.40   | 4.85  | 2.87  |
| f        | Konstruksi                                                     | 4.87  | -3.22  | 6.34  | 5.48  |
| g        | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 4.87  | -8.30  | 4.57  | 7.72  |
| h        | Transportasi dan Pergudangan                                   | 2.23  | -18.42 | 5.83  | 9.80  |
| i        | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2.54  | -17.99 | 14.23 | 12.09 |
| j        | Informasi dan Komunikasi                                       | 6.81  | 8.18   | 7.40  | 4.54  |
| k        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 0.17  | 1.63   | 4.68  | 3.97  |
| l        | Real Estat                                                     | 6.03  | 0.95   | 3.01  | 4.38  |
| m,n      | Jasa Perusahaan                                                | 2.67  | -20.83 | 1.43  | 15.16 |
| o        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.18  | -3.29  | 3.01  | 3.89  |
| p        | Jasa Pendidikan                                                | 4.64  | 1.56   | 3.23  | 3.22  |
| q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 9.96  | 12.36  | 11.38 | 1.21  |
| r,s,t,u  | Jasa lainnya                                                   | 6.06  | -20.66 | 4.20  | 15.47 |
|          | Produk Domestik Regional Bruto                                 | 4.15  | 0.43   | 4.46  | 5.31  |

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023)

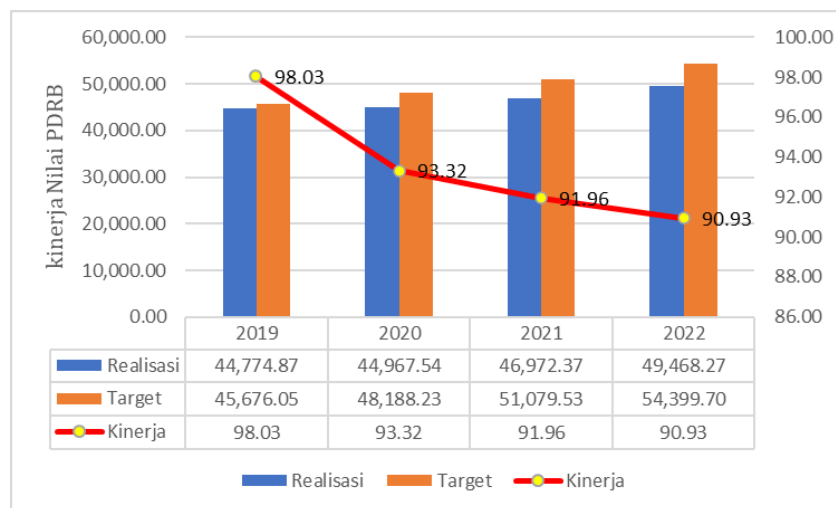
Lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian untuk didorong agar dapat memberikan kontribusi yang besar pada Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat dari pertumbuhannya yang tinggi dari rata- rata pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 melanda, lapangan usaha jasa perusahaan dan jasa lainnya



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

mengalami kontraksi cukup dalam yaitu 20,83 persen dan 20,66 persen. Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 12,36 persen. Lapangan usaha informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan cukup tinggi seiring dengan pembatasan interaksi yang diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran *COVID-19* sehingga masyarakat bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah juga dilakukan secara daring. Lapangan usaha ini adalah sektor perlu mendapat perhatian, namun demikian, sektor pertanian dan industri pengolahan tetap menjadi prioritas utama.

**Gambar II.5**  
**Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 - 2022**

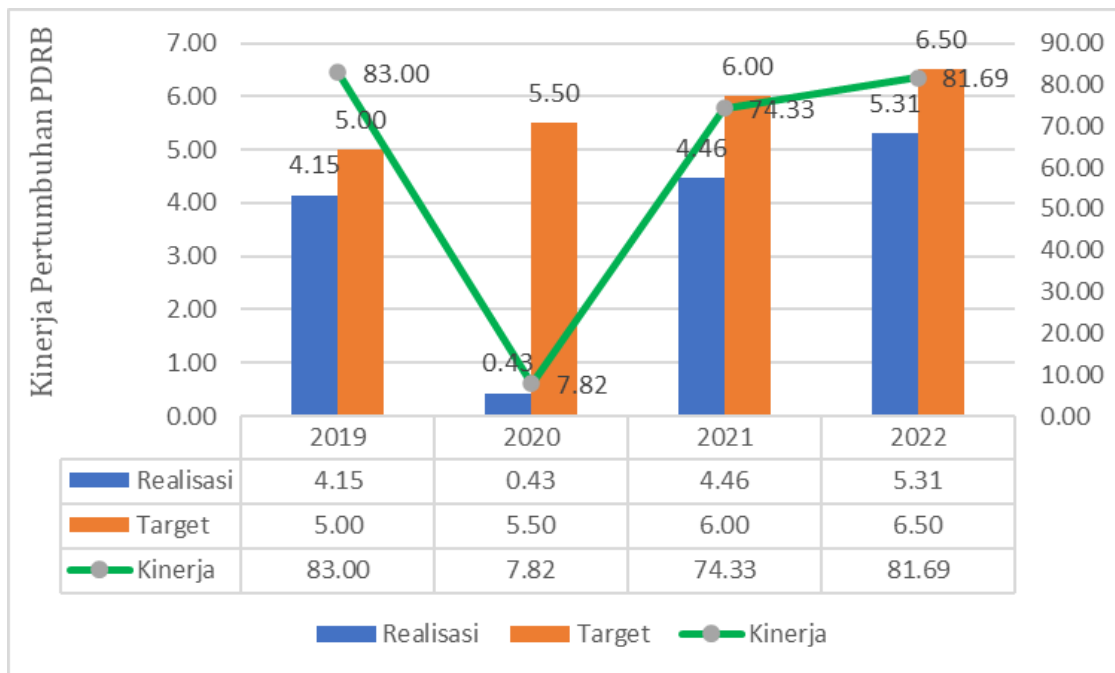


Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023)

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2022 telah ditargetkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 sebesar Rp 45.676,05 (juta), meningkat menjadi Rp 54.399,70 (juta) sampai dengan tahun 2022. Realisasi nilai PDRB tahun 2019 sebesar Rp 44.774,87 dengan kinerja sebesar 98,03 persen, sementara pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen maka nilai PDRB 2022 Rp 49.468,27 (juta) dengan kinerja sebesar 90,93%. Meskipun target RPJMD tidak tercapai atau melebihi, namun rata-rata capaian kinerja terkategori sangat baik yaitu sebesar 93,56 Persen.



**Gambar II.6**  
**Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021**



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023)

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan ditarget berkisar antara 5,00 persen hingga 7,00 persen. Pada tahun 2019, realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami penurunan dari 4,15 persen menjadi 0,34 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mulai pulih kembali. Di tahun 2021 sebesar 4,46 persen, sehingga realisasi kinerja nya juga meningkat sebesar 74,33 bahkan tahun 2022 meningkat tajam menjadi 5,32 Persen dengan kinerja terkategori tinggi yakni 81,69 persen. Penyebab rendahnya realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat dari pandemi COVID-19 menjadi 0,34 persen dengan realisasi kinerja hanya 7,82 persen.

#### 2.2.1.2. Inflasi

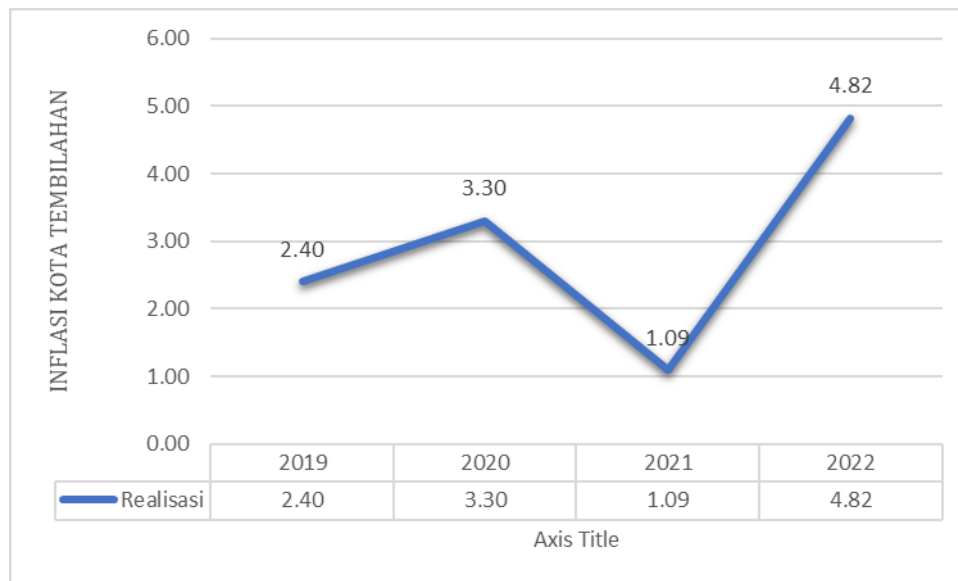
Selama periode 2019 – 2021, inflasi di Tembilahan – Indragiri Hilir berada terkategori inflasi ringan. Namun Pada tahun 2022, Kota



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

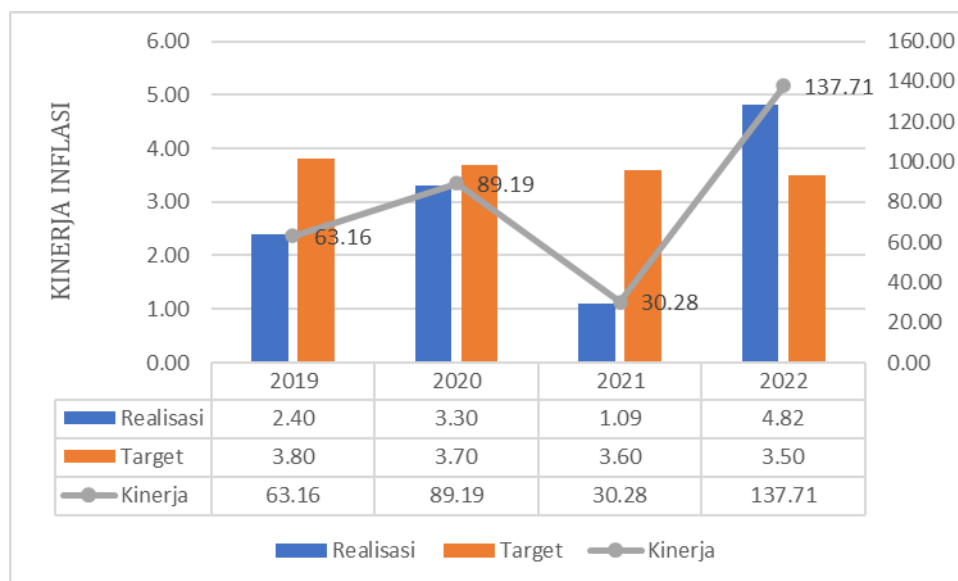
Tembilahan mengalami Inflasi yang terkategori ringan yaitu mencapai 4,82 persen dengan nilai terbesar pada kelompok transportasi yaitu 13,35 persen dan terendah pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -2,06 persen.

**Gambar II.7**  
**Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir,  
Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2019 - 2022**



Sumber: BPS Prov. Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2023)

**Gambar II.8**  
**Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2022**



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

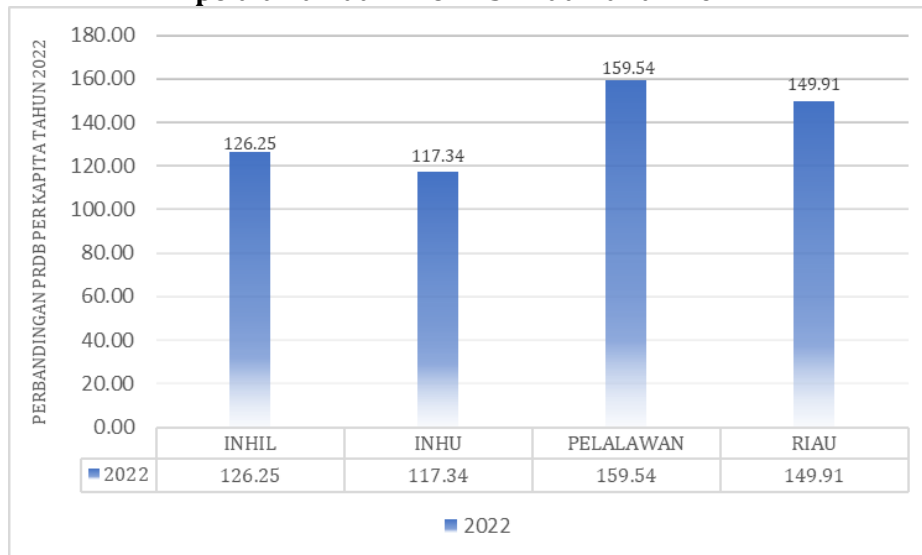


Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2020 telah ditargetkan inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,80 dan 3,70 persen serta untuk tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,60 persen dan 3,50 persen yang masih terkategori inflasi ringan. Selama periode 2019 – 2022, Realisasi inflasi di Indragiri Hilir berkisar antara 1,09 persen - 4,82 persen, hal ini mengalami peningkatan dimana selama periode 2019 – 2022, realisasi kinerja umumnya terkategori sangat tinggi.

#### 2.2.1.3. PDRB Per kapita

Selama periode 2019 – 2022, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren yang terus meningkat. Pada tahun 2019, PDRB per kapita sebesar Rp 87,34 juta per kapita/tahun meningkat menjadi Rp 126,25 juta per kapita/tahun pada tahun 2022. PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding PDRB per kapita Kabupaten Pelalawan yaitu 159,54 Juta Perkapita/tahun, sementara Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 117,34 Juta Perkapita/tahun pada tahun 2022. Sementara PDRB per kapita Provinsi Riau sebesar 149,91 Juta Perkapita/tahun.

**Gambar II.9**  
**Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022**



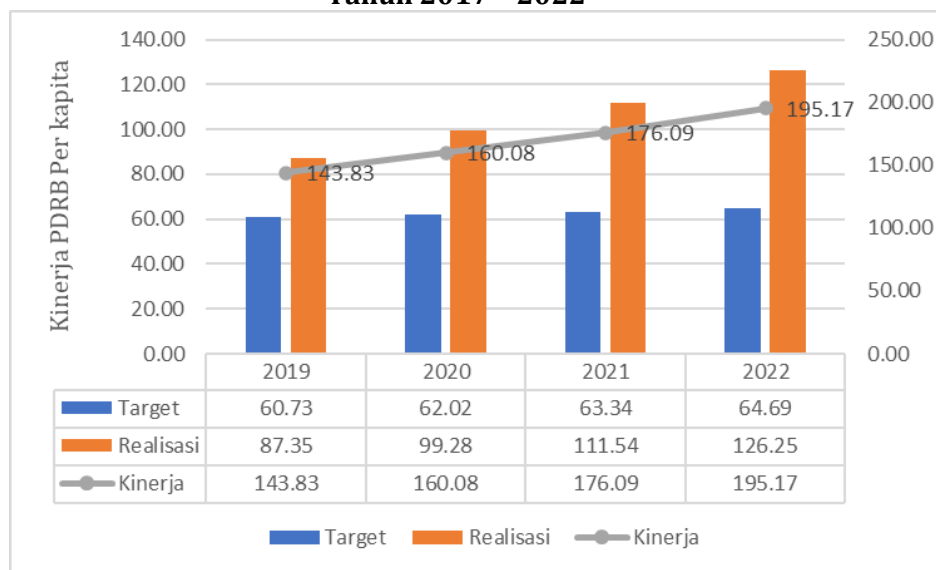
Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Angka, 2023)

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditargetkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2019 sebesar Rp 60,73 juta/kap/tahun, meningkat menjadi Rp 62,02



juta/kap/tahun pada tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2021 disesuaikan menjadi 63,34 juta/kap/ tahun dan sebesar 64,69 juta/kap/tahun pada tahun 2022. Realisasi PDRB per kapita tahun 2019 - 2022 berkisar antara Rp 87,34 juta/kap/tahun - Rp 126,25 juta/kap/tahun. Selama periode 2019 - 2022, realisasi kinerja PDRB per kapita terkategori sangat tinggi bahkan melebihi target

**Gambar II.10**  
**Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2017 - 2022**



Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Angka, 2017-2021)

#### 2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2019 - 2022 berada di kisaran angka 0.296 - 0.310, angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Akan tetapi angka ini merupakan peringatan dini untuk Kabupaten Indragiri Hilir agar bisa mengantisipasi kesenjangan distribusi pendapatan yang ada di kalangan masyarakatnya. Angka kesenjangan yang relatif tinggi dapat menyebabkan



terjadinya kecemburuan-kecemburuan sosial diantara masyarakat, sehingga bisa menyebabkan adanya konflik sosial serta tindakantindakan kriminal lainnya. Perkebangan Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.10**  
**Perkebangan Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| Tahun       | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Gini | 0.303 | 0.310 | 0.297 | 0.296 |

*Sumber : BPS Indragiri Hlir, 2023*

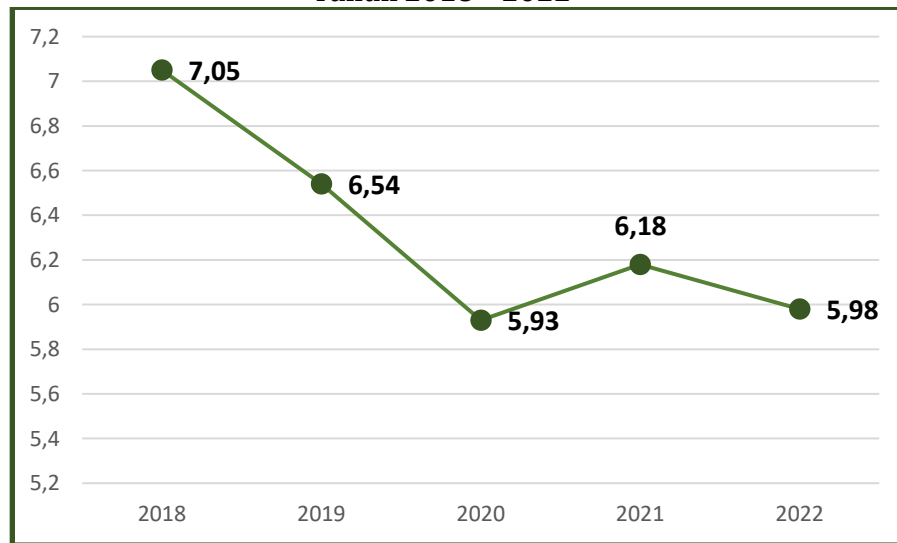
#### **2.2.1.5. Kemiskinan**

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan disini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran baik makanan maupun non makanan di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, untuk melihat penduduk masyarakat yang sejahtera, maka dapat didekati dengan melihat persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan atau dianggap penduduk tidak miskin.

Secara umum, angka kemiskinan di Indragiri Hilir mengalami penurunan dimana pada tahun 2018, angka kemiskinan mencapai 7,05 persen dan menurun hingga encapai 5,98 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2021, angka kemiskinan sempat mengalami kenaikan hingga mencapai 6,18 persen yang merupakan dampak dari Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan ini merupakan sinyal positif dari berhasilnya berbagai program pemulihan perekonomian daerah yang berimbas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.



**Gambar II.11**  
**Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2018 - 2022**



*Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023*

**Kemiskinan ekstrem**, atau kemiskinan absolut adalah suatu kondisi yang tidak dapat membantu kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi, tidak hanya tergantung dari pendapatan, tetapi juga ketersediaan jasa. Kemiskinan esktrrem indagiri Hilir pada tahun 2022 sebesar 0,69 persen atau 5.020 jiwa, menurun sebesar 0,84 Persen atau 5.990 jiwa dari tahun 2021 yakni 1.53 Persen atau sebesar 11.010 Jiwa. Lebih kecil dari Indragiri Hulu sebesar 11.150 jiwa dan lebih kecil dari Pelalawan yang berjumlah 9.650 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Riau Tahun 2022 mencapai 10.033 Jiwa. Kemiskinan ekstrem erat kaitannya dengan permasalahan stunting. Ini artinya, jika ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem, isu stunting menjadi hal penting untuk diperhatikan.

### **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat dalam membangun suatu kehidupan yang layak. Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek, namun dari seluruh aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus ultimate impact dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan



Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Indragiri Hilir

#### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan *Human Development Index* (HDI) oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hilir disertai dengan komponen pembentuknya.

**Tabel II.11**  
**Komponen Pembentuk**  
**Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022**

| Uraian                            | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Angka Harapan Hidup               | 67,32        | 67,66        | 67,85        | 67,98        | 68,31        |
| Rata-rata Lama Sekolah            | 7,19         | 7,22         | 7,23         | 7,24         | 7,26         |
| Harapan Lama Sekolah              | 11,89        | 11,9         | 11,91        | 11,93        | 12,19        |
| Pengeluaran per kapita            | 10.254       | 10.382       | 9.954        | 9.945        | 10.234       |
| <b>Indeks Pembangunan Manusia</b> | <b>66,51</b> | <b>66,84</b> | <b>66,54</b> | <b>66,63</b> | <b>67,37</b> |

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

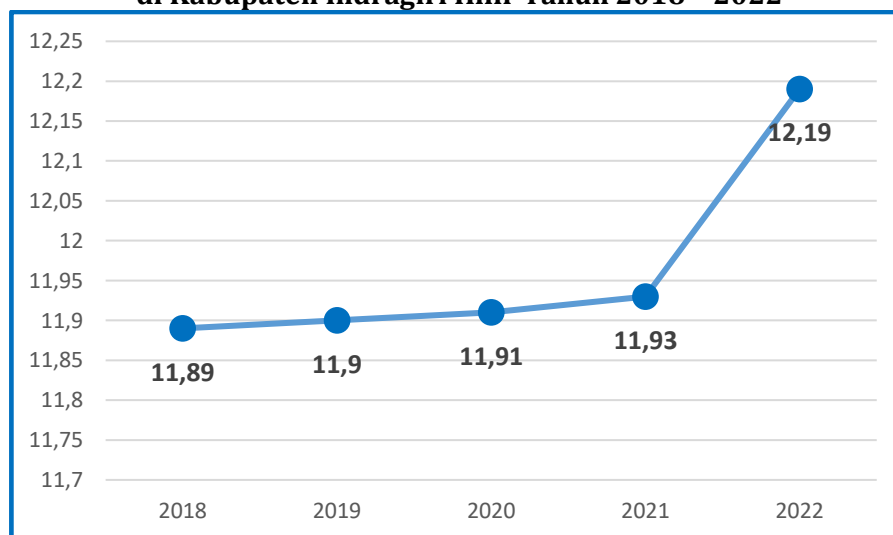
Selama periode 2018 – 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Tahun 2018, IPM Indragiri Hilir sebesar 66,51 meningkat menjadi 66,84 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, IPM Kabupaten Indragiri Hilir mengalami sedikit penurunan menjadi 66,54. Pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 66,63 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi sebesar 67,37.



#### 2.2.2.2. Harapan lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lama sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Selama periode 2018–2021, HLS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yang menggambarkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir terus meningkat. Peningkatan Harapan Lama Sekolah terjadi di Indragiri Hilir hingga tahun 2021 mencapai 11,93 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk Indragiri Hilir yang berusia tujuh tahun memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 11,93 tahun. Kondisi ini cukup menarik perhatian dikarenakan Harapan Lama Sekolah tidak mencapai angka wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan upaya optimal dalam mengembangkan aspek pendidikan secara berkualitas dan merata.

**Gambar II.12**  
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
**di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022**



*Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023*

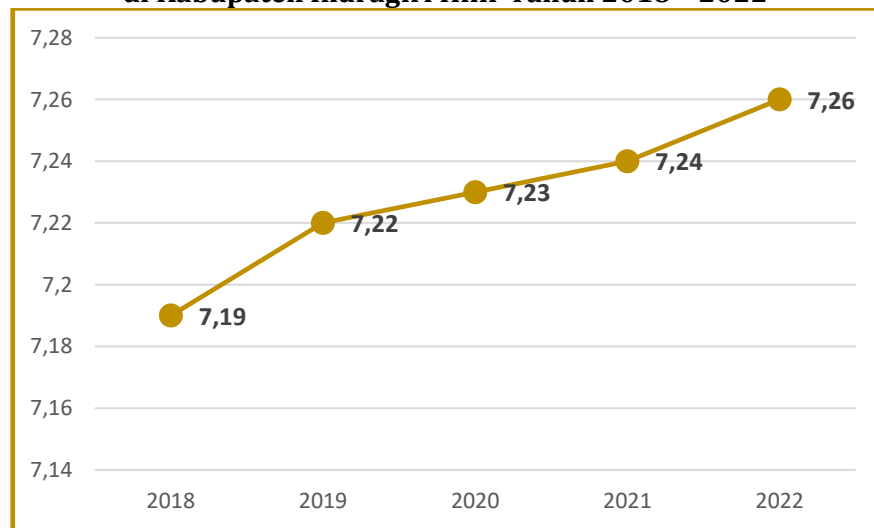
#### 2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Selama periode 2018 – 2022, RLS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat meski dengan slope yang hampir datar. Posisi RLS Kabupaten Indragiri Hilir kembali



menjadi yang terendah dibandingkan dengan RLS Kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau, sehingga kondisi ini perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan bidang pendidikan periode berikutnya. Pada tahun 2022, angka Rata-rata Lama Sekolah Indragiri Hilir mencapai 7,26 tahun dimana angka ini mengindikasikan bahwa penduduk Indragiri Hilir yang memiliki umur 25 tahun ke atas telah mengenyam rata-rata jenjang pendidikan hingga 7,26 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

**Gambar II.13**  
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)**  
**di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2022**



*Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023*

#### **2.2.2.4. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Selama periode 2018 – 2022, AHH Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yaitu dari 67,32 tahun pada tahun 2018 menjadi 68,31 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir diharapkan memiliki usia hingga 68,31 tahun.



**Gambar II.14**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun)**  
**di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2022**

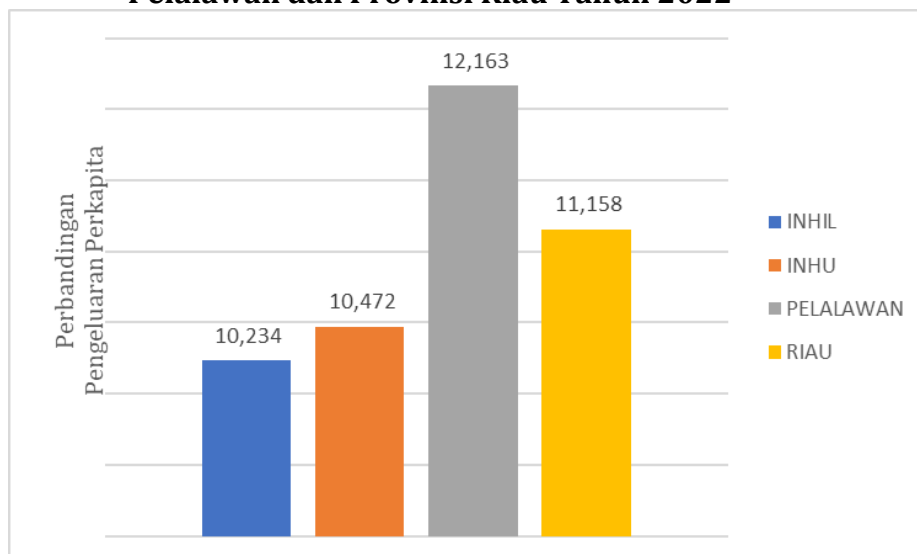


Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

#### 2.2.2.5. Pengeluaran Perkapita

Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan perkembangan yang cukup positif sejak periode 2019-2022, pada tahun 2019 pengeluaran per kapita sebesar Rp 10.382 (ribu) menurun menjadi 9,954 (Ribu) pada tahun 2020 dan 9,945 (Ribu) pada tahun 2021. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp 10,234 (ribu). Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga (Inhu dan Pelalawan) serta provinsi Riau (tahun 2022), pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir lebih rendah kisaran 238 - 1,929 (Ribu).

**Gambar II-15**  
**Perbandingan pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir, Inhu,**  
**Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022**



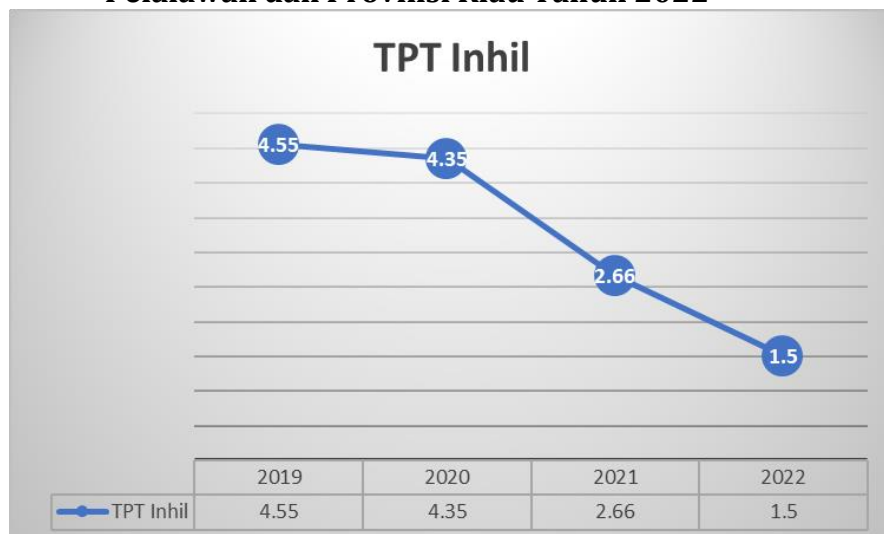


*Sumber : BPS (Riau dalam angka, 2023)*

#### 2.2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu daerah terdapat TPT yang tinggi, maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. TPT di Indragiri Hilir pada tahun 2019 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya (2019 sebesar 4,76 persen; 2020 sebesar 4,35 persen; 2021 sebesar 2,66 persen), meski sempat naik pada tahun 2019. TPT pada tahun 2022 adalah sebesar 1,50 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi, sekitar 2 orang adalah pengangguran, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2021;3 orang).

**Gambar II-16**  
**Perbandingan pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir, Inhu,**  
**Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022**



*Sumber : BPS kab. Indragiri Hilir*

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### 2.2.3.1. Seni Budaya

Kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

objek kebudayaan meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni.

Berdasarkan Keputusan Bupati Indragirihilir Nomor : Kpts. 803/xl/HK-2020 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Manuskrip, Tradisi Lisan, 4 Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional dan Cagar Budaya.

Berikut Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ;

**Tabel II- 12**

**Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022**

| No              |   | Objek Pemajuan Kebudayaan                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                         | Lokasi               | Kondisi Faktual |                |               |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                 |   |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                      | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| A Manuskrip     |   |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                      |                 |                |               |
|                 | 1 | Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan Tuan Guru Sapat | Beberapa tulisan tangan Tuan Guru Sapat ada pada ahli waris dan masyarakat.                                                                                                       | Indragiri Hilir      | 75%             | 15%            | 10%           |
|                 | 2 | Manuskrip Mandah                                                              | Beberapa tulisan tangan catatan tentang sengketa tanah, surat tanah, surat nikah, ilmu falakiyah, doa khatam Al Quran dan perkumpulan sosial, ada pada ahli waris dan masyarakat. | Kecamatan Mandah     | 60%             | 30%            | 10%           |
|                 | 3 | Manuskrip Gaung                                                               | Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.                                                                               | Kecamatan Gaung      | 60%             | 30%            | 10%           |
|                 | 4 | Manuskrip Reteh                                                               | Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.                                                                               | Kecamatan Reteh      | 60%             | 30%            | 10%           |
|                 | 5 | Manuskrip Tembilahan                                                          | Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.                                                                               | Kecamatan Tembilahan | 50%             | 35%            | 15%           |
|                 | 6 | Manuskrip Tempuling                                                           | Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.                                                                               | Kecamatan Tempuling  | 50%             | 35%            | 15%           |
|                 | 7 | Manuskrip Enok                                                                | Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.                                                                               | Kecamatan Enok       | 50%             | 35%            | 15%           |
|                 | 8 | Manuskrip Kateman                                                             | Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.                                                                               | Kecamatan Kateman    | 50%             | 35%            | 15%           |
| B Tradisi Lisan |   |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                      |                 |                |               |
| Sastra Lisan    |   |                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                      |                 |                |               |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                         | Objek Pemajuan Kebudayaan                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi                                                                                                                                                     | Kondisi Faktual |                |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 1                          | Pantun                                                                        | Tradisi lisan yang sering digunakan pada acara adat perkawinan Melayu dan pada acara-acara resmi yang berisikan pantun nasehat, jenaka, agama, dan adat.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                                                                                        | 90%             | 10%            | -             |
| 2                          | Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan Tuan Guru Sapat | 1. Syair Ibarat Khabar Kiamat merupakan hasil karya Tuan Guru Sapat bercerita tentang akhir hidup ini.<br>2. Syair Selendang Delima                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                                                                                        | 75%             | 15%            | 10%           |
| 3                          | Madihin                                                                       | Tradisi lisan yang dilakukan suku Banjar merupakan jenis puisi rakyat anonim bertipe hiburan yang dituturkan di depan publik dengan cara dihapalkan (tidak boleh membaca teks) yang dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, atau 4 orang seniman yang sering digunakan sebagai hiburan dalam pesta perkawinan dan acara-acara event kebudayaan yang dilakukan di tempat terbuka, seperti halaman, lapangan yang luas dan di dalam gedung pertunjukan. | Kecamatan yang memiliki populasi masyarakat suku Banjar mayoritas diantaranya : Kecamatan Tembilahan, Kuindra, Batang Tuaka dan Tempuling                  | 50%             | 30%            | 20%           |
| 4                          | Manuskrip Gaung                                                               | Tradisi lisan yang dilakukan suku Banjar merupakan seni cerita bertutur untuk menyampaikan pesan-pesan moral (cerita kerajaan/kebangsawanan, keagamaan dan lain-lainnya) untuk para penontonnya dimainkan dengan alat gendang terbang sebagai alat tabuh untuk seni hadrah.                                                                                                                                                                    | Kecamatan yang memiliki populasi masyarakat suku Banjar mayoritas diantaranya : Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kuindra, Batang Tuaka dan Tempuling | 10%             | 20%            | 70%           |
| <b>Senandung / Ratapan</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                 |                |               |
| 1                          | Ba ahoi                                                                       | Tradisi yang dilakukan masyarakat petani padi dalam menanam dan pada saat memanen padi di sawah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kecamatan Enok, Kuindra dan Tempuling                                                                                                                      | 10%             | 20%            | 70%           |
| 2                          | Berzanji                                                                      | Merupakan syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                                                                                        | 90%             | 10%            | -             |
| 3                          | Nyanyian Bapukung                                                             | Tradisi lisan yang dilakukan suku Banjar merupakan seni bernyanyi dalam menidurkan bayi yang dibalut kain panjang dan dimasukkan dalam ayunan dengan tuturan yang berisikan puji-pujian, doa dan sholawat.                                                                                                                                                                                                                                     | Kecamatan yang populasi masyarakat suku Banjar mayoritas diantaranya : Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kuindra, Batang Tuaka dan Tempuling          | 70%             | 20%            | 10%           |
| 4                          | Nyanyian Dodoi                                                                | Tradisi lisan yang dilakukan dalam menidurkan bayi yang dimasukkan dalam ayunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menyebar di seluruh Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                                                                                         | 70%             | 20%            | 10%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                      | Objek Pemajuan Kebudayaan                                                            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                                                         | Kondisi Faktual |                |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 5                       | Ratib Saman                                                                          | Tradisi lisan yang berisi tentang zikir kepada Allah SWT.                                                                                                                                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 60%             | 30%            | 10%           |
| 6                       | Bedenden                                                                             | Tradisi lisan yang dilakukan suku laut / suku Duano merupakan ratapan dalam menghadapi cobaan hidup dan dendang anak Duano dalam menyampaikan isi hati.                                                      | Kecamatan Concong, Kuindra, Tanah Merah, Sungai Batang, Mandah | 50%             | 35%            | 15%           |
| <b>C. Adat Istiadat</b> |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                 |                |               |
| 1                       | Masa Pantang (Larangan bagi perempuan baru melahirkan)                               | Aturan adat yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam hal larangan bercampur dengan suami dan makanan tertentu.                                                                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 100%            | -              | -             |
| 2                       | Mencacak Tongkat                                                                     | Tradisi membangun rumah mulai dari mencari lokasi hingga mendirikan tongkat rumah, dilakukan pada pagi hari dan pembacaan doa selamat.                                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 90%             | 10%            | -             |
| 3                       | Tegak Payung                                                                         | Tradisi membangun rumah pada saat mendirikan tiang rumah, dilakukan pada pagi hari dan pembacaan doa selamat.                                                                                                | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 75%             | 20%            | 5%            |
| 4                       | Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan <i>Tuan Guru Sapat</i> | Tradisi pada saat pertama kali membuka lahan untuk pertanian atau perkebunan dan setiap tahun di bulan Muharram.                                                                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 80%             | 10%            | 10%           |
| 5                       | Tepuk Tepung Tawar                                                                   | Salah satu bagian prosesi yang sakral dalam upacara adat budaya Melayu. Tepuk tepung tawar biasanya dilakukan pada acara pelantikan pejabat atau tokoh adat dan daerah, sunatan, khususnya acara pernikahan. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 80%             | 10%            | 10%           |
| <b>D. Ritus</b>         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                 |                |               |
| <b>Perayaan</b>         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                 |                |               |
| 1                       | Khitanan                                                                             | Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW terutama bagi anak-anak laki-laki.                                                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 98%             | -              | 2%            |
| 2                       | Khatam Al Quran                                                                      | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam melaksanakan syukuran bagi Muslim yang telah menamatkan bacaan Al Quran.                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 100%            | -              | -             |
| 3                       | Mandi Bulan Safar                                                                    | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam melakukan ritual mandi Safar dan berdoa pada hari Rabu terakhir/Arba Mustamir agar dapat dihindarkan dari bala dan marabahaya.                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 60%             | 20%            | 20%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                          | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 4                           | Mehararat / Mehalarat     | Kegiatan masyarakat suku Banjar ketika pindah rumah, mehanyari kelambu bagi pengantin baru dan bepergian jauh. Kegiatan dilakukan dengan pembacaan doa mehararat dan doa selamat. Untuk mehararat mehanyari kelambu makanannya identitik bubur kikicak. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 30%            | 20%           |
| <b>Peringatan Kelahiran</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                 |                |               |
| 1                           | Menempah Bidan            | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam hal menempah bidan kampong (bidan beranak) bagi ibu yang akan melahirkan.                                                                                                                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 30%            | 20%           |
| 2                           | Lenggang Perut            | Kegiatan dilakukan pada suku Melayu bagi kehamilan 7 bulan bagi seorang ibu.                                                                                                                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 30%            | 20%           |
| 3                           | Tujuh Bulanan             | Kegiatan dilakukan pada setiap suku daerah bagi kehamilan 7 bulan bagi seorang ibu dengan ritual yang berbeda antara satu suku lainnya.                                                                                                                 | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 15%            | 5%            |
| 4                           | Menguburkan Tembuni       | Kegiatan dilakukan pada setiap suku daerah dalam mengubur tembuni (ari-ari) bayi setelah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam wadah tempurung kelapa atau kaleng.                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 95%             | -              | 5%            |
| 5                           | Cuci Lantai (Balas Bidan) | Kegiatan dilakukan pada setiap suku daerah dalam masa 40 hari setelah melahirkan.                                                                                                                                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 75%             | 20%            | 5%            |
| 6                           | Tanggalan Pusat           | Kegiatan mendoa dilakukan pada setiap suku daerah bagi bayi yang tanggal tali pusatnya.                                                                                                                                                                 | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 30%             | 20%            | 50%           |
| 7                           | Aqiqah                    | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mengorbankan hewan sembelihan bagi seorang anak.                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 10%            | 10%           |
| 8                           | Potong Rambut             | Kegiatan dilakukan pada setiap suku daerah dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan seiring dengan aqiqah bagi bayi yang berumur 7 hari atau lebih diiringi doa dan sholat.                                                   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 10%            | 10%           |
| 9                           | Betindik                  | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam menindik atau melubangi telinga bagi bayi perempuan.                                                                                                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 95%             | -              | 5%            |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                        | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                     | Lokasi                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                           |                           |                                                                                                                                                                                               |                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 10                        | Menatah Anak              | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah bagi bayi yang baru bisa melangkah diiringi dengan doa.                                                                                | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 95%             | -              | 5%            |
| <b>Upacara perkawinan</b> |                           |                                                                                                                                                                                               |                                                     |                 |                |               |
| 1                         | Merisik                   | Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dalam merisik (mencari informasi) calon pengantin wanita yang akan dijadikan isteri melalui perantara tanpa sepengetahuan pihak tuan rumah.   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 30%             | 50%            | 20%           |
| 2                         | Meminang                  | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam meminang perempuan sesuai dengan persetujuan kedua keluarga calon pengantin.                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 95%             | -              | 5%            |
| 3                         | Betunang                  | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam mengikat calon mempelai wanita dengan sebetuk cincin tanda persetujuan (ikatan) bahwa seorang wanita sudah menjadi calon isteri. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 15%            | 5%            |
| 4                         | Mengantar Belanja         | Kegiatan memberikan hantaran uang dan barang keperluan calon mempelai wanita dari calon mempelai pria.                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 15%            | 5%            |
| 5                         | Berandam                  | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan cara mencukur anak rambut dan membersihkan seluruh anggota tubuh bagi calon mempelai.                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 60%             | 20%            | 20%           |
| 6                         | Menggantung               | Kegiatan menghias rumah dan pelaminan calon pengantin.                                                                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 60%             | 20%            | 20%           |
| 7                         | Bemule                    | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam mempersiapkan bahan makanan untuk pesta perkawinan.                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 15%            | 5%            |
| 8                         | Beselang                  | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah bagi tetangga membantu persiapan pesta perkawinan.                                                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 60%             | 20%            | 20%           |
| 9                         | Betangas                  | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah bagi kedua calon mempelai untuk membersihkan diri untuk membuang keringat dengan uap rebusan dedaunan.                                 | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 60%             | 20%            | 20%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                      | Objek Pemajuan Kebudayaan         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                | Lokasi                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 10                      | Beinai                            | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan memasang inai di jari mempelai pada malam sebelum menikah                                                                                                                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 10%            | 10%           |
| 11                      | Membayar Pelangkahan              | Kegiatan memberikan pelangkahan berupa cincin atau barang lainnya kepada saudara tua yang belum menikah (yang dilangkahi).                                                                                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 95%             | -              | 5%            |
| 12                      | Akad Nikah                        | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam melakukan ijab kabul perkawinan.                                                                                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 100%            | -              | -             |
| 13                      | Tepuk Tepung Tawar dan Cecah Inai | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan memberikan bedak sejuk ke tangan kedua mempelai. Dilanjutkan dengan menaburkan beras putih, beras kunyit, bertih, air tawar dan terakhir inai dan ditutup dengan doa.      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 10%            | 10%           |
| 14                      | Perhelatan Penganten              | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan pesta perkawinan sebagai tanda syukur telah terlaksananya akad nikah kedua mempelai.                                                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 100%            | -              | -             |
| 15                      | Bejulang                          | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan cara menggendong penganten diarak menuju pelaminan.                                                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 30%            | 20%           |
| 16                      | Mandi Pengantin                   | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan kegiatan mandi sehari setelah bersanding bagi kedua mempelai.                                                                                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 10%            | 10%           |
| 17                      | Makan Betalam                     | Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan kegiatan makan bersama dengan kedua keluarga mempelai.                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 10%            | 10%           |
| 18                      | Malam Beulit                      | Kegiatan menemani pengantin menjelang masuk kamar pada malam pertama. Kegiatan ini berupa perkumpulan orang-orang atau keluarga sambil berbincang setelah pelaksanaan pesta perkawinan sambil menemani pengantin sebelum masuk ke kamar. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 10%            | 10%           |
| <b>Upacara kematian</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                 |                |               |
| 1                       | Menguburkan Jenazah               | Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah melakukan ritual menguburkan mayat.                                                                                                                                                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 100%            | -              | -             |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                | Objek Pemajuan Kebudayaan                                                            | Deskripsi                                                                                                                 | Lokasi                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                   |                                                                                      |                                                                                                                           |                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 2                                 | Turun Tanah                                                                          | Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan doa pada hari kematian.                                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 3                                 | Mendo'a Arwah (3, 7, 20, 25, 40, 100 hari dan Haul)                                  | Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan doa bersama pada hari-hari yang telah ditentukan         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 90%             | 5%             | 5%            |
| 4                                 | Pindah Kubur                                                                         | Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan doa bersama pada saat perpindahan lokasi kuburan.        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 10%             | 10%            | 80%           |
| <b>Ritual Kepercayaan</b>         |                                                                                      |                                                                                                                           |                                                     |                 |                |               |
| 1                                 | Semah Kampung                                                                        | Kegiatan yang dilakukan pada suatu daerah dalam menjaga kampung agar terhindar dari bala dan bahaya yang melanda kampung. | Desa Pelanduk Kec. Mandah                           | 50%             | 30%            | 20%           |
| 2                                 | Semah Laut                                                                           | Kegiatan yang dilakukan oleh suku laut agar mendapat keselamatan dan rezeki di laut.                                      | Kecamatan Concong, Kuindra dan Mandah               | 50%             | 30%            | 20%           |
| 3                                 | Jampi Kesurupan                                                                      | Kegiatan yang dilakukan pada suatu daerah dalam mengobati orang kerasukan jin.                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 90%             | 10%            | -             |
| 4                                 | Tolak Bala                                                                           | Kegiatan yang dilakukan pada suatu daerah dengan melakukan doa bersama untuk menjaga kampung dari bala dan bahaya.        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 30%            | 20%           |
| <b>E. Pengetahuan Tradisional</b> |                                                                                      |                                                                                                                           |                                                     |                 |                |               |
| <b>Busana/Pakaian/Perhiasan</b>   |                                                                                      |                                                                                                                           |                                                     |                 |                |               |
| 1                                 | Telok Belanga                                                                        | Pakaian adat suku Melayu berupa baju kurung dengan model baju leher bulat berkancing satu.                                | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 30%            | 20%           |
| 2                                 | Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan <i>Tuan Guru Sapat</i> | Pakaian adat suku Melayu berupa baju kurung untuk laki-laki, dengan model baju kerah tinggi berkancing lima.              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 75%             | 15%            | 10%           |
| 3                                 | Destar                                                                               | Perhiasan adat suku Melayu berupa mahkota (hiasan kepala) bagi penganten laki-laki.                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 4                                 | Manuskrip Gaung                                                                      | Perhiasan adat suku Melayu berupa tutup kepala bagi perempuan yang terbuat dari kain sarung atau selendang.               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 90%             | 5%             | 5%            |
| 5                                 | Selempang                                                                            | Hiasan busana adat suku Melayu berupa kain yang digunakan di bahu para laki-laki.                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 6                                 | Selendang                                                                            | Hiasan busana adat suku Melayu berupa kain yang digunakan oleh perempuan yang dijahit dengan bentuk memanjang.            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 75%             | 15%            | 10%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                           | Lokasi                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                           |                                                                                                                                     |                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 7  | Serban                    | Hiasan busana adat suku Melayu berupa kain segi empat yang digunakan untuk menutup kepala laki-laki setelah pulang dari tanah suci. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 8  | Semutar                   | Ikat kepala laki-laki dari kain lepas.                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 15%             | 25%            | 60%           |
| 9  | Tanggui                   | Tutup kepala yang digunakan oleh petani terbuat dari anyaman pandan atau bambu.                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 30%             | 35%            | 35%           |
| 10 | Dokoh                     | Perhiasan berupa kalung besar untuk penganten.                                                                                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 11 | Gelang                    | Perhiasan yang digunakan dipergelangan tangan.                                                                                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 90%             | 5%             | 5%            |
| 12 | Kalung                    | Perhiasan berupa rantai emas yang digunakan untuk leher.                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 90%             | 5%             | 5%            |
| 13 | Subang                    | Perhiasan dipakai perempuan untuk telinga.                                                                                          | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 90%             | 5%             | 5%            |
| 14 | Tengkolok                 | Kain tutup kepala wanita.                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 15 | Tudong Manto (Mante)      | Selendang penutup kepala.                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 40%             | 30%            | 30%           |
| 16 | Tanjak                    | Perhiasan kepala yang terbuat dari kain songket digunakan laki-laki.                                                                | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 90%             | 5%             | 5%            |
| 17 | Gelang Keroncong          | Perhiasan wanita yang digunakan dipergelangan tangan jumlahnya lebih dari satu.                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 40%             | 30%            | 30%           |
| 18 | Keronsang                 | Semat baju kebaya berantai dan bertingkat tingkat biasanya digunakan satu set sebanyak 3 tingkatan.                                 | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 40%             | 30%            | 30%           |
| 19 | Cincin Belah Rotan        | Perhiasan berupa cincin untuk mengikat calon Isteri untuk mahar pernikahan.                                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 80%             | 10%            | 10%           |
| 20 | Kerabu                    | Hiasan telinga wanita berupa permata dengan jumlah banyak yang digunakan dengan sumbat belakang /paku.                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 20%            | 10%           |
| 21 | Baju Kurung Laboh         | Pakaian adat suku Melayu berupa baju kurung perempuan yang dipakai pada acara perkawinan.                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 22 | Kebaya Laboh              | Pakaian adat suku Melayu berupa kebaya panjang wanita yang longgar dengan hiasan kekek dan pisak                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                     | Objek Pemajuan Kebudayaan   | Deskripsi                                                                                                                  | Lokasi                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                        |                             |                                                                                                                            |                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 23                                     | Kebaya Pendek               | Pakaian adat suku Melayu wanita berupa kebaya dijahit sebatas pinggang.                                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 24                                     | Kebaya Encim                | Pakaian adat suku Melayu wanita berupa kebaya yang depannya runcing.                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 25                                     | Baju Kurung Sisit           | Pakaian adat suku Melayu wanita kurung yang memakai tali untuk disisit/ditarik di leher dan lengan baju.                   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| <b>Metode Pengobatan</b>               |                             |                                                                                                                            |                                                     |                 |                |               |
| 1                                      | Bekam                       | Teknik pengobatan dengan cara memanaskan mangkok atau gelas di atas kulit untuk mengeluarkan darah kotor.                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 2                                      | Seluruh                     | Teknik pengobatan dengan menggunakan air rendaman yang didoakan untuk memudahkan proses kelahiran.                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 3                                      | Tetemas                     | Teknik pengobatan suku Melayu dengan menggunakan kunyit dan kapur untuk dijauhkan dari makhluk halus.                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 4                                      | Pidaraan                    | Teknik pengobatan suku Banjar dengan menggunakan kapur dan kunyit untuk dijauhkan dari makhluk halus.                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| <b>Ramuan Tradisional</b>              |                             |                                                                                                                            |                                                     |                 |                |               |
| 1                                      | Ramuan Kencur               | Ramuan dengan bahan beras dan kencur untuk kebugaran tubuh dan menambah nafsu makan.                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 2                                      | Ramuan Ganda Rusa           | Ramuan dengan bahan daun rusa atau kisi-kisi, untuk pengobatan sakit perut dengan cara dipanaskan lalu dibarutkan keperut. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
|                                        | Ramuan Jerangau             | Ramuan dengan bahan daun jerangau untuk pengobatan anak kejang-kejang.                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
|                                        | Sedingin                    | Ramuan dengan bahan daun cocor bebek untuk pengobatan anak menurunkan panas.                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
|                                        | Jelom (Rendaman Bunga Raya) | Ramuan dengan bahan rendaman bunga raya untuk pengobatan anak menurunkan panas.                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
|                                        | Selasih                     | Ramuan dengan bahan rendaman selasih untuk membuang panas dalam dan kembung.                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
|                                        | Kembang Semangkok           | Ramuan dengan bahan kembang semangkok untuk pengobatan menurunkan panas dalam.                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| <b>Makanan dan Minuman Tradisional</b> |                             |                                                                                                                            |                                                     |                 |                |               |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi                                                        | Kondisi Faktual |                |               |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 1  | Kerabu                     | Makanan yang diolah dari ikan atau sayur tanpa menggunakan minyak goreng.                                                                                                                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 50%             | 25%            | 25%           |
| 2  | Cencaluk                   | Bahan utama dari makanan ini adalah udang pepay (udang kecil-kecil) setelah dibersihkan dimasukkan dalam tempat tertutup ditaburi garam dibiarkan selama 1 minggu (permentasi).                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 75%             | 20%            | 5%            |
| 3  | Kepurun                    | Makanan yang terbuat dari sagu mentah yang dimasak dan biasanya dinikmati dengan masakan asam pedas ikan (khusus daerah Khairiah Mandah).                                                                                                                              | Kecamatan Khairiah Mandah, Kecamatan GAS                      | 50%             | 25%            | 25%           |
| 4  | Laksa Sagu                 | Makanan yang diolah dari adonan tepung sagu yang diolah dengan pengukusan sebelum dikukus dibentuk sesuai keinginan dan dinikmati dengan kuah kari ditambah dengan sambal totok dan sayuran kol, kecambah mentah, irisan daun kunyit, timun dan perasan limau kasturi. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 50%             | 25%            | 25%           |
| 5  | Sempolet                   | Makanan yang diolah dari sagu mentah yang diolah dengan campuran sayuran daun pakis, bayam, katuk, kangkung, daun kesum, daun kunyit, daun selasih, udang, kerang, lada hitam, lada merah giling (campurkan) tanpa ditumis), jantung pisang mentah dan sambal terasi   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 75%             | 15%            | 10%           |
| 6  | Laksa Sagu Goreng          | Makanan yang diolah dari Mie sagu yang direndam dijadikan Mie setelah kembang dan lembut ditiriskan lalu diolah dengan bumbu tumisan, dicampur dengan ikan bilis.                                                                                                      | Kecamatan Mandah, GAS, Enok, Tembilahan                       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 7  | Gulai Sagu                 | Makanan yang diolah dari sagu rendang yang diolah dengan bahan yang sama dengan sempolet, namun gulai sagu ditumis bumbunya dan tidak menggunakan jantung pisang.                                                                                                      | Kec.Mandah, GAS                                               | 50%             | 25%            | 25%           |
| 8  | Bubur Sagu                 | Makanan dari sagu mutiara yang dimasak dengan gula merah dan diberi kuah santan.                                                                                                                                                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 50%             | 25%            | 25%           |
| 9  | Sagu Rendang/ Sagu Tangkop | Makanan yang diolah dari tepung sagu, cara memakannya terkenal dengan istilah nangkop, dimana sagu dimakan dengan lauk pauk yang berkuah.                                                                                                                              | Menyebar di Kecamatan Mandah, GAS, Gaung, Pelangiran, Kateman | 50%             | 25%            | 25%           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                               | Lokasi                                                                               | Kondisi Faktual |                |               |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 10 | Ketupat                   | Makanan yang diolah dari beras yang sudah dicuci dimasak dalam jalinan anyaman daun kelapa direbus menggunakan waktu 2-3 jam.                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 70%             | 20%            | 10%           |
| 11 | Lontong Lepat             | Makanan yang diolah dari beras hingga menjadi nasi lembek bersantan, air kapur sirih secukupnya, bungkus dengan daun pisang dan rebus lebih kurang 2 s/d 3 jam.                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 75%             | 15%            | 10%           |
| 12 | Nasi Dagang               | Makanan yang diolah dari beras yang dicampur dengan bahan dan bumbu minyak, bawang putih, bawang merah, halbe, garam cengkeh, kayu manis, serai, bunga lawang, kapulaga. Aron lalu setelah kering kukus | Kecamatan Mandah, Tembilahan, Enok                                                   | 60%             | 20%            | 20%           |
| 13 | Nasi Samin (Nasi Minyak)  | Nasi yang dimasak dengan minyak samin diberi bumbu bawang merah, bawang putih dan saos tomat.                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 75%             | 15%            | 10%           |
| 14 | Pulut Serundeng           | Makanan yang diolah dari pulut dan kelapa parut yang diberi bumbu lada merah, kunyit, kemiri, gula, ketumbar, jahe yang disangrai.                                                                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 75%             | 15%            | 10%           |
| 15 | Ayam Masak Putih          | Makanan yang diolah dari ayam yang telah dibersihkan, ditumis dengan bumbu yang telah dihaluskan : merica, bawang putih, bawang merah, jahe, jintan putih, garam, buah keras (kemiri) dan santan        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 100%            | -              | -             |
| 16 | Ayam Masak Habang/Merah   | Makanan yang diolah dari ayam yang telah dibersihkan, dimasak dengan sambal (cabe kering), saos tomat, bawang merah, bawang putih dan jahe.                                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 100%            | -              | -             |
| 17 | Tempoyak Durian           | Makanan yang diolah dari buah durian dengan fermentasi ditutup rapat untuk campuran penyedap masakan.                                                                                                   | Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok, Tempuling, GAS, Kateman, Pelangiran, Concong | 50%             | 25%            | 25%           |
| 18 | Masak Tempoyak            | Makanan yang diolah dari ikan atau udang yang dimasak dengan campuran tempoyak (asam durian) dengan bumbu yang telah dihaluskan lada, kunyit, garam terakhir masukkan daun kunyit.                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 50%             | 25%            | 25%           |
| 19 | Paes Ikan                 | Makanan yang diolah dari berbagai jenis ikan yang telah dibersihkan dengan proses setelah dibumbui dibungkus dengan daun pisang dan dikukus atau dipanggang                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 80%             | 10%            | 10%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan              | Deskripsi                                                                                                                                                                                     | Lokasi                                                    | Kondisi Faktual |                |               |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                           | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 20 | Paes Hati Ikan Pari                    | Makanan yang diolah dari hati ikan pari dicampur dengan sagu rendang, garam lalu dipanggang.                                                                                                  | Kec. Mandah, Enok, GAS, Kateman, Pelangiran               | 50%             | 25%            | 25%           |
| 21 | Pekasam Ikan                           | Makanan yang diolah dari ikan yang ditaburi nasi, garam pada tempat tertutup dan didiamkan selama 3 s/d 4 hari                                                                                | Kec. Mandah, Enok, GAS, Kateman, Pelangiran               | 50%             | 25%            | 25%           |
| 22 | Wadi Ikan                              | Makanan yang diolah dari ikan yang diawetkan yang dicampur dengan taburan beras gongseng, garam dan didiamkan selama 3-4 hari.                                                                | Kec. Tembilahan, Enok. Tempuling, Batang Tuaka, Gaung     | 50%             | 25%            | 25%           |
| 23 | Sambal Uap Ikan Bilis                  | Makanan yang diolah dari ikan bilis dibelah- belah, lada, bawang merah, bawang putih, tomat, belacan, uapkan di nasi yg sedang dikukus setelah itu diberi garam lalu haluskan.                | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 24 | Sambal Tanak Bilis                     | Makanan yang diolah dari ikan bilis, petai, bumbu yang dihaluskan lada, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri kunyit lalu tumis.                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 25 | Senggang                               | Makanan yang diolah dari ikan laut yang sudah dibersihkan, haluskan bawang putih, bawang merah air asam jawa, lada rawit, garam dan kunyit.                                                   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 26 | Ikan Pede                              | Makanan yang diolah dari ikan besar yang diasinkan dengan fermentasi dan penjemuran dengan waktu lama.                                                                                        | Kec. Tanah Merah, Concong, Kuindra, Mandah                | 50%             | 25%            | 25%           |
| 27 | Lalak Jering                           | Makanan yang diolah dari jering direbus sampai empuk dengan bumbu santan, garam, merica, gula putih dan bawang putih yang dihaluskan lalu tumis sampai masak dan bumbu meresap dengan jering. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 80%             | 10%            | 10%           |
| 28 | Mandai (kulit cempedek yang diasinkan) | Makanan yang diolah dari kulit buah cempedak yang direndam dengan garam ditempat tertutup.                                                                                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 75%             | 15%            | 10%           |
| 29 | Gangan Bakaroh                         | Makanan berkuah dari tongkol atau jantung pisang, kangkung, keladi, dan susupan yang diberi bumbu.                                                                                            | Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Tempuling | 75%             | 15%            | 10%           |
| 30 | Gulai Kulit Rambai                     | Makanan dari kulit buah rambai yang dimasak dengan bumbu dan santan.                                                                                                                          | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 31 | Gulai Umbut Kelapa                     | Makanan dari bagian batang yang muda pada pohon kelapa yang dimasak dengan santan dan bumbu.                                                                                                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 75%             | 15%            | 10%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi                                                                | Kondisi Faktual |                |               |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 32 | Gulai Nangka                                  | Sayur dengan bahan nangka muda dengan cara direbus dengan santan kelapa dan dicampur dengan bumbu yang dihaluskan antara lain: lada, bawang merah, bawang putih, garam, kunyit, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, daun salam. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 100%            | -              | -             |
| 33 | Acar Temu Pauh                                | Makanan pelengkap yang dicampur bahan- bahan seperti timun, wortel, nenas dan temu pauh.                                                                                                                                       | Kec. Mandah                                                           | 50%             | 25%            | 25%           |
| 34 | Bingka Kayapuk                                | Kue terbuat dari santan, telur, susu, tepung dan daun pandan dengan cara dikukus.                                                                                                                                              | Kec.Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Batang Tuaka, Enok, Gaung | 75%             | 15%            | 10%           |
| 35 | Bahulu Berendam                               | Kue terbuat dari tepung, telur dikocok sampai kembang lalu dikukus/dibakar setelah masak dimasukkan kedalam air rendaman gula yang sudah dimasak dengan cengkeh, kayu manis dan daun pandan.                                   | Kec. Mandah, Tembilahan, GAS, Enok, Tempuling, Kateman, Kuindra       | 75%             | 15%            | 10%           |
| 36 | Buah Melaka (Kalalapun / Klepon / Onde- onde) | Kue terbuat dari tepung beras pulut yang didalamnya terdapat gula merah dan berselimutkan kelapa parut                                                                                                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 100%            | -              | -             |
| 37 | Kikicak / Putri Berendam                      | Makanan yang terbuat dari tepung beras pulut yang dimasak dengan santan, gula merah dan daun pandan.                                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 100%            | -              | -             |
| 38 | Bubur Sum-sum                                 | Makanan yang terbuat dari tepung beras, santan, air kapur sirih, garam dan air gula merah                                                                                                                                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 80%             | 10%            | 10%           |
| 39 | Bubur Ba'ayak                                 | Makanan yang terbuat dari tepung beras, santan, gula merah, kapur sirih dan daun pandan.                                                                                                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 50%             | 25%            | 25%           |
| 40 | Aman Sari                                     | Kue yang terbuat dari tepung kacang hijau, santan, gula, telur dengan cara dikukus.                                                                                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 50%             | 25%            | 25%           |
| 41 | Cermin Basah                                  | Kue yang terbuat dari bahan gula, santan, telur, susu, tepung dengan cara dikukus.                                                                                                                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 50%             | 25%            | 25%           |
| 42 | Antu Seome                                    | Kue yang terbuat dari keledak yg dikukus lalu dihaluskan dicampur dengan santan, susu, gula, telur dimasak sampai kering dan bergerintil.                                                                                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 50%             | 25%            | 25%           |
| 43 | Tepung Gomak                                  | Kue yang terbuat dari tepung beras pulut, tepung kacang hijau, inti kelapa gula merah.                                                                                                                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 50%             | 25%            | 25%           |
| 44 | Roti Jala (Jelurai)                           | Makanan yang terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan mentega, santan, garam, disantap dengan kuah seri kaya atau kuah kari.                                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                   | 75%             | 15%            | 10%           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi                                                                          | Kondisi Faktual |                |               |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 45 | Dodol Labu                 | Kue yang terbuat dari buah labu yang dikukus dengan santan, gula merah, dan tepung pulut, biasanya akan dibuat ketika mengawali pesta perkawinan.                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                             | 50%             | 25%            | 25%           |
| 46 | Dodol Pulut                | Kue yang terbuat dari tepung pulut, santan, gula merah, gula putih dan garam dengan pengadukan yang sangat lama agar dapat dibentuk                                                                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                             | 75%             | 15%            | 10%           |
| 47 | Rendang Kasturi            | Kue yang terbuat dari kacang hijau yang direbus dengan gula putih sampai empuk, setelah dingin lalu dicetak-cetak dan digoreng dengan adonan tepung beras, garam dan sedikit air kapur sirih.                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                             | 75%             | 15%            | 10%           |
| 48 | Haluwe Buah                | Manisan yang terbuat dari buah-buah muda dengan cara direndam menggunakan air kapur sirih, dicampur dengan air gula yang sudah dimasak dan didinginkan selama beberapa malam.                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                             | 75%             | 15%            | 10%           |
| 49 | Haluwe Kelapa              | Manisan buah yang biasanya dibuat dari buah kelapa muda dimasak dengan air gula sampai kering.                                                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                             | 50%             | 25%            | 25%           |
| 50 | Hasidah                    | Kue sebagai hiasan sajian makanan yang dibuat dari campuran tepung gandum dan gula, garam, air serta bawang goreng.                                                                                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                             | 50%             | 25%            | 25%           |
| 51 | Lemang                     | Makanan yang diolah dari beras ketan yang sudah dibersihkan lalu tambahkan santan, garam dan dimasukkan ke dalam potongan- potongan bambu yang sebelumnya sudah dimasukkan daun pisang muda dan masak dengan cara dibakar.  | Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kuindra, Tempuling, Enok, Gaung, Batang Tuaka | 75%             | 15%            | 10%           |
| 52 | Lempuk                     | Makanan yang diolah dari daging buah durian yang telah pisahkan dari bijinya dan dimasak dengan gula putih dimasak sampai kental dan setelah masak lalu dicetak.                                                            | Kecamatan Kemuning                                                              | 50%             | 25%            | 25%           |
| 53 | Pulut Panggang / Lempa     | Makanan yang diolah dari beras pulut yang telah dibersihkan dan dicuci lalu diaron dengan santan, garam dan setelah mengering masukkan ke dalam daun pisang, diisi dengan sambal ikan teri atau udang bungkus dan panggang. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                             | 75%             | 15%            | 10%           |
| 54 | Pais Pisang / Lepat Pisang | Kue yang diolah dari tepung beras, pisang, santan, gula putih, telur dan daun pisang untuk membungkus lalu dikukus.                                                                                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                             | 75%             | 15%            | 10%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                                                    | Kondisi Faktual |                |               |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 55 | Pais Labu / Lepat Labu    | Kue yang diolah dari buah labu dicampur tepung beras, garam, tepung gandum, gula pasir, santan, aduk rata lalu bungkus dengan daun pisang dan dikukus.                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 56 | Wajik                     | Makanan yang diolah dari beras pulut, santan, gula merah, gula putih, santan,minyak.                                                                                                                                                                | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 75%             | 15%            | 10%           |
| 57 | Cingkarok                 | Cemilan yang diolah dari gula, ketan yang ditumbuk kasar dan dimasak jadi satu.                                                                                                                                                                     | Kec. Enok, Sungai Batang,Tempuling, Kuindra, Tembilahan   | 50%             | 25%            | 25%           |
| 58 | Gula Tapak                | Makanan yang diolah dari sadapan air nira kelapa yang dimasak sampai mengental dengan campuran kayu resak.                                                                                                                                          | Kec. Tempuling, Enok, Kempas, GAS, Mandah                 | 80%             | 20%            | -             |
| 59 | Gula Juroh                | Makanan yang diolah dari sadapan air nira kelapa yang dimasak sampai mengental.                                                                                                                                                                     | Tempuling, Enok, Kempas, GAS, Mandah                      | 50%             | 25%            | 25%           |
| 60 | Teng-teng Jahe            | Cemilan yang diolah dari kelapa setengah tua, diparut kasar dengan jahe lalu di gongseng sampai kering lalu dimasak dengan gula sampai agak kental lalu dicampur dengan gongsengan kelapa dan Jahe kemudian digiling dan dipotong sesuai keinginan. | Kec. Enok, Tembilahan, Tembilahan Hulu                    | 50%             | 25%            | 25%           |
| 61 | Tapai Pulut Daun Katu     | Makanan fermentasi dari beras pulut yang di beri warna hijau dari daun katu.                                                                                                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 80%             | 20%            | -             |
| 62 | Bangkit Sagu              | Kue kering yang terbuat dari tepung sagu, santan dan gula.                                                                                                                                                                                          | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 80%             | 20%            | -             |
| 63 | Sesagon                   | Cemilan kering yang terbuat dari kelapa yang agak muda diparut, tepung ketan dan gula.                                                                                                                                                              | Menyebar setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir            | 50%             | 25%            | 25%           |
| 64 | Lempeng Sagu              | Makanan yang terbuat dari tepung sagu, ada yang campur dengan kelapa parut dan ada juga dicampur nasi.                                                                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 65 | Papudak (Sunduk Lawang)   | Kue dari tepung beras, santan, gula putih, air daun pandan, adonan digulung dengan daun pisang memanjang dan dikukus. Ada juga yang menggunakan gula merah sehingga tidak perlu lagi air daun pandan.                                               | Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Tempuling | 50%             | 25%            | 25%           |
| 66 | Pundut (Babangko)         | Kue dari tepung beras, santan, air daun pandan, sebelum adonan dibungkus dengan daun pisang ditambahkan gula merah dan santan kental secukupnya lalu dikukus.                                                                                       | Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Tempuling | 70%             | 15%            | 15%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                      | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                                                                               | Kondisi Faktual |                |               |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 67                      | Putu Mayang               | Kue yang terbuat dari tepung beras, menggunakan cetakan untuk hasilnya seperti mie. Disajikan dengan kuah gula merah dan santan.                                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 50%             | 25%            | 25%           |
| 68                      | Putu Piring               | Kue yang terbuat dari tepung beras yang berwarna kuning dari kunyit, diberi gula merah dan diberi taburan kelapa                                                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 50%             | 25%            | 25%           |
| 69                      | Gula Gaet                 | Cemilan yang diolah dari gula merah dimasak dengan sedikit air sampai kental setelah agak dingin lalu ditempa dan ditarik-tarik dengan menggunakan tepung terigu setelah tarikan dan tempaan sudah cukup pas baru dilakukan pemotongan.       | Kec. Enok, Sungai Batang, Tempuling, Kuindra, Tembilahan                             | 50%             | 25%            | 25%           |
| 70                      | Cendol Sagu               | Minuman yang diolah dengan tepung sagu dicampur dengan air panas setelah mengental dicetak dan rendam dengan air dingin                                                                                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 75%             | 15%            | 10%           |
| 71                      | Cendol Tepung Beras       | Minuman yang diolah dengan tepung beras dicampur dengan air parutan daun pandan, air kapur sirih secukupnya, garam, dimasak sampai kental lalu angkat dan cetak masukkan di air dingin                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 75%             | 15%            | 10%           |
| 72                      | Ular-Ular                 | Minuman yang diolah dengan tepung sagu yang dicampur dengan air panas dan mengental setelah dapat diadon lalu cetak sesuai keinginan, rendam di air dingin tunggu sampai keesokan harinya. Disajikan dengan parutan kelapa dan air gula merah | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 75%             | 15%            | 10%           |
| 73                      | Kelapa Muda Gula Juroh    | Minuman yang diolah dengan air kelapa dan daging kelapa muda yang dicampur dengan gula juroh.                                                                                                                                                 | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 50%             | 25%            | 25%           |
| <b>Mata Pencabangan</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                 |                |               |
| 1                       | Berkebun                  | Kegiatan masyarakat dalam mengubah hutan alam menjadi perkebunan dengan menggunakan tata cara tradisional atau dengan pengetahuan tradisional masyarakat setempat.                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                  | 80%             | 10%            | 10%           |
| 2                       | Berladang                 | Kegiatan yang mengubah hutan alam menjadi hutan garapan untuk bercocok tanam padi dengan metode musim hujan atau pengetahuan masyarakat setempat dalam berladang.                                                                             | Kec. Kuindra, Enok, Tembilahan, Keritang, Reteh, Sungai Batang, Batang Tuaka, Kempas | 75%             | 15%            | 10%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                              | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi                                                                                      | Kondisi Faktual |                |               |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 3                               | Nelayan                   | Masyarakat yang kesehariannya bekerja di laut dan di sungai mencari ikan atau biota lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kec. Concong, Tanah Merah, Batang Tuaka, Mandah, Sungai Batang.                             | 75%             | 15%            | 10%           |
| 4                               | Menongkah Kerang          | Cara masyarakat Duano dalam menangkap kerang di padang lumpur dengan menggunakan sebilah papan sebagai tumpuan sebelah kakinya, untuk mendayung diatas lumpur sementara tangan untuk memungut / mencari kerang yang dikumpulkan dalam cangkang yang terletak di depan.                                                                                                                  | Kec. Concong, Tanah Merah, Mandah, Kuindra                                                  | 100%            | -              | -             |
| <b>F. Teknologi Tradisional</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                 |                |               |
| <b>Arsitektur/Ornamen</b>       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                 |                |               |
| 1                               | Teratak                   | Gubuk/pondok atau dangau tempat istirahat petani saat berladang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kec.Enok, Kuindra, Reth,Sungai Batang, Keritang, Kempas,Tempuling, Batang Tuaka Tembilahan. | 80%             | 10%            | 10%           |
| 2                               | Langkau                   | Pondok tempat petani mengolah kelapa (menyalai, mengeringkan dan mengasap) menjadi kopra.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                         | 60%             | 20%            | 20%           |
| 3                               | Rumah Belah Bubung        | Rumah panggung dengan tinggi sekitar 2 meter dari permukaan tanah menggunakan bubung (bambu) dan desainnya seperti terbelah dua dibuat menggunakan material yang berasal dari alam.Untuk tiang, gelagar, tangga, bendul, dan rasuk digunakan kayu; dinding dan lantai menggunakan papan; sementara atapnya yang berbentuk seperti pelana kuda terbuat dari daun nipah atau daun rumbia. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                         | 50%             | 25%            | 25%           |
| 4                               | Manuskrip Gaung           | Rumah yang seluruh bagiannya terbuat dari kayu. Sesuai dengan namanya, rumah limas mempunyai bentuk limasan dengan gaya panggung. Pondasi rumah limas terbuat dari kayu ulen.                                                                                                                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                         | 75%             | 15%            | 10%           |
| 5                               | Rumah Panggung            | Rumah yang dibangun di atas permukaan tanah atau air dibangun dengan menggunakan tongkat tinggi sebagai perlindungan terhadap binatang atau banjir.                                                                                                                                                                                                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                         | 75%             | 15%            | 10%           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                        | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                               | Lokasi                                                                      | Kondisi Faktual |                |               |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                           |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 6                                         | Selembayung               | Hiasan yang terletak bersilangan pada kedua ujung perabung bangunan. Pada bangunan setiap pertemuan sudut atap diberi hiasan yang terbuat dari ukiran kayu.                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                         | 40%             | 15%            | 35%           |
| 7                                         | Susunduk Lawang           | Alat yang terbuat dari kayu panjang untuk mengunci pintu.                                                                                                                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                         | 75%             | 15%            | 10%           |
| 8                                         | Rumah Kajang              | Rumah masyarakat suku Duano/Laut yang berdiri di pesisir pantai, di dalam perahu beratapkan nipah                                                                                                       | Kec. Sungai Batang, Concong, Mandah, Tanah Merah                            | 30%             | 15%            | 55%           |
| 9                                         |                           | dan bengkuang yang dianyam sedemikian rupa berbentuk persegi panjang yang dilipat dan diletak atau dipasang pada perahu mereka.                                                                         |                                                                             |                 |                |               |
| 10                                        | Sampan Leper              | Sampan yang dibuat dengan bentuk leper, rata atau tidak pakai lunas di bagian bawahnya sebagai solusi/kearifan lokal masyarakat setempat saat air sungai sedang surut dan bisa didayung di atas lumpur. | Kec. Batang Tuaka                                                           | 75%             | 15%            | 10%           |
| <b>Sistem Irigasi Tradisional</b>         |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                 |                |               |
| 1                                         | Pancuran Air              | Mengalirkan air hujan dari atap rumah ke tempat penampungan air.                                                                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                         | 75%             | 15%            | 10%           |
| 2                                         | Parit                     | Tempat mengalirnya air dari sungai ke parit atau dari anak parit ke parit.                                                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                         | 75%             | 15%            | 10%           |
| 3                                         | Pintu Klep                | Salah satu jenis pintu air yang dapat bergerak secara otomatis berdasarkan tekanan air dengan ketinggian tertentu, digunakan untuk mengatur air masuk dan keluar                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                         | 75%             | 15%            | 10%           |
| <b>Peralatan Rumah Tangga Tradisional</b> |                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                 |                |               |
| 1                                         | Tudung Saji               | Tempat penutup untuk melindungi makanan yang sudah dimasak terbuat dari anyaman pandan, bamban berbentuk kerucut.                                                                                       | Kec. Enok, Tempuling, Kuindra, Batang Tuaka, Tembilahan, Mandah             | 75%             | 15%            | 10%           |
| 2                                         | Bakul                     | Wadah yang terbuat dari anyaman buluh, pandan, purun, bamban.                                                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                         | 75%             | 15%            | 10%           |
| 3                                         | Lekar                     | Wadah yang terbuat dari anyaman lidi kelapa, lidi rumbia dan lidi nipah.                                                                                                                                | Kec. Enok, Mandah, Tempuling, GAS, Batang Tuaka, Gaung, Pelangiran, Kateman | 40%             | 15%            | 45%           |
| 4                                         | Rage                      | Wadah yang terbuat dari anyaman pandan, rumbia, bambu.                                                                                                                                                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                         | 40%             | 15%            | 45%           |
| 5                                         | Nyiru                     | Wadah yang terbuat dari anyaman buluh biasanya untuk menampi, menjemur, tempat meletak barang-barang.                                                                                                   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                         | 40%             | 15%            | 45%           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                                               | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                 | Lokasi                                                                           | Kondisi Faktual |                |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                           |                                                                                                                                                           |                                                                                  | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 6                                                                | Ayakan                    | Wadah yang terbuat dari anyaman buluh yang dibuat berlubang-lubang kecil ditengah lingkaran untuk memisahkan, menyaring dan membuang yang tidak terpakai. | Kec. Enok, Mandah, Tempuling, GAS, Batang Tuaka, Gaung, Pelangiran, Kateman      | 60%             | 20%            | 20%           |
| 7                                                                | Seprah                    | Alas dari kain putih memanjang untuk alas makan bersaji, hinding dan memakai paha/poho.                                                                   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                              | 40%             | 15%            | 45%           |
| 8                                                                | Tikar Pandan              | Alas duduk, alas makan, alas tidur yang terbuat dari anyaman pandan yang dikeringkan melalui proses tertentu.                                             | Kec. Enok, Mandah, Tempuling, GAS, Batang Tuaka, Gaung, Pelangiran, Kateman      | 60%             | 20%            | 20%           |
| 9                                                                | Tikar Purun               | Tikar sebagai alas duduk, tidur dan tempat makan yang terbuat dari sejenis tumbuh-tumbuhan rawa yang bernama purun, dianyam sedemikian rupa.              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                              | 60%             | 20%            | 20%           |
| 10                                                               | Bakul Purun               | Peralatan rumah tangga yang terbuat dari tumbuhan purun yang di anyam sedemikian rupa.                                                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                              | 60%             | 20%            | 20%           |
| 11                                                               | Bakul Bamban              | Peralatan rumah tangga yang terbuat dari tumbuhan bamban yang dianyam sedemikian rupa.                                                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                              | 60%             | 20%            | 20%           |
| <b>Peralatan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Tradisional</b> |                           |                                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |                |               |
| 1                                                                | Papan Tongkah Kerang      | Papan kayu yang berukuran 1,50 cm digunakan untuk mencari kerang yang tidak bersambung.                                                                   | Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang                                 | 100%            | -              | -             |
| 2                                                                | Sare                      | Alat tangkap ikan dalam sungai dengan menggunakan pelepah rumbia yang dipasang lidi- lidi rumbia.                                                         | Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang                                 | 60%             | 20%            | 20%           |
| 3                                                                | Ambai                     | Alat tambak udang di dalam sungai.                                                                                                                        | Kec. Mandah Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang, Enok Batang tuaka  | 60%             | 20%            | 20%           |
| 4                                                                | Pento                     | Alat penangkap kepiting yang terbuat dari bilah bamboo kayu tulang.                                                                                       | Kec. Mandah Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang                     | 60%             | 20%            | 20%           |
| 5                                                                | Togog                     | Alat tangkap udang di kuala sungai yang terbuat dari rajutan benang nilon.                                                                                | Kec. Mandah Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang, Enok Batang tuaka. | 60%             | 20%            | 20%           |
| 6                                                                | Tunde                     | Alat tangkap ikan yang ditarik dengan sampan bentuknya seperti pancing.                                                                                   | Kec. Mandah                                                                      | 60%             | 20%            | 20%           |
| 7                                                                | Solak                     | Alat untuk melepaskan sabut kelapa dari buah kelapa.                                                                                                      | Kab. Inhil                                                                       | 90%             | 5%             | 5%            |
| 8                                                                | Penyongkil/Cungki lan     | Alat untuk memisahkan isi kelapa, pinang dari tempurung kelapa dan pinang.                                                                                | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                              | 90%             | 5%             | 5%            |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                            | Objek Pemajuan Kebudayaan                                                            | Deskripsi                                                                                                                                          | Lokasi                                                        | Kondisi Faktual |                |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                               |                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                               | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 9                             | Ambong                                                                               | Alat untuk membawa kelapa, komoditas lainnya yang terbuat dari anyaman rotan bambu, yang biasanya disandang.                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 75%             | 15%            | 10%           |
| 10                            | Asak                                                                                 | Alat untuk menanam padi yang berbentuk seperti huruf T dengan runcing bagian bawahnya.                                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 75%             | 15%            | 10%           |
| 11                            | Ani- ani/Ranggaman                                                                   | Alat untuk memanen padi terbuat dari kayu sebesar genggam tangan dan diselipkan pisau silet didalam kayu.                                          | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 75%             | 15%            | 10%           |
| <b>Pengrajin Tradisional</b>  |                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                               |                 |                |               |
| 1                             | Tong Tek                                                                             | Pengrajin tradisional pandai besi pembuatan parang, peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga.                                                | Kec. Tembilahan, Enok,Tempuling, Kuindra, Batang Tuaka, Gaung | 75%             | 15%            | 10%           |
| 2                             | Tepung Sagu                                                                          | Pengrajin tradisional pengolahan tepung sagu.                                                                                                      | Kec. GAS, Gaung, Enok, Mandah                                 | 75%             | 15%            | 10%           |
| 3                             | Sagu Lemak                                                                           | Pengrajin tradisional pengolahan sagu lemak.                                                                                                       | Kec. GAS, Gaung, Enok, Mandah                                 | 75%             | 15%            | 10%           |
| 4                             | Gula Merah                                                                           | Pengrajin tradisional pengolahan nira kelapa menjadi gula tapak.                                                                                   | Kec. GAS, Mandah, Enok, Tempuling, Batang Tuaka,Kempas        | 75%             | 15%            | 10%           |
| 5                             | Gula Juroh                                                                           | Pengrajin tradisional pengolahan nira kelapa yang sudah diolah tetapi tidak dibekukan.                                                             | Kec. GAS, Mandah, Enok, Tempuling, Batang Tuaka, Kempas       | 75%             | 15%            | 10%           |
| 6                             | Tenun Indragiri Hilir                                                                | Pengrajin tradisional pembuatan kain sarung khas yang mempergunakan alat tenun bukan mesin (ATBN) yang memberikan corak khas kain Indragiri Hilir. | Kec. Tembilahan, Tanah Merah, Enok, Sungai Batang.            | 75%             | 15%            | 10%           |
| 7                             | Pengrajin Batik                                                                      | Pengrajin batik dengan motif khas Indragiri hilir biasanya, di ambil dari flora, fauna dan ukir Indragiri Hilir.                                   | Tembilahan                                                    | 75%             | 15%            | 10%           |
| <b>G. Seni</b>                |                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                               |                 |                |               |
| <b>Seni Musik Tradisional</b> |                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                               |                 |                |               |
| 1                             | Baahoi                                                                               | Senandung masyarakat dalam bergotong royong berladang/bercokok tanam padi.                                                                         | Kec.Kuindra, Enok, Batang Tuaka, Tempuling.                   | 40%             | 30%            | 30%           |
| 2                             | Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan <i>Tuan Guru Sapat</i> | Puji-pujian kepada Rasul dilakukan masyarakat ketika perayaan hari besar agama Islam dan hari- hari tertentu di Indragiri Hilir.                   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 80%             | 10%            | 10%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                                                  | Kondisi Faktual |                |               |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 3  | Berdah                    | Kesenian masyarakat Melayu yang bernuansa islami, berupa Puji-pujian kepada Allah dan Rasul diiringi dengan Alat musik tradisional yang berupa gendang dengan mempunyai beberapa macam pukulan dan bentuk gendang, yang dimainkan secara berkelompok (grup). | Kec. Tembilahan, Mandah, Gas, Gaung, Kateman, Enok.     | 75%             | 15%            | 10%           |
| 4  | Manuskrip Gaung           | Do'a dan puji-pujian kepada Allah Swt /Yang Maha Kuasa yang dilakukan berulang-ulang.                                                                                                                                                                        | Kab. Inhil                                              | 90%             | 5%             | 5%            |
| 5  | Gambus                    | Alat musik petik tradisional masyarakat Melayu yang digunakan pada musik religi dan pengiring musik tarian zapin.                                                                                                                                            | Kab. Inhil                                              | 75%             | 15%            | 10%           |
| 6  | Gebano/Gendang            | Alat musik pukul yang terbuat dari kulit dan kayu yang dimainkan dan dipadukan dengan alat-alat musik lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam mengiringi musik Melayu.                                                                                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir     | 75%             | 15%            | 10%           |
| 7  | Kompang                   | Alat musik yg digunakan untuk menyambut tamu dengan lagu puji-pujian dan sholawat.                                                                                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir     | 75%             | 15%            | 10%           |
| 8  | Terbangan                 | Alat musik pukul tradisional yang terbuat dari kulit yang terpadu dengan kayu pengiring dari alat-alat musik, kompang, hadrah, rebana, madihin, dan lain-lain                                                                                                | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir     | 75%             | 15%            | 10%           |
| 9  | Maruwas                   | Alat musik tradisional pukul yang terbuat dari kulit dan kayu digunakan untuk musik dan tari zapin.                                                                                                                                                          | Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok Mandah, Gas, Kateman. | 75%             | 15%            | 10%           |
| 10 | Rebana                    | Alat musik pukul yang dimainkan berkelompok/ grup yang mempunyai beberapa macam pukulan, biasanya mengiringi lagu-lagu qasidahan dan musik Melayu lainnya.                                                                                                   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir     | 80%             | 10%            | 10%           |
| 11 | Tambor                    | Alat musik yang terbuat dari kayu berbentuk tabung dimainkan menggunakan bilah rotan sebagai pemukul.                                                                                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir     | 75%             | 15%            | 10%           |
| 12 | Kelintang                 | Alat musik yang terdiri dari gong dan canang-canang kecil, merupakan alat musik masyarakat Melayu Timur / Iranon yang mempunyai beberapa jenis lagu.                                                                                                         | Desa Kuala Patah parang Kec. Sungai Batang, Kec. Rete.  | 80%             | 10%            | 10%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                           | Objek Pemajuan Kebudayaan    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                | Lokasi                                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 13                           | Gendang Buluh                | Alat musik yang terbuat dari potongan bambu yang dibuat sedemikian rupa, dimainkan dengan dipukul. Biasanya dimainkan saat waktu senggang, panen padi, perayaan hari besar tertentu, dimainkan satu orang pemain sekaligus sebagai penyanyi.                             | Kec. Keritang                                                       | 50%             | 15%            | 35%           |
| <b>Seni Tari Tradisional</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                 |                |               |
| 1                            | Zapin Balam Belage           | Ragam tari zapin yang berkembang di Indragiri Hilir yang menggambarkan burung balam berlaga. ini merupakan tarian yang bercerita tentang perlawanan antara burung yang sedang berkelahi.                                                                                 | Kec. Mandah, GAS, Enok. Tembilahan.                                 | 10%             | 45%            | 45%           |
| 2                            | Zapin Sisip                  | Tarian zapin khas Melayu banjar, ini merupakan tarian yang menceritakan para pemuda dan pemudi berpasang-pasangan menari bersuka ria.                                                                                                                                    | Kec. Tembilahan, GAS, Gaung, Batang Tuaka, Enok, Tempuling          | 50%             | 25%            | 25%           |
| 3                            | Tari Zapin Rantauan          | Tarian yang menceritakan perempuan yang bersuka cita menunggu orang jauh yang akan datang.                                                                                                                                                                               | Kec. Tembilahan, GAS, Gaung, Batang Tuaka, Enok, Tempuling          | 50%             | 25%            | 25%           |
| 4                            | Tari Tirik Laran             | Tari ini yang menceritakan kegundahan hati seorang isteri antara rela dan tidak rela melepaskan kepergian suami untuk pergi merantau agar bisa merubah kehidupan lebih baik lagi atau istri yang galau ditinggalkan suaminya untuk mencari pekerjaan dan pergi merantau. | Kec. Tembilahan, Kuindra, GAS, Gaung, Batang Tuaka, Enok, Tempuling | 50%             | 25%            | 25%           |
| 5                            | Joget Mande/joget Dangkong   | Tari pergaulan masyarakat dalam bersuka dan bergembira biasanya ditampilkan pada perayaan pesta kawin dan hari-hari tertentu.                                                                                                                                            | Kec. Mandah                                                         | 30%             | 35%            | 35%           |
| 6                            | Tari Pedang                  | Tari penyambutan tamu dan menggunakan properti pedang.                                                                                                                                                                                                                   | Kec. ReteH                                                          | 50%             | 25%            | 25%           |
| 7                            | Tari Kampilan / Tari Sondang | Tari penyambutan tamu dan pengantin datang pada masyarakat Melayu timur atau Iranun di daerah Kuala Patah Parang dan sekitarnya.                                                                                                                                         | Kec. Sungai Batang, ReteH, Enok.                                    | 75%             | 15%            | 10%           |
| 8                            | Tari Mayang                  | Tarian yang menggunakan mayang pinang yang telah diberi mantera dan apabila dipukulkan kepada para penonton maka penonton otomatis bisa menari.                                                                                                                          | Kec. ReteH                                                          | 50%             | 25%            | 25%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                             | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                                                        | Kondisi Faktual |                |               |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 9                              | Debus                     | Pertunjukan dengan menggunakan mantera dan jampi-jampi yang menunjukkan kekebalan pemainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kec. Enok, Keritang, Reteh.                                   | 50%             | 25%            | 25%           |
| <b>Seni Sastra Tradisional</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                 |                |               |
| 1                              | Madihin                   | Seni pertunjukan/Sastra lisan yang dimainkan perorangan atau lebih dengan menggunakan alat musik gendang/terbangan, bertutur secara spontanitas untuk hiburan masyarakat biasanya ditampilkan pada pesta perkawinan dan hari-hari tertentu dimasyarakat Melayu Banjar.                                                                                                        | Kecamatan Tembilahan, Kuindra, Batang Tuaka, Tempuling, Enok. | 80%             | 10%            |               |
| 2                              | Dodoi                     | Sastra lisan yang dilakukan suku Melayu dan Banjar merupakan seni bernyanyi dalam menidurkan bayi yang dimasukkan dalam ayunan.                                                                                                                                                                                                                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 50%             | 25%            |               |
| 3                              | Nandong                   | Nyanyian menidurkan anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 50%             | 25%            |               |
| 4                              | Lamut                     | Seni bertutur dalam sastra lisan yang di iringi dengan pukulan gendang/terbangan yang bercerita tentang cerita kebangsawanan, kemasyarakatan dan cerita religi yang bersifat sindiran terhadap pola kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat dan sebagai tunjuk ajar tentang agama dalam bermasyarakat dengan diiringi permainan gendang/terbangan dan bait-bait pantun nasehat. | Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kuindra               | 30%             | 35%            |               |
| 5                              | Syair                     | Sastra lisan yang disenandungkan dengan tujuan bermacam- macam diantaranya : syair panji, syair kiasan, percintaan, syair sejarah dan syair agama.                                                                                                                                                                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 50%             | 25%            |               |
| 6                              | Badenden                  | Sastra lisan yang merupakan ratapan dilakukan suku laut/suku duano merupakan ratapan dalam budaya bernafkah di lautan.                                                                                                                                                                                                                                                        | Kecamatan Kuindra, Concong, Tanah Merah, Sungai Batang,Mandah | 50%             | 25%            |               |
| <b>Seni Teater Tradisional</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                 |                |               |
| 1                              | Teater Bangsawan          | Seni teater tradisional Melayu yang berkisah tentang kerajaan dan kehidupan dalam istana.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir           | 50%             | 25%            |               |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                  | Objek Pemajuan Kebudayaan                                                            | Deskripsi                                                                                                                                        | Lokasi                                                                                      | Kondisi Faktual |                |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                             | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 2                                   | Drama                                                                                | Seni teater yang bercerita tentang kehidupan bermasyarakat.                                                                                      | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                         | 50%             | 25%            |               |
| 3                                   | Mamandak                                                                             | Seni teater suku Banjar Indragiri Hilir yang bercerita tentang kerajaan dan kehidupan dalam istana.                                              | Kec. Tembilahan, Tempuling                                                                  | 50%             | 25%            |               |
| 4                                   | Wayang Bangsawan                                                                     | Seni pertunjukan yang dilakukan oleh seorang dalang yang bercerita tentang kebangsawanan dengan menggunakan wayang.                              | Kec. Tembilahan, Tempuling, Kuindra.                                                        | 50%             | 25%            |               |
| 5                                   | Wayang Banjar                                                                        | Seni pertunjukan yang bercerita tentang kehidupan masyarakat dengan menggunakan wayang kulit.                                                    | Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Gaung, Kuindra, Tempuling.                                | 50%             | 25%            |               |
| <b>Seni Pertunjukan Tradisional</b> |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                             |                 |                |               |
| 1                                   | Debus                                                                                | Seni pertunjukan dengan senjata tajam yang telah dimantrai/jampi pada suku Jawa dan Melayu Indragiri Hilir yang mempertontonkan kekebalan tubuh. | Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Gaung, Kuindra, Tempuling, Enok.                          | 50%             | 25%            |               |
| 2                                   | Reog                                                                                 | Seni pertunjukan masyarakat Ponorogo pada suku Jawa Indragiri Hilir yang berasal dari Jawa Timur.                                                | Kec. Tembilahan, Kempas, Keritang, Kemuning, Enok, Pulau Burung, Teluk Belengkong, Katemen. | 70%             | 15%            |               |
| <b>H. Bahasa</b>                    |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                             |                 |                |               |
|                                     | Bahasa Indonesia                                                                     | Bahasa Nasional                                                                                                                                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                         | 100%            | -              | -             |
|                                     | Bahasa Melayu                                                                        | Bahasa daerah masyarakat Indragiri Hilir                                                                                                         | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir                                         | 70%             | 15%            | 15%           |
| 1                                   | Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan <i>Tuan Guru Sapat</i> | Bahasa perantau suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan                                                                                 | Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Batang Tuaka, Enok, Pelangiran, Kuindra        | 30%             | 35%            | 35%           |
| 2                                   | Dialek Mandah/Riau Lingga                                                            | Bahasa Melayu Pulau Penyengat yang berkembang sesuai dengan dialek bahasa lokal.                                                                 | Kec. Mandah GAS, Gaung, Kateman.                                                            | 70%             | 15%            | 15%           |
| 3                                   | Manuskrip Gaung                                                                      | Bahasa Melayu yang berkembang sesuai dengan dialek bahasa lokal dan Melayu Timor/Iranon.                                                         | Kec. Reteh, Sungai Batang, Enok.                                                            | 70%             | 15%            | 15%           |
| 4                                   | Dialek Melayu Pekan Tua / Indragiri                                                  | Bahasa Melayu yang berkembang sesuai dengan dialek bahasa lokal yang dipengaruhi oleh Bahasa Melayu kerajaan Indragiri.                          | Kec. Kempas, Enok, Tempuling.                                                               | 70%             | 15%            | 15%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                         | Objek Pemajuan Kebudayaan                                                            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi                                                    | Kondisi Faktual |                |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 5                          | Dialek orang Duano/ Suku Laut                                                        | Bahasa Melayu yang berkembang sesuai dengan dialek bahasa lokal etnis Duano dan suku laut lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kec. Concong Kuindra, Mandah, Sungai Batang, Tanah Merah. | 70%             | 15%            | 15%           |
| <b>I. Permainan Rakyat</b> |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                 |                |               |
| 1                          | Ali oma                                                                              | Permainan anak-anak dengan petak umpet yang diiringi nyanyian ali oma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 2                          | Bola kasti                                                                           | Permainan anak-anak beregu menggunakan lemparan bola kasti yang dilempar dan dipukul serta disambut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 70%             | 15%            | 15%           |
| 3                          | Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan <i>Tuan Guru Sapat</i> | Permainan anak-anak dipertandingkan dengan cara menebak yang ada di dalam genggam .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 40%             | 30%            | 30%           |
| 4                          | Calung (Goncang Kaleng)                                                              | Permainan anak-anak dengan petak umpet yang menggunakan kaleng ketika kaleng digoncang berarti telah ada yang berhasil mengelabui yang pajak biasanya bermain secara berkelompok 3 s/d 10 orang atau lebih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 70%             | 15%            | 15%           |
| 5                          | Manuskrip Gaung                                                                      | Permainan sejenis catur di atas papan atau selembat kertas karton yang bersilang-silang, biasanya mempergunakan buah caturnya dari kerang siput, biji asam jawa dan potongan kertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 50%             | 25%            | 25%           |
| 6                          | Lu Lu cina buta                                                                      | Permainan anak-anak dengan petak umpet, salah satu anak ditutup matanya untuk mencari teman yang akan ditangkap yang tidak terlepas dari rantai tangan berkeliling diiringi dengan lagu lulu cina buta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 70%             | 15%            | 15%           |
| 7                          | Congkak                                                                              | Permainan anak-anak yang menggunakan papan yang dinamakan <i>papan congklak</i> dan 98 (14 x 7) buah biji yang dinamakan <i>biji congklak</i> atau <i>buah congklak</i> . Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kananya dianggap sebagai milik sang pemain. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir       | 70%             | 15%            | 15%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 8  | Gasing                    | Permainan dengan menggunakan sebuah gasing yang terbuat dari kayu, dimainkan dengan seutas tali agar bisa berputar pada poros dan berkeseimbangan pada suatu titik terbuat dari alat dari dimainkan dengan perorangan dan beregu. Dengan adu lama berputar dan main pangkah/mengdu gasing yang satu dengan gasing yang lain. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 9  | Guli                      | Permainan yang menggunakan kelereng sejenis kaca yang bulat-bulat menggelinding dimainkan beramai-ramai dan dengan dijentik untuk mematikan lawan main                                                                                                                                                                       | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 10 | Layang-layang             | Permainan menerbangkan layang-layang yang dihias dan diraut bambunya dan diberi kertas warna warni dan dibuat bunyi-bunyian, menggunakan benang atau tali.                                                                                                                                                                   | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 11 | Lugu                      | Permainan yang terbuat dari tempurung/batok kelapa di bentuk hati dan di mainkan dengan menggunakan sebilah bambu yang dipipihkan.                                                                                                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 60%             | 20%            | 20%           |
| 12 | Sepak raga/Takraw         | Permainan perorangan dan beregu menggunakan bola yang terbuat dari anyaman rotan.                                                                                                                                                                                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 13 | Seremban                  | Permainan anak-anak perempuan menggunakan kulit kerang dan bola dimainkan berdua dan berkelompok.                                                                                                                                                                                                                            | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 14 | Yeye                      | Permainan anak-anak yang menggunakan karet gelang yang dijalin menjadi seperti tali dan dilangkahi atau dilompati.                                                                                                                                                                                                           | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 15 | Engkaan/setatak           | Permainan anak-anak yang dimainkan di lapangan yang dibuat bagan kotak-kotak untuk gambar untuk melompat- lompat dengan menggunakan buah engkaan yang terbuat dari kayu ataupun mar-mar.                                                                                                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 70%             | 15%            | 15%           |
| 16 | Langkah Tiung             | Permainan anak-anak dengan melakukan langkah tiung dimainkan oleh beberapa regu.                                                                                                                                                                                                                                             | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 17 | Tam Tambuku               | Permainan anak-anak dimainkan dengan berkelompok yang akan melewati pagar tangan dan anak yang belakang akan diberi pertanyaan dengan nyanyian.                                                                                                                                                                              | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                             | Objek Pemajuan Kebudayaan  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi                                              | Kondisi Faktual |                |               |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 18                             | Lempar Sendal              | Permainan anak-anak secara perorangan dan bereg dengan melempar sesuatu sengan menggunakan sendal, siapa yang kalah akan mengendong/menghambin temannya yang menang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 19                             | Terompa Panjang            | Permainan yang menggunakan terompa/ sandal panjang yang terbuat dari sebilah kayu digunakan secara bersama-sama untuk melangkah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 20                             | Main Belon / Ikan- ikanan  | Permainan yang dilakukan beberapa anak dibagi dua regu, satu regu harus melintasi garis regu satunya lagi, jika tertangkap atau tidak bisa melintasi maka regu anak tersebut tidak bisa lagi bermain dan bergantian menjadi penjaga/ penghalang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 21                             | Ampar-ampar Pisang         | Permainan anak-anak dilakukan dengan berpasangan (dua orang anak atau lebih) dengan menyanyikan lagu ampar-ampar pisang dan dengan menggerakkan tangan atau kaki. Apabila pemain memilih untuk menggunakan tangan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan merapatkan jari-jari kedua tangan. Tempelkan kedua telapak tangan (keduanya bersebelahan) pada media seperti meja, lantai dll. Kemudian mulailah bermain dengan menyanyikan lagu ampar-ampar pisang dan menggerakkan tangan kiri atau kanan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan anak. | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| <b>J. Olah raga Tradisonal</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                 |                |               |
| 1                              | Silat                      | Ilmu bela diri dan seni menggerakkan tubuh untuk mengapresiasi gerak kasar ke gerak lembut yang bernilai seni. Silat yang ada di Indragiri Hilir yaitu silat Pangean, kuntau, sendeng, gayung dan buah tujuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| 2                              | Sepak Raga                 | Olahraga tradisional yang menggunakan bola keranjang, yang terbuat dari jalinan rotan dan dimainkan secara perorangan dan beregu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir | 50%             | 25%            | 25%           |
| <b>K. Cagar Budaya</b>         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                 |                |               |
| 1                              | Makam Tengku Syarif Mahmud | Wakil Sultan Riau Lingga yang memerintah di daerah Batin Enam Suku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jl. Tengku Syarif dan Jl. Datok Thalib Mandah       | 60%             | 20%            | 20%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan                      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi                               | Kondisi Faktual |                |               |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 2  | Makam Tuan Guru H. Khalil Bin. H. Abdul Shamad | Tokoh ulama Mandah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kampung Indragiri Mandah             | 50%             | 25%            | 25%           |
| 3  | Tapak Rumah Candu                              | Rumah Candu dibangun Belanda merupakan tempat para orang Cina pekerja kayu (Pop Log) dan Para Amtenar dan Anderneming dalam kegiatan untuk bersenang-senang dan berleha-leha beristirahat sambil menghisap Candu dan perdagangan candu (jual beli) diperkirakan dibangun 92 tahun yang lalu oleh Belanda.                                                                                                                                                       | Jalan Datok Kasim Tepi Sungai Mandah | 20%             | 40%            | 40%           |
| 4  | Vihara Bhudi Dharma Sembuang                   | Rumah ibadah bagi Pemeluk Agama Budha. Kelenteng didirikan tahun 1832 yang sampai saat ini sudah mengalami renovasi sebanyak 7 kali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sembuang RT 07 RW 02 Mandah          | 90%             | 5%             | 5%            |
| 5  | Rumah Kuning (Eks. Peninggalan Belanda)        | Rumah peninggalan Belanda yang diperkirakan dibangun sekitar awal tahun 1932-an. Usia bangunan sampai sekarang diperkirakan 87 Tahun, dan mendapat renovasi dari Pemerintah Daerah pada Tahun 2005.                                                                                                                                                                                                                                                             | Jalan Tengku Syarif Mandah           | 60%             | 20%            | 20%           |
| 6  | Meriam Langkap                                 | Meriam ini berjumlah 5 buah, 4 buah masih tinggal di lokasi awal dan 1 buah dipindahkan ke Kantor Camat Mandah. Kondisi dari 4 buah meriam Berada pada Lintang Selatan daerah kampong Langkap Desa Igal.                                                                                                                                                                                                                                                        | Jalan Poros Mandah                   | 40%             | 30%            | 30%           |
| 7  | Meriam Mandah                                  | Meriam berjumlah 4 buah dengan ukuran yang berbeda-beda 2 buah meriam sama besarnya dan panjangnya yang paling besar dan dua buah lagi juga sama ukurannya dan panjangnya namun berukuran sedang. Kondisi meriam saat sekarang ini dapat dikatakan sudah termakan usia dan sangat prihatin kondisinya karena sudah lama tergerus dan terendam oleh keasinan air sungai, pada Tahun 2005. oleh Pemerintah dibangun tempat tapak untuk kedudukan meriam dimaksud. | Jl. Datuk Qasim Mandah               | 60%             | 20%            | 20%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi                                                 | Kondisi Faktual |                |               |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 8  | Kitab- Kitab :<br>H. Idam<br>H. Khalil Bin H. Abdul Samad  | Kitab-kitab tua peninggalan H. Khalil Bin. H. Abdul Shamad Berdasarkan penanggalan yang terdapat pada Kitab-kitab Tua terdapat Tahun penerbitan buku yaitu Tahun 1334 H dan Jumlah Buku yang ada sekitar + 80 Kitab/Buku tentang Pernikahan, Perceraian, Fiqih, Tauhid, Tsawuf, Kehidupan dan berkehidupan, buku-buku dan Kitab-kitab ini merupakan salah satu kontribusi untuk Syiar Agama Islam pada masa hidupnya. | Jalan M. Saleh Thalaha Mandah                          | 50%             | 25%            | 25%           |
| 9  | Makam Tuan Guru Haji Abdurrahman Ya'kub                    | Tokoh yang mensyiarkan agama Islam di Indragiri Hilir, beliau juga banyak mendirikan sekolah-sekolah (madrasah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Masjid Baiturrahman, Desa Pasar Kembang, Kec. Keritang | 70%             | 15%            | 15%           |
| 10 | Kitab Tuan Guru Haji Abdurrahman Ya'kub                    | Kitab-kitab peninggalan Tuan Guru Haji Abdurrahman Ya'kub yang ditulis langsung oleh beliau. Kitab-kitab beliau hanya tersisa empat dan lainnya banyak yang habis terbakar bersama Pondok Pesantren Tuan Guru Haji Abdurrahman Ya'kub di Desa Sei Gergaji.                                                                                                                                                            | Desa Pasar Kembang, Kec. Keritang                      | 70%             | 15%            | 15%           |
| 11 | Kolam Taga Raja                                            | Salah satu kolam ditepinya adalah merupakan tempat kuburan buaya putih yang terdampar kekeringan dan kolam ini disebut sebagai kolam buaya berdendang.                                                                                                                                                                                                                                                                | Jl. Pendidikan Suak Pangminah S. Guntung Kec. Kateman  | 40%             | 30%            | 30%           |
| 12 | Makam Syekh Abdul Sa'id Bin Affa/ Syekh Manshur Nashruddin | Seorang ulama dan merupakan Syekh Mufti berdarah bugis berasal dari Kesultanan Riau-Lingga Keturunan sultan ke IV Penyengat-Riau Lingga dan wafat di Sungai Guntung, pada 17-10-1923.                                                                                                                                                                                                                                 | Parit 1 Bandar Sri Gemilan Kecamatan Kateman           | 70%             | 15%            | 15%           |
| 13 | Rumah dan Eks Tapak Kantor Bea dan Cukai                   | Bangunan rumah dan kantor dibangun pada tahun 1942, Kondisi bangunan kantor sudah tidak dapat digambarkan karena sudah tergerus oleh erosi dan abrasi dan sekarang hanya tinggal Tapak Bangunan Kantor yang berada pada tepian sungai. Menurut informasi bangunan rumah tersebut merupakan tempat persembunyian orang-orang Durai Kecamatan Moro ketika terjadi penyerangan oleh pihak Belanda.                       | Parit 2 Sungai Guntung Kec. Kateman                    | 40%             | 30%            | 30%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lokasi                                                            | Kondisi Faktual |                |               |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 14 | Meriam Kecil                      | Meriam ditemukan tahun 1972, saat ini keberadaan meriam terletak berada di halaman kantor Koramil Kecamatan Kateman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jl. Abd. Manaf dan Jl. Hasanuddin Taga Raja Kec. Kateman          | 70%             | 15%            | 15%           |
| 15 | Makam H. Syekh Abdurrahman Ya'kub | Tokoh ulama Keritang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mesjid Baiturrahman Kec. Keritang                                 | 70%             | 15%            | 15%           |
| 16 | Pondok Pesantren Nurul Wathan     | Pondok yang didirikan oleh H. Syekh Abdurrahman Ya'qub bersama masyarakat sekitaran Tahun 1946 di Sungai Gergaji. Madrasah tersebut terbakar termasuk sejumlah buku hasil karangan beliau. Kemudian Madrasah dibangun kembali di Desa Pasar Kembang pada tahun 1954. Selanjutnya oleh ahli waris Madrasah Nurul Wathan ini dijadikan yayasan yang dikenal dengan nama Yayasan Nurul Wathan.                                                                                                                | Pasar Kembang Kec. Keritang                                       | 70%             | 15%            | 15%           |
| 17 | Makam Batu Nunggul                | Makam Keramat Batu Nunggul terletak di tepi danau Batu Nunggul Desa Tok Jimun Kecamatan Kemuning. Pada awalnya terdapat 2 (dua) makam yang diidentifikasi adalah makam Batu Nunggul suami isteri, yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai makam keramat. Saat ini kondisi di lapangan hanya terdapat 1 (satu) makam yang diduga makam isterinya, sementara makam suaminya sudah jatuh/longsong kedalam Danau Batu Nunggul karena erosi. Sampai saat ini makam tersebut masih dikunjungi masyarakat | Jl. Penunjang Keramat Tok Jimon Kec. Kemuning                     | 40%             | 30%            | 30%           |
| 18 | Meriam ReteH                      | Merupakan meriam tua peninggalan zaman penjajahan Belanda yang ada di Kecamatan ReteH lalu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Yudha Bhakti Parit 6 Jalan Telaga Biru Tembilahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parit 6 Jalan Telaga Biru Kec. Tembilahan Hulu                    |                 |                |               |
| 19 | Situs Pendam Tujuh                | Legenda Tujuh Anak Raja yang mati akibat di tawan oleh yang jahat, kemudian di kuburkan di lokasi yang sama ketujuh Gadis tersebut dinamakanlah Pendam Tujuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Batu Ampar Lama Dusun I Bukit Bunga Batu Ampar Lama Kec. Kemuning | 40%             | 30%            | 30%           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi                                                   | Kondisi Faktual |                |               |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 20 | Batu Tanda Batas (Eks Peninggalan Belanda)                 | Batu tanda batas eks peninggalan Belanda berupa batu coran berbentuk segi empat dan bertulisan angka 2982, yang saat ini keberadaan benda berada di bawah bangunan rumah penduduk yang dulunya merupakan rumah sekolah zaman Belanda. | RT. 8 Raden Kepayang Lubuk Besar kec. Kemuning           | 20%             | 40%            | 40%           |
| 21 | Peninggalan Sesejuh Suku Iranon di Desa Kuala Patah Parang | Alat-alat peninggalan dari sesejuh Suku Iranon, berupa alat-alat kesenian, (kelintang) senjata, (kampilan dan sondang), senjata tradisional/peralatan perang.                                                                         | Desa Kuala Patah Parang, Kec. Sungai Batang              | 70%             | 15%            | 15%           |
| 22 | Makam Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad                 | Makam seorang tokoh pensyiar agama Islam yang lahir di Kelantan, Malaysia. Beliau sempat mendirikan Madrasah Tarbi'atul Islamiah sebelum meninggal.                                                                                   | Dusun Sungai Wanit, Desa Pandan Sari, Kec. Sungai Batang | 70%             | 15%            | 15%           |
| 23 | Rumah Dinas Amir Enok (Eks Peninggalan Belanda)            | Bangunan peninggalan Belanda yang kemudian digunakan untuk rumah dinas bagi "amir" di daerah Enok. Rumah ini dibangun pada tahun 1936.                                                                                                | Jl. Lintas Enok, Kel. Enok, Kec. Enok                    | 50%             | 25%            | 25%           |
| 24 | Rumah BKIA Enok                                            | Bangunan ini merupakan mess tempat tinggal bagi pegawai Keamiran Enok. Disebut Rumah BKIA karena bangunan ini pernah menjadi Kantor Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Enok.                                                         | Jl. Desa Enok, Kel. Enok, Kec. Enok                      | 50%             | 25%            | 25%           |
| 25 | Rumah Pesanggrahan Enok                                    | Bangunan peninggalan Belanda sebagai penginapan bagi tamu-tamu khususnya tamu pejabat kolonial.                                                                                                                                       | Jl. Desa Enok, Kel. Enok, Kec. Enok                      | 40%             | 30%            | 30%           |
| 26 | Makam Letda M Boya                                         | Letnan Dua Mohamad Boya atau Letda M Boya adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia asal Indragiri Hilir.                                                                                                             | Desa Sungai Rukam, Kec. Enok                             | 70%             | 15%            | 15%           |
| 27 | Rumah Bea Cukai Reteih I (Eks Peninggalan Belanda)         | Bangunan ini dibangun oleh Belanda. Rumah dinas ini pernah menjadi rumah dinas karyawan bea dan cukai Indonesia yang bertugas di Pulau Kijang                                                                                         | Jl. Pegawai, Kel. Pulau Kijang, Kec. Reteih              | 40%             | 30%            | 30%           |
| 28 | Rumah Bea Cukai Reteih II (Eks Peninggalan Belanda)        | Bangunan ini dibangun oleh Belanda. Rumah dinas ini pernah menjadi rumah dinas karyawan bea dan cukai Indonesia yang bertugas di Pulau Kijang.                                                                                        | Jl. Utama, Kel. Pulau Kijang, Kec. Reteih                | 40%             | 30%            | 30%           |
| 29 | Makam Tua – Teluk Jenang                                   | Pemakaman ini dahulunya merupakan kompleks pemakaman raja-raja.                                                                                                                                                                       | Jl. Teluk Jenang, Desa Simpang Gaung, Kec. Gaung         | 40%             | 30%            | 30%           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi                                                                          | Kondisi Faktual |                |               |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | Terawat         | Kurang Terawat | Tidak Terawat |
| 30 | Makam Tua – Teluk Kabung                     | Diperkirakan usia makam sudah sangat tua. Bentuknya masih asli tidak tersentuh rehabilitasi, hanya terdapat batu nisan dan batu galangnya.                                                                                                                                                                                                | Jl. Teluk Kabung, Desa Simpang Gaung, Kec. Gaung                                | 40%             | 30%            | 30%           |
| 31 | Rumah Kuning–Gaung (Eks Peninggalan Belanda) | Bangunan jaman Kolonial Belanda. Bangunan ini telah direhabilitasi namun tidak mengubah bentuk asli bangunan.                                                                                                                                                                                                                             | Jl. Merdeka, Desa Kuala Lahang, Kec. Gaung                                      | 70%             | 15%            | 15%           |
| 32 | Makam-makam Tua Pelangiran                   | Terdapat sepuluh makam tua namun hanya dua saja yang mudah dikunjungi karena delapan makam lainnya ada di dalam hutan.                                                                                                                                                                                                                    | Desa Sungai Terap - Desa Sungai Enggang - Desa Tanjung Simpang, Kec. Pelangiran | 40%             | 30%            | 30%           |
| 33 | Makam Syekh Abdurrahman Shiddiq              | Seorang ulama dari Kerajaan Indragiri yang lebih dikenal dengan sebutan “Tuan Guru Sapat”. Beliau berasal dari Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Tuan Guru Sapat adalah seorang pendakwah, pengajar, mufti, penulis dan petani kebun yang berhasil. Syair yang sangat dikenal dari Tuan Guru Sapat yaitu Syair Ibarat Khabar Kiamat. | Kampung Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kec. Kuala Indragiri                         | 80%             | 10%            | 10%           |
| 34 | Sondang                                      | Senjata tradisional masyarakat suku Iranun/Melayu Timur yang terbuat dari besi atau tembaga, berkepala atau gagang reflika kepala naga atau buaya. Senjata ini tidak memiliki sarung senjata.                                                                                                                                             | Kec. Rete, Enok, Sungai Batang                                                  | 70%             | 15%            | 15%           |
| 35 | Kampilan                                     | Senjata tradisional masyarakat suku Iranun/Melayu Timur yang terbuat dari besi atau tembaga, berkepala atau gagang reflika kepala naga atau buaya. Senjata ini memiliki sarung senjata.                                                                                                                                                   | Kec. Rete, Enok, Sungai Batang                                                  | 70%             | 15%            | 15%           |

Sumber : Disparporabud Kab. Inhil

### 2.2.3.2. Olahraga

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. Selain itu olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat Daerah. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang



lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Berikut capaian Kinerja Sub urusan olahraga di Kabupaten Indragiri Hilir

**Tabel II- 13**  
**Kinerja keolahrgaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| Indikator                                               | Satuan | INDRAGIRI HILIR |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|
|                                                         |        | 2019            | 2020 | 2021 | 2022 |
| Prestasi olahraga                                       | Medali | 18              | 2    | 38   | 73   |
| Persentase Peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah | Persen | 0               | 0    | 0    | -27  |
| Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat daerah              | Medali | 0               | 0    | 11   | 73   |

Sumber : Disparporabud Kab. Inhil

### **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan dengan penentuan permasalahan pembangunan hingga kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasinya.

#### **2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **2.3.1.1. Pendidikan**

Sumber Daya Manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, program wajib belajar, beasiswa dan lain-lain.

Tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dipantau dari beberapa indikator pendidikan diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM),



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka partisipasi Sekolah (APS) serta Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dalam mengukur kualitas tenaga pendidik.. Dari Tahun 2018-2022 capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel II- 14**  
**Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                                                                                                                  | KINERJA |        |           |        | SUMBER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|                                                                                                                                                   | 2019    | 2020   | 2021      | 2022   |        |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (persen)                                                                                                      | 95.34   | 95.52  | 95.99     | 99.99  | BPS    |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (persen)                                                                                                    | 81.26   | 82.06  | 82.59     | 82.06  | BPS    |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (persen)                                                                                                      | 105.85  | 105.93 | 104.56    | 103.92 | BPS    |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (persen)                                                                                                   | 99.3    | 102.01 | 99.97     | 101.92 | BPS    |
| Angka Partisipasi Sekolah SD/MI                                                                                                                   | 99.08   | 99.75  | 99.77     | 99.99  | BPS    |
| Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs                                                                                                                 | 91.70   | 92.13  | 92.27     | 85.57  | BPS    |
| Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV )                                                                                                | 73.91   | 71.97  | 72.96     | 71.99* | BPS    |
| <b>SPM Bidang Pendidikan :</b>                                                                                                                    |         |        |           |        |        |
| Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                                  | 95.39   | 95.94  | 96.02     | 92.78  | DISDIK |
| Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 5.38    | 95.57  | 95.29207  | N/A    | DISDIK |
| Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD                                                                     | 33.07   | 91.62  | 19.712706 | N/A    | DISDIK |

Sumber : BPS Indragiri Hilir, 2023/ Dinas Pendidikan Kab Inhil

Data tabel diatas terlihat bahwa kinerja urusan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir relatif baik yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja meningkat dari tahun ke tahun.

Capaian APM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2022 sebesar 99,99 persen hampir semua penduduk umur SD/MI dapat bersekolah sehingga juga mendorong terhadap pencapaian wajib belajar dan IPM Indragiri Hilir. Sementara, Selama periode 2019-2022 terdapat 17,94 persen penduduk usia sekolah SMP/MTs yang belum sekolah. Semakin kecilnya nilai APM setiap kenaikan jenjang disebabkan oleh terbatasnya jumlah sekolah dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak semua wilayah memiliki fasilitas pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi sehingga sulit mengakses fasilitas pendidikan tersebut. Jarak sekolah yang jauh membuat banyak masyarakat dengan keadaan ekonomi yang kurang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena bingung mencari biaya hidup sehari-hari dan tempat tinggal jika memutuskan tinggal di dekat sekolah, sementara



melakukan perjalanan pulang pergi tidak memungkinkan. Keadaan ini membuat tingginya putus sekolah dan rendahnya APM di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada Periode 2019-2022 berdasarkan jenjang pendidikan, nilai APK terlihat menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin sedikit penduduk yang bersekolah di jenjang tersebut. Nilai APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Indragiri Hilir melebihi angka 100 persen yaitu sebesar 103.92 yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar rentang usia 7-12 tahun, lebih jelasnya yaitu dari 105 murid, sebanyak 100 muridnya merupakan penduduk usia 7-12 tahun, di luar itu terdapat 4 sampai dengan 5 murid yang berasal dari golongan usia di atas 12 tahun atau bahkan di bawah usia 7 tahun. Berbagai hal bisa menjadi alasan, antara lain orang tua yang terkadang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, angka mengulang kelas yang tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP untuk tahun yang sama, nilai APK sebesar 101.92. Artinya, dari sebanyak 100 penduduk usia 13-15 tahun, masih ada yang berada di luar rentang usia 13-15 tahun.

Pada kelompok umur 7-12 tahun (SD/MI) , 99,99 persen penduduk di kelompok usia tersebut bersekolah yang artinya hampir seluruh umur dimaksud telah bersekolah. Pada kelompok umur 13-15 tahun (SMP/MTs) , 85,57 persen penduduk di kelompok usia ini bersekolah, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (2021). Artinya masih terdapat sekitar 14,43 persen penduduk di kelompok umur ini yang tidak bersekolah. Pada saat pemerintah sudah mengusahakan kebijakan Wajib Belajar 12 tahun, hal ini harusnya tidak terjadi. Lokasi tempat tinggal yang jauh dari sarana pendidikan SMP dan keadaan ekonomi kurang mampu adalah beberapa penyebab seorang anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Seorang guru atau pendidikan profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau Diploma Empat (D.IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) memiliki sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa



guru di Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tahun 2022 yang sudah berkualifikasi akademik S-1/D-IV sebanyak 71.99 persen. Hal ini berarti bahwa masih terdapat sebanyak 28.01 persen yang belum berkualifikasi akademik S-1/D-IV.

#### **2.3.1.2. Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang Kesehatan dapat diukur dari indikator Indeks Kesehatan seperti angka harapan hidup, Indeks Kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 kelahiran hidup, Jumlah Kematian Ibu dan Bayi. Selain itu kecukupan sarana dan prasarana serta sumberdaya Kesehatan juga menjadi tolok ukur kinerja Kesehatan yang diukur melalui indikator Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk, Rasio dokter per 1000 penduduk, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk. Kinerja Indikator-indikator Kesehatan yang tercantum adalah dalam rangka pencapaian indikator utama dalam urusan Kesehatan yakni Angka Harapan Hidup. Selama periode tahun 2019-2022, Angka harapan hidup di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat. Pada tahun 2019 AHH Kabupaten Indragiri Hilir 67.66 Tahun, sampai dengan tahun 2022 meningkat menjadi 68.31, ini berarti ada penambahan umur harapan hidup masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan 68,31 Tahun. Namun pencapaian ini bila dibandingkan dengan Kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu dan pelalawan AHH Indragiri Hilir lebih Rendah. AHHH Indragiri Hulu mencapai 70.48 Tahun sementara pelalawan mencapai 71,53 Tahun pada tahun 2022, Begitu juga Provinsi Riau mencapai 71.95 Tahun.

Gambaran pencapaian kinerja urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel II- 15**  
**Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                                                                                  | KINERJA |       |       |       | SUMBER      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------------|
|                                                                                                                   | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |             |
| Angka Harapan Hidup                                                                                               | 67.66   | 67.85 | 67.98 | 68.31 | BPS         |
| Indeks Kesehatan                                                                                                  | 0.733   | 0.736 | 0.738 | 0.743 | DATA DIOLAH |
| Angka Kematian Bayi                                                                                               | 24      | 24    | 71    | 41    | DINKES      |
| Jumlah Kematian Ibu                                                                                               | 7       | 10    | 16    | 8     | DINKES      |
| Angka Stunting                                                                                                    | 27.7    | 24.4  | 28.4  | 28.5  | SSGI        |
| Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk                                                                              | 0.005   | 0.006 | 0.006 | 0.006 | BPS         |
| Rasio dokter per 1000 penduduk                                                                                    | 0.14    | 0.20  | 0.20  | 0.19  | BPS         |
| Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk                                                            | 0.11    | 0.13  | 0.13  | 0.14  | BPS         |
| <b>SPM Bidang Kesehatan :</b>                                                                                     |         |       |       |       |             |
| Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan                                                               | 77.68   | 77.07 | 71.2  | 66.98 | DINKES      |
| Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                                                            | 48.79   | 60.29 | 57.8  | 67.5  | DINKES      |
| Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                                                         | 79.62   | 76.3  |       | 70.08 | DINKES      |
| Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                  | 58.59   | 61.7  | 47    | 66.1  | DINKES      |
| Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan                                      | 97.13   |       | 52    | 64.03 | DINKES      |
| Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                                             | 10.44   | 4.69  | 4.69  | 43.86 | DINKES      |
| Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                                                | 59.24   | 28.3  | 79.8  | 62.73 | DINKES      |
| Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan                                       | 14.26   | 4.63  | 1.55  | 68.97 | DINKES      |
| Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan                                | 88.12   | 41.16 | 18    | 62.97 | DINKES      |
| Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan                                           | 78.97   | 82.22 | 82.4  | 91.09 | DINKES      |
| Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan                                       | 100     | 29.09 | 18.22 | 80.75 | DINKES      |
| Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya manusia Immunodeficie mendapatkan layanan | 13.69   | 25    | 27    | 58.74 | DINKES      |

Sumber : BPS Indragiri Hilir, 2023/Dinas Kesehatan Kab. Inhil

Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir jika dirata-ratakan hanya mencapai 70 persen, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kelengkapan data yang dikirim puskesmas tidak lengkap dan tidak tepat waktu
2. Data sasaran dengan data kunjungan masih belum sesuai
3. Perhitungan kebutuhan sesuai SPM untuk variable dan komponen banyak yang sulit terpenuhi



4. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua standar pelayanan minimal dapat terpenuhi
5. Kegiatan/program masih belum optimal dikarenakan adanya pandemic covid-19
6. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kefasilitas pelayanan kesehatan seperti melakukan skrining HIV dan masih banyak ditemukan pasien tuberculosis yang putus obat
7. Masih minimnya penyediaan barang/jasa misalnya alat-alat skrining dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat-obatan
8. Masih minimnya pengetahuan Puskesmas tentang kebutuhan SPM sehingga tidak semua kebutuhan SPM terpenuhi
9. pikiranKolaborasi Rumah Sakit dan Puskesmas Poned dan Ponek belum maksimal
10. Sumber Daya yang masih kurang dan pengelola program yang sering berganti

**a. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga kesehatan**

Pada tahun 2022, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 3 rumah sakit pemerintah dan 1 Rumah Sakit Swasta. Selama periode 2019–2022, jumlah rumah sakit tidak mengalami perubahan dan yang berubah adalah jumlah penduduk yang meningkat dengan rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Indragiri Hilir relatif tetap yaitu sebesar 0,006 yang berarti setiap 1 rumah sakit melayani sebanyak 219.341 orang penduduk Indragiri Hilir. Sementara untuk fasilitas Kesehatan lainnya diwakili oleh indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk. Selama periode 2019-2022 kinerja indikator ini juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sampai dengan tahun 2022 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk mencapai 0,14 persen. Meski telah memenuhi standar nasional dari sisi kuantitas, namun dari segi kualitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Kondisi puskesmas, peralatan dan obat-obatan belum mampu memenuhi standar sebuah puskesmas yang baik. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas harus menjadi agenda pembangunan ke depan.



Sumber Daya Kesehatan dapat dilihat melalui Indikator Rasio dokter per 1000 penduduk. Selama periode ini, rasio dokter per 1.000 penduduk memiliki tren berfluktuatif meningkat berkisar antara yaitu dari 0,14 sampai 0,20 Persen yang bermakna bahwa setiap 1 orang dokter melayani penduduk berkisar antara 15.593 20.972 penduduk. Kondisi rasio dokter Indragiri Hilir masih dibawah standar (15 dokter spesialis melayani 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis melayani 6.946 penduduk). Agar mencapai jumlah ideal, maka jumlah dokter di Indragiri Hilir sebanyak 52 orang dokter spesialis dari berbagai keahlian. Kondisi ini perlu menjadi target pada pembangunan kesehatan ke depan

**b. Status Gizi Masyarakat**

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. berdasarkan hasil survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 Angka Stunting diKabupaten Indragiri hilir berflutiatif meningkat. pada tahun 2018 angka stunting sebesar 27.70 persen menurun menjadi 24.40 persen pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 28.40 dan kembali meningkat menjadi 28.50 paada tahun 2022. berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan Kabupaten indragiri hilir dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah populasi balita, dan adanya temuan kasus stunting baru. Selain itu Faktor deteminan yg mempengaruhi adalah (1) Bayi ada yang tidak diberikan ASI eksklusif (2) Ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan ANC minimal 6 kali (2 kali USG) disebabkan belum semua Puskesmas memiliki USG (3) Ibu hamil diberi tablet tambah darah namun masih ada yg tidak meminum secara rutin (4) Masih ditemukan kasus diare karena air bersih, jamban sehat dan sanitasi.



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari menciptakan program inovasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting seperti “GERAKAN SATU HATI” (GSH) jilid I dan II dimulai dari gerakan seluruh TP. PKK Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Gerakan ini merupakan gerakan bersama dengan melibatkan seluruh ASN, Perbankan, Swasta, Perusahaan, LSM dan Organisasi untuk berdonasi yang akhirnya berhasil menurunkan prevalensi stunting, balita gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Indragiri Hilir.

### c. Sebaran Tenaga medis

Dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan rata-rata sudah terdapat minimal satu puskesmas. Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang memadai. Salah satu contohnya, dengan jumlah dokter sebanyak 139 orang dan jumlah penduduk Indragiri Hilir sebanyak 723.394 jiwa, berarti 1 (satu) dokter terbebani sekitar lima ribu penduduk. Beban ini masih terlalu besar sehingga jumlah dokter masih perlu ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Indragiri Hilir. Selain itu, jumlah penduduk juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan tenaga kesehatan juga akan terus meningkat.

Berikut Data terkait Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Indragiri Hilir, 2022

**Tabel II- 16**  
**Sebaran Tenaga Kesehatan di Indragiri Hilir tahun 2022**

|   |                     | DR    |    | DRG   |    | S2 KESEHATAN | s1 KESMAS | BIDAN | PERAWAT | KESLING | NUTRISIONIS | PENYULUH KESEHATAN | PRAMATA LABRES | PWT GIGI | FISIOTERAPI | ASSAPOTEKER | APOTEKER | PSIKOLOGI | RM | NON KES | JUMLAH |
|---|---------------------|-------|----|-------|----|--------------|-----------|-------|---------|---------|-------------|--------------------|----------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------|----|---------|--------|
|   |                     | AKTIF | TB | AKTIF | TB |              |           |       |         |         |             |                    |                |          |             |             |          |           |    |         |        |
|   | DINAS KESEHATAN     | 0     | 0  | 0     | 0  | 6            | 18        | 10    | 11      | 6       | 3           | 0                  | 0              | 2        |             | 1           | 1        | 0         |    | 17      | 75     |
| 1 | PKM TEMBILAHAN KOTA | 4     | 1  | 1     | 0  | 0            | 1         | 31    | 20      | 1       | 0           | 1                  | 3              | 2        |             | 2           | 0        |           | 1  | 0       | 68     |
| 2 | PKM GAJAH MADA      | 3     | 0  | 2     | 0  | 0            | 0         | 20    | 22      | 0       | 0           | 0                  | 0              | 1        |             | 3           | 0        |           |    | 0       | 51     |
| 3 | PKM TEMBILAHAN HULU | 3     | 0  | 1     | 0  | 0            | 1         | 21    | 29      | 0       | 2           | 1                  | 1              | 2        |             | 0           | 0        |           |    | 1       | 62     |
| 4 | PKM SUNGAI SALAK    | 1     | 0  | 1     | 0  | 0            | 0         | 9     | 21      | 0       | 0           | 1                  | 0              | 0        |             | 1           | 1        |           |    | 3       | 38     |
| 5 | PKM KEMPAS JAYA     | 0     | 0  | 1     | 0  | 0            | 2         | 18    | 15      | 1       | 1           | 1                  | 2              | 0        |             | 0           | 1        |           |    | 1       | 43     |
| 6 | PKM SAPAT           | 1     | 0  | 0     | 0  | 0            | 0         | 7     | 7       | 0       | 3           | 0                  | 1              | 0        |             | 0           | 0        |           |    | 0       | 19     |
| 7 | PKM CONCONG LUAR    | 1     | 0  | 1     | 0  | 0            | 1         | 6     | 7       | 0       | 0           | 1                  | 1              | 0        |             | 0           | 0        |           |    | 0       | 18     |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

|    |                               |    |   |    |   |   |    |     |     |    |    |    |    |    |  |   |    |    |   |   |    |     |
|----|-------------------------------|----|---|----|---|---|----|-----|-----|----|----|----|----|----|--|---|----|----|---|---|----|-----|
| 8  | PKM KUALA ENOK                | 1  | 0 | 0  | 0 | 0 | 2  | 6   | 5   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |  | 1 | 0  |    |   | 1 | 17 |     |
| 9  | PKM TANAH MERAH               | 1  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 5   | 7   | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  |  | 0 | 0  |    |   | 0 | 17 |     |
| 10 | PKM ENOK                      | 1  | 0 | 2  | 0 | 0 | 0  | 8   | 8   | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  |  | 0 | 1  |    |   | 1 | 24 |     |
| 11 | PKM PENGALIHAN ENOK           | 2  | 0 | 1  | 0 | 1 | 0  | 9   | 9   | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  |  | 1 | 0  |    |   | 0 | 25 |     |
| 12 | PKM TELUK PINANG              | 1  | 0 | 1  | 0 | 0 | 1  | 5   | 8   | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |  | 0 | 1  |    |   | 0 | 19 |     |
| 13 | PKM SUNGAI ILIRAN             | 0  | 0 | 1  | 0 | 0 | 2  | 2   | 2   | 0  | 1  | 1  | 2  | 0  |  | 1 | 0  |    |   | 0 | 12 |     |
| 14 | PKM SUNGAI PIRING             | 0  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 10  | 11  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  |  | 1 | 0  |    |   | 0 | 24 |     |
| 15 | PKM SUNGAIRAYA                | 1  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 11  | 7   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |  | 0 | 1  |    |   | 0 | 22 |     |
| 16 | PKM KUALA LAHANG              | 2  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 5   | 7   | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  |  | 1 | 1  |    |   | 0 | 19 |     |
| 17 | PKM SIMPANG GAUNG             | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 8   | 1   | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |  | 0 | 0  |    |   | 0 | 12 |     |
| 18 | PKM PULAU KIJANG              | 0  | 1 | 0  | 0 | 0 | 1  | 12  | 9   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |  | 0 | 1  |    |   | 1 | 30 |     |
| 19 | PKM BENTENG                   | 2  | 1 | 0  | 0 | 0 | 0  | 6   | 10  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  |  | 1 | 0  |    |   | 1 | 24 |     |
| 20 | PKM KOTA BARU                 | 0  | 0 | 1  | 0 | 0 | 1  | 14  | 13  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  |  | 1 | 1  |    |   | 1 | 35 |     |
| 21 | PKM P. KERITANG               | 2  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 8   | 12  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0  |  | 1 | 1  |    |   | 0 | 29 |     |
| 22 | PKM SELENSEN                  | 2  | 0 | 0  | 0 | 0 | 1  | 14  | 14  | 0  | 2  | 1  | 1  | 2  |  | 1 | 1  |    |   | 0 | 39 |     |
| 23 | PKM KERITANG HULU             | 2  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 1   | 3   | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |  | 0 | 0  |    |   | 0 | 8  |     |
| 24 | PKM MANDAH                    | 1  | 1 | 1  | 0 | 0 | 0  | 7   | 7   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |  | 3 | 0  |    |   | 0 | 21 |     |
| 25 | PKM BEKAWAN                   | 1  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 6   | 5   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |  | 1 | 0  |    |   | 0 | 15 |     |
| 26 | PKM BATANG TUMU               | 1  | 0 | 0  | 0 | 0 | 1  | 8   | 6   | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  |  | 1 | 0  |    |   | 0 | 19 |     |
| 27 | PKM SUNGAI GUNTUNG            | 1  | 0 | 2  | 0 | 0 | 2  | 9   | 14  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  |  | 2 | 0  |    |   | 0 | 34 |     |
| 28 | PKM PULAU BURUNG              | 1  | 0 | 0  | 0 | 0 | 2  | 11  | 11  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  |  | 0 | 0  |    |   | 0 | 27 |     |
| 29 | PKM PELANGIRAN                | 1  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 15  | 10  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |  | 1 | 0  | 0  |   | 0 | 31 |     |
| 30 | PKM TELUK BELENGKONG          | 1  | 0 | 1  | 0 | 0 | 0  | 10  | 6   | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |  | 0 | 0  |    |   | 0 | 20 |     |
| 31 | UPTD LAB KES                  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 2   | 1  | 0  | 0  | 6  | 0  |  | 0 | 0  |    |   | 0 | 9  |     |
| 32 | UPTO INSTALASI GUDANG FARMASI | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  | 1 | 2  |    |   | 2 | 6  |     |
|    | JUMLAH                        | 37 | 4 | 24 | 0 | 7 | 36 | 312 | 319 | 16 | 22 | 16 | 34 | 16 |  | 1 | 23 | 11 | 0 | 1 | 29 | 906 |

Sumber : Dinas Kesehatan kab. Indragiri Hilir

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II- 17**  
**Kinerja Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                                          | SATUAN | KINERJA |       |       |       | SUMBER |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                           |        | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |        |
| Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap                      | Persen | 57.84   | 54.13 | 55.10 | 56.00 | PUTR   |
| Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | Persen | 17.29   | 26.93 | 26.99 | 26.69 | PUTR   |

#### a. Jalan dan Jembatan

Panjang dan kualitas jalan Kabupaten berdasarkan Data Teknis Jalan (DD1) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah 1.190.594 Km.



Kondisi Baik untuk jalan Kabupaten berdasarkan data diatas adalah sebanyak 50,22%, Kondisi Sedang 21,41 dan Kondisi Rusak sebanyak 23,49%. Sementara itu hasil rekapitulasi berdasarkan DD1 untuk kondisi mantap jalan sebesar 55,10% dan Kondisi Tidak Mantap Jalan sebesar 44,90%.

Berdasarkan data Teknik Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten (DD2) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, Total Panjang jembatan adalah 17.125,3 M dengan jumlah jembatan sebanyak 680 unit. Dengan kondisi sebagai berikut :

**Tabel II- 18**  
**Panjang dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2022**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Jumlah Jembatan  | 680 unit       |
| Panjang Jembatan | 17.125,3 meter |
| NK 1             | 282 unit       |
| NK 2             | 88 unit        |
| NK 3             | 127 unit       |
| NK 4             | 168 unit       |
| NK 5             | 15 unit        |

*Sumber : Dinas PUTR kab. Inhil*

Berdasarkan data diatas maka Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah 56.00 Persen. Terjadi penurunan dari 57.84 pada tahun 2019 kemudian meningkat Kembali menjadi 54.13 Persen tahun 2020 dan 55.10 persen pada tahun 2021. Terdapat peningkatan sebesar 1.87 Persen dari tahun 2021 ke Tahun 2022.

Ruas jalan mendukung sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Ruas jalan Pulau Kijang- Sanglar (Ruas 6) dan Ruas jalan Sanglar - Kota Baru (Ruas 7). panjang Ruas jalan Pulau Kijang-Sanglar 21.5 KM 32.62 persen dalam kondisi mantap (Baik + sedang) sementara 67.38 Persen dalam kondisi tidak mantap (rusak sedang + rusak berat) , Ruas jalan Sanglar- Kota baru dengan panjang 19 KM, Kondisi mantap (baik+sedang) 58.59 sementara kondisi tidak mantap (Rusak Ringan + Rusak Berat) 41.41 Persen.



Sementara Ruas jalan mendukung sektor pariwisata adalah ruas jalan Tembilahan-Trusan Mas(Ruas 23) dan Ruas jalan Terusan Mas-Sapat (Ruas 22). Panjang Total ruas jalan Tembilahan-Trusan Mas adalah 6.9 KM dengan kondisi jalan mantap 8.7 persen sementara Kondisi tidak mantap sebesar 91.3 Persen. Untuk Ruas jalan Terusan Mas-Sapat dengan panjang total 1.5 KM kondisi jalan mantap 13.3 Persen dan Kondisi tidak mantap 86.67 Persen.

Untuk ruas jalan yang mendukung Perindustrian dan Perdagangan merupakan kewenangan Provinsi yaitu Ruas jalan Tembilahan - simpang kuala saka - mandah dengan total panjang jalan 92.13, Jalan Kondisi mantap sebesar 23.15 persen sementara kondisi tidak mantap 76.85 Persen. Kemudian Ruas jalan Simpang Kuala saka - Teluk Lanjut - Sungai guntung - sebekek dengan total panjang jalan 82.02 KM. Kondisi jalan mantap 6.04 persen sementara tidak mantap 93.96 persen.

Tingginya persentase jalan tidak mantap ini disebabkan oleh Struktur tanah di Kab. Inhil yang pada umumnya gambut memerlukan konstruksi khusus/ kompleks sehingga membutuhkan biaya yang besar.

b. Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah dan air permukaan. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang salah satunya adalah irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Sebagai suatu sistem pengaliran Sistem Irigasi menganggap irigasi terdiri atas lima (5) pilar irigasi yaitu: (i)



ketersediaan air; (ii) infrastruktur; (iii) pengelolaan irigasi; (iv) institusi irigasi; dan (v) manusia pelaku

Sesuai Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai Total luas Daerah irigasi Kabupaten indragiri hilir adalah 16.722 H. DIR dalam kondisi baik seluas 876 Ha atau hanya sebesar 5.23 Persen dari total luar DIR Kab. Indragiri Hilir yang terletak di Sialang Panjang.

c. Air Minum dan Sanitasi

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Di Indragiri Hilir, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten / kota selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat, namun tidak signifikan. Pada tahun 2019 sebesar 17.29 persen dan sampai dengan tahun 2022 sebesar 26.69 persen. Penyebab Rendahnya capaian ini adalah Belum meratanya penyebaran SPAM dan jaringan perpipaan pada satuan permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir serta kinerja PDAM yang dalam kondisi salit. Hal ini hendaknya agar menjadi fokus pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Sementara untuk Sanitasi terkait dengan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat. Di Kabupaten Indragiri Hilir Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan



pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 baru mencapai 35 persen. Kondisi ini masih jauh dari dikatakan layak untuk layanan sanitasi sesuai dengan target RPJMN yaitu 90 layak dan 15 Persen aman.

d. **Penataan Ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Indragiri Hilir belum dapat maksimal hal ini terkendala belum ditetapkannya Ranperda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir, terkait pengajuan perizinan Pemanfaatan ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi persyaratan dasar dalam perizinan berusaha maupun non berusaha menggunakan persetujuan KKPR berusahaan/non berusaha oleh Forum Penataan Ruang dengan proses penilaian KKPR sebelum diterbitkannya dokumen Persetujuan KKPR mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi. Adapun jumlah KKPR Berusaha/Non Berusaha yang sudah diterbitkan dengan persetujuan KKPR per 31 Desember 2022 berjumlah 39 KKPR.

**2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perumahan yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

**a. Perumahan Rakyat**

Rumah layak huni adalah didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Selama periode 2019 – 2022, Rasio rumah layak huni di Indragiri Indragiri Hilir



terdapat peningkatan . Pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 89.72 persen selanjutnya meningkat pada tahun 2021 menjadi 89.87 persen dan tahun 2022 sebesar 89.88 persen, Artinya masih ada sekitar 10.12 Persen masyarakat Indragiri Hilir yang tidak memiliki rumah layak.

Selama Periode 2019-2022 telah terbangun 281 Unit Rumah Layak Huni. Pada tahun 2019 dan 2020 belum ada terbangun sementara tahun 2021 sebanyak 250 unit dan tahun 2022 sebanyak 31 Unit. Dari Total Rumah yang terdata Di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 204.201 unit, sebanyak 186.989 unit rumah dinyatakan layak huni sementara sebanyak 17.212 unit rumah dinyatakan tidak layak huni. Dari data dimaksud Cakupan ketersediaan rumah layak huni Di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 91.57 Persen, artinya tersisa 8.43 Persen ketersediaan rumah tidak layak huni.

#### **b. Kawasan Permukiman**

Berdasarkan SK kawasan Kumuh Nomor KPTS.133/II/HK-2017 , Luas Kawasan kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 176.26 Ha. Selama periode 2019–2022, Rasio permukiman layak huni di Indragiri Hilir terus meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 99.37 persen dan terus meningkat sampai dengan tahun 2022 sebesar 99.40

Berdasarkan Pendataan RP2KPKPK Tahun 2021, Lokasi Kawasan kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir tersebar di 12 kawasan dengan total luas Kawasan kumuh 216,91 Ha dengan rata-rata tingkat kekumuhan sedang. Sampai dengan tahun 2022 pencapaian pengurangan Kawasan kumuh adalah 9.08 Ha atau 4.18 Persen dari total Kawasan kumuh. Masih tersisa sebanyak 207,83 kawasan kumuh yang belum tertangani. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel II- 19**  
**Capaian Pengurangan Kumuh Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Sampai dengan 2022**

| No     | Kawasan          | Kecamatan        | Kelurahan              | Total Luas Kumuh (Ha) | Capaian Pengurangan Kumuh (Ha) Tahun 2022 | Sisa Luasan Kumuh (Ha) |
|--------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1      | Tembilahan Kota  | Tembilahan       | Tembilahan Kota        | 9,05                  | 6,09                                      | 2,96                   |
| 2      | Tembilahan Hilir | Tembilahan       | Tembilahan Hilir       | 39,39                 | 2,99                                      | 36,4                   |
| 3      | Tembilahan Hulu  | Tembilahan Hulu  | Tembilahan Hulu        | 18,19                 | 0                                         | 18,19                  |
| 4      | Kuala Enok       | Tanah Merah      | Kuala Enok Tanah Merah | 11,88                 | 0                                         | 11,88                  |
| 5      | Pulau Burung     | Pulau Burung     | Pulau Burung           | 2,33                  | 0                                         | 2,33                   |
| 6      | Sungai Guntung   | Kateman          | Taga Raja              | 22,82                 | 0                                         | 22,82                  |
| 7      | Pulau Kijang     | Reteh            | Pulau Kijang           | 15,96                 | 0                                         | 15,96                  |
| 8      | Khairiah Mandah  | Mandah           | Khairiah Mandah        | 5,29                  | 0                                         | 5,29                   |
| 9      | Kotabaru         | Keritang         | Kotabaru               | 18,49                 | 0                                         | 18,49                  |
| 10     | Teluk Pinang     | Gaung Anak Serka | Teluk Pinang           | 25,44                 | 0                                         | 25,44                  |
| 11     | Sungai Salak     | Tempuling        | Sungai Salak           | 32,31                 | 0                                         | 32,31                  |
| 12     | Kempas Jaya      | Kempas           | Kempas Jaya            | 15,76                 | 0                                         | 15,76                  |
| Jumlah |                  |                  |                        | 216,91                | 9,08                                      | 207,83                 |

Sumber : Dinas Perkim Kab. Indragiri Hilir

### c. Prasarana Sarana Utilitas

Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman. Penyediaan PSU mencakup pembangunan jalan lingkungan, penyediaan Drainase Perumahan, Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah dan penyediaan Sanitasi Perumahan. Pelaksanaan bantuan PSU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Lingkungan perumahan di Kabupaen Indragiri Hilir mengalami penurunan. Di tahun 2020 sebesar 5.18 persen, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4.50 persen.

Secara garis besar Bidang PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan



dan Permukiman. Bidang PSU Di samping pembangunan jalan lingkungan, bantuan PSU juga dapat mencakup penyediaan Drainase Perumahan, Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah dan penyediaan Sanitasi Perumahan. Berikut rekapitulasi Pencapaian kinerja urusan perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022

**Tabel II- 20**  
**Kinerja Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                                | SATUAN | KINERJA |       |       |       | SUMBER |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                 |        | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |        |
| Rasio rumah layak huni                                          | Persen | 89.72   | 89.72 | 89.87 | 89.88 | PERKIM |
| Rasio permukiman layak huni                                     | Persen | 99.37   | 99.37 | 99.37 | 99.40 | PERKIM |
| Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | Persen | N/A     | 5.18  | 5.18  | 4.50  | PERKIM |

Sumber : Dinas Perkim Kab. Indragiri Hilir

#### 2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbit dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non kebakaran Kabupaten/kota, Persentase Penegakan PERDA serta dilengkapi dengan capaian indikator standar pelayanan minimal pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pencapaian kinerja urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II- 21**  
**Kinerja Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan**  
**Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                                         | KINERJA |      |      |      | SUMBER    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-----------|
|                                                                          | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 |           |
| Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 100     | 100  | 100  | 100  | SATPOL PP |
| Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non kebakaran Kabupaten/kota     | 100     | 100  | 100  | 100  | SATPOL PP |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| URAIAN INDIKATOR                                                                                         | KINERJA |        |        |       | SUMBER       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------------|
|                                                                                                          | 2019    | 2020   | 2021   | 2022  |              |
| Persentase Penegakan PERDA                                                                               | 100     | 100    | 100    | 100   | SATPOL<br>PP |
| <b>Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat :</b>  |         |        |        |       |              |
| Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota | 0       | 0      | 0      | 0     | SATPOL<br>PP |
| Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                      | 123388  | 275590 | 163597 | 95540 | BPBD         |
| Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                | 109495  | 142382 | 148779 | 85946 | BPBD         |
| Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                     | -       | -      | -      | 201   | BPBD         |
| Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                   | 100.00  | 100    | 100    | 100   | DPKP         |

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019-2022 dapat dikatakan berhasil dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbit dan aman tercapai. Namun

#### 2.3.1.6. Sosial

Kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan pembangunan Indragiri Hilir dengan analisis pembangunan selama ini sebagai berikut:

##### a. Penerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terus meningkat yaitu dari 90 persen pada tahun 2017 menjadi 100 persen pada tahun 2018. Indikator ini ditetapkan agar menjamin indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta



lanjut usia yang tidak potensial di Kabupaten Indragiri Hilir menerima jaminan sosial.

Selama periode 2017-2021, realisasi capaian indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017– 2019, realisasi kinerja indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial berkisar antara 90,00 persen -100 persen yang terkategori Tinggi – Sangat Tinggi.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja indikator ini sebesar 93,55 persen dan terkategori Sangat Tinggi. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan dengan realisasi kinerja 77,34 persen lalu mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dengan realisasi kinerja 100 persen dengan kategori sangat tinggi, Meski capaian kinerja telah Sangat tinggi, namun upaya terus mempertahankan kinerja harus terus dilakukan agar penyandang cacat mendapat perlindungan sosial.

#### **b. PPKS yang Menerima Bantuan Sosial**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator PPKS yang menerima bantuan sosial terus meningkat yaitu dari 60 persen pada tahun 2016 menjadi 100 persen pada tahun 2018. Indikator ini ditetapkan dan dimasukkan dalam RPJMD untuk menjamin agar PPKS yang ada di Indragiri Hilir mendapat pembinaan dan bantuan sosial.

Selama periode 2017-2021, realisasi capaian indikator di Indragiri Hilir hampir sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2017-2019, realisasi kinerja indikator ini sebesar 80 –



82,50 persen yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2020 realisasi indikator sebesar 100 persen namun karena target meningkat sehingga realisasi kinerja meningkat menjadi 111,11 persen dan terkategori sangat Tinggi. dan di tahun 2021 realisasi PPKS penerima Bantuan sosial menurun menjadi 96 persen dikarenakan target juga meningkat, Capaian indikator PPKS penerima bantuan sosial yang tinggi selama periode 2017-2021 perlu terus dipertahankan pada periode berikutnya.

Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa DTKS merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum dari hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi:

- 1) Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan anak terlantar.
- 2) Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat - program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako).
- 3) Potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Dalam pengelolaan DTKS dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang terintegrasi. SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan , penyajian dan penyimpanan DTKS dengan memanfaatkan



teknologi informasi komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Data DTKS Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan perbaikan (Update) setiap bulan dengan memasukan ke SIKS-NG Kemensos melalui akun Supervisor Kabupaten.

**Tabel II.22**  
**Rekapitulasi DTKS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022**

| No            | Tanggal SK       | Nomor SK     | Jumlah Individu  | Jumlah Keluarga  |
|---------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1             | 10 Januari 2022  | 2/HUK/2022   | 335.541          | 119.557          |
| 2             | 25 Januari 2022  | 10/HUK/2022  | 335.545          | 119.557          |
| 3             | 10 Februari 2022 | 21/HUK/2022  | 335.074          | 119.307          |
| 4             | 25 Februari 2022 | 29/HUK/2022  | 334.632          | 116.065          |
| 5             | 10 Maret 2022    | 41/HUK/2022  | 334.606          | 116.054          |
| 6             | 21 Maret 2022    | 46/HUK/2022  | 334.606          | 116.054          |
| 7             | 04 April 2022    | 52/HUK/2022  | 334.550          | 116.007          |
| 8             | 9 Mei 2022       | 81/HUK/2022  | 340.162          | 117.791          |
| 9             | 6 Juni 2022      | 110/HUK/2022 | 346.034          | 119.393          |
| <b>JUMLAH</b> |                  |              | <b>3.030.750</b> | <b>1.059.785</b> |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Inhil

Terkait Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Karena permasalahan keterpencilan dan kemiskinan, maka KAT sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu penanganan khusus agar dapat hidup setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tersebar di beberapa Kecamatan, yakni Kecamatan Reteh, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kateman, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Concong dan Kecamatan Kemuning. Kehidupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sangat tergantung pada sumber daya alam, terutama hutan, sungai dan laut yang sebagian besar merupakan daerah perairan di Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi Suku KAT di Kabupaten Indragiri Hilir tersebar pada beberapa desa/kelurahan, mereka pada umumnya hidup dipinggir pantai dengan mata



pencaharian sebagai nelayan sedangkan yang di daratan dengan mata pencaharian bertani untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Demografis Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Indragiri Hilir ini terdapat di 7 (tujuh) Kecamatan dan tersebar di 12 (dua belas) Desa/Kelurahan, kehidupan mereka tergatung sekali pada sumber daya alam sekitarnya. Terutama sekali pada hutan, sungai dan laut yang sebagian besar merupakan daerah perairan di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun jumlah masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdapat di 7 (tujuh) Kecamatan dan tersebar di 12 (dua belas) Desa/Kelurahan.

Mata pencaharian utama masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Duano di Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar sebagai Nelayan disamping itu ada juga sebagai buruh, pedagang, wiraswasta dan kebanyakan memiliki mata pencaharian lainnya, sedangkan masyarakat Suku Kubu umumnya bertani untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

### **2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.2.1 Ketenaga Kerjaan**

##### **a. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu daerah terdapat TPT yang tinggi, maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. TPT di Indragiri Hilir pada tahun 2019 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya (2019 sebesar 4,76 persen; 2020 sebesar 4,35 persen; 2021 sebesar 2,66 persen), meski sempat naik pada tahun 2019. TPT pada tahun 2022 adalah sebesar 1,50 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi, sekitar 2 orang adalah pengangguran, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2021;3 orang).



**b. Tingkat Kesempatan Kerja**

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir mencatat, tingkat kesempatan kerja sebesar 98.50 % pada tahun 2022. Angkanya naik dari tahun sebelumnya yakni 95.45% Tahun 2019, 95.65% tahun 2020 dan 97.34% tahun 2021.

**c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Angka ini untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlihat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.

Pada periode 2019-2022, terjadi kenaikan TPAK Indragiri Hilir pada tahun 2019 hingga 2021, namun kembali merangsek turun pada tahun 2022. Pada tahun 2022, terjadi penurunan 4,59 poin atau sebesar 7 persen dibandingkan tahun 2021. TPAK Indragiri Hilir pada tahun 2022 sebesar 63,97 artinya dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 64 orang tersedia melakukan aktivitas ekonomi, dengan kata lain 63,97 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sisanya 36,03 persen bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).

Rangkuman pencapaian kinerja urusan Ketenaga kerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel II- 23**  
**Kinerja Indikator Urusan Ketenaga kerjaan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                          | KINERJA |       |       |       | SUMBER |
|-------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                                           | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |        |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 64.44   | 69.17 | 68.56 | 63.97 | BPS    |
| Tingkat Kesempatan Kerja                  | 95.45   | 95.65 | 97.34 | 98.50 | BPS    |
| Tingkat Pengangguran Terbuka              | 4.55    | 4.35  | 2.66  | 1.50  | BPS    |

#### **2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pelibatan perempuan dalam berbagai aktivitas telah menjadi bagian komitmen dari berbagai organisasi dunia. Salah satu konferensi perempuan yang diselenggarakan UNDP di Beijing menghasilkan kesepakatan bahwa pemberdayaan perempuan dan partisipasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pengambilan keputusan dan akses terhadap kekuasaan merupakan dasar bagi kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian di dunia (UN, 1995). Selanjutnya, pengarusutamaan gender menjadi salah satu agenda penting dalam setiap penentuan kebijakan. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa pemberdayaan gender bukan sesuatu hal yang bisa datang dengan sendirinya tanpa campur tangan eksternal (inisiatif khusus). Oleh sebab itu, program pemerintah perlu disusun untuk menciptakan kondisi bahwa perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi agen dalam pembangunan.

##### **a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks yang dirancang untuk mengukur kesetaraan gender. IDG adalah salah satu usaha UNDP untuk mengukur ketidaksetaraan gender antar negara, menggunakan ukuran estimasi pendapatan relatif wanita, partisipasi di posisi ekonomi dengan bayaran tinggi, dan akses ke posisi parlemen dan profesional. Indeks ini diperkenalkan bersamaan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), tapi mencakup topik- topik seperti pemberdayaan yang tidak tercakup dalam IPG.

Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2021 mengalami peningkatan 0,5 poin dibandingkan tahun 2020 yakni dari 64.45 poin tahun 2020 menjadi 64.50 poin pada tahun 2021, sementara data



tahun 2022 belum rilis. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan ketimpangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2021.

**b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. IPG Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan trend positif, dimana tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dari 82.57 meningkat menjadi 82.74. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun tahun empat tahun terakhir tersebut menunjukkan kondisi yang stabil.

**c. Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)**

Tujuan KLA ini secara umum untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA). Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir sendiri pada Tahun 2019 sampai Tahun 2021 masih mendapatkan Predikat Pratama. Namun pada tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir berhasil meningkatkan Komitmennya dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dengan sukses meraih predikat Madya( naik satu tingkat dari Pratama) dalam Evaluasi Kabupaten/Kota layak anak yang dilaksanakan oleh KPPPA/ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI

**d. Rasio KDRT**

KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap



keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga (UU PKDRT). Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban yang justru sebaliknya. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutupi.

Rasio KDRT di Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong kecil. Pada tahun 2019 sebesar 0.027 Persen menurun menjadi 0.091 Persen pada tahun 2021. KDRT di Kabupaten disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan, dan kebiasaan minuman keras. Perlu dilakukan edukasi pada pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan untuk mencegah tindakan kekerasan yang berujung perceraian.

**Tabel II- 24**  
**Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                   | KINERJA |         |         |       | SUMBER   |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
|                                                    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022  |          |
| Indeks Pembangunan Gender (IPG)                    | 82.57   | 82.34   | 82.37   | 82.74 | BPS      |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                   | 64.83   | 64.45   | 64.50   | n/a   | BPS      |
| Implementasi Pencapaian Kabupaten layak Anak (KLA) | Pratama | Pratama | Pratama | Madya | DP2KBP3A |
| Rasio KDRT                                         | 0.027   | 0.037   | 0.091   | n/a   | DP2KBP3A |

### 2.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Penyediaan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022 sebagaimana dijabarkan pada Tabel di bawah ini :



**Tabel II- 25**  
**Kinerja Indikator Urusan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                           | KINERJA   |           |           |           | SUMBER |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                            | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |        |
| Ketersediaan Pangan Utama (%)                              | 109.00    | 103.90    | 104.20    | 101.10    | DPTPHP |
| Produksi Beras (Ton)                                       | 45.36,39  | 49.008,18 | 46.651,57 | 42.777,94 | DPTPHP |
| Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)                       | 86.564,02 | 84.276,70 | 89.908,06 | 81.470,30 | DPTPHP |
| Jumlah Produksi Ternak (ton)                               | 475       | 487.99    | 512.33    | 519.1     | DPTPHP |
| Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                             | 85.9      | 86.06     | 86.22     | 86.38     | DPTPHP |
| Ketersediaan<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)<br>Konsumsi | 84.2      | 84.8      | 85.5      | 85.7      | DPTPHP |

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (Urban Farming atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **2.3.2.4. Lingkungan Hidup**

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut.

##### **a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indragiri Hilir dianalisis pada capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Dari ketiga indeks tersebut



terjadi peningkatan pada IKU dan IKA sementara pada IKTL terlihat bahwa terjadi penurunan berfluktuatif. Perlu adanya upaya meminimalisir potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian serta aksi mitigasi yang dilakukan tidak hanya terhadap aktivitas ekonomi dari pelaku usaha akan tetapi juga domestic yang juga berkontribusi terhadap pencemaran air. Berikut data pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup.

**Tabel II- 26**  
**Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                 | KINERJA |       |       |       | SUMBER |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|
|                                  | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |        |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 53.04   | 57.79 | 64.79 | 67.66 | DLHK   |
| Indeks Kualitas Udara            | 52.22   | 92.15 | 88.63 | 90.61 | DLHK   |
| Indeks Kualitas Air              | 24.69   | 32.86 | 50.00 | 53.78 | DLHK   |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan    | 92.91   | 50.72 | 46.11 | 49.05 | DLHK   |

#### 2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakankebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tahun 2022, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 486.707 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 480.817 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP el- sebesar 98.79 Persen

Berikut data Wajib KTP , Memiliki KTP, dan Persentase Tahun 2019-2022

**Tabel II- 27**  
**Wajib KTP , Memiliki KTP, dan Persentase Tahun 2019-2022**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**

| NAMA_KEC | 2019   |        |       | 2020   |        |       | 2021   |        |       | 2022   |        |       |
|----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
|          | WKTP   | REKAM  | %     | WKTP   | REKAM  | %     | WKTP   | REKAM  | %     | WKTP   | REKAM  | %     |
| RETEH    | 25,348 | 24,998 | 98.62 | 26,010 | 25,714 | 98.86 | 27,100 | 26,852 | 99.08 | 27,495 | 27,157 | 98.77 |
| ENOK     | 24,533 | 24,253 | 98.86 | 24,962 | 24,779 | 99.27 | 25,699 | 25,577 | 99.53 | 26,225 | 25,957 | 98.98 |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NAMA_KEC         | 2019           |                |              | 2020           |                |              | 2021           |                |              | 2022                      |                           |              |
|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|                  | WKTP           | REKAM          | %            | WKTP           | REKAM          | %            | WKTP           | REKAM          | %            | WKTP                      | REKAM                     | %            |
| KUALA INDRAGIRI  | 9,753          | 9,476          | 97.16        | 10,201         | 10,003         | 98.06        | 10,829         | 10,694         | 98.75        | 11,204                    | 11,066                    | 98.77        |
| TEMBILAHAN       | 53,123         | 52,574         | 98.97        | 54,715         | 54,233         | 99.12        | 56,212         | 55,892         | 99.43        | 57,602                    | 56,946                    | 98.86        |
| TEMPULING        | 22,124         | 21,870         | 98.85        | 22,699         | 22,502         | 99.13        | 23,702         | 23,570         | 99.44        | 24,436                    | 24,144                    | 98.81        |
| GAUNG ANAK SERKA | 15,902         | 15,745         | 99.01        | 16,046         | 15,942         | 99.35        | 16,505         | 16,429         | 99.54        | 16,898                    | 16,713                    | 98.91        |
| MANDAH           | 23,741         | 23,474         | 98.88        | 25,170         | 24,917         | 98.99        | 26,986         | 26,812         | 99.36        | 27,851                    | 27,523                    | 98.82        |
| KATEMAN          | 24,874         | 24,410         | 98.13        | 26,422         | 26,039         | 98.55        | 28,189         | 27,844         | 98.78        | 29,362                    | 29,028                    | 98.86        |
| KERITANG         | 42,130         | 41,343         | 98.13        | 43,906         | 43,286         | 98.59        | 45,386         | 44,884         | 98.89        | 46,974                    | 46,357                    | 98.69        |
| TANAH MERAH      | 17,776         | 17,544         | 98.69        | 18,114         | 17,946         | 99.07        | 18,774         | 18,648         | 99.33        | 19,278                    | 19,039                    | 98.76        |
| BATANG TUAKA     | 18,312         | 18,161         | 99.18        | 18,688         | 18,556         | 99.29        | 19,725         | 19,640         | 99.57        | 20,472                    | 20,205                    | 98.70        |
| GAUNG            | 25,179         | 24,804         | 98.51        | 26,261         | 25,968         | 98.88        | 28,076         | 27,843         | 99.17        | 29,107                    | 28,699                    | 98.60        |
| TEMBILAHAN HULU  | 31,775         | 31,481         | 99.07        | 32,959         | 32,689         | 99.18        | 34,172         | 34,006         | 99.51        | 35,029                    | 34,614                    | 98.82        |
| KEMUNING         | 23,026         | 21,850         | 94.89        | 24,998         | 24,165         | 96.67        | 26,054         | 25,321         | 97.19        | 27,589                    | 27,250                    | 98.77        |
| PELANGIRAN       | 19,075         | 18,771         | 98.41        | 20,056         | 19,830         | 98.87        | 20,916         | 20,717         | 99.05        | 21,754                    | 21,424                    | 98.48        |
| TELUK BELENGKONG | 5,923          | 5,792          | 97.79        | 6,112          | 6,040          | 98.82        | 6,418          | 6,344          | 98.85        | 6,599                     | 6,523                     | 98.85        |
| PULAU BURUNG     | 12,541         | 12,225         | 97.48        | 13,084         | 12,906         | 98.64        | 13,745         | 13,541         | 98.52        | 14,140                    | 13,991                    | 98.95        |
| CONCONG          | 8,012          | 7,906          | 98.68        | 8,003          | 7,926          | 99.04        | 8,487          | 8,425          | 99.27        | 8,631                     | 8,531                     | 98.84        |
| KEMPAS           | 25,824         | 25,425         | 98.45        | 26,699         | 26,424         | 98.97        | 27,442         | 27,226         | 99.21        | 28,284                    | 27,945                    | 98.80        |
| SUNGAI BATANG    | 7,400          | 7,312          | 98.81        | 7,280          | 7,227          | 99.27        | 7,588          | 7,531          | 99.25        | 7,777                     | 7,705                     | 99.07        |
| <b>JUMLAH</b>    | <b>436,371</b> | <b>429,414</b> | <b>98.41</b> | <b>452,385</b> | <b>447,092</b> | <b>98.83</b> | <b>472,005</b> | <b>467,796</b> | <b>99.11</b> | <b>48,670</b><br><b>7</b> | <b>48,081</b><br><b>7</b> | <b>98.79</b> |

Sumber : Dukcapil Indragiri Hilir

### 2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Kebijakan arah pembangunan ini dilandasi pemikiran bahwa pemberdayaan masyarakat perdesaan dan wilayah perdesaan akan mengurangi kemiskinan struktural masyarakat/wilayah perdesaan sehingga dapat menekan laju urbanisasi yang potensial menimbulkan permasalahan sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi dan Ketahanan Lingkungan agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Muara pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Kinerja IDM Kabupaten Indragiri Hilir terdapat peningkatan dari tahun 2019 dengan kategori Tertinggal meningkat menjadi berkembang pada tahun 2022 pada tingkat Kabupaten/Kota.



Berikut kondisi pembangunan desa yang diwakili ioleh indikator Indeks Desa membangun beserta variable pembentuknya.

**Tabel II- 28**  
**Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                  | KINERJA             |                     |                     |                     | SUMBER   |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
|                                   | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |          |
| Indeks Desa Membangun (IDM)       | Tertinggal (0.5822) | Berkembang (0.6071) | Berkembang (0.6198) | Berkembang (0.6535) | KEMENDES |
| Indeks Ketahanan Sosial (IKS)     | 0.69                | 0.71                | 0.73                | 0.76                | KEMENDES |
| Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)    | 0.45                | 0.49                | 0.50                | 0.55                | KEMENDES |
| Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) | 0.61                | 0.62                | 0.63                | 0.65                | KEMENDES |
| Persentase Bumdes Aktif           | 21.83               | 96.45               | 100.00              | 97.46               | DPMD     |

### 2.3.2.7. Kominikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran penyelenggara pemerintahan diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi.

Indeks SPBE merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan tujuan (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, (2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan (3) Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Dalam pelaksanaannya, Indragiri Hilir baru dinilai pengimplementasian SPBE tahun 2021 dengan nilai 2.24 dan tahun



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

2022 dengan nilai 2.13. Terdapat penurunan nilai SPBE, hal ini disebabkan penilaian tahun 2021 masih bersifat mandiri sementara tahun 2022 telah dinilai oleh kemenpan rb. Pencapaian ini masih belum optimal, Pembangunan SPBE Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan arsitektur pembangunan SPBE nasional, Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang belum mencapai nilai 3 dengan Kategori baik.

Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir sampai tahun 2022 telah melakukan pengelolaan terkait domain dalam rangka pengelolaan website. Terdapat 54 webside yang dikelola sampai tahun 2022 dengan system pengamanan SSL, dari kelseluruhan webside terdapat 40 website yang aktif.berikut data Website OPD menurut Jenis Pengamanan Yang Di Gunakan Di Lingkungan Pemda Kab.Inhil Tahun 2022

**Tabel II- 29**  
**Website OPD menurut Jenis Pengamanan Yang Di Gunakan Di**  
**Lingkungan Pemda Kab.Inhil Tahun 2022**

| NO | OPD                                                                                               | NAMA WEBSITE                 | JENIS PENGAMANAN | HASIL ANALISA DAN MONITORING APLIKASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1  | Sekretariat Daerah                                                                                | setda.inhilkab.go.id         | SSL              | Aktif                                 |
| 2  | Sekretariat DPRD                                                                                  | dprd.inhilkab.go.id          | SSL              | Aktif                                 |
| 3  | Inspektorat Daerah                                                                                | inspektorat.inhilkab.go.id   | SSL              | Aktif                                 |
| 4  | Dinas Pendidikan                                                                                  | disdik.inhilkab.go.id        | SSL              | Aktif                                 |
| 5  | Dinas Kesehatan                                                                                   | dinkes.inhilkab.go.id        | SSL              | Aktif                                 |
| 6  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                                                               | dpuatr.inhilkab.go.id        | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 7  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                            | disperkim.inhilkab.go.id     | SSL              | Aktif                                 |
| 8  | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                        | satpolpp.inhilkab.go.id      | SSL              | Aktif                                 |
| 9  | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                                                          | disdamkar.inhilkab.go.id     | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 10 | Dinas Sosial                                                                                      | dinsos.inhilkab.go.id        | SSL              | Aktif                                 |
| 11 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi                                                            | disnakertians.inhilkab.go.id | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | dppkb.inhilkab.go.id         | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan                                                             | dilhik.inhilkab.go.id        | SSL              | Aktif                                 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                           | disdukcapil.inhilkab.go.id   | SSL              | Aktif                                 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                            | dpmd.inhilkab.go.id          | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 16 | Dinas Perhubungan                                                                                 | dishub.inhilkab.go.id        | SSL              | Aktif                                 |
| 17 | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik                                            | diskominfops.inhilkab.go.id  | SSL              | Aktif                                 |
| 18 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                                                       | diskopumkm.inhilkab.go.id    | SSL              | Aktif                                 |
| 19 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                    | dpmpptsp.inhilkab.go.id      | SSL              | Aktif                                 |
| 20 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan                                             | disporabudpar.inhilkab.go.id | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                                                               | dpad.inhilkab.go.id          | SSL              | Tidak Aktif                           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | OPD                                                         | NAMA WEBSITE                    | JENIS PENGAMANAN | HASIL ANALISA DAN MONITORING APLIKASI |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 22 | Dinas Perikanan                                             | diskan.inhilkab.go.id           | SSL              | Aktif                                 |
| 23 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Pertenakan | dptphp.inhilkab.go.id           | SSL              | Aktif                                 |
| 24 | Dinas Perkebunan                                            | disbun.inhilkab.go.id           | SSL              | Aktif                                 |
| 25 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                         | disperindag.inhilkab.go.id      | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                        | bappeda.inhilkab.go.id          | SSL              | Aktif                                 |
| 27 | Badan Keuangan dan Aset Daerah                              | bpkad.inhilkab.go.id            | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah                                     | bapenda.inhilkab.go.id          | SSL              | Aktif                                 |
| 29 | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia       | bkspsdm.inhilkab.go.id          | SSL              | Aktif                                 |
| 30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                           | bakesbangpol.inhilkab.go.id     | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 31 | Badan penanggulangan Bencana Daerah                         | bpbd.inhilkab.go.id             | SSL              | Aktif                                 |
| 32 | Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan                          | rsudpurihusada.inhilkab.go.id   | SSL              | Aktif                                 |
| 33 | Rumah Sakit Tengku Sulung Pulau Kijang                      | rsudtengkusulung.inhilkab.go.id | SSL              | Aktif                                 |
| 34 | Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung                        | rsudrajamusa.inhilkab.go.id     | SSL              | Aktif                                 |
| 35 | Kecamatan Tembilahan                                        | tembilahan.inhilkab.go.id       | SSL              | Aktif                                 |
| 36 | Kecamatan Tembilahan Hulu                                   | tembilahanhulu.inhilkab.go.id   | SSL              | Aktif                                 |
| 37 | Kecamatan Tempuling                                         | tempuling.inhilkab.go.id        | SSL              | Aktif                                 |
| 38 | Kecamatan Batang Tuaka                                      | batangtuaka.inhilkab.go.id      | SSL              | Aktif                                 |
| 39 | Kecamatan Concong                                           | concong.inhilkab.go.id          | SSL              | Aktif                                 |
| 40 | Kecamatan Enok                                              | enok.inhilkab.go.id             | SSL              | Aktif                                 |
| 41 | Kecamatan Gaung                                             | gaung.inhilkab.go.id            | SSL              | Aktif                                 |
| 42 | Kecamatan Gaung Anak Serka                                  | gaunganakserka.inhilkab.go.id   | SSL              | Aktif                                 |
| 43 | Kecamatan Kateman                                           | kateman.inhilkab.go.id          | SSL              | Aktif                                 |
| 44 | Kecamatan Kempas                                            | kempas.inhilkab.go.id           | SSL              | Aktif                                 |
| 45 | Kecamatan Kemuning                                          | kemuning.inhilkab.go.id         | SSL              | Aktif                                 |
| 46 | Kecamatan Keritang                                          | keritang.inhilkab.go.id         | SSL              | Aktif                                 |
| 47 | Kecamatan Kuala Indragiri                                   | kualaindragiri.inhilkab.go.id   | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 48 | Kecamatan Mandah                                            | mandah.inhilkab.go.id           | SSL              | Aktif                                 |
| 49 | Kecamatan Pelangeran                                        | pelangeran.inhilkab.go.id       | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 50 | Kecamatan Reteh                                             | reteh.inhilkab.go.id            | SSL              | Aktif                                 |
| 51 | Kecamatan Sungai Batang                                     | sungaibatang.inhilkab.go.id     | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 52 | Kecamatan Tanah Merah                                       | tanahmerah.inhilkab.go.id       | SSL              | Tidak Aktif                           |
| 53 | Kecamatan Pulau Burung                                      | pulauburung.inhilkab.go.id      | SSL              | Aktif                                 |
| 54 | Kecamatan Teluk Belengkong                                  | telukbelengkong.inhilkab.go.id  | SSL              | Aktif                                 |

Sumber : Diskominfo kab. Indragiri Hilir

Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Hal ini perlu ditunjuk petugas/pejabat yang mengelola informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung-jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Komunikasi



dan Informatika, Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Berikut data terkait PPID Pembantu (OPD) dan PPID Desa Se-Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dibentuk.

**Tabel II- 30**  
**PPID Pembantu (OPD) dan PPID Desa Se-Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2022**

| Tahun       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Jumlah PPID | 3    | 33   | 19   | 26   | 81   |

Sumber : Diskominfo kab. Indragiri Hilir

### 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa diperlukan kebijakan afirmatif dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan II - 85 keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Berikut capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari tahun 2019-2022 yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel II- 31**  
**Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                 | SATUAN   | KINERJA |        |        |        | SUMBER   |
|----------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|----------|
|                                  |          | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   |          |
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | PUS      | 173525  | 167662 | 168091 | 185680 | DP2KBP3A |
| Peserta KB Aktif                 | KB Aktif | 194219  | 152800 | 133062 | 44630  | DP2KBP3A |
| TFR                              | Nilai    | 2.38    | 2.31   | 2.21   | 2.28   | DP2KBP3A |

### 2.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud



dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Hal ini dikarenakan ketersediaan prasarana jalan sebagai jaringan aksesibilitas antar wilayah di Indragiri Hilir belumlah memadai.

Perkembangan kinerja indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II- 32**  
**Kinerja Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                                | SATUAN | KINERJA |      |      |      | SUMBER |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|--------|
|                                                                 |        | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 |        |
| Jumlah arus penumpang angkutan umum                             | Orang  | 3572    | 3944 | 3353 | 3463 | DISHUB |
| Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                        | Unit   | 3       | 3    | 3    | 3    | DISHUB |
| Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | Orang  | 3572    | 3944 | 3353 | 3463 | DISHUB |

#### 2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode tahun 2019-2022 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan trend peningkatan Koperasi Aktif, Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal sendiri dan modal luar, Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indragiri Hilir. Secara rinci kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II- 33**  
**Kinerja Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                     | KINERJA |       |        |        | SUMBER |
|------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|
|                                                      | 2019    | 2020  | 2021   | 2022   |        |
| Koperasi Aktif                                       | 66.22   | 66.49 | 66.93  | 67.18  | BPS    |
| Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal sendiri | -58.51  | -8.72 | -25.35 | 141.02 | BPS    |
| Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal luar    | -27.99  | 11.68 | -41.57 | 124.40 | BPS    |
| Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah    | -26.86  | 16.70 | -2.60  | 0.90   | BPS    |



### 2.3.2.11. Penanaman Modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Adapun perkembangan jumlah investasi dan indikator lainnya di Kabupaten Indragiri hilir dapat dijelaskan sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel II- 34**  
**Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                                 | KINERJA |          |          |           | SUMBER  |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|---------|
|                                                                  | 2019    | 2020     | 2021     | 2022      |         |
| Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan          | 414,07  | 4.339,70 | 1.889,20 | 12.706,02 | DPMPTSP |
| Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                     | 291     | 217      | 93       | 168       | DPMPTSP |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.61    | 3.63     | 3.73     | 4.02      | DPMPTSP |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian jumlah investasi di Kabupaten Indragiri Hilir meningkat tajam yaitu pada Tahun 2019 sebesar 414,07 milyar rupiah, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar 4.339,70 milyar rupiah, pada Tahun 2021 sebesar 1.889,20 milyar rupiah, naik tajam pada Tahun 2022 sebesar 12.706,02 milyar rupiah. Indikator lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam pelayanan penanaman modal adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM terhadap pelayanan terpadu satu pintu dengan kecenderungan meningkat. hal ini dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.

### 2.3.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam



mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan diarahkan pada pembangunan softskill dan hardskill pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat character building yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan softskill. Sedangkan pengembangan hardskill pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan dan ketrampilan bagi pemuda.

Berikut capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Indragiri hilir tahun 2019-2022

**Tabel II- 35**  
**Kinerja Indikator Urusan kepemudaan dan olahraga**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                        | SATUAN | KINERJA |      |      |      | SUMBER        |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|---------------|
|                                                         |        | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 |               |
| Prestasi olahraga                                       | Medali | 18      | 2    | 38   | 73   | DISPARPORABUD |
| Persentase Peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah | Persen | 550     | 104  | 179  | -55  | DISPARPORABUD |
| Persentase Peningkatan Pemuda Aktif                     | Persen | 550     | 104  | 179  | -55  | DISPARPORABUD |
| Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat daerah              | Medali | 0       | 0    | 11   | 73   | DISPARPORABUD |

### 2.3.2.13. Statistik

indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Ketersediaan Dokumen Statistik. Periode 2019-2023 Kabupaten Indragiri Hilir telah menyediakan dokumen statistic yaitu Indragiri Hilir dalam angka dan Kabupaten dalam angka. Jumlah keterdediaan mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 180 buku menjadi 20 buku pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi, tidak banyak lagi berupa buku namun berupa soft file.



#### 2.3.2.14. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Beberapa indikator yang menggambarkan pemajuan kebudayaan adalah (1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya Benda, (2) Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, (3) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pencapaian Kinerja indikator Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II- 36**  
**Kinerja Indikator Urusan Kebudayaan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                        | KINERJA |      |      |      | SUMBER        |
|---------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---------------|
|                                                         | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 |               |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya                | 0       | 1    | 1    | 1    | DISPORABUDPAR |
| Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 1       | 1    | 1    | 1    | DISPORABUDPAR |
| Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu        | 1       | 1    | 1    | 1    | DISPORABUDPAR |

#### 2.3.2.15. Persandian

Urusan Persandian merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah Kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. capaian kinerja indikator urusan persandian di Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Dokumen Elektronik yang diamankan melalui SANAPATI sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel II- 37**  
**Pengamanan Dokumen Elektronik Sanapati**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| BULAN    |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| JANUARI  | 20   | 50   | 59   | 39   |
| FEBRUARI | 39   | 59   | 50   | 44   |
| MARET    | 46   | 62   | 45   | 67   |
| APRIL    | 28   | 45   | 58   | 47   |
| MEI      | 41   | 57   | 66   | 26   |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| BULAN     |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| JUNI      | 38   | 30   | 57   | 50   |
| JULI      | 22   | 59   | 48   | 48   |
| AGUSTUS   | 49   | 55   | 69   | 80   |
| SEPTEMBER | 27   | 48   | 45   | 64   |
| OKTOBER   | 21   | 38   | 65   | 48   |
| NOVEMBER  | 34   | 57   | 59   | 44   |
| DESEMBER  | 45   | 66   | 58   | 63   |
| TOTAL     | 410  | 626  | 679  | 620  |

Sumber : Diskominfo persantik Kab. Indragiri Hilir

### 2.3.2.16. Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan berupaya untuk mewujudkan perpustakaan yang ideal bagi masyarakat umum. Perpustakaan ideal adalah sebuah perpustakaan yang mampu memberdayakan masyarakat, mampu melakukan revolusi minat baca pada masyarakat, mampu mengubah karakter masyarakat dari tidak suka membaca menjadi suka membaca, dan mampu mengubah masyarakat tuna informasi menjadi masyarakat yang berliterasi atau melek informasi. Salah satu bukti nyatanya adalah berdirinya perpustakaan daerah yang representative pada tahun 2020.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan adalah Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan, di tahun 2019 sebanyak 39.59 Persen kemudian meningkat sampai dengan tahun 2022 menjadi 70.25 Persen. Hal ini juga dipengaruhi oleh Nilai SKM Pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan yang perlahan lahan meningkat dari 90.91 Persen tahun 2019 menjadi 92,00 Persen ditahun 2022.

Secara lengkap capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II- 38**  
**Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                      | KINERJA |       |       |       | SUMBER      |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------------|
|                                                       | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |             |
| Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan | 39.59   | 50.17 | 60.75 | 70.25 | DISPERPUSIF |
| Nilai SKM Pemustaka terhadap pelayanan                | 90.91   | 91.46 | 91.89 | 92.00 | DISPERPUSIF |



### 2.3.2.17. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan Indeks Kearsipan dan Persentase Perangkat Daerah Dengan pengelolaan Arsip yang tertib di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan kinerja yang baik. pada Tahun 2019 Indeks kearsipan Indragiri Hilir baru mencapai 31,84 poin, namun tahun 2020 meningkat tajam menjadi 61.00 persen. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan arsip di Kabupaten Indragiri Hilir sudah terjadi perbaikan. Sementara untuk Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik mencapai 16 Persen pada tahun 2022 dari total 34 Perangkat Daerah (tidak termasuk Kecamatan) yang artinya baru sekitar 6 Perangkat Daerah yang masuk dalam kategori baik dalam pengelolaan arsip. Perlu usaha dan strategi yang terarah dalam perbaikan kondisi ini. Tabel dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Kearsipan :

**Tabel II- 39**  
**Kinerja Indikator Urusan Kearsipan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                                 | KINERJA |       |       |       | SUMBER      |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------------|
|                                                                  | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |             |
| Indeks Kearsipan                                                 | 31.84   | 50.75 | 20.12 | 61.00 | DISPERPUSIF |
| Persentase Perangkat Daerah Dengan pengelolaan Arsip yang tertib | 1.00    | 6.00  | 11.00 | 16.00 | DISPERPUSIF |

### 2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar yang menjadi sumber perekonomian bagi masyarakatnya. Secara umum Kabupaten Indragiri Hilir memiliki aktivitas kegiatan perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Selama periode 2019-2022 produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari 54.271,82 ton pada tahun 2019 meningkat menjadi 70.895,01 ton pada tahun 2022. Namaun pada produksi perikanan budidaya mengalami



penurunan yang signifikan yang semula (tahun 2019) 54.271,82 ton menurun menjadi 4.831,75 pada tahun 2022. Hal ini perlu upaya yang serius dalam menangani permasalahan ini. Secara detail kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2019 – 2022 dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II- 40**  
**Kinerja Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                      | KINERJA   |           |           |           | SUMBER |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |        |
| Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Indragiri Hilir  | 54.271,82 | 54.271,82 | 60.330,35 | 70.895,01 | BPS    |
| Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Indragiri Hilir | 54.271,82 | 2.104,15  | 2.484,55  | 4.831,75  | BPS    |

#### 2.3.3.2. Pariwisata

Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2019-2022 dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata dan tingkat hunian. Jumlah Kunjungan wisatawan di tahun 2019 sebanyak 91.137 orang, namun terjadi penurunan menjadi 42.127 pada tahun 2022. Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya pandemic covid 19 pada tahun 2020 dan berdampak sampai tahun 2021 dan 2022. Jumlah kunjungan wisata tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat hunian. Selama periode tahun 2019-2022 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap tingkat hunian. Pada tahun 2018 jumlah tingkat hunian sebesar 15.736 hunian, meningkat menjadi 21.758 pada tahun 2022. Selain itu, Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilakukan peningkatan terutama sarana dan prasarannya serta bagaimana upaya promosi pariwisata yang lebih kreatif sehingga menimbulkan minat para pelancong untuk berkunjung ke Indragiri Hilir.

**Tabel II- 41**  
**Kinerja Indikator Urusan Pariwisata**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR    | KINERJA |       |       |       | SUMBER        |
|---------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|
|                     | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |               |
| Kunjungan Wisatawan | 91137   | 51728 | 56728 | 42127 | DISPORABUDPAR |
| Tingkat Hunian      | 15736   | 7868  | 10868 | 21758 | DISPORABUDPAR |



### 2.3.3.3. Pertanian

Indragiri Hilir merupakan sentra kelapa Indonesia, bahkan dunia. Pada tahun 2022, produksi pada lahan kelapa di Indragiri Hilir sebesar 263,732.34 Ton, perkembangan produksi kelapa ini relatif sama sejak tahun 2019. Luas lahan kelapa Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, memiliki porsi sebesar 84,76 persen dari total luas areal kelapa Provinsi Riau dengan kontribusi produksi sebesar 86,41 persen. Perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam di Kabupaten Indragiri Hilir mencakup hampir seluruh kecamatan kecuali di kecamatan Kemuning yang luasan dan produksinya relatif kecil. Perkebunan kelapa ini telah menjadi urat perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara umum data statistik menunjukkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas meningkat sebesar 1,88 persen per tahun, namun capaian produktivitas saat ini masih dibawah potensinya yaitu sebanyak 9000 – 11.000 butir atau 1,5 – 2,0 ton kopra/hektar/tahun. Belum optimalnya produktivitas kelapa Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi petani kelapa antara (i) luasnya tanaman tua dan rusak - TTR, (ii) banyaknya tanggul yang rusak sehingga banyak tanaman kelapa sawit yang terancam rusak, dan (iii) serangan hama.

Pada masa yang hampir bersamaan, perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam dihadapkan kepada banyak tanggul-tanggul yang sudah rusak sehingga mengancam tidak kurang dari 100. 000 hektar tanaman kelapa terinstruksi air laut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperbaiki tanggul dan trio tata airnya. Pada tahun 2017, sekitar 60.000 hektar perkebunan kelapa dalam rakyat masih memerlukan perbaikan tanggul dan trio tata air yang rusak dan kurang berfungsi.

Relatif rendahnya produktivitas kelapa juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya serangan hama kelapa khususnya serangan



hama kumbang tanduk. Kondisi cuaca yang cenderung lembab dan semakin luas replating kelapa sawit, dimana dalam pembenaman batang kelapa kurang sesuai SOP, maka batang kelapa sawit sisa replanting ini menjadikan media yang baik untuk berkembang biaknya kumbang tanduk. Hama kumbang tanduk inilah yang menyerang tanaman kelapa dalam rakyat.

Hal yang terus menjadi perbincangan adalah harga jual kelapa bulat petani yang cenderung rendah. Akibat tekanan harga beli kelapa yang sudah lama rendah, menjadikan kebun-kebun kelapa kurang mendapat perhatian oleh petani. Kondisi harga jual kelapa rakyat yang rendah karena pasar kelapa bulat di Indragiri Hilir yang Monopsoni dan akan mengarah ke Monopoli. Campur tangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar posisi tawar petani menjadi lebih baik perlu dilakukan antara melalui resi gudang.

Selain itu terdapat permasalahan terkait perkebunan kelapa dalam kawasan hutan. Dalam hal ini berfokus pada 2 komoditas yaitu Kelapa dan Kelapa Sawit. Berdasarkan Kajian kerjasama dengan pihak ketiga, overlay dengan Peta Kawasan Hutan didapatkan data bahwa dari 341.000 Kebun Kelapa Rakyat terdapat 137.000 Ha (40%) diantaranya berada dalam kawasan hutan, sementara berdasarkan data Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) KemenLHK didapatkan bahwa dari 301.883 Hektar Kebun Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir, 139.532 Ha diantaranya berada dalam kawasan hutan.

Kebun yang berada dalam Kawasan hutan ini tentunya menyebabkan banyak kendala yang dihadapi oleh petani. Salah satunya adalah kendala dalam mengajukan permohonan bantuan salah satunya baik untuk komoditas kelapa maupun kelapa sawit. Karena bantuan-bantuan tersebut mensyaratkan posisi kebun yang berada dalam Kawasan hutan. Kendala lain yang dihadapi petani adalah terhambatnya proses pengurusan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dimana dokumen ini seharusnya dimiliki oleh petani swadaya yang memiliki lahan di bawah 25 Hektar sebagai salah satu bukti legalitas kebun.



Upaya mendorong industri miko/kecil berbasis kelapa di pedesaan adalah bentuk lainnya mendorong berkembang dan berjayanya kembali industri kelapa Indragiri Hilir. Selain itu peluang terkait dengan pengembangan potensi perkebunan kelapa dapat di laksanakan dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan pedesaan, dimana di Kabupaten Indragiri Hilir desa-desa yang memiliki potensi perkebunan kelapa dapat di tetapkan sebagai Kaswasan Perdesaan Perkebunan Kelapa Indragiri Hilir.

Secara umum, dalam perekonomian Indragiri Hilir, Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Indragiri Hilir menurut lapangan usaha dengan tren berfluktuatif menurun. Kontribusi sektor pertanian menurut sub sektor menunjukkan bahwa subsektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 57 persen diikuti perikanan (24 persen), kehutanan (11 persen), tanaman pangan (4 persen), tanaman hortikultura (1 persen) dan peternakan (1 persen) serta jasa pertanian dan perburuan (1 persen).

Selain Komoditi kelapa dalam, capaian kinerja komoditi lainnya seperti padi, Kakao dan lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel II- 42**  
**Kinerja Indikator Urusan Pertanian**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                       | KINERJA   |           |          |           | SUMBER |
|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
|                                        | 2019      | 2020      | 2021     | 2022      |        |
| Produktivitas padi                     | 37        | 40        | 42       | 41        | BPS    |
| Luas Panen Padi                        | 19.159    | 19.517    | 15.520   | 13.821    | BPS    |
| Produksi Padi                          | 70.138,7  | 78.458,7  | 65.755,1 | 56.274,7  | BPS    |
| Produksi Beras                         | 40.045,5  | 45.027,7  | 37.737,1 | 32.296,2  | BPS    |
| Konsumsi Beras                         | 64.083,6  | 64.457,2  | 65.287,1 | 63.832,2  | BPS    |
| Produktivitas Jagung                   | n/a       | 24.29     | n/a      | 36.62     | BPS    |
| Produktivitas Kedelai                  | n/a       | 11.03     | n/a      | 11.06     | BPS    |
| <b>Luas Areal Tanaman Perkebunan :</b> |           |           |          |           | BPS    |
| Kelapa Sawit/Oil Palm                  | 81.346    | 81.737    | 81.795   | 82.025    | BPS    |
| Kelapa Dalam/Coconut                   | 22.8077,2 | 22.5417   | 22.6037  | 22.6037   | BPS    |
| Kelapa Hibrida/Hybrid Coconut          | 35.855,02 | 35.564    | 35.398   | 35.195    | BPS    |
| Karet/Rubber                           | 3.408     | 3.392     | 3.264    | 3.342     | BPS    |
| Kopi/Coffee                            | 642.15    | 639       | 632      | 632       | BPS    |
| Kakao/Cocoa                            | 954       | 944       | 989      | 974       | BPS    |
| <b>Produksi Tanaman Perkebunan :</b>   |           |           |          |           | BPS    |
| Kelapa Sawit/Oil Palm                  | 267.045,9 | 268.881,7 | 269.138  | 269.983,9 | BPS    |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| URAIAN INDIKATOR              | KINERJA   |           |           |           | SUMBER |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                               | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |        |
| Kelapa Dalam/Coconut          | 264.449,7 | 262.992,4 | 263.731,9 | 263.732,3 | BPS    |
| Kelapa Hibrida/Hybrid Coconut | 50.826,9  | 50,367,8  | 50.155,74 | 49.794,96 | BPS    |
| Karet/Rubber                  | 4.721,64  | 4.698,63  | 4.540,58  | 4.646,23  | BPS    |
| Kopi/Coffee                   | 251       | 243.71    | 242.74    | 242.74    | BPS    |
| Kakao/Cocoa                   | 452,38    | 436,73    | 468,07    | 458,65    | BPS    |

#### 2.3.3.4. Perdagangan

Salah satu kegiatan ekonomi atau perdagangan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, dimana ekspor memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama bagi daerah yang berkembang.

**Tabel II- 43**  
**Kinerja Indikator Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR | KINERJA        |                |                |                | SUMBER |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |        |
| Volume Ekspor    | 560.151,86     | 526.173,09     | 465.779,78     | 509.863,70     | BPS    |
| Nilai Ekspor     | 303,961,994.10 | 349,419,461.02 | 339,623,796.53 | 371,081,702.27 | BPS    |
| Volume Impor     | 22.802,21      | 21.328,38      | 20.733,43      | 20.827,95      | BPS    |
| Nilai Impor      | 68,779,597.00  | 65,652,804.00  | 71,969,318.00  | 73,143,626.00  | BPS    |

Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari nilai ekspor dan import nonmigas. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai ekspor Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah 371.081.702,27 US \$ dan volume ekspor 509.863,70 ton. Berdasarkan pelabuhan muat, Guntung adalah pelabuhan dengan nilai ekspor terbesar dengan nilai ekspor 281.050.549,04 US \$ atau 75,74 persen dari total nilai ekspor Kabupaten Indragiri Hilir. Jika dilihat berdasarkan negara tujuan ekspor Singapura adalah negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar, diikuti oleh Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam.

Sementara nilai impor Kabupaten Indragiri Hilir adalah 73.143.626,00 US \$ dan volume impor 20.827,95 ton. Nilai impor terbesar melalui pelabuhan Guntung (Kateman) yaitu 43.274.709,00 US \$ atau 53,16 persen dari total nilai impor. Sedangkan 29.791.371,00 US



\$ atau 40,73 persen melalui pelabuhan Tembilahan dan sisanya melalui pelabuhan Kuala Enok. Impor Kabupaten Indragiri Hilir terbesar berasal dari Singapura dan India.

#### **2.3.3.5. Perindustrian**

Sektor industri disini adalah Industri Pengolahan dengan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Kontribusi Sektor industri ini dalam PDRB indragiri Hilir menempati posisi kedua setelah sektor pertanian.

Selama periode 2019-2022, realisasi indikator Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB memiliki trend meningkat yaitu dari 23.63 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 24.06 persen pada tahun 2020 dan meningkat lagi 24.63 pada tahun 2021 dan 25.06 persen pada tahun 2022. Meski kontribusi sektor industri Tinggi, namun pencapaian ini dapat jauh lebih tinggi karena sumberdaya yang tersedia masih banyak diekspor dengan nilai tambah rendah seperti kelapa bulat dan CPO. Disisi lain perkembangan ekspor dari sector UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini telah menunjukkan ke arah yang semakin baik terbukti dengan dilakukannya ekspor perdana UMKM PT. Bekawan Agro Mandiri yang memproduksi gula kelapa ke Malaysia beberapa waktu lalu. Oleh karena perlu upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri berfokus untuk membangun/mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) sesuai dengan potensi sumberdaya alam saat ini.



## 2.3.4. Pendukung Urusan Pemerintahan

### 2.3.4.1. Sekretariat Daerah

#### a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diukur dengan 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja, capain kinerja SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel II- 44**  
**Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| Tahun    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Nilai    | 55.12 | 62.79 | 63.85 | 64.10 |
| Prediket | CC    | B     | B     | B     |

*Sumber : LHE SAKIP Kemenpanrb 2023*

Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, namun tidak signifikan. Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2022 Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa nilai sebesar 64,10 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik” pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Adapun Rekomendasi dari LHE SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi;
- 2) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi



- berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;
- 3) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
  - 4) Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi ESAKIP untuk monitoring dan evaluasi kinerja daerah dan PD, sehingga dapat memberikan informasi yang mampu 'mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target kinerja daerah dan 'menggunakan hasil capaian kinerja tersebut sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment;
  - 5) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja PD sebagai bahan evaluasi proses pencapaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
  - 6) Memastikan seluruh laporan kinerja PD telah di-reviu Inspektorat sebelum dipublikasi untuk memastikan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan kinerja tersebut;
  - 7) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
  - 8) Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi SAKIP PD agar mampu memberikan penilaian dan rekomendasi yang berkualitas sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja;
  - 9) Memastikan bahwa terdapat pemantauan atas tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi internal yang diberikan dan pelaksanaan pembinaan berkelanjutan kepada seluruh PD.

#### **b. Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Capaian Indeks Reformasi



Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir , disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel II- 45**  
**Implementasi Indek Reformasi Birokrasi**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| Tahun    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Nilai    | 60.05 | 60.37 | 60.42 | 63.07 |
| Prediket | B     | B     | B     | B     |

*Sumber : LHE RB (Kempanrb) 2023*

Tujuan evaluasi RB untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai Indeks RB Kabupaten Indragiri Hilir menunjukan peningkatan dari tahun ketahun, namun tidak signifikan.

Hasil evaluasi tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh program reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PMPRB;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi pada seluruh anggota organisasi dan unit kerja untuk menyamakan pemahaman dalam penerapan reformasi birokrasi sehingga dapat terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi ea rah yang lebih efektif dan efisien;
- 3) Memastikan keberadaan pemetaan produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan melakukan perbaikan jika ada kebijakan



- yang menghambat atau tidak harmonis, serta membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan;
- 4) Menyusun peta proses bisnis sampai level terendah dan memastikan kesesuaian dan kelengkapan SOP atas seluruh aktifitas yang ada;
  - 5) Meningkatkan penerapan manajemen SPBE sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;
  - 6) Menyusun kebijakan manajemen talenta dan melaksanakan asesment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN;
  - 7) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System, dan benturan kepentingan;
  - 8) Mendorong seluruh PD melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dan menginformasikan hasilnya kepada stakeholder serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan, dan kepatuhan standar pelayanan agar pada tahun berikutnya terjadi peningkatan hasil penilaian

### **2.3.5. Penunjang Urusan pemerintahan**

#### **2.3.5.1. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan



dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Capaian Indikator Kinerja Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II- 46**  
**Kinerja Indikator Perencanaan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR                                      | KINERJA |       |       |       | SUMBER  |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
|                                                       | 2019    | 2020  | 2021  | 2022  |         |
| Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 3.00    | 2.00  | 2.00  | 3.00  | BAPPEDA |
| Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah    | 88.79   | 93.96 | 91.35 | 93.34 | BAPPEDA |

#### **2.3.5.2. Keuangan**

Indeks pengelolaan Keuangan (IPKD) adalah perwakilan indikator dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan. IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Nilai Indeks pengelolaan Keuangan (IPKD) Kabupaten Indragiri Hilir beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 nilai IPKD Inhil 57.22 dan meningkat menjadi 58.49 pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 meningkat Kembali menjadi 75.47 yang berarti pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori BAIK,. Sementara untuk Nilai IPKD Tahun 2022 belum rilis oleh Kemendagri.

#### **2.3.5.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai



dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Penilaian terhadap Indeks Profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu, Penilaian terhadap Indeks Sistem Merit diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir baru dimulai tahun 2020 sampai sekarang dengan kinerja dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II- 47**  
**Kinerja Indikator Perencanaan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022**

| URAIAN INDIKATOR           | KINERJA |        |        | SUMBER |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                            | 2020    | 2021   | 2022   |        |
| Indeks Profesionalitas ASN | 52.40   | 52.30  | 57.06  | BKN    |
| Indeks Sistem Merit        | 262.50  | 281.50 | 289.00 | KASN   |

#### **2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan**

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 umumnya menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kembali berhasil masuk pada 10 besar dalam Indeks daerah yang sangat inovatif. Dari 415 Kabupaten yang terdata pada indeks inovasi daerah, Inhil tercatat sebagai Kabupaten yang sangat inovatif dengan nomor urut 6 dari 10 Kabupaten yang masuk dalam



kategori Kabupaten sangat inovatif. Sedangkan Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan lainnya disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel II- 48**  
**Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022**

| URAIAN INDIKATOR                      | KINERJA                    |                            |                            | SUMBER     |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|                                       | 2020                       | 2021                       | 2022                       |            |
| Indeks Inovasi Daerah                 | Sangat Inovatif<br>(1.630) | Sangat Inovatif<br>(62.42) | Sangat Inovatif<br>(75.98) | Kemendagri |
| Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah | 80                         | 100                        | 82.50*                     | BAPPEDA    |

#### 2.3.6. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Indikator Kinerja yang terwakuli dalam urusan ini adalah Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Berikut data ketercapaian indikator dimaksud :

**Tabel II- 49**  
**Kinerja Indikator Perencanaan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| URAIAN INDIKATOR | KINERJA            |                    |                    |                    | SUMBER |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
|                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |        |
| Maturitas SPIP   | 3<br>(Terdefinisi) | 3<br>(Terdefinisi) | 3<br>(Terdefinisi) | 3<br>(Terdefinisi) | BPKP   |
| Kapabilitas APIP | 3<br>(Integrated)  | 3<br>(Integrated)  | 3<br>(Integrated)  | 3<br>(Integrated)  | BPKP   |

#### 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan daya saing daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Adapun aspek yang dimaksud dapat berkenaan dengan kemampuan ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing infrastruktur dan daya saing investasi. Berikut ini adalah beberapa informasi yang berkenaan dengan kemampuan daya saing daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



#### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita. Berikut ini akan disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

##### **a. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan**

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari standar hidup yang makin membaik yang direpresentasikan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sempat menurun pada tahun 2021 dari 10,382 Ribu Rupiah pada Tahun 2019 menjadi 9,945 Ribu rupiah. Tahun 2022 kembali meningkat meningkat sebesar 10.234 Ribu Rupiah.

##### **b. Tingkat Kesempatan Kerja**

Penyerapan tenaga kerja di Indragiri Hilir tersebar di seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Lapangan usaha yang terbanyak menyerap tenaga kerja antara lain pertanian sebesar 186 ribu jiwa atau 47,07 persen, selanjutnya sektor jasa sebanyak 103 ribu jiwa dan manufaktur 47 ribu jiwa dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2022.

Seiring dengan potret perekonomian di Indragiri Hilir yang memang didominasi oleh lapangan usaha pertanian dengan kontribusi sekitar 46,78 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indragiri Hilir. Dari sini tampak bahwa sebagai lapangan usaha yang mendominasi dalam perekonomian, pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang besar, karena lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha padat karya sehingga penyerapan tenaga kerjanya sangat baik.

Jika dilihat dari tingkat kesempatan kerja, terlihat bahwa selama kurun waktu beberapa tahun terakhir TKK Indragiri Hilir Terus meningkat seperti gambar breikut :



**Gambar II-17**  
**Tingkat kesempatan Kerja Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2022**



Sumber : BPS 2023

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi kedua Perubahan RPJMD 2018-2023 berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu *tools* yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (*outcome*).

Jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital bagi pembangunan suatu wilayah. Untuk kemudahan akses, pemerintah telah membangun jalan sepanjang lebih dari 1.634,06 km. Terdiri dari 163,32 km jalan negara, 280,15 km jalan provinsi dan 1.190,59 jalan Kabupaten serta 680 unit jembatan. Panjang dan kualitas jalan Kabupaten berdasarkan Data Teknis Jalan (DD1) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yang dirilis pada 31 Maret 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:



**Tabel II-50**  
**Panjang dan Kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022**

| Panjang<br>(km) | Bahan Perkerasan (km) |                                 |         |                     |                           | Kondisi (km) |         |         |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|
|                 | Hotmix                | Aspal/<br>Penetrasi/<br>Makadam | Beton   | Telford/<br>Kerikil | Tanah/<br>Belum<br>Tembus | Baik         | Sedang  | Rusak   |
| 1.190,594       | 58,146                | 65,633                          | 320,806 | 537,981             | 208,028                   | 597,878      | 254,962 | 279,648 |

Sumber : Dinas PUTR Kab. Inhil

Kondisi Baik untuk jalan Kabupaten berdasarkan data diatas adalah sebanyak 50,22%, Kondisi Sedang 21,41 dan Kondisi Rusak sebanyak 23,49%. Sementara itu hasil rekapitulasi berdasarkan DD1 untuk kondisi mantap jalan sebesar 55,10% dan Kondisi Tidak Mantap Jalan sebesar 44,90%.

Berdasarkan data Teknik Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten (DD2) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yang juga dirilis pada 31 Maret 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut,

**Tabel II-51**  
**Panjang Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Jumlah Jembatan  | 680 unit       |
| Panjang Jembatan | 17.125,3 meter |
| NK 1             | 282 unit       |
| NK 2             | 88 unit        |
| NK 3             | 127 unit       |
| NK 4             | 168 unit       |
| NK 5             | 15 unit        |

Sumber : Dinas PUTR Kab. Inhil

Pada Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk untuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur tahun 2022, nilai IKLI yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut:



Tabel II-52  
Hasil Akhir Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

| Indeks Kepuasan | Jumlah Responden | Nilai | Indikator                                | Indeks Kepuasan Per Unsur |
|-----------------|------------------|-------|------------------------------------------|---------------------------|
| SEDANG          | 400              | 65,02 | Program Pembangunan Infrastruktur        | 69.17                     |
|                 |                  |       | Kondisi dan Keadaan Infrastruktur        | 65.33                     |
|                 |                  |       | Perawatan dan Pemeliharaan Infrastruktur | 61.33                     |
|                 |                  |       | Jumlah Infrastruktur Jalan               | 64.42                     |
|                 |                  |       | Jumlah Infrastruktur Jembatan            | 64.83                     |
|                 |                  |       |                                          |                           |

Sumber : Laporan IKLI (Bappeda)

Secara umum, nilai Indeks Pelayanan pada Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah 65,02 Persen. Berdasarkan table Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan pada Permenpan-RB 14/2017, dapat diketahui bahwa mutu pelayanan pada Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah SEDANG untuk tahun 2022.

#### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan menggunakan indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (2) Jumlah investor berskala nasional (PMA). Sampai dengan tahun 2022 Jumlah investor yang melaksanakan kegiatan atau usaha di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 168 Investor, dengan Nilai Investasi pada tahun 2022(PMDN/PMA) mencapai 12,706.02 Milyar Rupiah.

Kondisi daerah yang kondusif akan mendorong meningkatnya iklim investasi karena investor ingin modal yang telah ditanamkan dapat kembali lagi. Untuk itu diperlukan kepastian hukum dan supremasi hukum harus ditegakan serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja sumberdaya manusia dilakukan menggunakan indikator rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*depecency ratio*) adalah angka yang



menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Semakin tingginya prosentase *Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 sebesar 44,11 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 44-45 orang yang dianggap belum produktif atau sudah tidak produktif lagi.

Angka ini lebih menurun jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya yaitu 47,23 tahun 2019 dan stabil diangka 44,10-44,11 sampai dengan tahun 2022. Dengan kata lain beban tanggungan penduduk untuk membiayai penduduk yang tidak produktif juga menurun.

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian ini tentu saja menjadi salah satu poin penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya akan terjabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan di setiap perangkat daerah.

Berikut rekapitulasi capaian kinerja indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan berdasarkan aspek pembangunan daerah.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

**Tabel II.53**  
**Rekapitulasi Capaian Indikator Pembangunan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022**

| NO           | ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN                             | Satuan                      | CAPAIAN KINERJA |           |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
|              |                                                              |                             | 2019            | 2020      | 2021       | 2022       |
| <b>2.2.</b>  | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                        |                             |                 |           |            |            |
| <b>2.2.1</b> | <b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi</b> |                             |                 |           |            |            |
| 2.2.1.1      | Pertumbuhan Ekonomi                                          | Persen                      | 4,15            | 0,43      | 4,46       | 5,31       |
| 2.2.1.2      | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan                          | Juta                        | 44.774,87       | 44.967,54 | 46.972,37  | 49.468,27  |
| 2.2.1.3      | Laju Inflasi                                                 | Persen                      | 2,4             | 3,3       | 1,09       | 4,82       |
| 2.2.1.4      | PDRB Per Kapita                                              | Rp. Ribu                    | 87.346,96       | 99.283,21 | 111.536,24 | 126.254,97 |
| 2.2.1.5      | Perkembangan Indeks Gini                                     | Poin                        | 0,303           | 0,31      | 0,297      | 0,296      |
| 2.2.1.6      | Tingkat Kemiskinan                                           | Persen                      | 6,54            | 5,93      | 6,18       | 5,98       |
| <b>2.2.2</b> | <b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>                            |                             |                 |           |            |            |
| 2.2.2.1      | Angka Melek Huruf (AMH)                                      | Persen                      | 98,64           | 98,33     | 98,1       | 98,5       |
| 2.2.2.2      | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                             | Tahun                       | 66,84           | 66,54     | 66,63      | 67,37      |
| 2.2.2.3      | Angka Harapan Hidup (AHH)                                    | Tahun                       | 67,66           | 67,85     | 67,98      | 68,31      |
| 2.2.2.4      | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)                             | Tahun                       | 11,9            | 11,91     | 11,93      | 12,19      |
| 2.2.2.5      | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)                           | Tahun                       | 7,22            | 7,23      | 7,24       | 7,26       |
| 2.2.2.6      | Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan                      | Ribu Rupiah/<br>Orang/Tahun | 10.382          | 9.954     | 9.945      | 10.234     |
| 2.2.2.7      | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                           | Persen                      | 4,55            | 4,35      | 2,66       | 1,50       |
| <b>2.2.3</b> | <b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>                        |                             |                 |           |            |            |
| 2.2.3.1      | Seni Budaya                                                  |                             |                 |           |            |            |
|              | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                     | Kali                        | 0               | 1         | 1          | 1          |
|              | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang                   | Cabud                       | 1               | 1         | 1          | 1          |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO       | ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN                                       | Satuan | CAPAIAN KINERJA |        |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                        |        | 2019            | 2020   | 2021   | 2022   |
| 2.2.3.2  | dilestarikan                                                           |        |                 |        |        |        |
|          | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu                       | Cabud  | 1               | 1      | 1      | 1      |
|          | Olahraga                                                               |        |                 |        |        |        |
|          | Prestasi olahraga                                                      | Medali | 18              | 2      | 38     | 73     |
|          | Persentase Peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah                | Persen | 0               | 0      | 0      | -27    |
| 2.3.     | Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat daerah                             | Medali | 0               | 0      | 11     | 73     |
|          | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                            |        |                 |        |        |        |
|          | <b>2.3.1</b>                                                           |        |                 |        |        |        |
|          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b> |        |                 |        |        |        |
|          | <b>2.3.1.1.</b>                                                        |        |                 |        |        |        |
| 2.3.1.1. | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan                                  |        |                 |        |        |        |
|          | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (persen)                           | Tahun  | 95,34           | 95,52  | 95,99  | 99,99  |
|          | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (persen)                         | Tahun  | 81,26           | 82,06  | 82,59  | 82,06  |
|          | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (persen)                           | Tahun  | 105,85          | 105,93 | 104,56 | 103,92 |
|          | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (persen)                        | Tahun  | 99,3            | 102,01 | 99,97  | 101,92 |
|          | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI                                        | Tahun  | 99,08           | 99,75  | 99,77  | 99,99  |
|          | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs                                      | Tahun  | 91,7            | 92,13  | 92,27  | 85,57  |
|          | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV )                     | Persen | 73,91           | 71,97  | 72,96  | 71,99  |
|          | <b>2.3.1.2.</b>                                                        |        |                 |        |        |        |
|          | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan                                   |        |                 |        |        |        |
|          | Angka Harapan Hidup                                                    | Tahun  | 67,66           | 67,85  | 67,98  | 68,31  |
|          | Indeks Kesehatan                                                       | Indeks | 0,733           | 0,736  | 0,738  | 0,743  |
|          | Angka Kematian Bayi                                                    | Angka  | 24              | 24     | 71     | 41     |
|          | Jumlah Kematian Ibu                                                    | Angka  | 7               | 10     | 16     | 8      |
|          | Angka Stunting                                                         | Angka  | 27,7            | 24,4   | 28,4   | 28,5   |
|          | Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk                                   | Persen | 0,005           | 0,006  | 0,006  | 0,006  |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO       | ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN                                                        | Satuan | CAPAIAN KINERJA |           |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                         |        | 2019            | 2020      | 2021      | 2022      |
| 2.3.1.5  | Rasio dokter per 1000 penduduk                                                          | Persen | 0,14            | 0,2       | 0,2       | 0,19      |
|          | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk                                  | Persen | 0,11            | 0,13      | 0,13      | 0,14      |
|          | Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum seta Perlindungan Masyarakat |        |                 |           |           |           |
|          | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)                | Persen | 100             | 100       | 100       | 100       |
|          | Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non kebakaran kabupaten/kota                    | Persen | 100             | 100       | 100       | 100       |
| 2.3.1.6  | Persentase Penegakan PERDA                                                              | Persen | 100             | 100       | 100       | 100       |
|          | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial                                                       |        |                 |           |           |           |
|          | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial                                          | Persen | 82,5            | 100       | 96        | 80        |
| 2.3.2.   | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat      | Persen | 100             | 100       | 0,14      | 100       |
|          | <b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>            |        |                 |           |           |           |
| 2.3.2.1. | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja                                                 |        |                 |           |           |           |
|          | a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                            | Persen | 64,44           | 69,17     | 68,56     | 63,97     |
|          | b. Tingkat Kesempatan Kerja                                                             | Persen | 95,45           | 95,65     | 97,34     | 98,5      |
|          | c. Tingkat Pengangguran Terbuka                                                         | Persen | 4,55            | 4,35      | 2,66      | 1,5       |
|          | d. Upah Minimum Kabupaten/Kota                                                          | Rupiah | 2.750.618       | 2.984.696 | 2.984.696 | 2.984.696 |
| 2.3.2.2. | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                 |        |                 |           |           |           |
|          | a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                      | Indeks | 82,57           | 82,34     | 82,37     | 82,74     |
|          | b. Indeks Pemberdayaan Gender                                                           | Indeks | 82,57           | 64,45     | 64,5      | n/a       |
|          | c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                      | Indeks | 0,567           | 0,546     | 0,542     | n/a       |
|          |                                                                                         |        |                 |           |           |           |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO        | ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN                              | Satuan       | CAPAIAN KINERJA       |                       |                       |                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                               |              | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
| 2.3.2.3.  | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan                             |              |                       |                       |                       |                       |
|           | Ketersediaan Pangan Utama (%)                                 | Persen       | 109                   | 103,9                 | 104,2                 | 101,1                 |
|           | Produksi Beras (Ton)                                          | Ton          | 45.369,39             | 49.008,18             | 46.651,57             | 42.777,94             |
|           | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)                          | Ton          | 86564,02              | 84276,7               | 89908,06              | 81470,3               |
|           | Jumlah Produksi Ternak (ton)                                  | Ton          | 475                   | 487,99                | 512,33                | 519,1                 |
|           | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                   | Persen       | 85,9                  | 86,06                 | 86,22                 | 86,38                 |
|           | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                       | Persen       | 84,2                  | 84,8                  | 85,5                  | 85,7                  |
| 2.3.2.5.  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup                   |              |                       |                       |                       |                       |
|           | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                              | Indeks       | 53,04                 | 57,79                 | 64,79                 | 67,66                 |
|           | Indeks Kualitas Udara                                         | Indeks       | 52,22                 | 92,15                 | 88,63                 | 90,61                 |
|           | Indeks Kualitas Air                                           | Indeks       | 24,69                 | 32,86                 | 50                    | 53,78                 |
|           | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                 | Indeks       | 92,91                 | 50,72                 | 46,11                 | 49,05                 |
| 2.3.2.7.  | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   |              |                       |                       |                       |                       |
|           | Indeks Desa Membangun (IDM)                                   | Status/Nilai | Tertinggal<br>-0,5822 | Berkembang<br>-0,6071 | Berkembang<br>-0,6198 | Berkembang<br>-0,6535 |
|           | Indeks Ketahanan Sosial (IKS)                                 | Nilai        | 0,6903                | 0,7116                | 0,7265                | 0,7572                |
|           | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)                                | Nilai        | 0,4472                | 0,4899                | 0,5002                | 0,5528                |
|           | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)                             | Nilai        | 0,6091                | 0,6197                | 0,6327                | 0,6504                |
|           | Persentase Bumdes Aktif                                       | Persen       | 21,83                 | 96,45                 | 100                   | 97,46                 |
|           | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika         | Nilai        | n/a                   | n/a                   | 2,24                  | 2,13                  |
| 2.3.2.10. | Indeks SPBE                                                   | Nilai        | n/a                   | n/a                   | 2,24                  | 2,13                  |
| 2.3.2.11. | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |              |                       |                       |                       |                       |
|           | Koperasi Aktif                                                | Persen       | 66,22                 | 66,49                 | 66,93                 | 67,18                 |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO        | ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN                                 | Satuan       | CAPAIAN KINERJA |          |          |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|-----------|
|           |                                                                  |              | 2019            | 2020     | 2021     | 2022      |
| 2.3.2.12. | Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal sendiri             | Persen       | -58,51          | -8,72    | -25,35   | 141,02    |
|           | Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal luar                | Persen       | -27,99          | 11,68    | -41,57   | 124,4     |
|           | Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)         | Persen       | -26,86          | 16,7     | -2,6     | 0,9       |
|           | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal                       |              |                 |          |          |           |
|           | Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan          | Milyar Rp    | 414,07          | 4.339,70 | 1.889,20 | 12.706,02 |
|           | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                     | Investor     | 291             | 217      | 93       | 168       |
|           | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai        | 3,61            | 3,63     | 3,73     | 4,02      |
| 2.3.2.15. | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan                            |              |                 |          |          |           |
|           | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                         | Event        | 0               | 1        | 1        | 1         |
|           | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan          | Objek        | 1               | 1        | 1        | 1         |
| 2.3.2.16. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu                 | Cagar Budaya | 1               | 1        | 1        | 1         |
|           | Bidang Urusan Perpustakaan                                       |              |                 |          |          |           |
|           | Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan            | Persen       | 39,59           | 50,17    | 60,75    | 70,25     |
| 2.3.2.17. | Nilai SKM Pemustaka terhadap pelayanan                           | Indeks       | 90,91           | 91,46    | 91,89    | 92        |
|           | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan                             |              |                 |          |          |           |
|           | Indeks Kearsipan                                                 | Indeks       | 31,84           | 50,75    | 20,12    | 61        |
| 2.3.3.    | Persentase Perangkat Daerah Dengan pengelolaan Arsip yang tertib | Persen       | 1               | 6        | 11       | 16        |
|           | <b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>                               |              |                 |          |          |           |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO       | ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN                                    | Satuan | CAPAIAN KINERJA |           |           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                     |        | 2019            | 2020      | 2021      | 2022      |
| 2.3.3.1  | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan                   |        |                 |           |           |           |
|          | Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Indragiri Hilir                | Ton    | 54.271,82       | 54.271,82 | 60.330,35 | 70.895,01 |
|          | Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Indragiri Hilir               | Ton    | 54.271,82       | 2.104,15  | 2.484,55  | 4.831,75  |
| 2.3.3.2. | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata                               |        |                 |           |           |           |
|          | Kunjungan Wisatawan                                                 | Orang  | 91137           | 51728     | 56728     | 42127     |
|          | Tingkat Hunian                                                      | Kamar  | 15736           | 7868      | 10868     | 21758     |
| 2.3.3.3. | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian                                |        |                 |           |           |           |
|          | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB | Persen | 4,00            | 3,50      | 4,01      | 4,34      |
|          | Produktivitas padi                                                  | Kw/Ha  | 36,61           | 40,2      | 42,37     | 40,72     |
|          | Luas Panen Padi                                                     | Ha     | 19.159,29       | 19.516,84 | 15.520,17 | 13.820,60 |
|          | Produksi Padi                                                       | Ton    | 70.138,75       | 78.458,70 | 65.755,10 | 56.274,74 |
|          | Produksi Beras                                                      | Ton    | 40.045,57       | 45.027,78 | 37.737,13 | 32.296,29 |
|          | Konsumsi Beras                                                      | Ton    | 64.083,64       | 64.457,29 | 65.287,17 | 63.832,22 |
|          | Produktivitas Jagung                                                | Kw/Ha  | n/a             | 24,29     | n/a       | 36,62     |
|          | Produktivitas Kedelai                                               | Kw/Ha  | n/a             | 11,03     | n/a       | 11,06     |
|          | Luas Areal Tanaman Perkebunan                                       |        |                 |           | 348.115   | 348.205   |
|          | Kelapa Sawit/Oil Palm                                               | Ha     | 81.346          | 81.737    | 81.795    | 82.025    |
|          | Kelapa Dalam/Coconut                                                | Ha     | 228.077,19      | 225.417   | 226.037   | 226.037   |
|          | Kelapa Hibrida/Hybrid Coconut                                       | Ha     | 35.855,02       | 35.564    | 35.398    | 35.195    |
|          | Karet/Rubber                                                        | Ha     | 3.408           | 3.392     | 3.264     | 3.342     |
|          | Kopi/Coffee                                                         | Ha     | 642,15          | 639       | 632       | 632       |
|          | Kakao/Cocoa                                                         | Ha     | 954             | 944       | 989       | 974       |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO       | ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN                      | Satuan   | CAPAIAN KINERJA |                |                |                |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                       |          | 2019            | 2020           | 2021           | 2022           |
| 2.3.3.4. | Produksi Tanaman Perkebunan                           |          |                 |                |                |                |
|          | Kelapa Sawit/Oil Palm                                 | Ton      | 267.045,85      | 268.881,67     | 269.137,95     | 269.983,88     |
|          | Kelapa Dalam/Coconut                                  | Ton      | 264.449,67      | 262.992,42     | 263.731,86     | 263.732,34     |
|          | Kelapa Hibrida/Hybrid Coconut                         | Ton      | 50.826,91       | 50.367,80      | 50.155,74      | 49.794,96      |
|          | Karet/Rubber                                          | Ton      | 4.721,64        | 4.698,63       | 4.540,58       | 4.646,23       |
|          | Kopi/Coffee                                           | Ton      | 251             | 243,71         | 242,74         | 242,74         |
|          | Kakao/Cocoa                                           | Ton      | 452,38          | 436,73         | 468,07         | 458,65         |
| 2.3.3.5. | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan                |          |                 |                |                |                |
|          | Volume Ekspor                                         | Ton      | 560.151,86      | 526.173,09     | 465.779,78     | 509.863,70     |
|          | Nilai Ekspor                                          | US \$    | 303.961.994,10  | 349.419.461,02 | 339.623.796,53 | 371.081.702,27 |
|          | Volume Impor                                          | Ton      | 22.802,21       | 21.328,38      | 20.733,43      | 20.827,95      |
|          | Nilai Impor Kabupaten Indragiri Hilir                 | US \$    | 68.779.597      | 65.652.804     | 71.969.318     | 73.143.626     |
| 2.3.4.   | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian              |          |                 |                |                |                |
|          | Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB   | Persen   | 23,63           | 24,06          | 24,63          | 25,06          |
| 2.3.4.1  | <b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>            |          |                 |                |                |                |
|          | Sekretariat Daerah                                    |          |                 |                |                |                |
| 2.3.5.   | Nilai AKIP                                            | Prediket | CC<br>(55.12)   | B<br>(62.79)   | B<br>(63.85)   | B<br>(64.10)   |
|          | Nilai LPPD                                            | Prediket | Tinggi          | Sangat Tinggi  | Sangat Tinggi  | Sangat Tinggi  |
|          | Indeks Reformasi Birokrasi                            | Prediket | B<br>(60.05)    | B<br>(60.37)   | B<br>(60.42)   | B<br>(63.07)   |
|          | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>            |          |                 |                |                |                |
| 2.3.5.1. | Perencanaan                                           |          |                 |                |                |                |
|          | Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) | Dokumen  | 3               | 2              | 2              | 3              |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO       | ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN                                                | Satuan   | CAPAIAN KINERJA    |                            |                            |                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                 |          | 2019               | 2020                       | 2021                       | 2022                       |
| 2.3.5.2. | Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah                              | Persen   | 88,79              | 93,96                      | 91,35                      | 93,34                      |
|          | Keuangan                                                                        |          |                    |                            |                            |                            |
| 2.3.5.3. | Indeks pengelolaan Keuangan Daerah                                              | Nilai    | 57,22              | 58,49                      | 75,47                      | 77.74*                     |
|          | Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan                                      |          |                    |                            |                            |                            |
| 2.3.5.5. | Indeks Profesionalitas ASN                                                      | Nilai    | n/a                | 52,4                       | 52,3                       | 57,06                      |
|          | Indeks Sistem Merit                                                             | Nilai    | n/a                | 262,5                      | 281,5                      | 289                        |
| 2.3.6.   | Penelitian dan Pengembangan                                                     |          |                    |                            |                            |                            |
|          | Indeks Inovasi Daerah                                                           | Prediket | n/a                | Sangat Inovatif<br>(1.630) | Sangat Inovatif<br>(62.42) | Sangat Inovatif<br>(75.98) |
| 2.3.6.   | Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah                                           | Persen   | n/a                | 80,00                      | 100,00                     | 82,50                      |
|          | <b>Pengawasan</b>                                                               |          |                    |                            |                            |                            |
| 2.3.7.   | Maturitas SPIP                                                                  | Nilai    | 3<br>(Terdefinisi) | 3<br>(Terdefinisi)         | 3<br>(Terdefinisi)         | 3<br>(Terdefinisi)         |
|          | Kapabilitas APIP                                                                | Nilai    | 3<br>(Integrated)  | 3<br>(Integrated)          | 3<br>(Integrated)          | 3<br>(Integrated)          |
| 2.3.7.   | Indeks Integritas                                                               | Nilai    | n/a                | n/a                        | 73,2                       | 72,65                      |
|          | Sekretariat Dewan                                                               | Persen   | 100                | 100                        | 100                        | 100                        |
| 2.3.7.   | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan<br>terhadap Layanan Sekretariat DPRD | Persen   | 100                | 100                        | 100                        | 100                        |
|          | Persentase Prolegda yang diselesaikan                                           | Persen   | 100                | 100                        | 100                        | 100                        |



Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil pembangunan yang diharapkan dari suatu tujuan pembangunan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berbagai Capaian pembangunan seharusnya dapat terlihat pada sasaran pembangunan (sasaran pokok) dengan indikator sebagai tolok ukurnya. Pada analisis kinerja pembangunan jangka menengah Indragiri Hilir dapat dilihat pada capaian pembangunan selama empat pembangunan tahunan yakni tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022.

Kinerja Pembangunan dapat dilihat dari capaian indikator sasaran pembangunan sebagai pengejawantahan perwujudan visi dan misi pembangunan. Adapun capaian pembangunan Indragiri Hilir pada awal pelaksanaan pembangunan RPJMD masih belum maksimal dengan capaian “Sangat Tinggi” hanya sebesar 36,96 persen dan capaian “Tinggi” sebesar 4,35 persen. Adapun yang memiliki status “Sangat Rendah” mencapai 2,17. Belum optimalnya analisis ini disebabkan oleh minimnya data dan informasi yang diperoleh dari indikator yang telah disusun sehingga masih memerlukan perbaikan pemenuhan data dan informasi.

Pada tahun kedua pelaksanaan pembangunan jangka menengah, pencapaian pembangunan mengalami peningkatan dimana capaian dengan status “Sangat Tinggi” sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 36,96 persen dan sementara capaian “Tinggi” mengalami kenaikan menjadi 8,70 persen. Kondisi ini tentu saja merupakan peningkatan dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah dimana capaian status meningkat kualitasnya. Adapun yang memiliki status “Sangat Rendah” mencapai 0,00 persen. Pemenuhan data dan informasi pada tahun ini sudah cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada tahun 2021, pelaksanaan pembangunan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 dimana capaian pembangunan dengan status “Sangat Tinggi” sama dengan tahun sebelumnya yakni 36,96 persen. Sementara capaian lain mengalami penurunan, seperti pada capaian “Tinggi” turun menjadi 6,52 persen. Terlebih capaian status “Sangat Rendah” yang naik signifikan dari 0,00 Persen tahun 2020 menjadi 4,35 persen.



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Pada tahun 2022, pelaksanaan pembangunan Kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama pada kinerja sangat tinggi yakni mencapai 41,30 persen, namun status N/A atau data tidak tersedia mengalami kenaikan menjadi 6.52 persen. Hal ini diakibatkan oleh belum tersedianya data-data realisasi kinerja terutama pada indikator yang bersifat sektoral yang bersumber dari Perangkat Daerah.

Secara lengkap, capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

**Tabel II – 54**  
**Capaian Indikator Sasaran RPJMD (Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020**

| No | SASARAN                                                                                | INDIKATOR                                                                                      | TARGET KINERJA |                 |                 |                 | REALISASI |                 |                 |                 | CAPAIAN KINERJA (%) |        |       |       | Rata-Rata |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------|-------|-------|-----------|
|    |                                                                                        |                                                                                                | 2019           | 2020            | 2021            | 2022            | 2019      | 2020            | 2021            | 2022            | 2019                | 2020   | 2021  | 2022  |           |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                 | Nilai AKIP (Predikat)                                                                          | B              | B               | B               | B               | CC        | B               | B               | B               | 75                  | 100    | 100   | 100   | 100       |
|    |                                                                                        | Nilai LPPD ( Nilai )                                                                           | Tinggi         | Sanga Tinggi    | Sanga Tinggi    | Sanga Tinggi    | Tinggi    | Sanga Tinggi    | Sanga Tinggi    | Sanga Tinggi    | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100       |
|    |                                                                                        | Opini BPK atas LKPD (predikat)                                                                 | WTP            | WTP             | WTP             | WTP             | WTP       | WTP             | WTP             | WTP             | 100                 | 100    | 100   | 100   | 96.14     |
|    |                                                                                        | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                 | 2.07           | 2.08            | 2.08            | 2.09            | 1.75      | 2.4             | 2.24            | 2.13            | 84.54               | 100    | 100   | 100   | 100       |
|    |                                                                                        | Indeks Inovasi Daerah (Kategori)                                                               | N/A            | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | N/A       | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | N/A                 | 100    | 100   | 100   | 97.82     |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                                                            | 78.47          | 84.31           | 85.12           | 87.65           | 82.38     | 83.15           | 83.4            | 83              | 100                 | 99     | 98    | 95    | 64.11     |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman                               | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih                 | 29.00          | 35.00           | 42.00           | 48.00           | 17.29     | 26.93           | 26.99           | 26.69           | 59.62               | 76.94  | 64.26 | 55.60 | 58.17     |
|    |                                                                                        | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak                    | 40.00          | 46.00           | 57.00           | 65.00           | 25        |                 |                 | 35.00           | 62.50               |        |       | 53.85 | 65.49     |
| 4  | Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum                                              | Persentase Penyediaan Infrastruktur                                                            | 57.80          | 58.24           | 58.67           | 59.50           | 37.85     |                 |                 |                 | 65.49               |        |       |       |           |
| 5  | Meningkatnya pelayanan transportasi                                                    | Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%) | 100.00         | 100.00          | 100.00          | 100.00          | 55.00     | 78.72           | 40.24           | N/A             | 55.00               | 78.72  | 40.24 | N/A   | 98.71     |
| 6  | Meningkatnya produktivitas sektor pertanian                                            | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB                            | 44.68          | 46.78           | 47.54           | 48.56           | 44.68     | 46.77           | 47.5            | 46.10           | 100                 | 99.98  | 99.92 | 94.93 | 87.07     |
| 7  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                 | Indeks Kualitas Udara                                                                          | 92.91          | 92.15           | 93.12           | 93.5            | 52.22     | 92.15           | 88.63           | 90.61           | 56.20               | 100.00 | 95.18 | 96.91 | 75.95     |
|    |                                                                                        | Indeks Kualitas Air                                                                            | 52.22          | 52.86           | 52.99           | 52.55           | 24.69     | 32.86           | 50              | 53.78           | 47.28               | 62.16  | 94.36 | 100   | 94.70     |
|    |                                                                                        | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                                                  | 24.69          | 50.72           | 52.55           | 53.87           | 92.91     | 50.72           | 46.11           | 49.05           | 100.00              | 100    | 87.75 | 91.05 | 96.76     |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | SASARAN                                                                               | INDIKATOR                                                        | TARGET KINERJA |        |        |        | REALISASI |         |         |         | CAPAIAN KINERJA (%) |       |        |       | Rata-Rata |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------------------|-------|--------|-------|-----------|
|    |                                                                                       |                                                                  | 2019           | 2020   | 2021   | 2022   | 2019      | 2020    | 2021    | 2022    | 2019                | 2020  | 2021   | 2022  |           |
| 8  | Meningkatnya kualitas pendidikan                                                      | Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >25 tahun (tahun)           | 7.22           | 7.23   | 7.52   | 8      | 7.22      | 7.23    | 7.24    | 7.26    | 100.00              | 100   | 96.28  | 90.75 | 99.23     |
|    |                                                                                       | Harapan Lama Sekolah (tahun)                                     | 11.90          | 11.91  | 12.00  | 12.50  | 11.9      | 11.91   | 11.93   | 12.19   | 100.00              | 100   | 99.42  | 97.52 | 99.41     |
| 9  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                             | Angka Harapan Hidup (tahun)                                      | 67.66          | 67.85  | 68.05  | 69.90  | 67.66     | 67.85   | 67.98   | 68.31   | 100.00              | 100   | 99.90  | 97.73 | 78.08     |
| 10 | Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat                                           | Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)                 | 11,987         | 12,724 | 13,565 | 13,800 | 10382     | 9954    | 9,945   | 10234   | 86.61               | 78.23 | 73.31  | 74.16 | 80.37     |
| 11 | Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan                     | Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat                       | 60.00          | 65.00  | 70.00  | 75.00  | 52.35     | 53.5    | 55.00   | 55      | 87.25               | 82.31 | 78.57  | 73.33 | 80.37     |
| 12 | Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat           | Tingkat Keberdayaan Masyarakat                                   | 60.00          | 65.00  | 70.00  | 75.00  | N/A       | N/A     | N/A     | N/A     | N/A                 | N/A   | N/A    | N/A   | 99.09     |
| 13 | Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                  | 82.57          | 83.41  | 83.58  | 84     | 82.57     | 82.34   | 82.37   | N/A     | 100.00              | 98.72 | 98.55  | N/A   | 96.97     |
| 14 | Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat                   | Indeks Rasa Aman                                                 | 66.66          | 75.8   | 75.8   | 75.8   | N/A       | N/A     | N/A     | 73.5    | N/A                 | N/A   | N/A    | 96.97 | 96.97     |
| 15 | Meningkatnya perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak              | Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100            | 100    | 100    | 100    | 100       | 53.4483 | -62.963 | N/A     | 100.00              | 53.45 | -62.96 | N/A   | 98.10     |
| 16 | Menurunnya tingkat kemiskinan                                                         | Persentase Penduduk Miskin                                       | 6.54           | 5.93   | 5.75   | 5.34   | 6.54      | 5.93    | 6.18    | 5.98    | 100.00              | 100   | 92.52  | 99.88 | 100       |
| 17 | Menurunnya tingkat pengangguran                                                       | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                               | 4.55           | 4.35   | 4.3    | 4      | 4.55      | 4.55    | 2.66    | 1.5     | 100.00              | 100   | 100.00 | 100   | 110       |
| 18 | Meningkatnya produksi sektor potensial                                                | PDRB Perkapita (Juta Rupiah)                                     | 60.46          | 68.6   | 69.2   | 69.8   | 84.8      | 99.27   | 111.43  | 126.25  | 140.26              | 100   | 100.00 | 100   | 100       |
| 19 | Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah                                             | Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)                             | 385.23         | 448.6  | 1681.9 | 2782.6 | 385.23    | 448.597 | 1855.34 | 8013.01 | 100.00              | 100   | 100.00 | 100   | 89.53     |
| 20 | Meningkatnya nilai ekspor daerah                                                      | Nilai ekspor bersih perdagangan (juta Rupiah)                    | 301.51         | 409.15 | 410.12 | 412.67 | 303.96    | 349.419 | 339.624 | 371.082 | 100.00              | 85.40 | 82.81  | 89.92 | 89.53     |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | SASARAN                        | INDIKATOR                | TARGET KINERJA |      |        |        | REALISASI |      |        |        | CAPAIAN KINERJA (%) |      |      |      | Rata-Rata |
|----|--------------------------------|--------------------------|----------------|------|--------|--------|-----------|------|--------|--------|---------------------|------|------|------|-----------|
|    |                                |                          | 2019           | 2020 | 2021   | 2022   | 2019      | 2020 | 2021   | 2022   | 2019                | 2020 | 2021 | 2022 |           |
| 21 | Meningkatnya daya saing daerah | Indeks Daya Saing Daerah | N/A            | N/A  | Rendah | Sedang | N/A       | N/A  | Sedang | Tinggi | N/A                 | N/A  | 100  | 100  | 100       |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi dimaksud merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memprakarsai dan memperbarui sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, inovasi lebih ditekankan bagaimana pemerintah daerah membuat gagasan baru baik melalui teknologi informasi maupun secara klasikal, yang bertujuan meningkatkan efektif dan efisiensi pelayanan kepada publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, masyarakat maupun stakeholder mampu mendapatkan optimalisasi dari apa yang diharapkan dengan lebih cepat, relevan dan berkualitas. Adapun inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dirincikan sebagai berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

**Tabel II.55**  
**Inovasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir**

| NO                                                                                                                                  | JUDUL INOVASI                                                                                                                                             | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Inovasi Daerah Tema Covid -19 Tahun 2020</b>                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                         |             |               |
| 1                                                                                                                                   | Video New Normal Life Sektor Pasar Modern Di Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                    | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 2                                                                                                                                   | Video New Normal Life Sektor Pasar Tradisional                                                                                                            | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 3                                                                                                                                   | Video New Normal Life Sektor Transportasi Umum Di Kabupaten Indragiri Hilir                                                                               | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 4                                                                                                                                   | Video New Normal Life Sektor Ptsp Di Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                            | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 5                                                                                                                                   | Video New Normal Life Sektor Restoran Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                           | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 6                                                                                                                                   | Video New Normal Life Sektor Perhotelan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                         | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 7                                                                                                                                   | Video New Normal Life Sektor Objek Wisata Di Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                    | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                         |             |               |
| <b>Inovasi Daerah Tahun 2020 Skor Indeks Penilaian Kemendagri 1.630 (Sangat Inovatif) Peringkat 101 Kabupaten Seluruh Indonesia</b> |                                                                                                                                                           |                                                                                         |             |               |
| 1                                                                                                                                   | Gerakan Magrib Mengaji                                                                                                                                    | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 2                                                                                                                                   | Program Inovasi "Posyandu Bougenville" Upt Puskesmas Tembilahan Kota                                                                                      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 3                                                                                                                                   | Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                             | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digital | OPD           |
| 4                                                                                                                                   | Pembangunan Pos Keamanan Terpadu Satu Atap (Babinsa Dan Bhabinkamtibmas)                                                                                  | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digital | OPD           |
| 5                                                                                                                                   | Simpati (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir)                                                                                    | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Digital     | Kepala Daerah |
| 6                                                                                                                                   | Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Aplikasi Informasi Pemerintah Dan Masyarakat (Inpas) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Digital     | Kepala Daerah |
| 7                                                                                                                                   | Peningkatan Sistem Informasi Kebencanaan Di Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                     | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Digital     | Kepala        |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO                                                                                                                                | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                             | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |             | Daerah        |
| 8                                                                                                                                 | Layanan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Di Kabupaten Indragiri Hilir (Lokasi Kecamatan Kemuning)                                                                                    | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 9                                                                                                                                 | Gerakan 1 Desa 1 Kelurahan 1 Rumah Tahfidz Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Dmij) Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir                                                                      | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 10                                                                                                                                | Inovasi Pelayanan Forum Anak Peduli Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                                             | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 11                                                                                                                                | Inovasi Layanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Akupuntur Medik) Di Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 12                                                                                                                                | Dmac-Hd (Digital Media Analytic Center – Health District)                                                                                                                                                 | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Digita      | OPD           |
| 13                                                                                                                                | Inovasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                          | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digita  | OPD           |
| <b>Inovasi Daerah Tahun 2021 Skor Indeks Penilaian Kemendagri 62.42 (Sangat Inovatif) Peringkat 7 Kabupaten Seluruh Indonesia</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |             |               |
| 1                                                                                                                                 | Tim Sirtu (Penyisir Peraturan) Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 2                                                                                                                                 | Inovasi "Nasi Uduk Inhil" (Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Indragiri Hilir) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir                                | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 3                                                                                                                                 | Inovasi "Pidada Inhil" (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                                   | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 4                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Demi Tuan Inhil" (Dermaga Miring Untuk Anak Negeri Indragiri Hilir) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                           | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 5                                                                                                                                 | Inovasi "Piagam Pualam" (Pelayanan Prima 3 Jam Pengurusan Izin Reklame) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Indragiri Hilir                                                                          | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 6                                                                                                                                 | Inovasi "Si Atah Padi" (Sidang Istbat Nikah Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 7                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Layanan Kopi Inhil" (Layanan Konsultasi Online Pengawasan Intern Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                   | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 8                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Teman Sehati" (Tanah Merah Menjemput Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir) Produk Inovasi Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir                                                   | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 9                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Sultan" (Sistem Kemudahan Layanan Tata Ruang) Produk Inovasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir                                                                | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 10                                                                                                                                | Inovasi Daerah "Si Prima 15 Menit" (Inovasi Pelayanan Ramah, Menyenangkan, Akurat Dan Cepat 15 Menit) Produk Inovasi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir                                         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                                      | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 11 | Inovasi Pemanfaatan Air Budidaya Lele Bioflok Untuk Tanaman Produk Inovasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                               | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 12 | Inovasi Daerah "Si Kapal Layar" (Sitem Informasi Kas Dan Pencairan Digital Langsung Bayar) Produk Inovasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                 | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 13 | Inovasi Daerah "Biore" (Bilik Video Conference) Produk Inovasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir                                                                   | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 14 | Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Informasi Pemerintah Dan Masyarakat (Inpas) Tv Digital Produk Inovasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir            | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Tekno logi  | OPD           |
| 15 | Inovasi Daerah "Gerakan Satu Hati Peduli Stunting Di Kabupaten Indragiri Hilir" Produk Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir                                                    | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 16 | Inovasi Daerah "Permata Trc-19" (Pemutus Rantai Tim Reaksi Covid -19) Produk Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 17 | Inovasi Daerah "Sop Pais Umi" (Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Usaha Mikro) Produk Inovasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir                               | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 18 | Inovasi "Si Papa Ku" (Aplikasi Pendamping Penatausahaan Keuangan) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Produk Inovasi Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 19 | Inovasi Daerah "Teras Kita" (Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Produk Inovasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                               | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digital | OPD           |
| 20 | Inovasi Daerah "Tim Informasi Cakra" (Cepat, Akurat, Kredibel, Respon Dan Akuntabel) Produk Inovasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir                                                    | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 21 | Inovasi Daerah "D' Bumil O" (Data Ibu Hamil Online) Produk Inovasi Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 22 | Inovasi Daerah "Kelapa Muda" (Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah Dan Akurat) Produk Inovasi Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir                                                                     | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 23 | Inovasi Daerah "Salaman" (Satuan Relawan Pemadam Kebakaran) Produk Inovasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 24 | Inovasi Daerah "Sapa Rasa" (Sapa Pasien, Rangkul Dengan Santun) Produk Inovasi Rsud Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir                                                                             | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 25 | Inovasi Daerah "Sagu Mandah" (Inovasi Sistem Akuntabilitas Guna Untuk Masyakat Lebih Mudah) Produk Inovasi Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir                                                              | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 26 | Inovasi Daerah "Paten Pepes" (Pelayanan Andmistrasi Terpadu Kecamatan Spesial Pesisir) Produk Inovasi Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir                                                            | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 27 | Inovasi Daerah "Tim Si Cepat Peduli Ham" (Tim Koordinasi Percepatan Kabupaten Indragiri                                                                                                                            | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non         | OPD           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                     | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    | Hilir Peduli Ham) Produk Inovasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                        |                                                                                         | Digital     |           |
| 28 | Inovasi Daerah "Korsi Panas" (Kontak Informasi Pelayanan Akuntabel Dan Sistematis) Produk Inovasi Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir                                                    | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 29 | Inovasi Daerah "Inti Reteh" (Registrasi Online Surat Pindah Di Kecamatan Reteh) Produk Inovasi Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir                                                          | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 30 | Inovasi Daerah "Tanam Kelapa" (Tamu Senang, Nyaman, Keamanan Dan Pelayanan Prima) Produk Inovasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD       |
| 31 | Inovasi Daerah "Tipekk" (Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan) Produk Inovasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                             | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digital | OPD       |
| 32 | Inovasi Daerah "Tim Trembesi" (Tim Percepatan Pelayanan Pelatihan Berbasis Kompetensi) Produk Inovasi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir                            | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Digital     | OPD       |
| 33 | Inovasi Daerah "Simpidade & Kiambang" (Sistim Informasi Pelayanan Dari Desa & Kelurahan, Inovatif, Murah, Berkualitas, Menyenangkan) Produk Inovasi Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 34 | Inovasi Daerah "Ada Si Udin Ocit" (Administrasi Surat Izin Dispensasi Nikah Online Bagi Calon Pengantin) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir                       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 35 | Inovasi Daerah "Sikes" (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Secara Online) Produk Inovasi Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir                                                             | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 36 | Inovasi Daerah "Sapat" (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi) Produk Inovasi Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir                                                  | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 37 | Inovasi Daerah "Tim Kape Muda" (Tim Koordinasi Penyambutan Tamu Daerah) Produk Inovasi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                       | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digital | OPD       |
| 38 | Inovasi Daerah "Tim Persada" (Tim Percepatan Kerjasama Daerah) Produk Inovasi Bagian Kerjasama Dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                        | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digital | OPD       |
| 39 | Inovasi Daerah "Tali Serat" (Taman Literasi Sekolah Dan Masyarakat) Produk Inovasi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                  | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD       |
| 40 | Inovasi Daerah "Wardan-Mbak Ikha" (Warga Damai, Aman, Membangun Kampung Indah, Kreatif, Harmonis, Dan Asri) Produk Inovasi Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir                   | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD       |
| 41 | Inovasi Daerah "Jam Tangan" (Jaga Kampung Dengan Semangat Gotong Royong) Produk Inovasi Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir                                                      | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD       |
| 42 | Inovasi Daerah "Kodok's Melonchat" (Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telepon Dan Chat) Produk Inovasi Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 43 | Inovasi Daerah "Invest" (Inovasi Pengurusan Surat Tanah) Produk Inovasi Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir                                                                          | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO                                                                                                                                 | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                                                                               | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 44                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Si Pelangi Pagi" (Sistem Pengaduan Dan Layanan Administrasi Pelangiran Penggunaan Aktif Teknologi) Produk Inovasi Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir                                                                            | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 45                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Pantai Cermin" (Pelayanan Tani Cerdas, Cermat Dan Integrasi) Produk Inovasi Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                     | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 46                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Slip" (Sistem Layanan Informasi Perkim) Produk Inovasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                     | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 47                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Layanan Siaap" (Sistem Aplikasi Administrasi Produk Hukum Daerah) Produk Inovasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                       | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 48                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Bu Kia Pertama" (Buku Kesehatan Ibu Dan Anak Menjadi Persyaratan Tambahan Masuk Sekolah) Produk Inovasi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 49                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Kelapa Kopyor Bisa" (Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Yang Berorientasi Bisnis Agro) Produk Inovasi Pemerintah Kecamatan Sungai Batang Bekerjasama Dengan Tim Penggerak Pkk Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Masyarakat    |
| 50                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Tim Koordinasi Percepatan Kampung Qur'ani" Produk Inovasi Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                                         | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 51                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Sipetus" (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                                   | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 52                                                                                                                                 | Inovasi Daerah "Tim Siber" (Tim Penyisir Kebersihan) Produk Inovasi Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| <b>Inovasi Daerah Tahun 2022 Skor Indeks Penilaian Kemendagri 67.63 (Sangat Inovatif) Peringkat 11 Kabupaten Seluruh Indonesia</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |             |               |
| 1                                                                                                                                  | Sipori (Sistem Pelayanan Obat Rawat Inap) Produk Inovasi Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                                              | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 2                                                                                                                                  | Pembelok Padi (Pemurnian Benih Lokal Padi) Produk Inovasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                               | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 3                                                                                                                                  | Amal Setyacu (Animal Safety And Rescue) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                             | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 4                                                                                                                                  | Aplikasi Pidada Inhil (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                       | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | Kepala Daerah |
| 5                                                                                                                                  | Sigap Airi (Sistem Informasi Geografis Aplikasi Perpipaian Air Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                           | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 6                                                                                                                                  | Timpas (Tim Patroli Sampah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                            | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 7                                                                                                                                  | Si Panglink (Sistem Pengaduan Lingkungan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas                                                                                                                                                                        | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno       | OPD           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                                                      | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|    | Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                                                                                          |                                                                                         | logi        |            |
| 8  | Inovasi Lapor Urc Saja Bermenu Si Pentol Kuah (Produk Inovasi Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir)                                                                                               | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD        |
| 9  | Inovasi Sahabat Sejiwa Podcast Satpol Pp (Produk Inovasi Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir)                                                                                                    | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD        |
| 10 | Inovasi Japri (Jemput Antar Berkas Perizinan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                        | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD        |
| 11 | Inovasi Duri Bidara (Dialog Radio Interaktif Bicara Daerah Kita) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir                                            | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD        |
| 12 | Inovasi Damkar Road To School (Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir)                                                                                            | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD        |
| 13 | Budaya Sijata Anadara Granosa (Budidaya Sistem Jaring Tancap Anadara Granosa) Produk Inovasi Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir                                                             | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Digital     | Masyarakat |
| 14 | Kelola Nypa Palm (Kegiatan Pengelolaan Nypa Palm) Produk Inovasi Bentuk Lainnya Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir                                                                          | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | ASN        |
| 15 | Pak Sani (Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini) Produk Inovasi Pelayanan Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD        |
| 16 | Inovasi Tulis (Waktu Hemodialisa) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD        |
| 17 | Sipori (Sistem Pelayanan Obat Rawat Inap) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                               | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD        |
| 18 | Satgas P2ab (Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Air Bersih) Produk Inovasi Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                                    | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD        |
| 19 | Pembelok Padi (Pemurnian Benih Lokal Padi) Produk Inovasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                      | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD        |
| 20 | Kotaku Online (Konsultasi Penatausahaan Keuangan Online) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                 | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD        |
| 21 | Laksa Inhil (Layanan Konsultasi Online Kerja Sama Daerah Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Bagian Kerja Sama Dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD        |
| 22 | Si Punak (Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan Perempuan Dan Anak) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD        |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                    | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 23 | Inovasi E-Absensi Asn Kab. Inhil (Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir)                                 | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD       |
| 24 | Database Inhil (Desa Tangguh Bencana Se Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD       |
| 25 | Forum Pembaharuan Inhil (Forum Koordinasi Bersama Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD       |
| 26 | Inovasi Sahabat (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 27 | Si Perjake (Sistem Pendaftaran Jaminan Kesehatan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021                                                         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 28 | Inovasi Spion Rs (Sistem Pendaftaran Online Rumah Sakit) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir                                     | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 29 | Inovasi Pemeran Si Kancil Inhil (Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 30 | Kreasi (Berkreativitas Di Gemilang Televisi) Produk Inovasi Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir                                                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 31 | Si Mantap (Sistem Informasi Manajemen Tata Pengaduan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir                                        | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 32 | Simpati Terintegrasi (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir Terintegrasi) Produk Inovasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Indragiri Hilir        | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 33 | Asinan (Asistensi Perizinan Kateman) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 34 | Layanan Siaap Versi Ii (Sistem Aplikasi Admnistrasi Produk Hukum Daerah Versi Ii) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Indragiri Hilir                        | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD       |
| 35 | Kami (Kolom Aspirasi Masyarakat) Berbasis Online Sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Indragiri Hilir                                                         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 36 | Inovasi Juang (Pejuang Untuk Atasi Banjir Dan Genangan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir                                       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 37 | Sapu Ob (Simpati Pada Pasien Usai Operasi Bedah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir                                                  | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 38 | Sidoi Meloncat (Sistem Infomasi Daftar Online Melalui Telepon Dan Chating) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir                        | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |
| 39 | Sepeda Ontel (Sistem Penyerahan Spm Online Terkoneksi Langsung) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                            | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD       |
| 40 | Sampan Layar (Sistem Pencairan Langsung Bayar) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                             | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD       |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                  | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 41 | Fokus Tuntas (Forum Koordinasi Penuntasan Stunting Terintegrasi) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir                                              | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 42 | Laju Perahu Inhil (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 43 | Rebana (Rumah Terdampak Bencana) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir                                                         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 44 | Sorum (Sistem Informasi Transportasi Umum) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                    | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 45 | Romantis (Mikro Dan Kecil Cepat, Nyaman Dan Gratis) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Indragiri Hilir                                                      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 46 | Aplikasi Simona (Sistem Informasi Monitoring Lapangan) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir               | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 47 | Pesta Padi (Perubahan Status Tanpa Di Urus) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir                                             | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Digital     | Kepala Daerah |
| 48 | Tanjak Pelepah {Tim Peningkatan Pajak Untuk Pendataan, Validasi Dan Penepatan Pajak Air Tanah} Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digital | OPD           |
| 49 | Sinema Gemilang (Inovasi Nenas Madu Gemilang) Produk Inovasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir                                               | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 50 | Pul Kompas (Pusat Layanan Kelompok Masyarakat Peduli Stunting) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir                                                       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 51 | Tajuk Reteh (Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir                                                                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 52 | Inovasi E-Cuti (Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir)                                                 | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 53 | Tipekk Terintegrasi (Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Terintegrasi) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 54 | Bu Kia Langsing (Buku Kesehatan Ibu Dan Anak Sebagai Langkah Awal Pencegahan Dan Pemantauan Stunting) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir         | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 55 | Peta Kan Online (Pencatatan Kapal Perikanan Online) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir                                                     | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 56 | Peta Koper Online (Pencatatan Komoditi Perikanan Online) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir                                                | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                                     | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 57 | Juklak Perkada (Pengajuan Dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah) Produk Inovasi Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 58 | Inovasi Si Petus Bergerak (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir                                                                       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 59 | Si Panda Sakti (Sistem Informasi Pengusulan Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Transportasi Sungai) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir                           | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 60 | E-Office Penatausahaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Elektronik (Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)                                   | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 61 | Sicepat (Inovasi Cermat Dan Tepat) Produk Inovasi Pelayanan Publik Administrasi Kecamatan Di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir                                                                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 62 | Udang Pedes (Usaha Perdagangan Peningkatan Ekonomi Desa) Bumdes Sumber Rezeki Produk Inovasi Desa Kelapa Patih Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir                                          | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 63 | Inovasi Muda Mudi (Mudah Urus Dokumen Anjab Abk Untuk Di Legalisasi) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                  | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Tekno logi  | OPD           |
| 64 | Inovasi Tanjung Simpang (Transportasi Antar Jemputan Anak Sekolah Gratis Di Pelangiran) Produk Inovasi Pelayanan Publik Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir                       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 65 | Inovasi Dm Dan Ht Center Bagi Pasien Diabetes Melitus Dan Hipertensi Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Upt. Puskesmas Kuala Enok Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir                                     | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | ASN           |
| 66 | Fokus Si Nona Rika (Forum Komunikasi Sistim Informasi Pelayanan Toko Daring Dan Katalog Lokal) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 67 | Rumah Indah Inhil (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 68 | Inovasi Kelapa Pandan Wangi (Kelompok Papa Peduli Jamban Keluarga Indragiri) Produk Inovasi Upt Puskesmas Tembilahan Hulu Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir                                               | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 69 | Cakra Bertajuk Linmas (Layanan Informasi Online Masyarakat) Produk Inovasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir                                                                            | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Tekno logi  | OPD           |
| 70 | Silayang Tuan (Sistem Layanan Pengumpulan Data Survey Dan Rekomendasi Penelitian) Produk Inovasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir                                                      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 71 | Pendekar Umkm (Pengembangan Desa Kolam Renang Dan Gerai Umkm) Produk Inovasi Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir                                                                    | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                     | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 72 | Si Tangkas (Sistem Pembangunan Tanggul Mekanik Dengan Swakelola) Produk Inovasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir                                        | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Kepala Daerah |
| 73 | Kelapa Hibrida (Kegiatan Pola Partisipatif Untuk Hilirisasi Bersifat Mandiri Dan Berdaya Saing) Produk Inovasi Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir    | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 74 | Periuk Wak Atan (Pelopor Tertib Ukur Daerah Wajib Akurat Alat Takaran Dan Ukurannya) Produk Inovasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 75 | Klinik Putri (Klinik Pelayanan Umum Terintegrasi) Produk Inovasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir                                    | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 76 | Pegulat (Pengembangan Produk Gula Semut) Produk Inovasi Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir                                                | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 77 | Inovasi Festival Teater Klasik Bangsawan Secara Virtual Produk Inovasi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir             | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Digital     | OPD           |
| 78 | Trc Rakit (Tim Reaksi Cepat Orang Sakit) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir                                             | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 79 | Inovasi Gratis (Inovasi Gerakan Paud Terintegrasi) Produk Inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir                                                      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | Kepala Daerah |
| 80 | Inovasi Osps Mpa (Online System Pengaduan Siaga Masyarakat Peduli Api) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Digital     | OPD           |
| 81 | Kopi (Konsultasi Online Pengawasan Intern) Terintegrasi Produk Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                               | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 82 | Si Tanduk (Sistim Imformasi Data Penduduk) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir                                       | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 83 | Si Pintar Kerja (Sistem Informasi Pendaftaran Pencari Kerja) Produk Inovasi Pelayanan Publik Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir     | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 84 | Inovasi Besung Mi-Seraga ( Bebas Pasung Membangun Insan Sehat Jiwa Dan Raga) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir      | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 85 | Klinik Kopukm (Klinik Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah) Produk Inovasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir                    | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 86 | Layanan Pesona (Layanan Pengaduan Stunting Online) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir                                   | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 87 | Inovasi Siap Desa (Evaluasi Apb Desa) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir                                        | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 88 | Simeldik (Sistem Informasi Manajemen Elektronik Peserta Didik) Ppdb Online Sd Negeri 032 Tembilahan Produk Inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir     | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| NO | JUDUL INOVASI                                                                                                                                                                                                           | BENTUK INOVASI                                                                          | JENIS       | INISIATOR     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 89 | Inovasi Simdana (Sistim Informasi Darurat Bencana) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                   | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 90 | Sapat 2.0 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 2.0) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir                                                                | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Tekno logi  | OPD           |
| 91 | Inovasi Geber Metik Nuja Annafi (Gerakan Bersama Membatik Nuja Annafi ) Produk Inovasi Lainnya Pada Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir                                                                        | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | Masyarakat    |
| 92 | Inovasi Kampung Kb (Keluarga Berkualitas) Terintegrasi Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 93 | Inovasi Forum Percepatan Corporate Social Responsibility (Csr) Produk Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                                                            | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 94 | Inovasi Pemenang (Pengembangan Nanas Gemilang) Produk Inovasi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                                | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 95 | Inovasi Sapradang (Pengembangan Sapi Perah Dan Pedaging) Produk Inovasi Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir                                                                                     | Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah | Non Digital | OPD           |
| 96 | Teman Sehati Terintegrasi Kecamatan Tanah Merah Menjemput Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir Tahun 2021 Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir                                 | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 97 | Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Upgrade                                                                                                                                                        | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah                                                 | Non Digital | Kepala Daerah |
| 98 | Inovasi Rumah Si Mas Appe (Rumah Singgah Masyarakat Dan Aparat Pemerintah) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Enok                                                                                              | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Non Digital | OPD           |
| 99 | Pantas Adek Tahu (Papan Transparansi Online Informasi Aset Desa Kecamatan Tembilahan Hulu) Inovasi Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir                                                                  | Inovasi Pelayanan Publik                                                                | Digital     | OPD           |



# BAB III

## GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu serta proyeksi kerangka pendanaan periode yang akan datang berdasarkan dari hasil analisis kebijakan keuangan masa lalu.

### **3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel III.1**  
**Skala interval Otonomi Fiskal**

| No | Derajat Otonomi Fiskal (DOF)<br>(%) | Kemampuan Keuangan Daerah |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 0,00-10,00                          | Sangat Kurang             |
| 2  | 10,01-20,00                         | Kurang                    |
| 3  | 20,01-30,00                         | Sedang                    |
| 4  | 30,01-40,00                         | Cukup                     |
| 5  | 40,01-50,00                         | Baik                      |
| 6  | >50                                 | Sangat Baik               |

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 DOFD Kabupaten Indragiri Hilir hanya mencapai angka 12% yang berarti masuk dalam kategori kurang. Memasuki tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 DOFD Kabupaten Indragiri Hilir turun menjadi 8% yang berarti masuk ke dalam kategori sangat kurang, Kemudian ditahun 2020 naik menjadi 9 % dan kembali naik menjadi 12% pada tahun 2021. Fluktuasi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan dan penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pendapatan Pajak Daerah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Indragiri Hilir yang sebesar 10% masih masuk kategori **sangat kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



**Tabel III.2**  
**Derajat Otonomi Fiskal Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

| Uraian                 | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | Rata-rata        |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Pendapatan             | 1.807.880  | 1.880.755 | 1.996.971 | 1.962.245 | 1.953.975  | <b>1.920.365</b> |
| Pendapatan Asli Daerah | 214.785    | 157.482   | 153.746   | 180.960   | 226.601    | <b>186.715</b>   |
| <b>Persentase</b>      | <b>12%</b> | <b>8%</b> | <b>8%</b> | <b>9%</b> | <b>12%</b> | <b>10%</b>       |

Sumber: *Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2017-2021 menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2% per tahun. Fluktuasi ini tidak lepas dari efek pandemi *Covid-19* yang membuat kontribusi pendapat asli daerah terkoreksi sebesar 12% pada tahun 2021. Pendapatan transfer dari pemerintah



pusat juga mengalami realokasi dan refocusing hingga mengalami kenaikan hanya sebesar 1%.

### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan “Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah”. Penerimaan daerah ini terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah dijelaskan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mana tidak perlu dibayarkan kembali. Termasuk pula penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

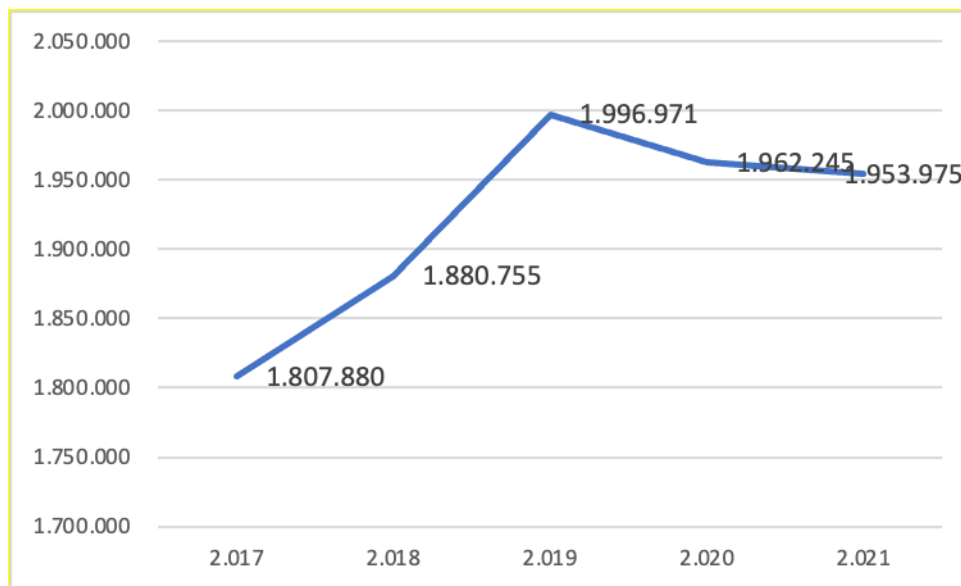
Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan



pendapatan daerah harus mampu menciptakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) mengalami trend fluktuatif menurun dengan rata-rata kenaikan sebesar 2% pertahun dari Rp. 1,8 miliar di tahun 2017 menjadi Rp. 1,9 miliar di tahun 2021.

**Gambar III.1**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**



*Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir terbaik pada tahun 2019. Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun.

PAD mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 3% pertahun dari tahun 2017 sebesar Rp. 214 miliar, turun cukup signifikan menjadi Rp. 157 miliar di tahun 2018 dan kembali naik menjadi Rp. 226 miliar ditahun 2021. Pendapatan transfer stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 1% pertahun dari Rp. 1,593 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 1,639 miliar di tahun 2021. Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah tercatat naik dengan rata-rata pertumbuhan 8% pertahun dari Rp. 71 miliar ditahun 2018, meningkat hingga Rp 88 miliar di tahun 2021.



Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pajak yang dipungut sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten meliputi: PBB-P2, BPHTB, PBJT (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Tenaga Listrik), Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum, meliputi :

- Pelayanan Kesehatan;
- Pelayanan Kebersihan;
- Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Pelayanan Pasar; dan
- Pengendalian Lalu Lintas

b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

- Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga;
- Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

- Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :

- Persetujuan Bangunan Gedung;
- Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Pengelolaan Pertambangan Rakyat

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden BUMD Kabupaten Indragiri Hilir di lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, dll.

**Gambar III.2**  
**Trend Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**



Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022(diolah)

Sumber pendapatan terbesar pada struktur pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berasal dari pendapatan transfer, disusul PAD dari pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah,



kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada kurun waktu 2017-2021, PAD konsisten naik dengan rata-rata pertumbuhan 3% dengan optimalisasi tertinggi pada sektor lain-lain PAD yang sah. Pembatasan kegiatan perekonomian, pelayanan umum dan pelayanan usaha serta adanya stimulus pengurangan pajak/retribusi menjadi beberapa alasan turunnya PAD di tahun 2018 dan 2019. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya penataan pengelolaan keuangan yang baik dan didukung oleh kebijakan yang kuat dari Kepala Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Tabel III.3

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

| No           | Uraian                                                       | REALISASI        |                  |                  |                  |                  | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|              |                                                              | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |                          |
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN</b>                                            | <b>1.807.880</b> | <b>1.880.755</b> | <b>1.996.971</b> | <b>1.962.245</b> | <b>1.953.975</b> | <b>2%</b>                |
| <b>01.01</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>214.785</b>   | <b>157.482</b>   | <b>153.746</b>   | <b>180.960</b>   | <b>226.601</b>   | <b>3%</b>                |
| 01.01.01     | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 27.550           | 32.646           | 35.514           | 55.499           | 44.025           | 16%                      |
| 01.01.02     | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 3.742            | 6.853            | 6.437            | 2.991            | 5.360            | 26%                      |
| 01.01.03     | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 11.522           | 13.564           | 10.363           | 9.950            | 16.789           | 15%                      |
| 01.01.04     | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 171.972          | 104.419          | 101.432          | 112.519          | 160.428          | 3%                       |
| <b>01.02</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>1.593.095</b> | <b>1.652.250</b> | <b>1.759.989</b> | <b>1.685.503</b> | <b>1.639.127</b> | <b>1%</b>                |
| 01.02.01     | Transfer Pemerintah Pusat                                    | 1.439.251        | 1.510.237        | 1.662.049        | 1.599.047        | 1.531.837        | 2%                       |
| 01.02.02     | Transfer Pemerintah Provinsi                                 | 153.845          | 142.014          | 97.940           | 86.455           | 107.290          | -7%                      |
| <b>01.03</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | <b>-</b>         | <b>71.022</b>    | <b>83.235</b>    | <b>95.783</b>    | <b>88.246</b>    | <b>8%</b>                |
| 01.03.01     | Pendapatan Hibah                                             | -                | 71.022           | 83.235           | 95.783           | 87.827           | 8%                       |
| 01.03.02     | Pendatan Dana Darut                                          | -                | -                | -                | -                | -                |                          |
| 01.03.03     | Pendapatan Lainnya                                           | -                | -                | -                | -                | 419              |                          |

Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)



Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi yang stabil namun belum maksimal, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan agar capaian rata-rata pertumbuhan dapat direalisasikan dengan baik dan maksimal.

## **2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

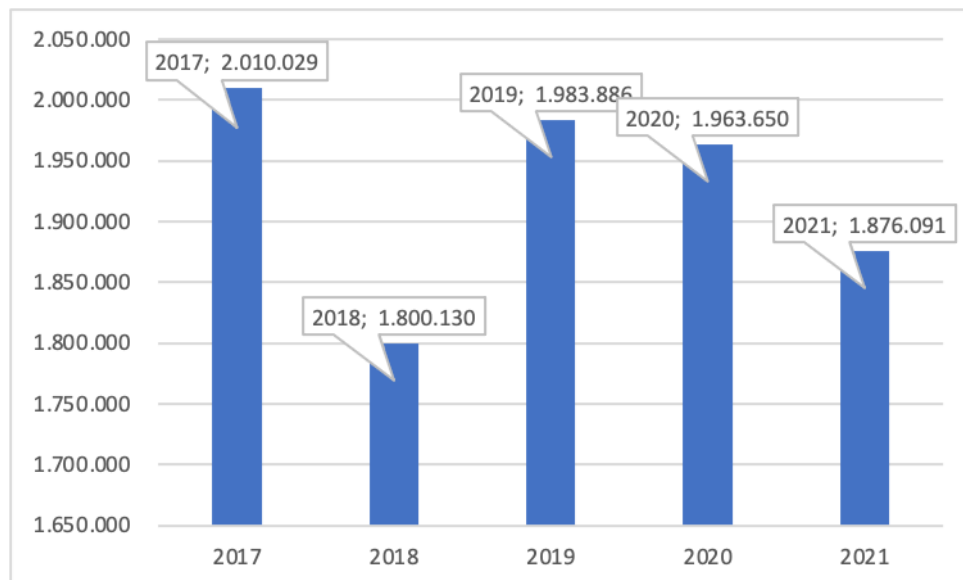


Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2017-2021 realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata menurun mencapai -1% per tahun dari Rp. 2 miliar pada tahun 2017, turun menjadi Rp. 1,8 miliar di tahun 2018, naik pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,9 miliar dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi Rp. 1,8 miliar.

Fluktuasi belanja tersebut seiring dengan fluktuasi pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar III.3**  
**Realisasi Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**



Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Dari gambar dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Belanja Daerah menunjukkan kinerja berfluktuatif dan cenderung stagnan dengan pertumbuhan -1%. Hal ini sangat kuat dipengaruhi oleh serapan belanja yang ada pada masing-masing OPD.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja



tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Fluktuasi belanja operasi sangat dipengaruhi oleh adanya belanja subsidi pada tahun 2020. Untuk belanja pegawai stagnan, hanya mengalami kenaikan 0% pertahun dari Rp. 775 miliar di tahun 2017, turun meskipun tidak signifikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 773 miliar dan stagnan sampai tahun 2021 sebesar Rp. 764 miliar.

Sedangkan belanja hibah yang tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 95 miliar rupiah dan turun pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 42 miliar. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang pada tahun 2017-2021 mengalami rata-rata kenaikan sebesar -12%.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

**Tabel III.4**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

| No           | Uraian                            | REALISASI        |                  |                  |                  |                  | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|              |                                   | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |                          |
| <b>2</b>     | <b>Belanja</b>                    | <b>2.010.029</b> | <b>1.800.130</b> | <b>1.983.886</b> | <b>1.963.650</b> | <b>1.876.091</b> | <b>-1%</b>               |
| <b>02.01</b> | <b>Belanja Operasi</b>            | <b>1.652.128</b> | <b>1.582.237</b> | <b>1.719.905</b> | <b>1.672.273</b> | <b>1.408.987</b> | <b>-4%</b>               |
| 02.01.01     | Belanja pegawai                   | 775.611          | 773.531          | 805.680          | 772.661          | 764.273          | 0%                       |
| 02.01.02     | Belanja Barang dan Jasa           | 501.349          | 483.453          | 569.823          | 535.532          | 597.142          | 5%                       |
| 02.01.03     | Belanja Bunga                     | -                | -                | -                | -                | -                |                          |
| 02.01.04     | Belanja Subsidi                   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 4.000            | 2.000            | 13%                      |
| 02.01.05     | Belanja Hibah                     | 95.115           | 65.332           | 44.716           | 56.176           | 42.848           | -15%                     |
| 02.01.06     | Belanja Biaya Provisi             | -                | -                | -                | -                | -                |                          |
| 02.01.07     | Belanja Bantuan Sosial            | 300              | 566              | 807              | 1.013            | 2.723            | 81%                      |
| 02.01.08     | Belanja Bantuan Keuangan          | 277.752          | 257.355          | 296.879          | 302.889          | -                | -22%                     |
|              |                                   | -                | -                | -                | -                | -                |                          |
| <b>02.02</b> | <b>Belanja Modal</b>              | <b>353.140</b>   | <b>213.660</b>   | <b>257.568</b>   | <b>264.520</b>   | <b>182.879</b>   | <b>-12%</b>              |
| 02.02.01     | Belanja Modal Tanah               | 367              | -                | -                | 89               | 5                | -97%                     |
| 02.02.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 72.908           | 44.753           | 61.310           | 123.885          | 58.950           | 12%                      |
| 02.02.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 68.514           | 67.472           | 68.290           | 80.173           | 66.496           | 0%                       |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No           | Uraian                                   | REALISASI    |              |              |               |                | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|
|              |                                          | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021           |                          |
| 02.02.04     | Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan | 191.737      | 81.315       | 99.301       | 51.429        | 51.768         | -21%                     |
| 02.02.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya         | 19.613       | 106          | 14           | 5.118         | 5.661          | 9071%                    |
| 02.02.06     | Belanja Modal Aset Lainnya               | -            | 20.014       | 28.653       | 3.826         | -              | -48%                     |
|              |                                          | -            | -            | -            | -             | -              |                          |
| <b>02.03</b> | <b>Belanja Tak Terduga</b>               | <b>214</b>   | <b>96</b>    | <b>-</b>     | <b>21.952</b> | <b>486</b>     | <b>-77%</b>              |
| 02.03.01     | Belanja Tak Terduga                      | 214          | 96           | -            | 21.952        | 486            | -84%                     |
| <b>02.04</b> | <b>Transfer</b>                          | <b>4.548</b> | <b>4.137</b> | <b>6.413</b> | <b>4.905</b>  | <b>283.738</b> | <b>1427%</b>             |
| 02.04.01     | Transfer Bagi Hasil Pendapatan           | 4.548        | 4.137        | 6.413        | 4.905         | 283.738        | 1427%                    |
| 02.04.02     | Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa      | 3.174        | 3.381        | 4.074        | 4.393         | 4.342          | 8%                       |
| 02.04.03     | Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa  | 1.374        | 756          | 1.242        | 512           | 411            | -15%                     |
| 02.04.04     | Belanja Bantuan Keuangan                 | -            | -            | -            | -             | 278.985        |                          |
| 02.04.05     | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya            | -            | -            | 1.097        | -             | -              |                          |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)



### 3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu tahun 2017-2021 hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

**Tabel III.5**  
**Realisasi Pembiayaan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan)**

| No           | Uraian                                                  | REALISASI      |              |               |               |                | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|
|              |                                                         | 2017           | 2018         | 2019          | 2020          | 2021           |                          |
| <b>03.01</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                            | <b>217.943</b> | <b>5.059</b> | <b>80.466</b> | <b>97.165</b> | <b>116.210</b> | <b>358%</b>              |
|              | Penggunaan SILPA                                        | <b>215.943</b> | <b>3.059</b> | <b>80.466</b> | <b>95.165</b> | <b>114.398</b> | <b>618%</b>              |
|              | Pinjaman Dalam Negeri                                   | -              | -            | -             | -             | -              |                          |
|              | Penerimaan Kembali Pinjaman<br>Kepada Perusahaan Daerah | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b> | -             | <b>2.000</b>  | <b>1.812</b>   | <b>-36%</b>              |
|              |                                                         | -              | -            | -             | -             | -              |                          |
| <b>03.02</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                           | <b>5.000</b>   | <b>5.225</b> | <b>10.425</b> | <b>3.700</b>  | -              | <b>-15%</b>              |
|              | Penyertaan Modal/Investasi<br>Pemerintah Daerah         | <b>5.000</b>   | <b>5.225</b> | <b>10.425</b> | <b>3.700</b>  | -              | <b>-15%</b>              |
|              | Pembayaran Pokok Pinjaman<br>Dalam Negeri               | -              | -            | -             | -             | -              |                          |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)



### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

#### 1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

#### 2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Indragiri Hilir berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### 3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.



Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada Tabel berikut ini,



**Tabel III.6**  
**Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021**  
**(Juta Rupiah)**

| No | Uraian                                                          | Ref        | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021      | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------|
| 1  | <b>ASET</b>                                                     |            |          |          |          |          |           |                       |
| 2  | <b>ASET LANCAR</b>                                              |            |          |          |          |          |           |                       |
| 3  | Kas di Kas Daerah                                               | 5.3.1.1.1  | 2.831    | 77.778   | 83.292   | 101.467  | 164.527   | 685%                  |
| 4  | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 5.3.1.1.1  | 574      | 421      | 626      | 31       | 177       | 100%                  |
| 5  | Kas di Bendahara Penerimaan                                     | 5.3.1.1.1  | 72       | -        | -        | 5        | -         | -100%                 |
| 6  | Kas di Bendahara BLUD                                           | 5.3.1.1.1  | 3.172    | 1.431    | 9.998    | 10.859   | 49.531    | 227%                  |
| 7  | Kas di Bendahara Kapitasi JKN FKTP                              | 5.3.1.1.1  | 3.434    | -        | 1        | 12       | 17        | 466%                  |
| 8  | Setara Kas Lainnya                                              | 5.3.1.1.1  | 3.203    | 1.635    | 3.809    | 1.889    | 763       | -7%                   |
| 9  | Kas di Lainnya di Bendahara Pengeluaran                         | 5.3.1.1.1  | 157      | -        | -        | -        | -         | -100%                 |
| 10 | Investasi Jangka Pendek                                         |            | -        | -        | 2.179    | 182      | 0         | -96%                  |
| 11 | Piutang Pajak Daerah                                            | 5.3.1.1.2  | 71.804   | 81.001   | 92.030   | 125.816  | 129.533   | 17%                   |
| 12 | Penyisihan Piutang Pajak                                        | 5.3.1.1.3  | (30.937) | (39.740) | -        | -        | -         | -36%                  |
| 13 | Piutang Retribusi Daerah                                        | 5.3.1.1.4  | 11.537   | 11.529   | 11.595   | 11.595   | 11.916    | 1%                    |
| 14 | Penyisihan Piutang Retribusi                                    | 5.3.1.1.5  | (3.653)  | (11.518) | -        | -        | -         | 58%                   |
| 15 | Penyisihan Piutang                                              |            | -        | -        | (65.245) | (98.342) | (113.007) | 33%                   |
| 16 | Penyisihan Piutang Dana Bergulir                                |            | -        | -        | -        | -        | -         |                       |
| 17 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan       |            | -        | -        | 0        | 0        | -         | -50%                  |
| 18 | Piutang Lain-lain PAD yang sah                                  | 5.3.1.1.6  | 16.822   | 16.426   | 22.655   | 17.215   | 16.878    | 2%                    |
| 19 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah                       | 5.3.1.1.7  | (84)     | (82)     | -        | -        | -         | -51%                  |
| 20 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan              | 5.3.1.1.8  | 16.541   | -        | -        | -        | -         | -100%                 |
| 21 | Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 5.3.1.1.9  | (83)     | -        | -        | -        | -         | -100%                 |
| 22 | Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi                               | 5.3.1.1.10 | 12.180   | 1.516    | -        | 6.345    | 10.911    | -39%                  |
| 23 | Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya           | 5.3.1.1.11 | (61)     | (8)      | -        | -        | -         | -94%                  |
| 24 | Piutang Pendapatan Lainnya                                      | 5.3.1.1.12 | 54       | 54       | 54       | 54       | -         | -25%                  |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Uraian                                                             | Ref        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 25 | Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya                              | 5.3.1.1.13 | (48)    | (48)    | -       | -       | -       | -50%                  |
| 26 | Belanja Dibayar Dimuka                                             |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 27 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara                    |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 28 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                    |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 29 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat          |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 30 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 31 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                           |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 32 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi                                  |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 33 | Piutang Lainnya                                                    |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 34 | Penyisihan PiutangLainnya                                          |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 35 | Uang Muka                                                          | 5.3.1.1.14 | 22      | 22      | -       | -       | 57      | -50%                  |
| 36 | Beban Dibayar dimuka                                               | 5.3.1.1.15 | 338     | 170     | 201     | 51      | 64      | -20%                  |
| 37 | Persediaan                                                         | 5.3.1.1.16 | 41.578  | 48.452  | 54.463  | 55.092  | 35.137  | -2%                   |
| 38 | <b>Jumlah Aset Lancar</b>                                          |            | 149.453 | 189.040 | 215.658 | 232.271 | 306.503 | 20%                   |
| 39 |                                                                    |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 40 | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                                    |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 41 | Investasi Non Permanen                                             |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 42 | Pinjaman Jangka Panjang                                            |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 43 | Investasi dalam Surat Utang Negara                                 |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 44 | Investasi dalam Proyek Pembangunan                                 |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 45 | Investasi Non Permanen Lainnya                                     | 5.3.1.2.1  | 14.440  | 12.442  | 12.450  | 10.440  | 448     | -31%                  |
| 46 | Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen                           | 5.3.1.2.2  | (1.244) | (6.980) | (6.980) | (7.815) | -       | 93%                   |
| 47 | <b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>                               |            | 13.196  | 5.462   | 5.471   | 2.625   | 448     | -48%                  |
|    |                                                                    |            |         |         |         |         |         |                       |
| 48 | Investasi Permanen                                                 |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |
| 49 | Penyertaan Modal Pemda                                             | 5.3.1.2.3  | 106.697 | 111.922 | 122.399 | 125.897 | 125.987 | 4%                    |
| 50 | Investasi Permanen Lainnya                                         |            | -       | -       | -       | -       | -       |                       |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Uraian                                   | Ref       | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 51 | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>         |           | 106.697     | 111.922     | 122.399     | 125.897     | 125.987     | 4%                    |
| 52 | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>   |           | 119.893     | 117.384     | 127.869     | 128.522     | 126.434     | 1%                    |
| 53 |                                          |           | -           | -           | -           | -           | -           |                       |
| 54 | <b>ASET TETAP</b>                        |           | -           | -           | -           | -           | -           |                       |
| 55 | Tanah                                    | 5.3.1.3.1 | 483.316     | 633.754     | 592.837     | 584.880     | 535.883     | 4%                    |
| 56 | Peralatan dan Mesin                      | 5.3.1.3.2 | 540.795     | 589.975     | 675.654     | 788.591     | 850.147     | 12%                   |
| 57 | Gedung dan Bangunan                      | 5.3.1.3.3 | 1.183.561   | 1.225.143   | 1.314.310   | 1.372.341   | 1.582.064   | 8%                    |
| 58 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan             | 5.3.1.3.4 | 2.265.536   | 2.320.778   | 2.417.978   | 2.487.135   | 2.614.246   | 4%                    |
| 59 | Aset Tetap Lainnya                       | 5.3.1.3.5 | 18.697      | 18.184      | 13.217      | 12.647      | 13.114      | -8%                   |
| 60 | Konstruksi dalam Pengerjaan              | 5.3.1.3.6 | 522.039     | 553.457     | 546.862     | 577.030     | 410.473     | -5%                   |
| 61 | Akumulasi Penyusutan                     | 5.3.1.3.7 | (1.629.524) | (1.844.225) | (2.056.688) | (2.314.142) | (2.651.394) | 13%                   |
| 62 | <b>Jumlah Aset Tetap</b>                 |           | -           | 3.497.067   | 3.504.169   | 3.508.482   | 3.354.534   | -1%                   |
| 63 |                                          |           | 3.384.420   | -           | -           | -           | -           | -100%                 |
| 64 | <b>DANA CADANGAN</b>                     |           | -           | -           | -           | -           | -           |                       |
| 65 | Dana Cadangan                            |           | -           | -           | -           | -           | -           |                       |
| 66 | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>              |           | -           | -           | -           | -           | -           |                       |
| 67 |                                          |           | -           | -           | -           | -           | -           |                       |
| 68 | <b>ASET LAINNYA</b>                      |           | -           | -           | -           | -           | -           |                       |
| 69 | Tagihan Penjualan Angsuran               | 5.3.1.4.1 | 1.471       | 1.446       | 1.446       | 1.107       | 1.107       | -6%                   |
| 70 | Tuntutan Ganti Rugi                      | 5.3.1.4.2 | 1.237       | 1.946       | 1.840       | 1.720       | 1.751       | 12%                   |
| 71 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga            | 5.3.1.4.3 | 13.202      | 13.820      | 13.820      | 14.006      | 14.006      | 2%                    |
| 72 | Aset Tak Berwujud                        | 5.3.1.4.4 | 2.098       | 2.675       | 3.044       | 3.044       | 3.093       | 11%                   |
| 73 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 5.3.1.4.5 | (1.537)     | (1.284)     | (1.719)     | (2.130)     | (2.377)     | 13%                   |
| 74 | Aset Lain-Lain                           | 5.3.1.4.6 | 153.971     | 153.947     | 142.859     | 142.170     | 72.691      | -14%                  |
| 75 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya        | 5.3.1.4.7 | (89.934)    | (90.036)    | (89.827)    | (89.707)    | -           | -25%                  |
| 76 | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>               |           | 80.507      | 82.514      | 71.463      | 70.209      | 90.272      | 4%                    |
| 77 |                                          |           | -           | -           | -           | -           | -           |                       |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No  | Uraian                                 | Ref       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Rata-rata Pertumbuhan |
|-----|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 78  | <b>JUMLAH ASET</b>                     |           | 3.734.274 | 3.886.005 | 3.919.159 | 3.939.484 | 3.877.743 | 1%                    |
| 79  |                                        |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 80  | <b>KEWAJIBAN</b>                       |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 81  | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>         |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 82  | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)   | 5.3.2.1.1 | 2.649     | 807       | 66        | 20        | 34        | -41%                  |
| 83  | Utang Bunga                            |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 84  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang     |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 85  | Pendapatan Diterima Dimuka             | 5.3.2.1.2 | 3.529     | 7.421     | 13.298    | 80        | 175       | 52%                   |
| 86  | Utang Belanja                          | 5.3.2.1.3 | 63.348    | 52.087    | 92.298    | 19.408    | 62.929    | 51%                   |
| 87  | Utang Jangka Pendek Lainnya            | 5.3.2.1.4 | 27.459    | 1.519     | 2.361     | 5.733     | 1.696     | 8%                    |
| 88  | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>  |           | 96.986    | 61.834    | 108.024   | 25.241    | 64.833    | 30%                   |
| 89  |                                        |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 90  | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>        |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 91  | Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan  |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 92  | Utang Dalam Negeri - Obligasi          |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 93  | Premium (Diskonto) Obligasi            |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 94  | Pendapatan Diterima Dimuka             |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 95  | Utang Jangka Panjang Lainnya           |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 96  | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 97  | <b>Jumlah Kewajiban</b>                |           | 96.986    | 61.834    | -         | 25.241    | 64.833    | 7%                    |
| 98  |                                        |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 99  | <b>EKUITAS</b>                         |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 100 | Ekuitas                                | 5.3.3     | 3.637.288 | 3.824.171 | 3.811.135 | 3.914.244 | 3.812.910 | 1%                    |
| 101 | <b>Jumlah Ekuitas</b>                  |           | 3.637.288 | 3.824.171 | 3.811.135 | 3.914.244 | 3.812.910 | 1%                    |
| 102 |                                        |           | -         | -         | -         | -         | -         |                       |
| 103 | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>    |           | 3.734.274 | 3.886.005 | 3.919.159 | 3.939.484 | 3.877.743 | 1%                    |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)



#### 4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2017-2021 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur menggunakan rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukan efisiensi siklus operasi. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2021 fluktuatif setiap tahun dengan rata-rata rasio antara 0,11 sampai dengan 0,65.

Berikut ini terlihat rasio lancar Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan):

**Tabel III.7**  
**Rasio Lancar Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

| No | Tahun | Aset Lancar | Hutang Jangka Pendek | Rasio Lancar |
|----|-------|-------------|----------------------|--------------|
| 1  | 2017  | 149.453     | 96.986               | 0,65         |
| 2  | 2018  | 189.040     | 61.834               | 0,33         |
| 3  | 2019  | 215.658     | 108.024              | 0,50         |
| 4  | 2020  | 232.271     | 25.241               | 0,11         |
| 5  | 2021  | 306.503,42  | 64.833               | 0,21         |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*



## 1. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

### a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017-2021 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 0,00 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,03. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2017-2021 fluktuatif dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Indragiri Hilir cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.



**Tabel III.8**  
**Rasio Hutang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)**

| Uraian                            | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KEWAJIBAN                         | 96.985,74    | 61.833,99    | 0,00         | 25.240,57    | 64.833,07    |
| EKUITAS                           | 3.637.287,86 | 3.824.170,70 | 3.811.134,85 | 3.914.243,74 | 3.812.910,35 |
| <b>TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO</b> | <b>0,03</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,02</b>  |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

**b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)**

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif hingga ditahun 2021 mencapai angka 0,02 Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai 0,03 Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2017-2021 tidak pernah lebih dari 1% dari total aset yang ada yang terjadi di tahun 2017 sampai dengan 2021. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel III.9**  
**Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

| Uraian                           | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KEWAJIBAN                        | 96.985,74    | 61.833,99    | 0,00         | 25.240,57    | 64.833,07    |
| AKTIVA                           | 3.734.273,60 | 3.886.004,69 | 3.919.158,88 | 3.939.484,31 | 3.877.743,42 |
| <b>TOTAL DEBT TO ASSET RATIO</b> | <b>0,03</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,02</b>  |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*



## 2. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan keuntungan.

### a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2017-2021 tren tetap. Adapun rasio di tahun 2017 tidak dapat terdeteksi karena aktiva tetap pada tahun 2017 tercatat 0, namun rasio pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,05%. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

**Tabel III.10**  
**Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021**  
**(dalam jutaan)**

| Uraian                               | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PAD                                  | 214.785,34 | 157.482,35   | 153.746,22   | 180.959,69   | 226.601,41   |
| AKTIVA TETAP                         | 0,00       | 3.497.066,64 | 3.504.168,79 | 3.508.481,84 | 3.354.533,62 |
| <b>RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP</b> |            | <b>0,05</b>  | <b>0,04</b>  | <b>0,05</b>  | <b>0,07</b>  |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)



**b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)**

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya maka semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2017-2021 relatif tetap. Rasio ditahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mencapai 0,02% sampai dengan 0,06%. Secara keseluruhan dari tahun 2017-2021 rata-rata nilai total aset daerah terbilang cukup masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah kedepannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

**Tabel III.11**  
**Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2017- 2021 (dalam jutaan)**

| Uraian                               | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PAD                                  | 214.785,34   | 157.482,35   | 153.746,22   | 180.959,69   | 226.601,41   |
| TOTAL AKTIVA                         | 3.734.273,60 | 3.886.004,69 | 3.919.158,88 | 3.939.484,31 | 3.877.743,42 |
| <b>RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP</b> | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,04</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,06</b>  |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*



### **3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU**

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2021 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

#### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; dan
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 40% pertahun. Proporsi Belanja untuk pemenuhan



kebutuhan aparatur di tahun 2017 sebesar 38% dari total pengeluaran daerah dan proporsinya stabil sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar 41%.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.12**  
**Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

| No.       | Tahun | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase (%) |
|-----------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | 2017  | 775.611                                          | 2.015.029                                            | 38%            |
| 2         | 2018  | 773.531                                          | 1.805.355                                            | 43%            |
| 3         | 2019  | 805.680                                          | 1.994.311                                            | 40%            |
| 4         | 2020  | 772.661                                          | 1.967.350                                            | 39%            |
| 5         | 2021  | 764.273                                          | 1.876.091                                            | 41%            |
| Rata-rata |       | 778.351                                          | 1.931.627                                            | 40%            |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya, analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.



Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2017-2021 cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 5% pertahun dari Rp. 1,16 miliar tahun 2017 menjadi Rp. 1,14 miliar ditahun 2021. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh naik dan turunnya belanja transfer dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer pos belanja bagi hasil hanya tercatat pada tahun 2021 naik optimal menjadi sebesar Rp. 4.6 miliar. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Tabel III.13

**Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2022 (dalam Jutaan)**

| Uraian                                                                                  | REALISASI        |                  |                  |                  |                  | APBD             | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|                                                                                         | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |                          |
| <b>Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama</b> | <b>1.165.087</b> | <b>1.112.378</b> | <b>1.173.332</b> | <b>1.172.203</b> | <b>1.379.808</b> | <b>1.143.783</b> | <b>5%</b>                |
| <b>Belanja Operasi</b>                                                                  | <b>1.150.778</b> | <b>1.098.784</b> | <b>1.150.082</b> | <b>1.136.741</b> | <b>811.845</b>   | <b>815.852</b>   | <b>-7%</b>               |
| Belanja pegawai                                                                         | 775.611          | 773.531          | 805.680          | 772.661          | 764.273          | 759.347          | 0%                       |
| Belanja Bunga                                                                           | -                | -                | -                | -                | -                | -                |                          |
| Belanja Subsidi                                                                         | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 4.000            | 2.000            | -                | 13%                      |
| Belanja Hibah                                                                           | 95.115           | 65.332           | 44.716           | 56.176           | 42.848           | 54.174           | -15%                     |
| Belanja Biaya Provisi                                                                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                |                          |
| Belanja Bantuan Sosial                                                                  | 300              | 566              | 807              | 1.013            | 2.723            | 2.332            | 81%                      |
| Belanja Bantuan Keuangan                                                                | 277.752          | 257.355          | 296.879          | 302.889          | -                | -                | -22%                     |
|                                                                                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                |                          |
| <b>Belanja Tak Terduga</b>                                                              | <b>214</b>       | <b>96</b>        | <b>-</b>         | <b>21.952</b>    | <b>486</b>       | <b>43.000</b>    | <b>-77%</b>              |
| Belanja Tak Terduga                                                                     | 214              | 96               | -                | 21.952           | 486              | 43.000           | #DIV/0!                  |
|                                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                          |
| <b>Transfer</b>                                                                         | <b>9.095</b>     | <b>8.274</b>     | <b>12.825</b>    | <b>9.811</b>     | <b>567.477</b>   | <b>284.931</b>   | <b>1427%</b>             |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan                                                          | 4.548            | 4.137            | 6.412            | 4.905            | 283.739          | <b>4.660</b>     | 1427%                    |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Uraian                                       | REALISASI    |              |               |              |         | APBD           | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|----------------|--------------------------|
|                                              | 2017         | 2018         | 2019          | 2020         | 2021    | 2022           |                          |
| Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa          | 3.174        | 3.381        | 4.074         | 4.393        | 4.342   | -              | 8%                       |
| Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa      | 1.374        | 756          | 1.242         | 512          | 411     | -              | -15%                     |
| Belanja Bantuan Keuangan                     | -            | -            | -             | -            | 278.985 | <b>280.271</b> |                          |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                | -            | -            | 1.097         | -            | -       | -              |                          |
|                                              | -            | -            | -             | -            | -       | -              |                          |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                | <b>5.000</b> | <b>5.225</b> | <b>10.425</b> | <b>3.700</b> | -       | -              | <b>-15%</b>              |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | <b>5.000</b> | <b>5.225</b> | <b>10.425</b> | <b>3.700</b> | -       | -              | <b>-15%</b>              |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri       | -            | -            | -             | -            | -       | -              |                          |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*



### 3.2.1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2017-2021) perkembangan defisit riil anggaran relatif fluktuatif namun mempunyai tren positif. Defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2017 sebesar minus Rp 207 miliar dan pada tahun 2020 sebesar minus Rp . 5,1 miliar. Adapun 2018, 2019 dengan 2021 terjadi surplus riil anggaran dengan nilai sebesar Rp 77 miliar pada tahun 2021.

**Tabel III.14**  
**Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

| No | Uraian                        | Realisasi   |           |           |           |           |
|----|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                               | 2017        | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1  | Realisasi Pendapatan Daerah   | 1.807.880   | 1.880.755 | 1.996.971 | 1.962.245 | 1.953.975 |
|    | Dikurangi realisasi           | -           |           |           |           |           |
| 2  | Belanja Daerah                | 2.010.029   | 1.800.130 | 1.983.886 | 1.963.650 | 1.876.091 |
| 3  | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5.000       | 5.225     | 10.425    | 3.700     | 0         |
|    | Defisit riil                  | -207.148,55 | 75.400,14 | 2.659,33  | -5.104,83 | 77.884,18 |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)



**Tabel III.15**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)**

| URAIAN                                             | 2017           | 2018         | 2019          | 2020          | 2021           |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 215.943        | 3.059        | 80.466        | 95.165        | 114.398        |
| Pencairan Dana Cadangan                            | -              | -            | -             | -             | -              |
| Hasilpenjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan    | -              | -            | -             | -             | -              |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                         | -              | -            | -             | -             | -              |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah       | -              | -            | -             | -             | -              |
| Penerimaan Piutang Daerah                          | 2.000          | 2.000        | -             | 2.000         | 1.812          |
| <b>Total Komposisi Penutup Defisit</b>             | <b>217.943</b> | <b>5.059</b> | <b>80.466</b> | <b>97.165</b> | <b>116.210</b> |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

**Tabel III.16**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Persen)**

| URAIAN                                             | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 99,08% | 60,46% | 100,00% | 97,94% | 98,44% |
| Pencairan Dana Cadangan                            | -      | -      | -       | -      | -      |
| Hasilpenjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan    | -      | -      | -       | -      | -      |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                         | 0%     | 0%     | 0%      | 0%     | 0%     |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah       | -      | -      | -       | -      | -      |
| Penerimaan Piutang Daerah                          | 0,92%  | 39,54% | 0,00%   | 2,06%  | 1,56%  |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017-2021 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau akibat Lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.



**Tabel III.17**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2017-2021 (dalam jutaan)**

| Uraian                                                                      | 2017           |               | 2018         |               | 2019          |              | 2020          |               | 2021           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                             | Rp             | % dari SiLPA  | Rp           | % dari SiLPA  | Rp            | % dari SiLPA | Rp            | % dari SiLPA  | Rp             | % dari SiLPA  |
| <b>Jumlah SiLPA</b>                                                         | <b>217.943</b> | <b>99,08%</b> | <b>5.059</b> | <b>60,46%</b> | <b>80.466</b> | <b>100%</b>  | <b>97.165</b> | <b>97,94%</b> | <b>116.210</b> | <b>98,44%</b> |
| Pelampauan penerimaan PAD                                                   | -              | -             | -            | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -             |
| Pelampauan penerimaan dana perimbangan                                      | -              | -             | -            | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -             |
| Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah                  | -              | -             | -            | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -             |
| Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya                                | -              | -             | -            | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -             |
| Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | -              | -             | -            | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -             |
| Kegiatan lanjutan                                                           | -              | -             | -            | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -             |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*



### 3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPD hingga tahun 2026. Dalam konteks pandemi global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPD kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu, penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih efektif dan efisien terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19 maupun untuk prioritas lainnya.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2023 hingga 2026.

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Indragiri Hilir tahun 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Percepatan penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Indragiri Hilir. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan



infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah**

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait pemulihan pasca Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 hingga 2021 (APBD) yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan dalam perubahan tahun 2022 dan RAPBD Tahun 2023.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2026 dilakukan dengan memerhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Riau. Kondisi perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2023-2026 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Riau dan Nasional.



### **a. Proyeksi Pendapatan**

Dalam mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan, dilakukan redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja. Disamping itu, dalam rangka akselerasi pembangunan, daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Dalam pilar pertama ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendorong creative and sustainable financing berbasis kerjasama melalui skema Sinergi Pendanaan. Pilar kedua merupakan penguatan local taxing power dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan administration dan compliance cost, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel, dalam pilar ketiga ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah, dan meningkatkan kualitas SDM dan pengawasan internal. Dalam pilar keempat, yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional, dilakukan dengan cara penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, Pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi bagan akun standar. Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan Pusat dan Daerah dan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dengan membangun sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis interkoneksi dan interoperabilitas.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2020). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan



dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan melihat bahwa kondisi keuangan lokal secara umum ditahun 2022 diproyeksikan mulai membaik maka beberapa komponen PAD yang ditahun 2020 mengalami penurunan yaitu Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, maka ditahun 2022 dua komponen ini ditargetkan nilainya membaik seperti realisasi tahun 2021. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan naik mengingat pandemi Covid-19 sudah dalam tahap *recovery*. Adapun proyeksi secara umum menggunakan tahun dasar realisasi APBD 2021.

Komponen pendapatan daerah pada tahun 2024-2026 ditargetkan naik pertahun sampai dengan tahun 2026 yang didongkrak oleh peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing pendapatan akan ditargetkan naik khususnya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar 2% sampai dengan 15%, dimana total pendapatan asli daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 200 miliar dan akan terus naik sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp. 255 miliar. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama



untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut.

Mengacu pada kinerja perekonomian pusat dan Kabupaten Indragiri Hilir yang diperkirakan belum akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, maka proyeksi pendapatan transfer tahun 2023 diasumsikan tidak jauh dengan tahun 2021. Pada awal tahun 2024 diharapkan target vaksinasi Covid-19 khususnya vaksin Booster terpenuhi sehingga telah tercapai *herd immunity*. Kondisi tersebut diasumsikan akan berdampak positif pada kinerja perekonomian. Oleh karena itu, pada tahun 2024 sampai dengan 2026, pendapatan transfer diproyeksi naik perkomponen. Angka tersebut cukup realistis mengingat LPE Provinsi dan LPE Nasional telah ditargetkan secara normal. Meskipun demikian, proyeksi pendapatan transfer belum berani dipasang angka di atasnya karena karakteristik pandemi yang penuh ketidakpastian.

Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

- 1) Dana Perimbangan;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan nilainya naik dari tahun 2021 menjadi 1,2 miliar pada tahun 2024 dan ditargetkan rata-rata kenaikan sebesar 0,26% pada tahun 2026.

Adapun Lain-lain pendapatan yang sah juga ditargetkan naik sebesar 5,44% dari angka dasar tahun 2021, namun angkanya masih dalam proses perumusan. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel III.18**  
**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**  
**(dalam jutaan)**

| No              | Uraian                                                       | Proyeksi         |                  |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |                                                              | 2024             | 2025             | 2026             |
| <b>1</b>        | <b>PENDAPATAN</b>                                            | <b>1.640.306</b> | <b>1.663.002</b> | <b>1.685.361</b> |
| <b>01.01</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>203.594</b>   | <b>250.730</b>   | <b>265.941</b>   |
| 01.01.01        | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 50.105           | 84.990           | 89.270           |
| 01.01.02        | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 3.406            | 3.481            | 3.586            |
| 01.01.03        | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 16.661           | 16.661           | 16.661           |
| 01.01.04        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 133.422          | 145.598          | 156.424          |
| <b>01.02</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>1.436.711</b> | <b>1.412.273</b> | <b>1.419.420</b> |
| <b>01.02.01</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>                             | <b>1.335.162</b> | <b>1.340.943</b> | <b>1.345.590</b> |
| <b>1.2.1.1</b>  | <b>Dana Perimbangan</b>                                      | <b>1.166.604</b> | <b>1.172.385</b> | <b>1.177.033</b> |
| 1.2.1.1.1       | Bagi Hasil Pajak                                             | 75.425           | 78.179           | 79.742           |
| 1.2.1.1.2       | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                      | 205.321          | 208.348          | 211.432          |
| 1.2.1.1.3       | Dana Alokasi Umum                                            | 885.858          | 885.858          | 885.858          |
| 1.2.1.1.4       | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                              | -                | -                | -                |
| <b>1.2.1.3</b>  | <b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>                     | <b>168.558</b>   | <b>168.558</b>   | <b>168.558</b>   |
| 1.2.1.3.2       | Dana Penyesuaian                                             | -                | -                | -                |
| <b>1.2.1.3</b>  | <b>Dana Desa</b>                                             | <b>168.558</b>   | <b>168.558</b>   | <b>168.558</b>   |
|                 | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                          | <b>101.549</b>   | <b>71.330</b>    | <b>73.830</b>    |
|                 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  | -                | -                | -                |
|                 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                | -                | -                | -                |
|                 | Pendapatan Bantuan Keuangan                                  | -                | -                | -                |
| <b>01.03</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>01.03.01</b> | <b>Pendapatan Hibah</b>                                      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>01.03.02</b> | <b>Pendapatan Dana Darurat</b>                               | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>01.03.03</b> | <b>Pendapatan Lainnya</b>                                    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

*Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*



Seperti yang terlihat pada tabel III.17 di atas, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
- b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat ;
- c. Pemberian *Reward* dan *Punishment* ;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
- g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
- h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
- j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
- k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan



- m. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**b. Proyeksi Belanja Daerah**

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja



langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
- 4) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
  - a) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD; dan
  - b) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 6) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir,



termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai dengan tuntutan regulasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun Anggaran 2024 anggaran belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir diproyeksikan sebesar Rp 1,690 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.1,152 miliar, belanja modal sebesar Rp 218 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp.30 miliar. Pada Tahun Anggaran 2026 anggaran belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir diproyeksikan mengalami sedikit kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya mengikuti proyeksi pendapatan dengan hitungan pesimis dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,88% di mana pada tahun 2026 belanja operasi menjadi sebesar Rp 1,182 miliar, belanja modal sebesar Rp 227 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp.20 miliar. Sehingga proyeksi total belanja pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1,735 Miliar. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.19**  
**Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)**

| No           | Uraian                            | Proyeksi  |           |           |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|              |                                   | 2024      | 2025      | 2026      |
| <b>2</b>     | <b>Belanja</b>                    | 1.690.306 | 1.713.002 | 1.735.361 |
| <b>02.01</b> | <b>Belanja Operasi</b>            | 1.131.500 | 1.089.049 | 1.112.936 |
| 02.01.01     | Belanja pegawai                   | 750.000   | 760.000   | 770.000   |
| 02.01.02     | Belanja Barang dan Jasa           | 350.000   | 312.549   | 326.436   |
| 02.01.03     | Belanja Bunga                     | -         | -         | -         |
| 02.01.04     | Belanja Subsidi                   | -         | -         | -         |
| 02.01.05     | Belanja Hibah                     | 30.000    | 15.000    | 15.000    |
| 02.01.06     | Belanja Biaya Provisi             | -         | -         | -         |
| 02.01.07     | Belanja Bantuan Sosial            | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 02.01.08     | Belanja Bantuan Keuangan          | -         | -         | -         |
|              |                                   | -         | -         | -         |
| <b>02.02</b> | <b>Belanja Modal</b>              | 218.236   | 304.310   | 306.878   |
| 02.02.01     | Belanja Modal Tanah               | -         | -         | -         |
| 02.02.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.000    | 20.000    | 15.000    |
| 02.02.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 70.000    | 65.000    | 60.000    |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No           | Uraian                                   | Proyeksi |         |         |
|--------------|------------------------------------------|----------|---------|---------|
|              |                                          | 2024     | 2025    | 2026    |
| 02.02.04     | Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan | 117.686  | 218.700 | 231.213 |
| 02.02.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya         | 500      | 550     | 600     |
| 02.02.06     | Belanja Modal Aset Lainnya               | 50       | 60      | 65      |
|              |                                          | -        | -       | -       |
| <b>02.03</b> | <b>Belanja Tak Terduga</b>               | 50.000   | 25.000  | 20.000  |
| 02.03.01     | Belanja Tak Terduga                      | 50.000   | 25.000  | 20.000  |
| <b>02.04</b> | <b>Transfer</b>                          | 290.569  | 294.643 | 295.547 |
| 02.04.01     | Transfer Bagi Hasil Pendapatan           | -        | -       | -       |
| 02.04.02     | Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa      | 5.011    | 8.499   | 8.927   |
| 02.04.03     | Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa  | 341      | 348     | 359     |
| 02.04.04     | Belanja Bantuan Keuangan                 | 285.218  | 285.796 | 286.261 |
| 02.04.05     | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya            | -        | -       | -       |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024-2026, meliputi:

- 1) Pemulihan *pasca Covid-19* berikut dampak sosialnya;
- 2) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
- 3) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- 4) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- 5) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- 6) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
- 7) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen



belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, di antaranya belanja pegawai, belanja rutin Perangkat Daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik  $\pm 2,00\%$  pertahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai sebesar 2,00% bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program unggulan Bupati. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II. Selain itu, pada tahun 2024 perlu diprioritaskan belanja operasi untuk dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, di antaranya pengembangan kawasan pariwisata percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dan pelayanan publik yang bersifat dasar.

Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu mengalokasikan Belanja Tak Terduga sebagai antisipasi perkembangan pandemi *Covid-19 varian Delta dan Omicron* yang diperkirakan masih berlangsung. Belanja transfer masih diprioritaskan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Setelah itu, belanja transfer digunakan untuk mewujudkan infrastruktur desa yang tidak menjadi kewenangan kabupaten. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini,



**Tabel III.20**  
**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta**  
**Prioritas Utama**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)**

| Uraian                                                                                  | Proyeksi         |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                         | 2024             | 2025             | 2026             |
| <b>Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama</b> | <b>1.102.070</b> | <b>1.096.143</b> | <b>1.102.047</b> |
| <b>Belanja Operasi</b>                                                                  | <b>761.500</b>   | <b>756.500</b>   | <b>766.500</b>   |
| Belanja pegawai                                                                         | 730.000          | 740.000          | 750.000          |
| Belanja Bunga                                                                           | -                | -                | -                |
| Belanja Subsidi                                                                         | -                | -                | -                |
| Belanja Hibah                                                                           | 30.000           | 15.000           | 15.000           |
| Belanja Biaya Provisi                                                                   | -                | -                | -                |
| Belanja Bantuan Sosial                                                                  | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| Belanja Bantuan Keuangan                                                                | -                | -                | -                |
|                                                                                         |                  |                  |                  |
| <b>Belanja Tak Terduga</b>                                                              | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| Belanja Tak Terduga                                                                     | 50.000           | 25.000           | 20.000           |
|                                                                                         |                  |                  |                  |
| <b>Transfer</b>                                                                         | <b>290.569</b>   | <b>294.643</b>   | <b>295.547</b>   |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan                                                          | -                | -                | -                |
| Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa                                                     | 5.011            | 8.499            | 8.927            |
| Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa                                                 | 341              | 348              | 359              |
| Belanja Bantuan Keuangan                                                                | 285.218          | 285.796          | 286.261          |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                                                           | -                | -                | -                |
|                                                                                         |                  |                  |                  |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                                           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah                                            | -                | -                | -                |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri                                                  | -                | -                | -                |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*



### c. **Proyeksi Pembiayaan**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 50 miliar dan direncanakan berasal dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah tahun sebelumnya.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD;
- c. Pada anggaran Tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.



Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.21**  
**Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**  
**(Juta Rupiah)**

| No           | Uraian                                               | Proyeksi |        |        |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|              |                                                      | 2024     | 2025   | 2026   |
| <b>03.01</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                         | 50.000   | 50.000 | 50.000 |
|              | Penggunaan SILPA                                     | 50.000   | 50.000 | 50.000 |
|              | Pinjaman Dalam Negeri                                | -        | -      | -      |
|              | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah | -        | -      | -      |
| <b>03.02</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                        | -        | -      | -      |
|              | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah         | -        | -      | -      |
|              | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri               | -        | -      | -      |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

### 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2024 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat namun landai. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel III.22**  
**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)**

| No. | Uraian                                                                           | Proyeksi         |                  |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                  | 2024             | 2025             | 2026             |
| 1   | Pendapatan                                                                       | 1.640.306        | 1.663.002        | 1.685.361        |
| 2   | Penerimaan Pembiayaan                                                            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|     | <b>TOTAL PENERIMAAN</b>                                                          | <b>1.690.306</b> | <b>1.713.002</b> | <b>1.735.361</b> |
|     | <b>(Dikurangi):</b>                                                              |                  |                  |                  |
| 3   | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 1.102.070        | 1.096.143        | 1.102.047        |
|     | <b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>                                         | <b>588.236</b>   | <b>616.859</b>   | <b>633.314</b>   |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/ subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:



**Tabel III.23**  
**Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)**

| No | Uraian                         | Proyeksi         |                  |                  |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                | 2024             | 2025             | 2026             |
| 1  | Pendapatan                     | 1.640.306        | 1.663.002        | 1.685.361        |
| 2  | Penerimaan Pembiayaan          | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|    | <b>Kapasitas Riil Pagu OPD</b> | <b>1.690.306</b> | <b>1.713.002</b> | <b>1.735.361</b> |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

**Tabel III.24**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)**

| No | Uraian                                   | Proyeksi       |                |                |
|----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                          | 2024           | 2025           | 2026           |
|    | <b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b> | <b>588.236</b> | <b>616.859</b> | <b>633.314</b> |
|    |                                          |                |                |                |
|    | Prioritas I                              | 392.855        | 411.971        | 422.961        |
|    | Prioritas II                             | 195.381        | 204.888        | 210.353        |

*Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*



# BAB IV

## PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2024-2026 ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan daerah sebelumnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Indragiri Hilir pada akhir tahun 2026 nanti. Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Provinsi Riau maupun Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024-2026, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan telaah terhadap isu strategis internasional, nasional dan regional.



Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Proses identifikasi dan analisa permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional maupun internasional harus ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPD Kabupaten Indragiri Hilir periode pembangunan 2024-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas.

#### **4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika



berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kabupaten Indragiri Hilir sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni: **“BELUM OPTIMALNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas SDM Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.
2. Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan.
3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada bagan berikut,



**Gambar IV.1**  
**Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten**  
**Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026**



Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **1. Belum Optimalnya Kualitas SDM Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat**

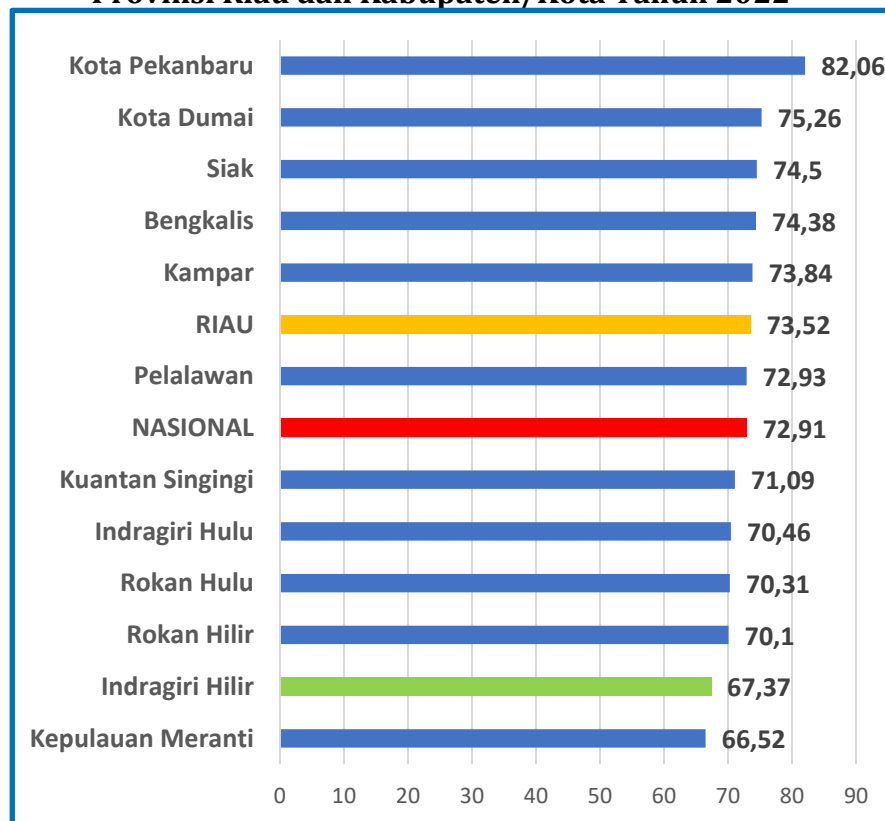
Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal



tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur untuk penunjang kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Indragiri Hilir masih berupaya untuk meningkatkan berbagai sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan secara nasional.

**Gambar IV.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia**  
**Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2022**



Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat masih berada jauh di bawah angka capaian Provinsi Riau dan Nasional. IPM **Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 67,37** di mana angka ini berada di peringkat kedua terbawah setelah Kabupaten Kepulauan Meranti (IPM 66,52). Sementara itu,



capaian IPM Provinsi Riau berada di angka 73,52 dengan IPM Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi di angka 82,06 dan capaian Nasional berada di angka 72,91.

Rendahnya capaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan hasil dari capaian seluruh komponen penyusun IPM yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Pada peningkatan mutu pendidikan wilayah, Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk memberikan pelayanan dalam hal sarana pendidikan baik kualitas tenaga pengajar maupun fasilitas fisik pendidikan sekolah. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan seperti sulitnya akses, belum optimalnya pendanaan dan masih terdapat kekurangan yang terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir dibanding wilayah lain.

Hal ini juga terlihat dari capaian indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir yang masih cukup jauh dari harapan. Begitu juga pada capaian rata-rata lama sekolah Indragiri Hilir yaitu selama 7,26 tahun dan harapan lama sekolah Indragiri Hilir selama 12,19 tahun yang merupakan angka terendah di Provinsi Riau.

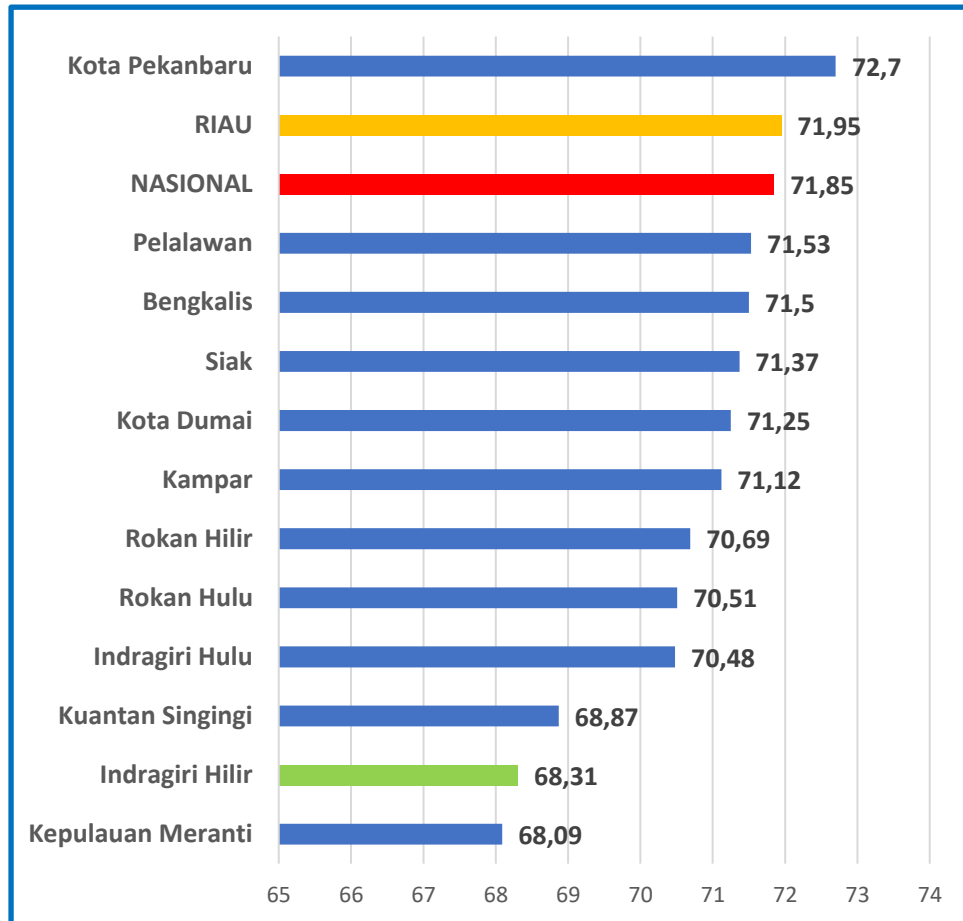
**Tabel IV.1**  
**Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (tahun)**  
**Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

| WILAYAH                | RATA-RATA LAMA SEKOLAH | HARAPAN LAMA SEKOLAH |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>NASIONAL</b>        | <b>8,69</b>            | <b>13,10</b>         |
| <b>RIAU</b>            | <b>9,22</b>            | <b>13,29</b>         |
| <b>INDRAGIRI HILIR</b> | <b>7,26</b>            | <b>12,19</b>         |
| Kuantan Singingi       | 8,76                   | 13,36                |
| Indragiri Hulu         | 8,4                    | 12,58                |
| Pelalawan              | 8,72                   | 12,68                |
| Siak                   | 9,87                   | 12,85                |
| Kampar                 | 9,39                   | 13,59                |
| Rokan Hulu             | 8,55                   | 12,86                |
| Bengkalis              | 9,71                   | 13,16                |
| Rokan Hilir            | 8,28                   | 12,83                |
| Kepulauan Meranti      | 7,88                   | 12,84                |
| Kota Pekanbaru         | 11,93                  | 15,56                |
| Kota Dumai             | 10,15                  | 13,32                |

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023



**Gambar IV.3**  
**Angka Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau**  
**Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2022**



Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

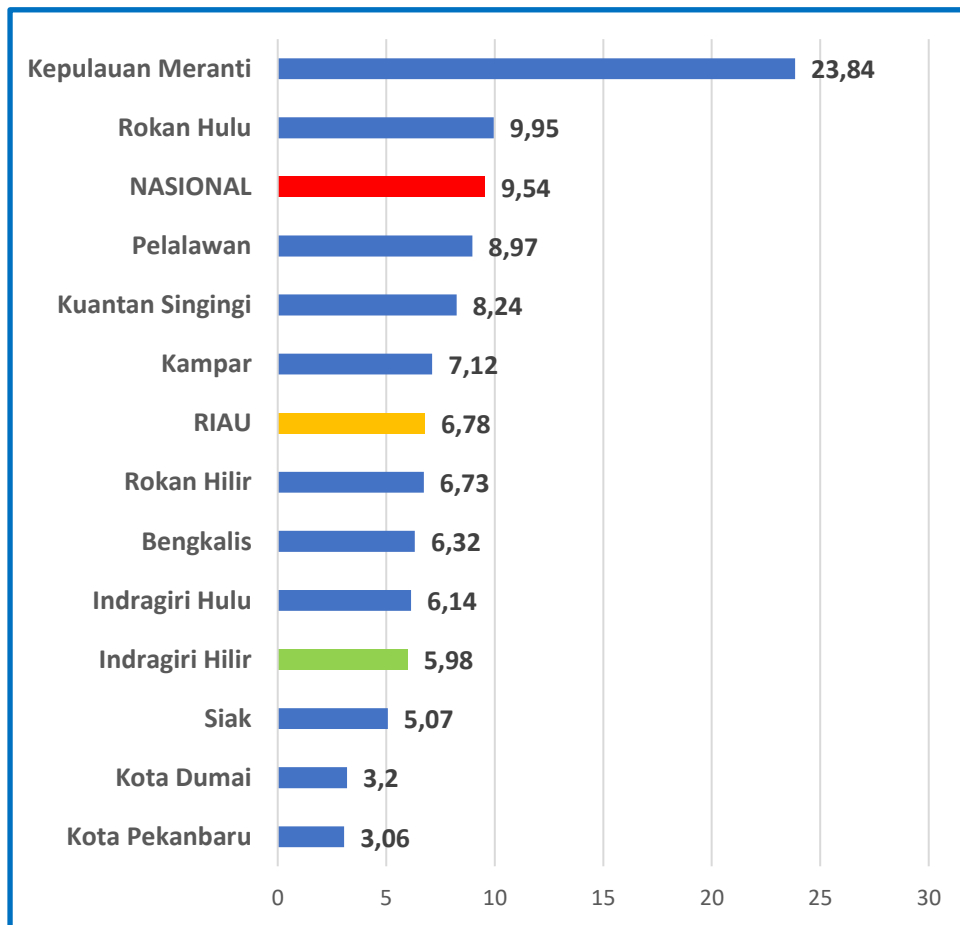
Permasalahan lain terkait pembangunan sumber daya manusia adalah belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terlihat bahwa capaian **angka harapan hidup Indragiri Hilir (68,31 tahun)** berada di peringkat terendah kedua di Provinsi Riau, dimana Provinsi Riau sendiri memiliki capaian angka harapan hidup sebesar 71,95 tahun yang berada di atas angka Nasional yang mencapai 71,85 tahun.

Selain dari kualitas SDM, dalam melihat permasalahan pembangunan ini juga merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu domain utama tujuan pembangunan nasional. Terlihat bahwa capaian angka kemiskinan di



Indragiri Hilir (5,98%) berada di bawah angka Provinsi Riau (6,78%), bahkan angka Nasional yang mencapai 9,54 persen.

**Gambar IV.4**  
**Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Riau**  
**Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2022**



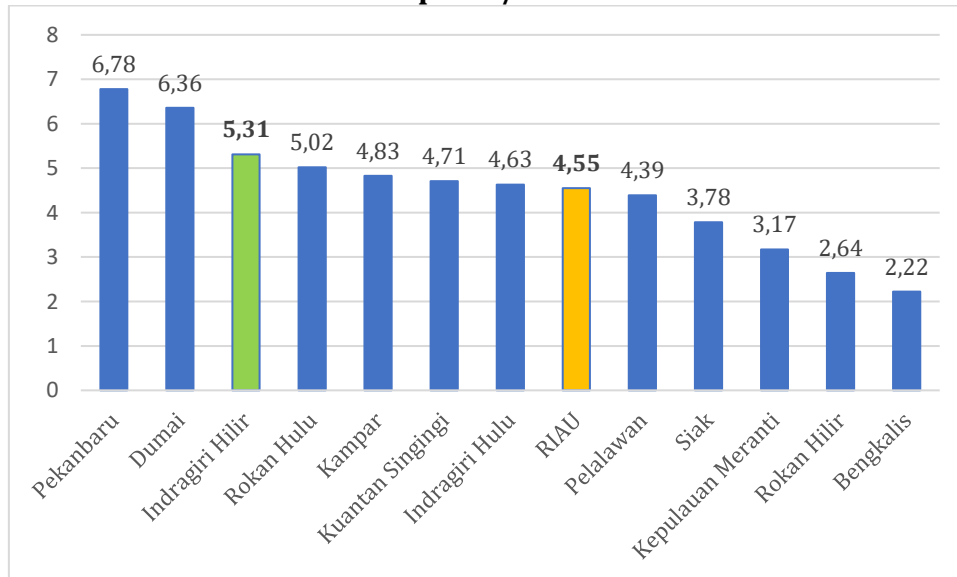
Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

## **2. Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan**

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi perhatian ke depannya mengingat Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masih dengan kondisi yang belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, berbagai arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah.



**Gambar IV.5**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau**  
**Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

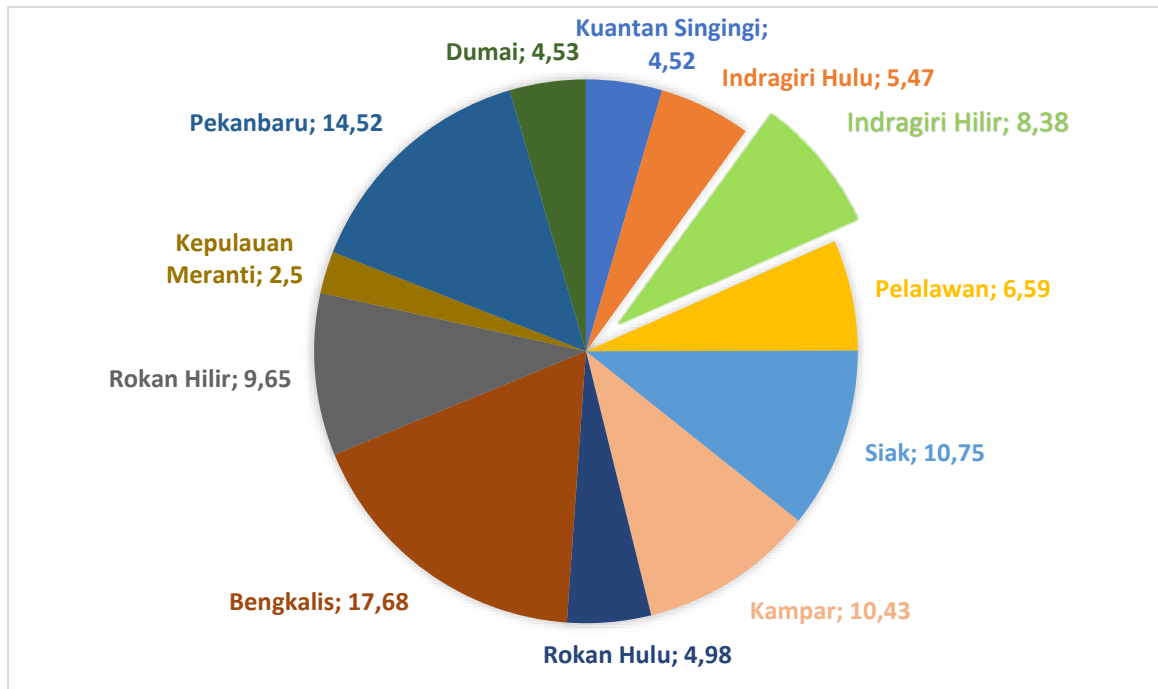


Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Pada tahun 2022, Pasca Pandemi COVID-19 telah terjadi selama lebih dari satu tahun dengan penanganan serta pemulihan perekonomian yang telah dilakukan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir; pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Riau semakin membaik. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang seluruhnya bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi **Kabupaten Indragiri Hilir mencapai angka 5,31**. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir berada di peringkat ketiga se-Provinsi Riau di bawah Kota Pekanbaru, Kota Dumai.



**Gambar IV.6**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Provinsi Riau Menurut**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2022**



Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Sementara itu, kontribusi perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada di tingkat bawah yaitu sebesar **8,38% terhadap perekonomian Provinsi Riau**. Angka ini berada pada peringkat enam berdasarkan kontribusi daerah terhadap perekonomian Provinsi. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam peningkatan nilai tambah sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengakselerasi capaian perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian dan akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama dalam melihat permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan



aksesibilitas yang bermanfaat khususnya kondisi sarana jalan. Selain sarana konektivitas wilayah, penyediaan sanitasi layak dan air minum layak juga menjadi *concern* pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terlihat sanitasi di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik, namun akses masyarakat terhadap air minum layak masih kurang. Beberapa rangkuman permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasan pengelolaan sumberdaya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusat pertumbuhan.
2. Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut dan; telekomunikasi, serta infrastruktur ke wilayah-wilayah terpencil serta akses dan sarana prasarana pariwisata.
3. Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerah pesisir (banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, erosi, interusi) serta rawan konflik sosial.
4. Adanya konflik Lahan perkebunan kelapa dalam (perkebunan rakyat) dan lahan pemukiman yang masih masuk kawasan hutan.
5. Kebijakan tata ruang yang belum ditetapkan
6. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah
7. Belum berkembangnya wilayah-wilayah cepat tumbuh. Hal ini disebabkan antara lain:
  - a. Keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
  - b. Kurangnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
  - c. Kurangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
  - d. Lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non



- pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;
- e. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
  - f. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta
  - g. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

### **3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga juga menemui kesulitan dalam menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi masih perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga



memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah.

Koordinasi antar OPD di Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal disebabkan oleh adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan daerah masih dilaksanakan oleh OPD yang terpisah-pisah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, maupun aset, sehingga menyulitkan tata usaha pelaporan keuangan daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum *reliabel*, sehingga berimplikasi pada kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan untuk merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis *baseline* data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki sistem *database* yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem.

Permasalahan yang lebih khusus adalah terkait pengelolaan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah. SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2022 memperoleh nilai 64,10 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berjalan cukup baik namun masih diperlukan keberlanjutan. Hal ini juga dibuktikan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang belum maksimal dengan capaian 63,07 (kategori B).

Terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.



Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah perubahan *software* klaim JKN BPJS sehingga klaim hanya dapat terlaksana selama 9 bulan yang membuat pelayanan lambat. Kemudian dalam penerapannya masalah rumah layak huni mempunyai permasalahan tenaga teknis (teknik sipil) yang masih kurang, masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dan terbatasnya dokumen perencanaan dan database sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip *good governance*.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan pada periode pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026, maka berbagai poin-poin kebijakan pada pelaksanaan periode pembangunan daerah harus selaras dengan perkembangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada periode pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan permasalahan utama Kabupaten Indragiri Hilir **“Belum Optimalnya Kemandirian Dan Pemerataan Pembangunan**



**Masyarakat Indragiri Hilir**” akan dirincikan menjadi empat permasalahan pokok dengan penjabaran permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar**  
**Masalah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| PERMASALAHAN POKOK                                                     | PERMASALAHAN                                               | AKAR MASALAH                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kualitas SDM guna meningkatkan taraf hidup masyarakat | Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan | Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada tingkatan rumah sakit, puskesmas sampai ke posyandu.                                          |
|                                                                        |                                                            | Ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan masih terus perlu ditingkatkan                                                      |
|                                                                        |                                                            | Masih adanya kasus stunting di beberapa wilayah kabupaten Indragiri Hilir                                                               |
|                                                                        |                                                            | Kurang meratanya penempatan tenaga medis di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sampai ke tingkat desa                            |
|                                                                        | Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan           | Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan                                                                                   |
|                                                                        |                                                            | Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata                                                                |
|                                                                        |                                                            | Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi masih kurang dan penyebarannya masih belum merata di semua wilayah Kabupaten Indragiri Hilir |
|                                                                        |                                                            | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti Perpustakaan dan laboratorium masih belum mencukupi                                 |
|                                                                        |                                                            | Implementasi pendidikan anak usia dini belum optimal                                                                                    |



| PERMASALAHAN POKOK                                                 | PERMASALAHAN                                                              | AKAR MASALAH                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Belum cukupnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak | Sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha masyarakat baik rumah tangga maupun industry dan sector komersial lainnya |
|                                                                    | Belum optimalnya daya saing lapangan usaha di Indragiri Hilir             | Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk mengurus perijinan lapangan usaha secara merata                              |
| Belum optimalnya kemandirian perekonomian berbasis sektor unggulan | Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah | Dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM, IKM dan koperasi belum optimal                               |
|                                                                    |                                                                           | Pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan komoditas dan produk unggulan belum optimal                       |
|                                                                    |                                                                           | Masih rendahnya pengembangan inovasi dalam pengelolaan produk unggulan                                                      |
|                                                                    |                                                                           | Pengembangan sistem informasi dan promosi potensi komoditas dan produk unggulan belum optimal                               |
|                                                                    |                                                                           | Regulasi dan kebijakan untuk kemudahan berinvestasi belum efektif                                                           |
|                                                                    | Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan                     | Belum optimalnya kebijakan untuk pemfasilitasian dan pembukaan akses pemasaran                                              |
|                                                                    |                                                                           | Belum optimalnya dukungan pemberdayaan ekonomi kerakyatan                                                                   |
|                                                                    |                                                                           | Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan bagi UKM, IKM dan Koperasi                                                      |
|                                                                    |                                                                           | Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan                                                                |



| PERMASALAHAN POKOK                                             | PERMASALAHAN                                                                 | AKAR MASALAH                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup                        | sampah yang ramah lingkungan dan pengelolaan Limbah                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                              | Masih terdapat bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan akibat penurunan kualitas lingkungan hidup                                   |
|                                                                |                                                                              | Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup                                                                                           |
|                                                                | Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah | Kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan belum optimal mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. |
|                                                                |                                                                              | Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi masih belum mencukupi                                                                                                   |
|                                                                |                                                                              | Masih kurangnya pemerataan pembangunan sistem penyediaan air minum                                                                                                   |
|                                                                |                                                                              | Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum pada kawasan pemukiman                                                                                |
| Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik | Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah         | Kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal                                                                                 |
|                                                                |                                                                              | Belum terinternalisasinya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja, khususnya dalam membangun budaya kerja                                              |
|                                                                |                                                                              | Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur                                                                                                    |



| PERMASALAHAN POKOK | PERMASALAHAN                                                                              | AKAR MASALAH                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif                        | Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal |
|                    | Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah                                     | Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah                |
|                    | Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik | Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu                 |
|                    |                                                                                           | Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum merata di semua wilayah                         |
|                    |                                                                                           | Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk peningkatan pelayanan publik                        |

## 4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

### 4.2.1 ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir adalah



adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona masih satu *family* dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari Tahun 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus Corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi.

Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan pasca Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir seperti:

#### **A. *Sustainable Development Goals/SDGs***

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut ***Sustainable Development Goals (SDGs)***. Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan



pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;



- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan apalagi Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Topografi yang ekstrim. Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan begitu juga untuk kebutuhan



permukiman. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi bencana banjir dan tanah longsor bertambah serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

## **B. Ancaman krisis ekonomi global**

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed Stated Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia. Adapun kondisi perekonomian Indragiri Hilir juga terkena imbasnya dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,76 persen pada tahun 2020.

## **C. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)**

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya



beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki 58.647 ha (lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh hektar) kawasan hutan lindung, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus pada habitat satwa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **D. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)**

*Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika penjaan atas jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah



meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "*Katowice Climate Package*" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada



lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **E. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan sebagai sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, di mana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.



#### 4.2.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

##### A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

##### 1) Visi, Misi, 5 (Lima) Arah Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:



- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

d) Penyederhanaan Birokrasi



Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

e) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.



c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Moderasi beragama; dan
- Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;



- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- Pembangunan Rendah Karbon.

g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Dalam kebijakan nasional ini setidaknya terdapat tiga kebijakan yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yakni transformasi ekonomi, penyederhaaan regulasi dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Indragiri Hilir.

**Pertama, transformasi ekonomi.** Laju pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020, berpengaruh pada kebijakan percepatan pemulihan ekonomi. Di tahun-tahun selanjutnya, arah kebijakan perekonomian ditransformasikan dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi peta perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir yang selama ini disokong oleh dua sektor terkuat yaitu pertanian dan perdagangan.

**Kedua, penyederhanaan regulasi dan birokrasi.** Sampai dengan tahun 2024, telah diagendakan penyederhanaan sejumlah aturan melalui UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 yang menaungi sejumlah sektor penting seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan investasi diperkirakan akan membawa dampak besar bagi tatanan sosial ekonomi masyarakat. Penyederhanaan birokrasi yang diprioritaskan untuk



mempermudah investasi akan berdampak pada pemangkasan birokrasi dan eselonisasi. Hal ini turut berpengaruh pada kondisi kinerja aparatur pemerintahan di daerah.

**Ketiga, pembangunan sumberdaya manusia.** Produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 174 negara (Human Capital Index, World Bank, 2020), di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Padahal, struktur penduduk Indonesia sedang didominasi penduduk usia produktif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin meraih bonus demografi. Beberapa kebijakan nasional yang akan mempengaruhi arah pembangunan daerah diantaranya pengendalian penduduk, pemenuhan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, revolusi mental, pendidikan karakter dan moderasi beragama untuk memperkuat toleransi.

## **2) Arah Pembangunan Wilayah Sumatera**

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan wilayah Sumatera pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pada pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di Provinsi Riau yakni pengembangan komoditas unggulan karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya.

### **4.2.3 ISU STRATEGIS REGIONAL**



Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah.

#### **A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 – 2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten/kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya..

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Riau, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu :

**“TERWUJUDNYA RIAU YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, BERMARTABAT,  
DAN UNGGUL DI INDONESIA (RIAU BERSATU)”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1. Misi Pertama : Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.**



Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender. Selain itu, untuk mewujudkan sumber daya yang beriman melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

**2. Misi Kedua : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui peningkatan pelayanan transportasi, cakupan pelayanan air minum dan sanitasi rumah tangga, cakupan layanan listrik bagi rumah tangga, infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air. Juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau) melalui peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca.

**3. Misi Ketiga : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.**

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kemandirian ekonomi dan penurunan kesenjangan pendapatan, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

**4. Misi Keempat : Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pemajuan Budaya Melayu melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Melayu Riau. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata melalui peningkatan kunjungan dan kenyamanan wisatawan mancanegara.

**5. Misi Kelima : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi.**



Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan public melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:

- a) Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya Saing
- b) Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman
- c) Meningkatkan kualitas infrastruktur
- d) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau)
- e) Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing
- f) Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu
- g) Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata
- h) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

#### **B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025**

RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir sudah memasuki periode terakhir dari pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, telaahan ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai upaya memastikan setiap visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan kondisi umum Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 yaitu:

#### **"INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025"**

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka, adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjanjikan bagi masa depan daerah dan masyarakatnya yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayah jauh lebih berpotensi.



**BERJAYA** adalah suatu keberhasilan dalam mencapai keadaan yang lebih baik, makmur, adil dan sejahtera sebagai sebuah prestasi disegala bidang, baik secara fisik dan mental spiritual, maupun jasmaniah dan rohaniah melalui ikhtiar dan kerja keras yang dilakukan secara bersama-sama dan seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan Indragiri Hilir dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, nilai kebudayaan Melayu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, nilai dan norma hukum yang berlaku.

**GEMILANG** sebagai sebuah kemajuan yang hebat akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis, dan konseptual antara pemerintah dengan seluruh *stakeholders*, yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin daripada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusi pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosial budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang. Disamping indikator-indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2005 - 2025, telah ditentukan misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut. Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan 5 misi pembangunan, yaitu sebagai berikut :



1. **Mewujudkan daya saing daerah;** adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*), meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. **Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis;** adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menunjang hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.
3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;** adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas diseluruh wilayah, dan tersedianya pelayanan sosial dan pelayanan dasar lainnya yang bermutu dan menjangkau keseluruhan wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
4. **Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya;** adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan berkembangnya seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni Melayu, maka



harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.

5. **Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional dan internasional;** adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan system kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

Tujuan pembangunan jangka panjang periode 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang berdaya dan gemilang sebagai landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### 4.2.4 ISU STRATEGIS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. **Optimalisasi Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan**

Peningkatan Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian



yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan baik dalam kaitannya dengan kesetaraan gender serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Selain dari sisi kesehatan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi titik vital dalam upaya pembangunan manusia yang sehat dan kuat. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi poin penting bagi stakeholder dalam memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat Indragiri Hilir tanpa terkecuali. Aksesibilitas dan konektivitas yang cukup sulit di beberapa wilayah menjadikan hambatan bagi terjangkaunya layanan medis. Kondisi ini yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan cakupan akses dan kualitas layanan terhadap Pendidikan dan Kesehatan.

## **2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim yang mencapai USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan intervensi kepada rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim supaya maju dan bertumbuh melalui berbagai program seperti subsidi, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim, hingga



program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kapasitas ekonomi keluarga.

### **3. Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Industri Hulu dan Hilir Pertanian**

Sumberdaya alam dan lingkungan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai modal pertumbuhan hidup (*life support system*). Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agrasif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar.

Dalam pelaksanaan era persaingan global tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing, diperlukan paradigma sesuai dengan perkembangannya, yang semula berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar, bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian Indragiri ilir yang paling unggul adalah sektor perkebunan dengan komoditi utamanya adalah Kelapa. Tanaman kelapa sangat berperan dalam perekonomian sebagai penyedia lapangan tenaga kerja, bahan baku industri dalam negeri dan konsumsi langsung di Indragiri Hilir. Meskipun demikian, kebanyakan usaha tani kelapa di Indragiri Hilir tidak terkait langsung dengan industri pengolahan, industri hilir, serta industri jasa, dan keuangan. Kabupaten Inhil memiliki produksi kelapa terbesar skala Nasional dan Internasional. Hal ini didukung dengan luas lahan mencapai 429.694 hektare, dan mayoritas (70%) perekonomian masyarakatnya bergantung pada sektor tersebut.



Sehingga Pemerintah Daerah sedang dan akan melakukan berbagai kebijakan/program terkait demikian dengan pengembangan agribisnis untuk mengangkat perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **4. Pembangunan Kewilayahan Berbasis Ketahanan Ekologi**

Fenomena alam gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun, daerah ini dilanda bencana alam yang memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhirnya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Pembangunan kewilayahan antar Kecamatan yang tidak seimbang ditambah dengan kondisi geografis yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Kondisi global yang mengalami krisis iklim menuntut perubahan pembangunan berkelanjutan, keberadaan pemerintah dibutuhkan kebijakan yang pro pada lingkungan digaungkan agar pemerintah mengedepankan ketahanan ekologi dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis ekologi merupakan salah strategi untuk menjamin kedaulatan air, pangan, energi, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

#### **5. Perwujudan Reformasi Birokrasi di Seluruh Urusan Pemerintahan**

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang



bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

Reformasi birokrasi yang belum berjalan sebagaimana diharapkan diduga terkait erat dengan kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi seperti tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang masih tetap berlangsung dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi yang masih lemah. Secara internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya pemecahan secara bertahap dan terarah dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik.



# BAB V

## TUJUAN DAN SASARAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2022. Dokumen RPD menjadi acuan bagi OPD menyusun Renstra serta penyusunan RKPD. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen RPD dikarenakan pemilukada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Bab V dalam dokumen RPD ini memuat tujuan dan sasaran, di mana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Kabupaten Indragiri Hilir dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2026.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.



Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 adalah **“INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025”**. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah; adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*), meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menunjang hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas diseluruh wilayah, dan tersedianya pelayanan sosial dan pelayanan dasar lainnya yang bermutu dan menjangkau keseluruhan wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.



4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya; adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan berkembangnya seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni Melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan teals dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional dan internasional; adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan system kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Indragiri Hilir. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan dari RPJMD ke-3, dan RPJMD ke - 4 pada hal ini disebut RPD, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal. Kesejahteraan yang makin meningkat ditandai dengan makin meratanya pendapatan



seluruh lapisan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, ditandai dengan makin meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pendidikan, meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kualitas tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian sasaran pokok sebagaimana yang dimaksud pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam 4 (empat) tahap RPJMD, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam bentuk proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up*.

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan target pembangunan Nasional (RPJMN).



**Tabel V.1**  
**Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro**  
**Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Nasional**

| No | RPJMN Tahun 2020-2024              |        |       |       |       |      | RPJMD Provinsi Riau                |        |             |             |             | RPD Kab. Indragiri Hilir           |        |        |        |
|----|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | Indikator                          | Target |       |       |       |      | Indikator                          | Target |             |             |             | Indikator                          | Target |        |        |
|    |                                    | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |                                    | 2021   | 2022        | 2023        | 2024        |                                    | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1  | IPM                                |        |       |       |       |      | IPM                                | 72,94  | 73,21-73,44 | 73,43-7369  | 73,74-73,91 | IPM                                | 67,79  | 68,07  | 68,35  |
| 2  | Tingkat Kemiskinan (%)             | 11,55  | 10,95 | 10,45 | 10,05 | 9,38 | Tingkat Kemiskinan (%)             | 7,00   | 6,52-6,87   | 6,31-6,65   | 5,97-6,05   | Tingkat Kemiskinan (%)             | 5,47   | 5,24   | 5,00   |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 4,00   | 3,80  | 3,60  | 3,20  | 2,90 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 4,42   | 4,12-4,30   | 3,92-4,13   | 3,43-3,74   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 1,44   | 1,41   | 1,38   |
| 4  | Indeks Gini                        |        |       |       |       |      | Indeks Gini                        | 0,327  | 0,322-0,333 | 0,319-0,329 | 0,316-0,324 | Indeks Gini                        | 0,286  | 0,280  | 0,275  |
| 5  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 6,00   | 6,70  | 7,00  | 7,30  | 7,50 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 3,36   | 2,69-3,04   | 2,82-3,49   | 2,10-3,75   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5.55   | 5.81   | 6.09   |
| 6  | PDRB per Kapita (Juta Rp)          |        |       |       |       |      | PDRB per Kapita (Juta Rp)          |        |             |             |             | PDRB per Kapita (Juta Rp)          | 133.39 | 137.10 | 140.92 |



Tujuan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2024–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana berikut:

**Tabel V.2**  
**Indikator Tujuan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| Tujuan                                                            | Indikator                  | Kondisi Awal | Target Akhir |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat                | Indeks Pembangunan Manusia | 67,37        | 68,35        |
| Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan                 | Laju Pertumbuhan Ekonomi   | 5,31         | 6.09         |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) | Indeks Reformasi Birokrasi | B<br>(63,07) | B<br>(66.21) |

*\*data sementara*

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing–masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

**1. Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan untuk membantu pengembangan kompetensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Indragiri Hilir yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
- Meningkatnya pendapatan masyarakat
- Meningkatnya kualitas kesempatan kerja



## **2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan**

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Hancurnya sektor perekonomian sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah merosot tajam. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak semakin terpuruk. Kabupaten Indragiri Hilir termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan sektor perekonomian Indragiri Hilir yang dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif.

Selain mengelola sektor-sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Indragiri Hilir terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah
- b) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- c) Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan

## **3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**



Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
- b) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah
- c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel V.3**

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024–2026**

| RPD                                                |                                                                |                                               | Kondisi Awal | Tahun Target |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Tujuan                                             | Sasaran                                                        | Indikator                                     | 2022         | 2024         | 2025  | 2026  |
| Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat |                                                                | Indeks Pembangunan Manusia                    | 67,37        | 67,79        | 68,07 | 68,35 |
|                                                    | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                      | Indeks Kesehatan                              | 0,743        | 0,750        | 0,754 | 0,758 |
|                                                    | Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat     | Indeks Pendidikan                             | 0,581        | 0,582        | 0,583 | 0,585 |
|                                                    | Meningkatnya pendapatan masyarakat                             | Indeks Pengeluaran                            | 0,708        | 0,715        | 0,718 | 0,721 |
|                                                    | Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran                         | Tingkat Kemiskinan                            | 5,98         | 5,47         | 5,24  | 5,00  |
|                                                    |                                                                | Tingkat Pengangguran Terbuka                  | 1,50         | 1,44         | 1,41  | 1,38  |
| Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan  |                                                                | Laju Pertumbuhan Ekonomi                      | 5,31         | 5.55         | 5.81  | 6.09  |
|                                                    | Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah | LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 4,34         | 4.64         | 4.87  | 5.12  |
|                                                    |                                                                | LPE Sektor Industri Pengolahan                | 4,68         | 5.34         | 5.60  | 5.88  |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| RPD                                                                      |                                                                              |                                           | Kondisi Awal         | Tahun Target         |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tujuan                                                                   | Sasaran                                                                      | Indikator                                 | 2022                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|                                                                          | Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup          | 63.31                | 68.05                | 68.43                | 68.81                |
|                                                                          |                                                                              | Indeks Risiko Bencana                     | 168.4*               | 162                  | 158                  | 154                  |
|                                                                          | Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan               | Indeks Infrastruktur                      | 58.99                | 63.33                | 65.71                | 67.88                |
| <b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b> |                                                                              | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>         | <b>B<br/>(63.07)</b> | <b>B<br/>(64.08)</b> | <b>B<br/>(65.13)</b> | <b>B<br/>(66.21)</b> |
|                                                                          | Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | Nilai AKIP                                | B<br>(64,10)         | B<br>(68,01)         | BB<br>(70,90)        | BB<br>(71,23)        |
|                                                                          |                                                                              | Indeks Profesionalitas ASN                | 57,06                | 58,10                | 58,12                | 58,15                |
|                                                                          | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah                            | Indeks Integritas                         | 72,65                | 74,00                | 74,50                | 75,00                |
|                                                                          |                                                                              | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah        | 75,47*               | 78,32                | 79,82                | 81,65                |
|                                                                          | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                       | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik | 83.40                | 89,64                | 92,24                | 94,83                |

*\*kondisi data tahun 2021/angka sementara*



Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Keterkaitan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel V.4**  
**Keterkaitan (Cascading) IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| TUJUAN/SASARAN DAERAH                                 | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN                                           | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                    | OPD PENANGGUNGJAWAB                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat | Indeks Pembangunan Manusia      |                                                          |                                                             |                                                |
| 1.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat        | Indeks Kesehatan                |                                                          |                                                             |                                                |
|                                                       |                                 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                | Angka Harapan Hidup                                         | Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan |
|                                                       |                                 | Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan masyarakat | Tingkat Akreditasi RS                                       | Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan |
|                                                       |                                 |                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Puri Husada Tembilahan   | Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan |
|                                                       |                                 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                | Angka Harapan Hidup                                         | Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung          |
|                                                       |                                 | Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan masyarakat | Tingkat Akreditasi RS                                       | Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung          |
|                                                       |                                 |                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Tengku Sulung            | Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung          |
|                                                       |                                 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                | Angka Harapan Hidup                                         | Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa              |
|                                                       |                                 | Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan masyarakat | Tingkat Akreditasi RS                                       | Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa              |
|                                                       |                                 |                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Raja Musa Sungai Guntung | Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa              |
|                                                       |                                 | Meningkatkan kualitas kependudukan,                      | Tingkat Angka Kelahiran Total (TFR)                         | DP2KBP3A                                       |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH                                           | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN                                                                  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                                                                                                                                               | OPD PENANGGUNGJAWAB |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                 |                                 | Pengendalian Penduduk serta Kesertaan Ber-KB.                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|                                                                 |                                 | Meningkatnya akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas              | Persentase Pemakaian Kontrasepsi (mCPR)                                                                                                                                                                                | DP2KBP3A            |
|                                                                 |                                 |                                                                                 | Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                                                  | DP2KBP3A            |
| 1.2. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat | Indeks Pendidikan               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|                                                                 |                                 | Meningkatkan Mutu/ Kualitas pendidikan masyarakat                               | Rata-rata Lama Sekolah<br>Harapan Lama Sekolah<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA<br>Angka Kelulusan (AL) SD/MI<br>Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs      | Dinas Pendidikan    |
|                                                                 |                                 | Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkeadilan | Angka Partisipasi Sekolah (7-12)<br>Angka Partisipasi Sekolah (13-15)                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan    |
|                                                                 |                                 | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan<br>Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi<br>Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi<br>Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV | Dinas Pendidikan    |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH                          | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN                                                                               | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                                                                                    | OPD PENANGGUNGJAWAB                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                |                                 | Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga                                    | Persentase Peningkatan Pemuda Aktif                                                                                                                         | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan |
|                                                |                                 |                                                                                              | Persentase Peningkatan prestasi olahraga Tingkat Daerah                                                                                                     | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan |
|                                                |                                 | Meningkatnya Peran Aktif Pemuda                                                              | Cakupan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan                                                                                                      | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan |
|                                                |                                 | Meningkatnya Prestasi Olahraga                                                               | Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah                                                                                                                  | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan |
|                                                |                                 | Meningkatkan Minat Baca Masyarakat                                                           | Nilai SKM Pemustaka terhadap pelayanan                                                                                                                      | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah                   |
|                                                |                                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan                                                 | Persentase jumlah pengunjung perpustakaan                                                                                                                   | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah                   |
| <b>1.3. Meningkatnya pendapatan masyarakat</b> | <b>Indeks Pengeluaran</b>       |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                       |
|                                                |                                 | Mewujudkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat                                           | Tingkat Penurunan Jumlah PPKS                                                                                                                               | Dinas Sosial                                          |
|                                                |                                 | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                   | Persentase PPKS yang Tertangani                                                                                                                             | Dinas Sosial                                          |
|                                                |                                 |                                                                                              | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Dinas Sosial                                          |
|                                                |                                 | Meningkatkan peran sektor industri dan perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi | LPE Kategori Industri Pengolahan                                                                                                                            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian                   |
|                                                |                                 |                                                                                              | Ekspor bersih perdagangan                                                                                                                                   | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian                   |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH                                | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH                 | TUJUAN/SASARAN                                                   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                  | OPD PENANGGUNGJAWAB                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      |                                                 | Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri                       | Pertumbuhan volume ekspor                                                 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian    |
|                                                      |                                                 | Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah        | Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)                                 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian    |
|                                                      |                                                 | Terjaganya stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat | Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga            | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian    |
| 1.4. Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran          | Tingkat Kemiskinan                              |                                                                  |                                                                           |                                        |
|                                                      | Tingkat Pengangguran Terbuka                    |                                                                  |                                                                           |                                        |
|                                                      |                                                 | Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja                          | Persentase Kenaikan UMK                                                   | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
|                                                      |                                                 | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja                           | Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
|                                                      |                                                 | Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja                             | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                        | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
|                                                      |                                                 | Meningkatnya kemandirian warga Transmigrasi                      | Persentase Transmigran Mandiri                                            | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
| 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan | Laju Pertumbuhan Ekonomi                        |                                                                  |                                                                           |                                        |
| 2.1. Meningkatkan produktifitas                      | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |                                                                  |                                                                           |                                        |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH               | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH  | TUJUAN/SASARAN                                                                                       | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                          | OPD PENANGGUNGJAWAB                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| sektor perekonomian unggulan daerah | LPE Kategori Industri Pengolahan |                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |
|                                     |                                  | Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis unggulan daerah                 | Persentase UMKM dan Koperasi yang naik skala usaha                                                | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah            |
|                                     |                                  | Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Koperasi dan UMKM                                                     | Persentase Koperasi yang aktif                                                                    | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah            |
|                                     |                                  |                                                                                                      | Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru                                                             | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah            |
|                                     |                                  | Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil | Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah            |
|                                     |                                  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil            | Nilai AKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil                                 | Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah            |
|                                     |                                  | Meningkatkan Investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                              | Persentase pertumbuhan investasi daerah sampai dengan tahun berkenaan                             | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                                     |                                  | Meningkatnya Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Indragiri Hilir                                    | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                                                      | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                                     |                                  | Meningkatnya Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir                                               | Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan                                           | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN                                     | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                      | OPD PENANGGUNGJAWAB                                       |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       |                                 | Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan  | Jumlah Kunjungan Wisatawan                                                                    | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan     |
|                       |                                 |                                                    | Tingkat Hunian Akomodasi                                                                      | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan     |
|                       |                                 |                                                    | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                       | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan     |
|                       |                                 | Meningkatnya Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat | Jumlah Desa Wisata dan Desa Kreatif                                                           | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan     |
|                       |                                 | Optimalisasi Pelestarian Warisan Budaya            | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan                                                         | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan     |
|                       |                                 | Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan       | Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah) | Dinas Perkebunan                                          |
|                       |                                 | Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan          | Produksi Komoditi Perkebunan                                                                  | Dinas Perkebunan                                          |
|                       |                                 | Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan     | jumlah produktivitas tanaman perkebunan                                                       | Dinas Perkebunan                                          |
|                       |                                 | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian           | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                     | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |
|                       |                                 | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah               | Jumlah Ketersediaan Pangan Utama                                                              | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |
|                       |                                 | Meningkatnya Produksi Pertanian                    | Jumlah Produksi Tanaman Pangan                                                                | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |
|                       |                                 |                                                    | Jumlah Produksi Ternak                                                                        | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH                                                         | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH               | TUJUAN/SASARAN                                                                         | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                        | OPD PENANGGUNGJAWAB                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                               | Meningkatkan Kesejahteraan Petani                                                      | Nilai Tukar Petani                                              | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |
|                                                                               |                                               | Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Petani                                                | Cakupan Bina Kelompok Petani                                    | Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |
|                                                                               |                                               | Meningkatkan Hasil Kelautan dan Perikanan                                              | LPE subkategori perikanan                                       | Dinas Perikanan                                           |
|                                                                               |                                               | Meningkatnya Kapasitas Produksi Melalui Peningkatan Penangkapan dan Budidaya Perikanan | Jumlah produksi perikanan tangkap                               | Dinas Perikanan                                           |
|                                                                               |                                               |                                                                                        | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya                        | Dinas Perikanan                                           |
| 2.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup              |                                                                                        |                                                                 |                                                           |
|                                                                               | Indeks Risiko Bencana<br>Indeks Infrastruktur |                                                                                        |                                                                 |                                                           |
|                                                                               |                                               | Menurunkan resiko bencana dan dampak bencana                                           | Luas wilayah terdampak bencana                                  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                       |
|                                                                               |                                               | meningkatnya efektifitas pencegahan, penenganan bencanan dan pemulihan pasca bencana   | persentase kesadaran masyarakat peduli bencana                  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                       |
|                                                                               |                                               |                                                                                        | persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                       |
|                                                                               |                                               |                                                                                        | persentase rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                       |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH                             | TUJUAN/SASARAN                                                             | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                               | OPD PENANGGUNGJAWAB                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                                                             | meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan bencana | indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan wilayah terdampak bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |
|                       | Menjamin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup      |                                                                            | Indeks Kualitas Udara (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                      | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |
|                       |                                                             |                                                                            | Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                        | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |
|                       |                                                             |                                                                            | Indeks Kualitas Lahan (IKL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                      | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |
|                       |                                                             |                                                                            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan          | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |
|                       | Penaatan Lingkungan Hidup                                   |                                                                            | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sumber Pencemar                           | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |
|                       | Pengendalian Lingkungan Hidup                               |                                                                            | Persentase timbulan sampah dan limbah yang tertangani                                  | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |
|                       | Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat |                                                                            | Indeks Infrastruktur                                                                   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang   |
|                       | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan                    |                                                                            | Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap.                                           | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang   |
|                       | Terpenuhinya Akses Air bersih                               |                                                                            | Persentase penduduk berakses air bersih                                                | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang   |
|                       | Meningkatkan Pelaksanaan pelayanan Jasa Konstruksi          |                                                                            | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi               | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang   |
|                       | Meningkatnya Layanan Air Limbah Domestik                    |                                                                            | Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Perkotaan            | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang   |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN                                                                                          | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                        | OPD PENANGGUNGJAWAB                 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                                 | Meningkatkan pembangunan pelayanan prasarana dan sarana bangunan gedung insfrastruktur Pekerjaan Umum   | Jumlah Kepatuhan PBG pertahun per satuan bangunan                                               | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
|                       |                                 | Meningkatnya pembangunan/gedung ber PBG                                                                 | Jumlah bangunan ber-PBG per satuan bangunan pertahun                                            | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
|                       |                                 | Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air                                                       | Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik                                                        | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
|                       |                                 | Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Air                                                                | Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik                                                 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
|                       |                                 | Meningkatkan keterwujudan tertib Tata Ruang                                                             | Persentase ketaatan pembangunan terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang                  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
|                       |                                 | Meningkatnya pelayanan KKPR                                                                             | Jumlah Persetujuan/Konfirmasi/Rekomendasi KKPR(PKKPR/KKKPR/RKKPR) yang diterbitkan pada tahun N | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
|                       |                                 | Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan                                          | Indekss Infrastruktur.                                                                          | Dinas Perhubungan                   |
|                       |                                 | Meningkatkan kelancaran dan Keselamatan aksesibilitas menuju KSPP,Pusat Pemerintahan dan Layanan Publik | Rasio konektivitas kabupaten                                                                    | Dinas Perhubungan                   |
|                       |                                 |                                                                                                         | Persentase Tingkat penurunan kecelakaan darat/perairan                                          | Dinas Perhubungan                   |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH                                                         | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN                                                                                   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                   | OPD PENANGGUNGJAWAB                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                               |                                 | Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman                                           | Rasio permukiman layak huni                                                                | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
|                                                                               |                                 | Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai | Rasio rumah layak huni                                                                     | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
|                                                                               |                                 |                                                                                                  | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU                            | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
|                                                                               |                                 | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Desa                                                      | Indeks Desa Membangun                                                                      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
|                                                                               |                                 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan                                         | Indeks Ketahanan Sosial<br>Indeks Ketahanan Ekonomi<br>Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)          | Indeks Reformasi Birokrasi      |                                                                                                  |                                                                                            |                                        |
| 3.1. Meningkatnya profesionalitas ASN akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP .                   |                                                                                                  |                                                                                            |                                        |
|                                                                               | Indeks Profesionalitas ASN      |                                                                                                  |                                                                                            |                                        |
|                                                                               |                                 | Meningkatkan Kualitas layanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD                                 | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD               | Sekretariat Dprd                       |
|                                                                               |                                 | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan                                                             | Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan                                             | Sekretariat Dprd                       |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH                                                                                                                          | TUJUAN/SASARAN           | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                           | OPD PENANGGUNGJAWAB                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                          | program legislasi daerah |                                                    |                                                       |
|                       | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif                                                          |                          | Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
|                       | Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                                    |                          | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
|                       | Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah |                          | Indeks Inovasi Daerah                              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
|                       | Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |                          | Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
|                       | Meningkatkan Integritas, Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Aparatur                                                                                    |                          | Indeks Profesionalitas ASN                         | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH                                  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH     | TUJUAN/SASARAN                                                            | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                                | OPD PENANGGUNGJAWAB                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                     | Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen Aparatur                           | Indeks Sistem Merit                                                                                     | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
|                                                        |                                     | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)         | Nilai LPPD (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)                                              | Sekretariat Daerah                                    |
|                                                        |                                     | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.                     | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi | Sekretariat Daerah                                    |
|                                                        |                                     |                                                                           | Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi          | Sekretariat Daerah                                    |
|                                                        |                                     |                                                                           | Persentase pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memiliki kategori sangat tinggi          | Sekretariat Daerah                                    |
| 3.2. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah | Indeks Integritas                   |                                                                           |                                                                                                         |                                                       |
|                                                        | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. |                                                                           |                                                                                                         |                                                       |
|                                                        |                                     | Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah                                  | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah                                                               | Badan Pendapatan Daerah                               |
|                                                        |                                     | Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah                   | Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD                                                                         | Badan Pendapatan Daerah                               |
|                                                        |                                     | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di BKAD | Opini BPK (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)                                               | Badan Keuangan Dan Aset Daerah                        |
|                                                        |                                     | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah                | Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan tepat waktu                 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah                        |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH                       | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH             | TUJUAN/SASARAN                                                                                                                 | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                          | OPD PENANGGUNGJAWAB                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                             |                                             |                                                                                                                                | Persentase SKPD yang menyusun laporan BMD secara akurat, akuntabel dan tepat waktu                | Badan Keuangan Dan Aset Daerah                         |
|                                             |                                             | Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Baik                              | Level Maturitas SPIP                                                                              | Inspektorat Daerah                                     |
|                                             |                                             | Meningkatnya Profesionalisme aparaturnya pengawasan internal Pemerintah                                                        | Level Kapabilitas APIP                                                                            | Inspektorat Daerah                                     |
| 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik . |                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                        |
|                                             |                                             | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan                           | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                |
|                                             |                                             | Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan                                                                          | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                     | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                |
|                                             |                                             |                                                                                                                                | Waktu Penyelesaian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                      | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                |
|                                             |                                             | Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                    | Indeks SPBE                                                                                       | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik |
|                                             |                                             | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                     | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik |
|                                             |                                             |                                                                                                                                | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH                                                                                  | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                  | OPD PENANGGUNGJAWAB                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                  |                | disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik                    |                                                        |
|                       |                                                                                                                  |                | Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi                   | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik |
|                       |                                                                                                                  |                | Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah                          | Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik |
|                       | Meningkatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir                                       |                | Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP Kab Inhil                                                 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                       | Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir |                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penanaman Modal                                | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                       | Menciptakan rasa tentram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat                                             |                | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)                  | Satuan Polisi Pamong Praja                             |
|                       | Menurunnya jumlah pelanggaran Perda                                                                              |                | Persentase Penegakan PERDA                                                                | Satuan Polisi Pamong Praja                             |
|                       | Meningkatnya Profesionalisme Personil Satpol PP dalam pelaksanaan Tugas                                          |                | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara | Satuan Polisi Pamong Praja                             |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN                                                                                           | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                                                      | OPD PENANGGUNGJAWAB                      |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                       |                                 | Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non Kebakaran                         | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran                                                 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
|                       |                                 | Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran dan Non Kebakaran                            | Cakupan penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran                                                  | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
|                       |                                 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat                                                                        | Persentase penurunan kejadian kebakaran                                                                                       | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
|                       |                                 | Meningkatkan kehidupan masyarakat Indragiri Hilir yang demokratis, kondusif, dan berwawasan kebangsaan   | Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara.                                  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        |
|                       |                                 | Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat | Persentase potensi konflik yang di fasilitasi                                                                                 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        |
|                       |                                 | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara           | Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan komponen masyarakat tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        |
|                       |                                 | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi                                                     | Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, dan Pilkades.                                         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| TUJUAN/SASARAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN                                                                   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                         | OPD PENANGGUNGJAWAB                 |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                                 | Meningkatkan tata kelola kearsipan daerah                                        | Indeks Kearsipan                                                                 | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah |
|                       |                                 | Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah                             | Persentase Perangkat Daerah dengan pengelolaan Arsip yang tertib                 | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah |
|                       |                                 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                                           | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik                                        | Kecamatan                           |
|                       |                                 | Terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di Kecamatan Tembilahan Hulu |                                     |



Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024-2026 disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.



**Tabel V.5**  
**Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| Tujuan                                             | Sasaran                                                    | Indikator                  | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat |                                                            | Indeks Pembangunan Manusia | $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                                            | Tingkat Kemiskinan         | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                  | Indeks Kesehatan           | $I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat | Indeks Pendidikan          | $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket:<br/> HLS = Harapan Lama Sekolah<br/> HLS maks = 18; HLS min = 0<br/> RLS = Rata-rata Lama Sekolah<br/> RLS maks = 15; RLS min = 0</p> |



| Tujuan                                            | Sasaran                                | Indikator                    | Definisi Operasional                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Meningkatnya pendapatan masyarakat     | Indeks Pengeluaran           | $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$              |
|                                                   |                                        | PDRB per Kapita              | $\frac{\text{PDRB adh Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$                                                                                                    |
|                                                   | Meningkatnya kualitas kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$                                                            |
| Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan |                                        | Laju Pertumbuhan Ekonomi     | $\frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket:<br/>PDRB atas dasar harga konstan<br/>t= tahun berjalan<br/>t-1= tahun sebelumnya</p> |



| Tujuan | Sasaran                                                                  | Indikator                                       | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah           | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | $\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket:<br/>PDRB atas dasar harga konstan<br/>t= tahun berjalan<br/>t-1= tahun sebelumnya<br/>P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p> |
|        |                                                                          | LPE Kategori Industri Pengolahan                | $\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket:<br/>PDRB atas dasar harga konstan<br/>t= tahun berjalan<br/>t-1= tahun sebelumnya<br/>IP= Kategori Industri Pengolahan</p>                   |
|        | Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                | <p><b>IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)</b></p> <p>Ket:<br/>IKA = Indeks Kualitas Air<br/>IKU = Indeks Kualitas Udara<br/>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>                                         |



| Tujuan                                                   | Sasaran                                                        | Indikator             | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                              |                                                          |                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                                                                | Indeks Risiko Bencana | <div><div>Indeks Bahaya (H)</div><div>Indeks Kerentanan (V)</div><div>Indeks Kapasitas (C)</div><div><math>R = (H * V * (1 - C))^{1/3}</math></div><div>Indeks Risiko</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                              |                                                          |                                                        |                                             |
|                                                          | Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan | Indeks Infrastruktur  | <div>Indeks Infrastruktur =<br/><math>0,3255 \times jalan + 0,3343 \times air + 0,5133 \times sanitasi + 0,5033 \times pkpl + 0,5153 \times i\_kom\_inv</math><br/>Variabel Indeks Infrastruktur :</div> <table><thead><tr><th>Definisi</th></tr></thead><tbody><tr><td>% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x</td></tr><tr><td>% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x</td></tr><tr><td>%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x</td></tr><tr><td>% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN</td></tr></tbody></table> | Definisi | % Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x | % Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x | %Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x | % Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN |
| Definisi                                                 |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              |                                                          |                                                        |                                             |
| % Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x             |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              |                                                          |                                                        |                                             |
| % Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              |                                                          |                                                        |                                             |
| %Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x   |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              |                                                          |                                                        |                                             |
| % Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN              |                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              |                                                          |                                                        |                                             |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan                                                            | Sasaran                    | Indikator | Definisi Operasional                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                            |           | Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah) |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) | Indeks Reformasi Birokrasi |           |                                                                                      |



| Tujuan             | Sasaran                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                              | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|---------------------|-----|------|-----|-----|--------------------|-----|--------|-------|-----|-------------------|-----|-------|-------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|--------|---------|---------|-------|--|----|----|-----|-----|
|                    | Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | Nilai AKIP                                                                                                                                                                             | <div><div><div>Sistem AKIP</div><table><tr><th></th><th>FORMAL</th><th>KUALITAS</th><th>PEMANFAATAN</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6 %</td><td>15 %</td><td>9 %</td><td>30%</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>5 %</td><td>12,5 %</td><td>7,5 %</td><td>25%</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3 %</td><td>7,5 %</td><td>4,5 %</td><td>15%</td></tr><tr><td>Evaluasi Kinerja</td><td>2 %</td><td>5 %</td><td>3 %</td><td>10%</td></tr></table><div>80%</div></div><div><table><tr><th>CAPAIAN KINERJA</th><th>OUTPUT</th><th>OUTCOME</th><th>LAINNYA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td></td><td>5%</td><td>5%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr></table></div></div> |             | FORMAL | KUALITAS | PEMANFAATAN | TOTAL | Perencanaan Kinerja | 6 % | 15 % | 9 % | 30% | Pengukuran Kinerja | 5 % | 12,5 % | 7,5 % | 25% | Pelaporan Kinerja | 3 % | 7,5 % | 4,5 % | 15% | Evaluasi Kinerja | 2 % | 5 % | 3 % | 10% | CAPAIAN KINERJA | OUTPUT | OUTCOME | LAINNYA | TOTAL |  | 5% | 5% | 10% | 20% |
|                    |                                                                              | FORMAL                                                                                                                                                                                 | KUALITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEMANFAATAN | TOTAL  |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
|                    | Perencanaan Kinerja                                                          | 6 %                                                                                                                                                                                    | 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 %         | 30%    |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
| Pengukuran Kinerja | 5 %                                                                          | 12,5 %                                                                                                                                                                                 | 7,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25%         |        |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
| Pelaporan Kinerja  | 3 %                                                                          | 7,5 %                                                                                                                                                                                  | 4,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15%         |        |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
| Evaluasi Kinerja   | 2 %                                                                          | 5 %                                                                                                                                                                                    | 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10%         |        |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
| CAPAIAN KINERJA    | OUTPUT                                                                       | OUTCOME                                                                                                                                                                                | LAINNYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL       |        |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
|                    | 5%                                                                           | 5%                                                                                                                                                                                     | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20%         |        |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
|                    | Indeks Profesionalitas ASN                                                   | Merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |
|                    | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah                            | Indeks Integritas                                                                                                                                                                      | Survey penilaian integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui survey pihak eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |          |             |       |                     |     |      |     |     |                    |     |        |       |     |                   |     |       |       |     |                  |     |     |     |     |                 |        |         |         |       |  |    |    |     |     |



| Tujuan | Sasaran | Indikator                          | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                                    |  <p><b>DIMENSI IPK</b></p> <p>Prevalensi, Preferensi, Severity, Akuntabilitas, Efektivitas</p> <p>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan nilai rerata sederhana dari kelima dimensi pengukuran korupsi di atas. Secara matematis formula perhitungan indeks persepsi korupsi tersebut sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Persepsi Korupsi} = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n}$ |
|        |         | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah:<br>a) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15)<br>b) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20)<br>c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15)<br>d) Penyerapan anggaran (20)<br>e) Kondisi keuangan daerah (15) Opini BPK atas LKPD (15)                                                                                                                                                          |



| Tujuan | Sasaran                                | Indikator                                 | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik |  <div> <b>Penghitungan Indeks</b> </div> <div> <ol style="list-style-type: none"> <li> <b>Menentukan nilai untuk setiap indikator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai per indikator: <math>\left( \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}</math></li> </ul> </li> <li> <b>Menentukan nilai setiap aspek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai per aspek: <math>\sum \text{nilai perindikator}</math></li> </ul> </li> <li> <b>Menentukan indeks</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai indeks: <math>\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)</math></li> </ul> </li> </ol> </div> <div> <div>Menentukan nilai INDIKATOR</div> <div>↓</div> <div>Menentukan nilai ASPEK</div> <div>↓</div> <div>Menentukan nilai INDEKS</div> </div> <p>Pembobotan Aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Pelayanan (30%)</li> <li>Profesionalisme SDM (18%)</li> <li>Sarana Prasarana (15%)</li> <li>Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%)</li> <li>Konsultasi dan Pengaduan (15%)</li> <li>Inovasi (7%)</li> </ol> |



# BAB VI

## STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Perencanaan merupakan salah satu proses yang menentukan tindakan masa depan, proses memilih urutan pilihan yang dapat dimaksimalkan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia, maka dibutuhkan langkah-langkah taktis strategis ke setiap segi operasional. Strategi harus dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghadapi berbagai tantangan dan problematika dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai langkah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya – upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026.



## 6.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian langkah strategis yang dilaksanakan melalui program – program indikatif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026. Strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran – sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026. Rumusan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut:

**Tabel VI.1.**  
**Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026**

| Tujuan/Sasaran  |                                                                                 |                                                                          | Strategi |                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan 1</b> | <b>Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat</b>                       |                                                                          |          |                                                                              |
|                 | Sasaran 1                                                                       | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                | 1        | Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan                    |
|                 | Sasaran 2                                                                       | Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat               | 2        | Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan                   |
|                 | Sasaran 3                                                                       | Meningkatnya pendapatan masyarakat                                       | 3        | Optimalisasi pengentasan kemiskinan                                          |
|                 | Sasaran 4                                                                       | Meningkatnya kualitas kesempatan kerja                                   | 4        | Peningkatan produktivitas tenaga kerja                                       |
| <b>Tujuan 2</b> | <b>Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan</b>                        |                                                                          |          |                                                                              |
|                 | Sasaran 5                                                                       | Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah           | 5        | Pengembangan potensi agroindustri daerah                                     |
|                 | Sasaran 6                                                                       | Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana | 6        | Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian |
|                 | Sasaran 7                                                                       | Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan           | 7        | Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah                       |
| <b>Tujuan 3</b> | <b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)</b> |                                                                          |          |                                                                              |



| Tujuan/Sasaran |            |                                                                              | Strategi |                                                                                          |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Sasaran 8  | Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | 8        | Memperkuat manajemen ASN seluruh urusan pemerintahan                                     |
|                |            |                                                                              | 9        | Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja   |
|                | Sasaran 9  | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah                            | 10       | Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah                      |
|                | Sasaran 10 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                       | 11       | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan berbasis elektronik |

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada Tahun 2024, 2025 dan 2026, berikut penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026:

#### **1. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan**

Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas yang harus diperhatikan dan dirancang dengan matang untuk mengimbangi kebutuhan kualitas daya saing manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan berbasis IT. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau layanan Pendidikan dengan lebih mudah, nyaman dan mampu mengembangkan minat, bakat, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan usaha. Selain Pendidikan, Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang harus diperhatikan Pemerintah Indragiri Hilir agar kualitas layanan kesehatan secara merata dapat lebih mudah diakses masyarakat. Dengan begitu, masyarakat mampu menjangkau fasilitas kesehatan yang mudah dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.



## **2. Optimalisasi pengentasan kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan standar hidup rata-rata disuatu daerah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kondisi ekonomi saat ini, dampak dari Covid-19 yang masih terasa, kenaikan inflasi, membuat perekonomian masyarakat tidak stabil. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah penduduk miskin di tahun 2021, sehingga perlu upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menangani kemiskinan. Salah satu penanganan kemiskinan yang dapat dilakukan yaitu optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan penduduk miskin di perdesaan harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, ini penting untuk mendorong pembangunan ekonomi di desa. Dengan memaksimalkan potensi sumberdaya terutama pada bidang pertanian, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah.

## **3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja**

Kualitas daya saing SDM sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, tenaga kerja yang unggul dan terampil akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Banyak factor yang mempengaruhi tingginya Produktivitas tenaga kerja, selain kualitas skill yang dimiliki, besarnya peluang penempatan pekerja, kemauan kerja keras dan kerja cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini sudah diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Pemerintah daerah sudah mempersiapkan Rencana Pembangunan Industri, yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024. Hal ini akan membuka peluang besar bagi investor untuk menanamkan usaha di Kabupaten Indragiri Hilir yang akan berdampak pada banyaknya penyerapan tenaga kerja sesuai lapangan kerja yang tersedia. Dengan ini perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, sehingga angkatan kerja ini mampu memenuhi kualifikasi dari bidang usaha yang dibutuhkan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.



#### 4. Pengembangan potensi agroindustri daerah

Pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan dengan menggali dan mengeksplor potensi sumber daya yang tersedia. Percepatan pembangunan ekonomi daerah harus berfokus pada pengembangan Kawasan dan produk andalannya. Kabupaten Indragiri Hilir yang berjudul "**Negeri Hamparan Kelapa Dunia**" dan diketahui merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, melihat potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sector pertanian dan industri pengolahan menjadi sector utama yang memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah. Pertanian merupakan sector yang penting dalam pembangunan ekonomi, selain mencukupi kebutuhan pangan, sector pertanian dapat berkembang menjadi sector industri unggulan daerah. Titik krusial pembangunan ekonomi adalah bergesernya produk (hasil pertanian) yang berupa bahan mentah ke sektor industri. Industri yang mengolah hasil-hasil pertanian primer menjadi produk olahan adalah proses dari agroindustri. Dengan upaya pengembangan potensi agroindustri maka diharapkan mampu memberikan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk pertanian, meningkatkan kesejahteraan para petani, pekebun dan peternak. Menindaklanjuti hal tersebut dan melihat potensi yang ada, maka upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pengembangan perkebunan kelapa rakyat, Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan, serta Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis. Dengan ini diharapkan pengembangan potensi agroindustri di Kabupaten Indragiri Hilir ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### 5. Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian

Dalam pembangunan ekonomi terkadang terdapat aktivitas-aktivitas yang mampu merusak ekosistem lingkungan hidup, sebagai contoh adanya pabrik pengolahan tepung beras yang pasti diperlukan pengolahan dari residu/limbahnya. Hal ini dapat memicu pencemaran bahkan meracuni lingkungan yang akhirnya secara bertahap mampu mendegradasi ekosistem lingkungan. Kerusakan yang terjadi pada berbagai ekosistem, menyebabkan terganggunya komponen-komponen yang menyusun suatu



ekosistem lingkungan hidup. Dengan ini perlu adanya upaya pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup. Dengan pengawasan lingkungan hidup yang ketat, diharapkan mampu meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat dan kemajuan menuju pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

#### **6. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah**

Infrastruktur menjadi salah satu bukti dan kunci pembangunan fisik yang mampu memberikan pengaruh cukup signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan (jalan penghubung daerah perbatasan), jembatan, drainase dan pembangunan perumahan/pemukiman yang layak. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersinergi dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah dan meningkatkan aktivitas masyarakat. Sehingga diharapkan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **7. Memperkuat manajemen ASN**

Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasinya sendiri yang tentunya akan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja daerah. Diperlukan berbagai macam langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah demi menciptakan ASN berkualitas dan pelayanan publik yang optimal diantaranya Meningkatkan Akuntabilitas, Memperkuat Rasa Nasionalisme,



Membentuk Etika Publik, Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi, Menciptakan Komitmen Mutu, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal kepada masyarakat.

#### **8. Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja**

Birokrasi merupakan instrument penting sebagai roda penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses system secara rasional menjamin mekanisme dan system kerja yang terstruktur dan teratur. Sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses), dan sumber daya manusia aparatur. Menindaklanjuti hal tersebut maka berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi tata kelola keuangan daerah, dan optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT. Dengan percepatan implementasi reformasi birokrasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dalam melayani masyarakat menjadi lebih profesional, efektif dan efisien.

#### **9. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam pencapaian efektifitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemerintahan yang dikenal dengan suatu sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian bahwa pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien



dan bebas korupsi ke masa depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah serta dengan sungguh-sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

#### **10. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan berbasis elektronik**

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk meningkatkan keterpaduan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan manajemen dan tata kelola SPBE artinya bahwa Dalam SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi ataupun sistem informasi pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, melainkan melebihi itu, SPBE juga memiliki berbagai macam domain dalam penerapannya yaitu, domain kegiatan pemerintahan, domain teknologi dan informasi, dan domain layanan. SPBE memberikan peluang bagi pemerintah dalam mendorong dan merealisasikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatis serta akuntabel, peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, memberikan kualitas dan kuantitas dalam jangkauan layanan kepada pengguna masyarakat selaku SPBE, dan menurunkan angka kejahatan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme melalui aplikasi sistem pengaduan masyarakat.

### **6.2 ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024 – 2026, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam



penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar VI.1**  
**Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026**



Dengan fokus/tema pembangunan diatas, berikut penjabaran agenda pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026.

### **1) Agenda Pembangunan Tahun I (2024)**

Pada Tahun 2024 ini Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tema pembangunan **“Peningkatan Daya Saing SDM berbasis Implementasi Kesejahteraan Masyarakat”**. Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir difokuskan pada bidang Pendidikan, kesehatan, social, ekonomi, dan pemerintahan. Beberapa bidang terserbut menjadi prioritas pembangunan dikarenakan merupakan bidang krusial dalam pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perlu dilakukan pemerataan kualitas layanan kesehatan kemudian peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT dan Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kompetensi yang unggul diharapkan kualitas SDM mampu bersaing, sehingga akan meningkatkan derajat ekonomi dan social masyarakat. Pembangunan ekonomi juga dilakukan pada tahun ini dengan upaya pengembangan perkebunan kelapa rakyat dan digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan. Dengan ini diharapkan akan mempercepat meningkatkan kualitas perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah daerah perlu melaksanakan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal



penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tema dan focus pembangunan diharapkan pada tahun 2024 ini menjadi titik awal yang maksimal dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2) Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Dengan melanjutkan pembangunan tahun pertama (2024), Kebijakan pembangunan tahun kedua (2025) Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tema **“Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2025 pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir fokus utama pembangunannya adalah pada bidang ekonomi. Dengan memperhatikan potensi sektor unggulan daerah, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah, kemudian Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan. Mengingat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi besar pada produk-produk pertanian maka untuk pengembangannya perlu diupayakan pembangunan agribisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk produk mentah pertanian diolah menjadi produk yang bernilai lebih. Selain penguatan pada bidang ekonomi, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu memperhatikan pembangunan pada bidang kesehatan dan Pendidikan. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan dan layanan Pendidikan sudah dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian untuk mengantisipasi kebutuhan sosial masyarakat yang belum terpenuhi dengan maksimal pada tahun ini Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian mendukung upaya dalam pembangunan daerah agar berjalan dengan semestinya maka perlu adanya peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan dan digitalisasi tata kelola keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

## 3) Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Kebijakan pembangunan tahun ketiga (2026) menjadi tahun penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Pada tahun ini mengusung tema pembangunan, **“Optimalisasi pelayanan publik demi Indragiri Hilir yang Berjaya dan Gemilang”**. Merujuk tema pembangunan ini



Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun ini akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu pada bidang ekonomi dengan peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah, peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja. Kemudian upaya tersebut diperkuat dengan pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, serta mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup. Melihat kebutuhan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan, dengan ini diharapkan kebutuhan masyarakat terkait jalan, jembatan, irigasi, drainase, air bersih, serta rumah layak huni sudah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya-upaya tersebut perlu didukung oleh Pemerintah daerah dengan upaya digitalisasi tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT. Pelaksanaan pembangunan tahun terakhir ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 sebagai berikut:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Tabel VI.2.  
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran |                                                    |                                                            | Strategi |                                                            | Arah Kebijakan |                                                                                                                                            | Tahapan |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|                |                                                    |                                                            |          |                                                            |                |                                                                                                                                            | 2024    | 2025 | 2026 |
| Tujuan 1       | Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat |                                                            |          |                                                            |                |                                                                                                                                            |         |      |      |
|                | Sasaran 1                                          | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                  | 1        | Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan  | 1              | Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan                                                                |         |      |      |
|                | Sasaran 2                                          | Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat | 2        | Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan | 2              | Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar |         |      |      |



**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026**

| Tujuan/Sasaran  |                                                          |                                        | Strategi |                                        | Arah Kebijakan |                                                                                                                                                           | Tahapan |      |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|                 |                                                          |                                        |          |                                        |                |                                                                                                                                                           | 2024    | 2025 | 2026 |
|                 | Sasaran 3                                                | Meningkatnya pendapatan masyarakat     | 3        | Optimalisasi penanggulangan kemiskinan | 3              | Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM |         |      |      |
|                 | Sasaran 4                                                | Meningkatnya kualitas kesempatan kerja | 4        | Peningkatan produktivitas tenaga kerja | 4              | Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja                                                                                                      |         |      |      |
| <b>Tujuan 2</b> | <b>Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan</b> |                                        |          |                                        |                |                                                                                                                                                           |         |      |      |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran |           |                                                                          | Strategi |                                                                              | Arah Kebijakan |                                                                                                      | Tahapan |      |      |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|                |           |                                                                          |          |                                                                              |                |                                                                                                      | 2024    | 2025 | 2026 |
|                | Sasaran 5 | Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah           | 5        | Pengembangan potensi agroindustri daerah                                     | 5              | Pengembangan perkebunan kelapa rakyat                                                                |         |      |      |
|                |           |                                                                          |          |                                                                              | 6              | Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan        |         |      |      |
|                |           |                                                                          |          |                                                                              | 7              | Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif |         |      |      |
|                | Sasaran 6 | Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana | 6        | Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian | 8              | Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup               |         |      |      |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran  |                                                                          |                                                                | Strategi |                                                        | Arah Kebijakan |                                                                                                                                                                       | Tahapan |      |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|                 |                                                                          |                                                                |          |                                                        |                |                                                                                                                                                                       | 2024    | 2025 | 2026 |
|                 | Sasaran 7                                                                | Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan | 7        | Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah | 9              | Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur menuju Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan publik dan perumahan |         |      |      |
| <b>Tujuan 3</b> | <b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b> |                                                                |          |                                                        |                |                                                                                                                                                                       |         |      |      |
|                 | Sasaran 8                                                                | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah           | 8        | Memperkuat manajemen ASN                               | 10             | Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan Kompetensi                                                                                         |         |      |      |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran |            |                                                    | Strategi |                                                                                        | Arah Kebijakan |                                                                                      | Tahapan |      |      |
|----------------|------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
|                |            |                                                    |          |                                                                                        |                |                                                                                      | 2024    | 2025 | 2026 |
|                |            |                                                    | 9        | Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja | 11             | Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah    |         |      |      |
|                | Sasaran 9  | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah  | 10       | Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah                    | 12             | Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan |         |      |      |
|                |            |                                                    |          |                                                                                        | 13             | Digitalisasi tata kelola keuangan daerah                                             |         |      |      |
|                | Sasaran 10 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT | 11       | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang                                             | 14             | Meningkatkan kualitas tata kelola TIK                                                |         |      |      |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran |  |  | Strategi |                                                     | Arah Kebijakan |  | Tahapan |      |      |
|----------------|--|--|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--|---------|------|------|
|                |  |  |          |                                                     |                |  | 2024    | 2025 | 2026 |
|                |  |  |          | berorientasi Pada<br>Layanan berbasis<br>elektronik |                |  |         |      |      |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

### 6.3 PROGRAM PRIORITAS

Dengan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan diatas, maka perlu adanya langkah nyata dari rumusan tersebut melalui program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah ini merupakan program yang menggambarkan keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut penjabaran program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2024-2026



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

**Tabel VI.3.**

**Keselarasan program dengan Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan                                                      |                                       |   |                                                                             | Program                                                                                   | Indikator Tujuan/Sasaran/ Outcome | Satuan | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024     |      | Tahun 2025     |      | Tahun 2026     |      | Kondisi Akhir   |      | OPD                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------------------------|
|                                                                                             |                                       |   |                                                                             |                                                                                           |                                   |        |                         | K              | Pagu | K              | Pagu | K              | Pagu | K               | Pagu |                             |
| <b>Tujuan 1. Mewujudkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat</b>                         |                                       |   |                                                                             |                                                                                           |                                   |        |                         |                |      |                |      |                |      |                 |      |                             |
| Indeks Pembangunan Manusia                                                                  |                                       |   |                                                                             |                                                                                           |                                   | Poin   | 67,37                   | 67,79          |      | 68,07          |      | 68,35          |      | 68,35           |      |                             |
| <b>Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b>                                 |                                       |   |                                                                             |                                                                                           |                                   |        |                         |                |      |                |      |                |      |                 |      |                             |
| Indeks Kesehatan                                                                            |                                       |   |                                                                             |                                                                                           |                                   | Poin   | 0,743                   | 0,75           |      | 0,754          |      | 0,758          |      | 0,758           |      |                             |
| <b>Strategi 1. Akselerasi Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan</b> |                                       |   |                                                                             |                                                                                           |                                   |        |                         |                |      |                |      |                |      |                 |      |                             |
| 1                                                                                           | Pemerataan Kualitas Layanan Kesehatan | 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)                | %                                 | 100    | 100                     | 44.710.534.000 | 100  | 43.458.848.000 | 100  | 43.030.411.000 | 100  | 131.199.793.000 |      | Dinas Kesehatan             |
|                                                                                             |                                       | 2 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan, Alat Kesehatan dan makanan serta minuman sesuai Standar | %                                 | 100    | 100                     | 194.318.000    | 100  | 169.709.000    | 100  | 151.322.000    | 100  | 515.349.000     |      | Dinas Kesehatan             |
|                                                                                             |                                       | 3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Memiliki Kompetensi                           | %                                 | 100    | 100                     | 1.149.922.000  | 100  | 1.004.307.000  | 100  | 895.508.000    | 100  | 3.049.737.000   |      | Dinas Kesehatan             |
|                                                                                             |                                       | 4 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar                                          | %                                 | 100    | 100                     | 5.866.068.000  | 100  | 5.123.258.000  | 100  | 4.568.235.000  | 100  | 15.557.561.000  |      | RSUD Puri Husada Tembilahan |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan                                |                                                           |                                                                                      |                                | Program                                                                     | Indikator Tujuan/Sasaran/ Outcome                      | Satuan | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024     |               | Tahun 2025     |               | Tahun 2026     |               | Kondisi Akhir  |               | OPD                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                           |                                                                                      |                                |                                                                             |                                                        |        |                         | K              | Pagu          | K              | Pagu          | K              | Pagu          | K              | Pagu          |                                                                                                |
|                                                                       |                                                           |                                                                                      | 5                              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar       | %      | 80                      | 80             | 1.477.434.000 | 90             | 1.290.349.000 | 100            | 1.150.548.000 | 100            | 3.918.331.000 | RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang                                                                |
|                                                                       |                                                           |                                                                                      | 6                              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar       | %      | 100                     | 100            | 1.461.058.000 | 100            | 1.276.046.000 | 100            | 1.137.800.000 | 100            | 3.874.904.000 | RSUD Raja Musa Sungai Guntung                                                                  |
|                                                                       |                                                           |                                                                                      | 7                              | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   | Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana(KB)               | %      | 36,92                   | 46,92          | 836.900.000   | 56,92          | 730.918.000   | 66,92          | 651.735.000   | 66,92          | 2.219.553.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga BerencanaDan Pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak |
|                                                                       |                                                           |                                                                                      | 8                              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga | %      | 60                      | 100            | 773.603.000   | 100            | 675.642.000   | 100            | 602.447.000   | 100            | 2.051.692.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga BerencanaDan Pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak |
| Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat |                                                           |                                                                                      |                                |                                                                             |                                                        |        |                         |                |               |                |               |                |               |                |               |                                                                                                |
| Indeks Pendidikan                                                     |                                                           |                                                                                      |                                |                                                                             |                                                        | Poin   | 0,581                   | 0,582          |               | 0,583          |               | 0,585          |               | 0,585          |               |                                                                                                |
|                                                                       |                                                           | Strategi 1. Akselerasi Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan |                                |                                                                             |                                                        |        |                         |                |               |                |               |                |               |                |               |                                                                                                |
| 2                                                                     | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan | 9                                                                                    | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APK PAUD                                                                    | %                                                      | 91,13  | 91,5                    | 19.228.084.000 | 92            | 16.793.268.000 | 92,5          | 14.973.988.000 | 92,5          | 50.995.340.000 |               | Dinas Pendidikan                                                                               |
|                                                                       |                                                           |                                                                                      |                                | APK SD                                                                      | %                                                      | 106    | 105,9                   |                | 105,5         |                | 105           |                | 105           |                |               | Dinas Pendidikan                                                                               |
|                                                                       |                                                           |                                                                                      |                                | APK SMP                                                                     | %                                                      | 104,1  | 104,1                   |                | 104           |                | 103           |                | 103           |                |               | Dinas Pendidikan                                                                               |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan             |                                                              |    |                                                                                     | Program                                                                                          | Indikator Tujuan/<br>Sasaran/ Outcome                                                                     | Satuan | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024  |             | Tahun 2025  |             | Tahun 2026  |            | Kondisi Akhir    |             | OPD                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                              |    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |        |                         | K           | Pagu        | K           | Pagu        | K           | Pagu       | K                | Pagu        |                                                                                                  |
|                                                    |                                                              |    |                                                                                     |                                                                                                  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PaketA                                                                | %      | 100                     | 100         |             | 100         |             | 100         |            | 100              |             | Dinas Pendidikan                                                                                 |
|                                                    |                                                              |    |                                                                                     |                                                                                                  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                                                             | %      | 100                     | 100         |             | 100         |             | 100         |            | Dinas Pendidikan |             |                                                                                                  |
|                                                    |                                                              |    | 10                                                                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                   | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar                                    | %      | 99                      | 99          | 125.127.000 | 99,5        | 109.282.000 | 100         | 97.442.000 | 100              | 331.851.000 | Dinas Pendidikan                                                                                 |
|                                                    |                                                              |    |                                                                                     |                                                                                                  | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar | %      | 70                      | 70          |             | 80          |             | 95          |            | 95               |             | Dinas Pendidikan                                                                                 |
| Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat      |                                                              |    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |        |                         |             |             |             |             |             |            |                  |             |                                                                                                  |
| Indeks Pengeluaran                                 |                                                              |    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           | Poin   | 0,708                   | 0,715       |             | 0,718       |             | 0,721       |            | 0,721            |             |                                                                                                  |
| Strategi 2. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan |                                                              |    |                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |        |                         |             |             |             |             |             |            |                  |             |                                                                                                  |
| 3                                                  | Optimalisasi Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat | 11 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                           | Cakupan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                             | %                                                                                                         | 30     | 70                      | 91.493.000  | 80          | 79.906.000  | 100         | 71.249.000  | 100        | 242.648.000      |             | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                    |                                                              | 12 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa | %                                                                                                         | 100    | 100                     | 764.190.000 | 100         | 667.422.000 | 100         | 595.115.000 | 100        | 2.026.727.000    |             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa                                              |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan |                                                   |                                                    |                                                      |                                                         | Program                                                    | Indikator Tujuan/Sasaran/ Outcome                | Satuan | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024    |             | Tahun 2025    |             | Tahun 2026    |                                                           | Kondisi Akhir |                                                           | OPD                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |                                                   |                                                    |                                                      |                                                         |                                                            |                                                  |        |                         | K             | Pagu        | K             | Pagu        | K             | Pagu                                                      | K             | Pagu                                                      |                                     |
|                                        |                                                   |                                                    | 13                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                             | Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial  | %                                                | 100    | 100                     | 618.575.000   | 100         | 540.242.000   | 100         | 481.715.000   | 100                                                       | 1.640.532.000 | Dinas Sosial                                              |                                     |
|                                        |                                                   |                                                    | 14                                                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                 | Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial  | %                                                | 100    | 100                     | 700.645.000   | 100         | 611.920.000   | 100         | 545.629.000   | 100                                                       | 1.858.194.000 | Dinas Sosial                                              |                                     |
|                                        | 4                                                 | Peningkatan Pendapatan pelaku usaha pertanian      | 15                                                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian                | %                                                | 5      | 2                       | 3.696.446.000 | 2           | 3.228.367.000 | 2           | 2.878.630.000 | 2                                                         | 9.803.443.000 | Dinas Pangan,Tanam an Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |                                     |
|                                        |                                                   |                                                    |                                                      |                                                         | Persentase Ketersediaan Prasarana Perbenihan               | %                                                | 15     | 15                      |               | 15          |               | 15          |               | Dinas Pangan,Tanam an Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |               |                                                           |                                     |
|                                        |                                                   |                                                    |                                                      |                                                         | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | %                                                | 60     | 62                      |               | 65          |               | 65          |               | 70                                                        |               | DINAS PERKEBUNAN                                          |                                     |
|                                        | Sasaran 4. Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran |                                                    |                                                      |                                                         |                                                            |                                                  |        |                         |               |             |               |             |               |                                                           |               |                                                           |                                     |
|                                        | Tingkat Kemiskinan                                |                                                    |                                                      |                                                         |                                                            |                                                  | %      | 5,98                    | 5,47          |             | 5,24          |             | 5,00          |                                                           | 5,00          |                                                           |                                     |
|                                        | Tingkat Pengangguran Terbuka                      |                                                    |                                                      |                                                         |                                                            |                                                  | %      | 1,50                    | 1,44          |             | 1,41          |             | 1,38          | 1,38                                                      | 1,38          |                                                           |                                     |
|                                        |                                                   | Strategi 3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja |                                                      |                                                         |                                                            |                                                  |        |                         |               |             |               |             |               |                                                           |               |                                                           |                                     |
|                                        |                                                   | 5                                                  | Peningkatan Keterampilan Dan Keahlian Angkatan Kerja | 16                                                      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA     | Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan | %      | 94,66                   | 83            | 445.065.000 | 83            | 388.706.000 | 83            | 346.595.000                                               | 249           | 1.180.366.000                                             | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan                      |                                                                           |                                       |                                                                                               |    | Program                                                                         | Indikator Tujuan/Sasaran/ Outcome                                                                                                   | Satuan    | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024      |               | Tahun 2025     |               | Tahun 2026      |               | Kondisi Akhir   |               | OPD                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                               |    |                                                                                 |                                                                                                                                     |           |                         | K               | Pagu          | K              | Pagu          | K               | Pagu          | K               | Pagu          |                                                          |
|                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                               | 17 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | %         | 6,5                     | 6,5             | 556.041.000   | 6,7            | 485.625.000   | 6,8             | 433.015.000   | 6,8             | 1.474.681.000 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi                      |
|                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                               | 18 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun                                                                              | Dokumen   |                         | 1               | 69.360.000    | 1              | 60.576.000    | 1               | 54.013.000    | 1               | 183.949.000   | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                   |
| Tujuan 2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan |                                                                           |                                       |                                                                                               |    |                                                                                 |                                                                                                                                     |           |                         |                 |               |                |               |                 |               |                 |               |                                                          |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi                                    |                                                                           |                                       |                                                                                               |    |                                                                                 |                                                                                                                                     | %         | 4,44                    | 5,14            |               | 5,40           |               | 5,67            | 5,67          | 5,67            |               |                                                          |
|                                                             | Sasaran 5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah |                                       |                                                                                               |    |                                                                                 |                                                                                                                                     |           |                         |                 |               |                |               |                 |               |                 |               |                                                          |
|                                                             | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                           |                                       |                                                                                               |    |                                                                                 |                                                                                                                                     | %         | 4,01                    | 4,64            |               | 4,87           |               | 5,12            | 5,12          | 5,12            |               |                                                          |
|                                                             | LPE Kategori Industri Pengolahan                                          |                                       |                                                                                               |    |                                                                                 |                                                                                                                                     | %         | 4,61                    | 5,34            |               | 5,60           |               | 5,88            | 5,88          | 5,88            |               |                                                          |
|                                                             | Strategi 4. Pengembangan Potensi Agroindustri Daerah                      |                                       |                                                                                               |    |                                                                                 |                                                                                                                                     |           |                         |                 |               |                |               |                 |               |                 |               |                                                          |
|                                                             | 6                                                                         | Pengembangan Perkebunan Kelapa Rakyat |                                                                                               | 19 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                            | Persentase ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan                                                                          | %         | 42,5                    | 42,5            | 556.511.000   | 50             | 486.039.000   | 50              | 433.385.000   | 45,75           | 1.475.935.000 | Dinas Perkebunan                                         |
|                                                             | 7                                                                         |                                       | Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Dan Perikanan | 20 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                           | Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                          | Ton       | 70.000 Ton              | 70.000 Ton      | 1.415.685.000 | 72.000 Ton     | 1.236.418.000 | 74.000 Ton      | 1.102.472.000 | 74.000 Ton      | 3.754.575.000 | Dinas Perikanan                                          |
|                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                               | 21 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                          | Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                         | Ton       | 5.500 Ton               | 5.600 Ton       | 673.028.000   | 5.700 Ton      | 587.800.000   | 5.800 Ton       | 524.120.000   | 5.800 Ton       | 1.784.948.000 | Dinas Perikanan                                          |
|                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                               | 22 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                | Ketersediaan pangan dan konsumsi ikan perkapita pertahun                                                                            | Kg/KAP/TH | 40,15 Kg/KAP/TH         | 40,15 Kg/KAP/TH | 61.752.000    | 40,2 Kg/KAP/TH | 53.932.000    | 40,25 Kg/KAP/TH | 48.088.000    | 40,25 Kg/KAP/TH | 163.772.000   | Dinas Perikanan                                          |
|                                                             |                                                                           |                                       |                                                                                               | 23 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                                        | %         | 74                      | 76              | 157.550.000   | 78             | 137.598.000   | 80              | 122.692.000   | 80              | 417.840.000   | Dinas Pangan,Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan                                              |                                                                                                     |    |                                                      | Program                                                                                      | Indikator Tujuan/Sasaran/ Outcome | Satuan  | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024    |         | Tahun 2025    |         | Tahun 2026    |         | Kondisi Akhir                                             |                                                           | OPD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                     |                                                                                                     |    |                                                      |                                                                                              |                                   |         |                         | K             | Pagu    | K             | Pagu    | K             | Pagu    | K                                                         | Pagu                                                      |     |
| 8                                                                                   | Pengembangan Kawasan Terpadu Guna Memperkuat Pembangunan Agribisnis, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 24 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan | %                                 | 20      | 15                      | 2.100.000.000 | 15      | 2.100.000.000 | 15      | 2.100.000.000 | 45      | 6.300.000.000                                             | Dinas Pangan,Tanam an Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |     |
|                                                                                     |                                                                                                     |    |                                                      | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  | %                                 | 20      | 15                      |               | 15      |               | 15      |               | 45      | Dinas Pangan,Tanam an Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |                                                           |     |
|                                                                                     |                                                                                                     |    |                                                      | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | %                                 | 20      | 15                      |               | 15      |               | 15      |               | 45      | Dinas Pangan,Tanam an Pangan, Hortikultura Dan Peternakan |                                                           |     |
|                                                                                     |                                                                                                     | 25 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN    | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif       | %                                 | 100     | 100                     | 618.630.000   | 100     | 540.294.000   | 100     | 481.759.000   | 100     | 1.640.683.000                                             | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian                       |     |
|                                                                                     |                                                                                                     | 26 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan                                 | %                                 | 20      | 40                      | 390.704.000   | 50      | 341.229.000   | 60      | 304.261.000   | 60      | 1.036.194.000                                             | DinasPariwisa ta, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan     |     |
|                                                                                     |                                                                                                     | 27 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                      | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan                            | Objek                             | 2 Objek | 3 Objek                 | 651.177.000   | 3 Objek | 568.719.000   | 3 Objek | 507.107.000   | 3 Objek | 1.727.003.000                                             | DinasPariwisa ta, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan     |     |
|                                                                                     |                                                                                                     | 28 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI         | Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina                                              | %                                 | 100     | 100                     | 394.831.000   | 100     | 344.833.000   | 100     | 307.477.000   | 100     | 1.047.141.000                                             | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian                       |     |
|                                                                                     |                                                                                                     | 29 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL           | Tingkat Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                   | %                                 | 50      | 10                      | 304.167.000   | 10      | 265.650.000   | 10      | 236.871.000   | 30      | 806.688.000                                               | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    |     |
| Sasaran 6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana |                                                                                                     |    |                                                      |                                                                                              |                                   |         |                         |               |         |               |         |               |         |                                                           |                                                           |     |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                    |                                                                                                     |    |                                                      |                                                                                              |                                   | Indeks  | 63,31                   | 68,05         |         | 68,43         |         | 68,81         | 68,81   | 68,81                                                     |                                                           |     |
| Indeks Risiko Bencana                                                               |                                                                                                     |    |                                                      |                                                                                              |                                   | Nilai   | 168,40                  | 162,00        |         | 158,00        |         | 154,00        | 154,00  | 154,00                                                    |                                                           |     |
|                                                                                     | Strategi 5. Meminimalisir Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Aktivitas Perekonomian            |    |                                                      |                                                                                              |                                   |         |                         |               |         |               |         |               |         |                                                           |                                                           |     |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan                                    |                                                                    |                                                                                        |    |                                                                     | Program                                                                   | Indikator Tujuan/Sasaran/ Outcome                             | Satuan  | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024    |                | Tahun 2025    |                | Tahun 2026    |                | Kondisi Akhir                         |                                       | OPD                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        |    |                                                                     |                                                                           |                                                               |         |                         | K             | Pagu           | K             | Pagu           | K             | Pagu           | K                                     | Pagu                                  |                                              |
|                                                                           | 9                                                                  | Mengoptimalkan Pengawasan Aktivitas Ekonomi Yang Berpotensi Degradasi Lingkungan Hidup | 31 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air                                                       | Indeks                                                        | 53,78   | 53,89                   | 370.973.000   | 53,99          | 323.996.000   | 54,09          | 288.896.000   | 54,09          | 983.865.000                           | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |                                              |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        |    | Indeks Kualitas Udara                                               | Indeks                                                                    | 90,61                                                         | 90,71   |                         | 90,81         |                | 90,91         |                | 90,91         |                | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |                                       |                                              |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        | 32 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                     | Persentase Timbulan Sampah yang ditangani                                 | %                                                             | 100     | 100                     | 4.125.525.000 | 100            | 3.603.119.000 | 100            | 3.212.783.000 | 100            | 10.941.427.000                        | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan |                                              |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        |    | 33                                                                  | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                            | Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan                      | %       | 100                     | 100           | 2.581.341.000  | 100           | 2.254.459.000  | 100           | 2.010.228.000  | 100                                   | 6.846.028.000                         | Badan Penanggulang an Bencana Daerah         |
| Sasaran 7. Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan |                                                                    |                                                                                        |    |                                                                     |                                                                           |                                                               |         |                         |               |                |               |                |               |                |                                       |                                       |                                              |
| Indeks Infrastruktur                                                      |                                                                    |                                                                                        |    |                                                                     |                                                                           |                                                               | Perse n | 58,99                   | 63,33         |                | 65,71         |                | 67,88         | 67,88          | 67,88                                 |                                       |                                              |
|                                                                           | Strategi 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan Daerah |                                                                                        |    |                                                                     |                                                                           |                                                               |         |                         |               |                |               |                |               |                |                                       |                                       |                                              |
|                                                                           | 10                                                                 | Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Dan Perumahan             | 34 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)       | Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar (LLAJ) | %                                                             | 80      | 80,29                   | 2.885.021.000 | 85,1           | 2.519.672.000 | 90,17          | 2.246.718.000 | 90,17          | 7.651.411.000                         | Dinas Perhubungan                     |                                              |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        |    | 35                                                                  | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                             | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan         | %       | 70                      | 75            | 6.129.620.000  | 81,84         | 7.804.485.000  | 92,47         | 6.337.937.000  | 92,47                                 | 20.272.042.000                        | Dinas Perhubungan                            |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        |    | 36                                                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                             | Proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap                   | %       | 56                      | 57,25         | 32.597.220.000 | 57,5          | 80.469.515.000 | 57,75         | 75.385.328.000 | 57,75                                 | 188.452.063.000                       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang          |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        |    | 37                                                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                    | Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) | %       | 2                       | 5             | 1.404.537.000  | 10            | 1.226.678.000  | 15            | 1.093.789.000  | 15                                    | 3.725.004.000                         | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang          |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        |    | 38                                                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                            | Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan                   | %       | 0,79                    | 0,9           | 596.384.000    | 1,1           | 520.852.000    | 1,5           | 464.424.000    | 1,5                                   | 1.581.660.000                         | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
|                                                                           |                                                                    |                                                                                        |    | 39                                                                  | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                | Persentase Areal Kawasan Kumuh                                | %       | 0,57                    | 0,54          | 545.161.000    | 0,49          | 476.111.000    | 0,45          | 424.543.000    | 0,45                                  | 1.445.815.000                         | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan                                                         |    |                                                                |    | Program                                                          | Indikator Tujuan/Sasaran/ Outcome                                                                                            | Satuan | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                | Kondisi Akhir |                | OPD                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                |    |                                                                |    |                                                                  |                                                                                                                              |        |                         | K          | Pagu          | K          | Pagu           | K          | Pagu           | K             | Pagu           |                                                       |
|                                                                                                |    |                                                                | 40 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                   | Persentase Luas Kawasan Permukiman yang tertangani                                                                           | %      | 8,96                    | 13,65      | 127.441.000   | 20,7       | 111.301.000    | 27,74      | 99.245.000     | 27,74         | 337.987.000    | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman         |
|                                                                                                |    |                                                                | 41 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)    | Persentase peningkatan PSU                                                                                                   | %      | 0                       | 100        | 7.703.124.000 | 100        | 29.727.695.000 | 100        | 22.998.864.000 | 100           | 60.429.683.000 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman                |
|                                                                                                |    |                                                                | 42 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Proporsi jumlah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan                         | %      | 27,68                   | 29,55      | 2.318.023.000 | 30,67      | 2.024.497.000  | 31,79      | 1.805.177.000  | 31,79         | 6.147.697.000  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang                   |
|                                                                                                |    |                                                                | 43 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan                                   | Unit   | 0                       | 10         | 91.500.000    | 10         | 79.912.000     | 50         | 71.256.000     | 70            | 242.668.000    | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang                   |
|                                                                                                |    |                                                                | 44 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | Meter  | 65.500                  | 68.000     | 7.411.637.000 | 71.000     | 6.473.117.000  | 74.000     | 5.771.865.000  | 74.000        | 19.656.619.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang                   |
| <b>Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)</b>             |    |                                                                |    |                                                                  |                                                                                                                              |        |                         |            |               |            |                |            |                |               |                |                                                       |
| Indeks Reformasi Birokrasi                                                                     |    |                                                                |    |                                                                  |                                                                                                                              | Predik | B (63.07)               | B (64.08)  |               | B (65.13)  |                | B (66.21)  | B (66.21)      | B (66.21)     |                |                                                       |
| <b>Sasaran 8. Meningkatnya Profesionalitas Asn Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b> |    |                                                                |    |                                                                  |                                                                                                                              |        |                         |            |               |            |                |            |                |               |                |                                                       |
| Nilai AKIP                                                                                     |    |                                                                |    |                                                                  |                                                                                                                              | Predik | B (64.10)               | B (68.01)  |               | BB (70.90) |                | BB (71.23) | BB (71.23)     | BB (71.23)    |                |                                                       |
| Indeks Profesionalitas ASN                                                                     |    |                                                                |    |                                                                  |                                                                                                                              | Nilai  | 57,06                   | 58,1       |               | 58,12      |                | 58,15      | 58,15          | 58,15         |                |                                                       |
| <b>Strategi 7. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Seluruh Urusan Pemerintahan</b>  |    |                                                                |    |                                                                  |                                                                                                                              |        |                         |            |               |            |                |            |                |               |                |                                                       |
|                                                                                                | 11 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dan Implementasi Perencanaan | 45 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                       | Persentase Pelayanan ASN yg Terealisasi                                                                                      | %      | 100                     | 100        | 4.891.988.000 | 100        | 4.272.524.000  | 100        | 3.809.667.000  | 100           | 12.974.179.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan                       |  |                                                                                        |                    | Program                                                           | Indikator Tujuan/<br>Sasaran/ Outcome                                                                                                             | Satuan                                                 | Kondisi<br>Awal RPD<br>(2022) | Tahun 2024 |                 | Tahun 2025    |                 | Tahun 2026    |                 | Kondisi Akhir |                  | OPD                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                              |  |                                                                                        |                    |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                        |                               | K          | Pagu            | K             | Pagu            | K             | Pagu            | K             | Pagu             |                                      |                                                       |
|                                                              |  |                                                                                        | Pembangunan Daerah | 46                                                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                          | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | %                             | 52         | 52              | 1.308.066.000 | 53              | 1.142.428.000 | 54              | 1.018.665.000 | 54               | 3.469.159.000                        | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
|                                                              |  |                                                                                        | 47                 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil                                                                                      | %                                                      | 100                           | 100        | 1.680.326.000   | 100           | 1.468.560.000   | 100           | 1.309.668.000   | 100           | 4.458.554.000    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                       |
|                                                              |  |                                                                                        | 48                 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                     | Persentase Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | %                                                      | 100                           | 100        | 21.837.745.000  | 100           | 19.072.484.000  | 100           | 17.006.306.000  | 100           | 57.916.535.000   | Sekretariat Daerah                   |                                                       |
| Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah |  |                                                                                        |                    |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                        |                               |            |                 |               |                 |               |                 |               |                  |                                      |                                                       |
| Indeks Integritas                                            |  |                                                                                        |                    |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                        | Indeks                        | 76,77      | 81,71           |               | 83,35           |               | 85,00           | 85,00         | 85,00            |                                      |                                                       |
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                           |  |                                                                                        |                    |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                        | Nilai                         | 75,47      | 82,28           |               | 84,55           |               | 86,83           | 86,83         | 86,83            |                                      |                                                       |
|                                                              |  | Strategi 7. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Seluruh Urusan Pemerintahan |                    |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                        |                               |            |                 |               |                 |               |                 |               |                  |                                      |                                                       |
| 12                                                           |  | Peningkatan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan   | 49                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan yang diselesaikan                                                                               | %                                                      | 0                             | 70         | 4.519.996.000   | 80            | 3.947.637.000   | 85            | 3.519.978.000   | 85            | 11.987.611.000   | Inspektorat Daerah                   |                                                       |
| 13                                                           |  | Digitalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah                                               | 50                 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                               | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu                                                                                                             | %                                                      | 100                           | 100        | 346.917.082.000 | 100           | 347.043.503.000 | 100           | 347.346.165.000 | 100           | 1.021.306.750.00 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah       |                                                       |
|                                                              |  |                                                                                        | 51                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                             | Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah                                                                                                                  | %                                                      | -4,91                         | 2          | 3.997.409.000   | 3             | 3.491.219.000   | 4             | 3.113.008.000   | 4             | 10.601.636.000   | Badan Pendapatan Daerah              |                                                       |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan             |                                                   |                                                                                        |                                                     | Program                                                                                           | Indikator Tujuan/Sasaran/ Outcome | Satuan | Kondisi Awal RPD (2022) | Tahun 2024    |       | Tahun 2025    |       | Tahun 2026    |       | Kondisi Akhir  |                                                         | OPD                                                     |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                    |                                                   |                                                                                        |                                                     |                                                                                                   |                                   |        |                         | K             | Pagu  | K             | Pagu  | K             | Pagu  | K              | Pagu                                                    |                                                         |  |
| Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |                                                   |                                                                                        |                                                     |                                                                                                   |                                   |        |                         |               |       |               |       |               |       |                |                                                         |                                                         |  |
| Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik          |                                                   |                                                                                        |                                                     |                                                                                                   |                                   |        | perse<br>n              | 83,40         | 89,64 |               | 92,24 |               | 94,83 | 94,83          | 94,83                                                   |                                                         |  |
|                                                    |                                                   | Strategi 7. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Seluruh Urusan Pemerintahan |                                                     |                                                                                                   |                                   |        |                         |               |       |               |       |               |       |                |                                                         |                                                         |  |
| 14                                                 | Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik Berbasis IT | 52                                                                                     | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi                                   | %                                 | 30     | 100                     | 3.833.613.000 | 100   | 3.348.168.000 | 100   | 2.985.450.000 | 100   | 10.167.231.000 |                                                         | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik |  |
|                                                    |                                                   | 53                                                                                     | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA            | Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. inhil | %                                 | 74     | 74                      | 1.971.494.000 | 92    | 1.721.845.000 | 100   | 1.535.307.000 | 100   | 5.228.646.000  |                                                         | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik |  |
|                                                    |                                                   |                                                                                        |                                                     | Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK                                   | %                                 | 84     | 50                      |               | 75    |               | 100   |               | 100   |                | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik |                                                         |  |
|                                                    |                                                   | 54                                                                                     | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA              | Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi dengan baik                                       | %                                 | 73,1   | 80,71                   | 4.785.285.000 | 91,37 | 4.179.336.000 | 100   | 3.726.570.000 | 100   | 12.691.191.000 |                                                         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                  |  |



#### 6.4 PROYEK STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyusun langkah konkrit dalam ketercapaian Tujuan Pembangunan yang telah disusun. Seperti diketahui, Tujuan Kabupaten Indragiri Hilir fokus ke dalam empat bidang, antara lain Bidang Sumber daya manusia, Bidang Ekonomi, Bidang kesejahteraan, dan bidang Pemerintahan. Proyek strategis daerah untuk melaksanakan ketercapaian empat bidang tersebut antara lain:

1. Bidang Sumber Daya Manusia
  - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
  - Pembentukan Unit kelompok belajar informal (PKBM).
  - Akses layanan pendidikan dan kesehatan.
2. Bidang Kesejahteraan
  - Bantuan sosial tunai untuk kemiskinan Ekstrem
  - Pemberdayaan masyarakat melalui padat karya
  - Peningkatan balai latihan kerja (menjahit, perbengkelan, kerupuk ikan, pengelolaan kelapa)
3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
  - Perbaikan sarana prasarana sektor pertanian dan implementasi lahan sawah yang dilindungi.
  - Percepatan pelepasan perkebunan yang berada dalam kawasan.
  - Pemberian bantuan kemudahan perizinan serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM.
  - Pengembangan ekonomi kreatif melalui intensitas penyelenggaraan event.
  - Normalisasi parit perkotaan.
  - Peningkatan bantuan rumah korban bencana.
  - Peningkatan jalan dan jembatan Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP) dan konektivitas terhadap pusat pemerintahan dan layanan publik.
  - Peningkatan layanan air minum, sanitasi/ persampahan perkotaan.
  - Pembangunan rumah layak huni dan penuntasan kawasan kumuh serta Relokasi kawasan kumuh.
4. Bidang Pemerintahan
  - Peningkatan kualitas layanan publik dengan melakukan revitalisasi kantor-kantor pemerintah.



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek/diklat

### 5. Infrastruktur

- Percepatan Fungsi bandara Tempuling dan percepatan penyerahan ke Pemerintah Pusat
- Penyelenggaraan pelabuhan daerah, transportasi sungai/laut dan penyeberangan
- Pembangunan koridor angkutan perkotaan (bus mikro)
- Jalan Rengat-Kuala Cenaku



# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026 yang berisi program-program untuk mencapai pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPD ini. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

### 7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan



dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 secara rinci tercantum pada Tabel VII.1 dan Tabel VII. 2 berikut ini:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Tabel VII.1.  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2024-2026

| Uraian                                                                                                          | REALISASI        |                  |                  |                  |                  | APBD             | Proyeksi<br>Pertumbuhan | Proyeksi<br>2023<br>(RKPD) | Proyeksi         |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |                         |                            | 2024             | 2025             | 2026             |
| <b>Belanja</b>                                                                                                  | <b>1.165.087</b> | <b>1.112.378</b> | <b>1.173.332</b> | <b>1.172.203</b> | <b>1.379.808</b> | <b>1.143.783</b> | <b>2%</b>               | <b>1.120.611</b>           | <b>1.102.070</b> | <b>1.096.143</b> | <b>1.102.047</b> |
| <b>Belanja dan<br/>Pengeluaran<br/>Pembiayaan<br/>yang Wajib<br/>dan Mengikat<br/>serta Prioritas<br/>Utama</b> | <b>1.165.087</b> | <b>1.112.378</b> | <b>1.173.332</b> | <b>1.172.203</b> | <b>1.379.808</b> | <b>1.143.783</b> | <b>2%</b>               | <b>1.120.611</b>           | <b>1.102.070</b> | <b>1.096.143</b> | <b>1.102.047</b> |
| <b>Belanja<br/>Operasi</b>                                                                                      | <b>1.150.778</b> | <b>1.098.784</b> | <b>1.150.082</b> | <b>1.136.741</b> | <b>811.845</b>   | <b>815.852</b>   | <b>2%</b>               | <b>801.397</b>             | <b>761.500</b>   | <b>756.500</b>   | <b>766.500</b>   |
| Belanja pegawai                                                                                                 | 775.611          | 773.531          | 805.680          | 772.661          | 764.273          | 759.347          | 2%                      | 732.356                    | 730.000          | 740.000          | 750.000          |
| Belanja Bunga                                                                                                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                       | -                          | -                | -                | -                |
| Belanja Subsidi                                                                                                 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 4.000            | 2.000            | -                | -                       | -                          | -                | -                | -                |
| Belanja Hibah                                                                                                   | 95.115           | 65.332           | 44.716           | 56.176           | 42.848           | 54.174           | 2%                      | 67.958                     | 30.000           | 15.000           | 15.000           |
| Belanja Biaya<br>Provisi                                                                                        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                       | -                          | -                | -                | -                |
| Belanja Bantuan<br>Sosial                                                                                       | 300              | 566              | 807              | 1.013            | 2.723            | 2.332            | 10%                     | 1.083                      | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| Belanja Bantuan<br>Keuangan                                                                                     | 277.752          | 257.355          | 296.879          | 302.889          | -                | -                | -                       | -                          | -                | -                | -                |
| <b>Belanja Tak<br/>Terduga</b>                                                                                  | <b>214</b>       | <b>96</b>        | <b>-</b>         | <b>21.952</b>    | <b>486</b>       | <b>43.000</b>    | <b>2%</b>               | <b>25.960</b>              | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>20.000</b>    |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Uraian                                       | REALISASI    |              |               |              |                | APBD           | Proyeksi<br>Pertumbuhan | Proyeksi<br>2023<br>(RKPD) | Proyeksi |         |         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|
|                                              | 2017         | 2018         | 2019          | 2020         | 2021           | 2022           |                         |                            | 2024     | 2025    | 2026    |
| Belanja Tak Terduga                          | 214          | 96           | -             | 21.952       | 486            | 43.000         | 2%                      | 25.960                     | 50.000   | 25.000  | 20.000  |
| <b>Transfer</b>                              | <b>9.095</b> | <b>8.274</b> | <b>12.825</b> | <b>9.811</b> | <b>567.477</b> | <b>284.931</b> | <b>5%</b>               | <b>293.254</b>             | 290.569  | 294.643 | 295.547 |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan               | 4.548        | 4.137        | 6.412         | 4.905        | 283.739        | <b>4.660</b>   | 5%                      | 5.247                      | -        | -       | -       |
| Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa          | 3.174        | 3.381        | 4.074         | 4.393        | 4.342          | -              | -                       | -                          | 5.011    | 8.499   | 8.927   |
| Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa      | 1.374        | 756          | 1.242         | 512          | 411            | -              | -                       | -                          | 285.218  | 285.796 | 286.261 |
| Belanja Bantuan Keuangan                     | -            | -            | -             | -            | 278.985        | <b>280.271</b> | 5%                      | 288.007                    | 285.218  | 285.796 | 286.261 |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                | -            | -            | 1.097         | -            | -              | -              | -                       | -                          | -        | -       | -       |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                | <b>5.000</b> | <b>5.225</b> | <b>10.425</b> | <b>3.700</b> | -              | -              | -                       | -                          | -        | -       | -       |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | <b>5.000</b> | <b>5.225</b> | <b>10.425</b> | <b>3.700</b> | -              | -              | -                       | -                          | -        | -       | -       |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Uraian                                       | REALISASI |      |      |      |      | APBD | Proyeksi<br>Pertumbuhan | Proyeksi<br>2023<br>(RKPD) | Proyeksi |      |      |
|----------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------------------|----------|------|------|
|                                              | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |                         |                            | 2024     | 2025 | 2026 |
| Pembayaran<br>Pokok Pinjaman<br>Dalam Negeri | -         | -    | -    | -    | -    | -    |                         | -                          | -        | -    | -    |

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)



Dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan.

## **7.2. Program Perangkat Daerah**

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan dapat dilihat pada Lampiran



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

**Tabel VII.2**  
**Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja Program (outcome)                                    | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                      | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                        |                                            | Tahun 2024                                     |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                        |                      |                                  |
|         |                                                                 |                                                                        |                                            | K                                              | Rp                 | K          | Rp                 | K          | Rp                 | K                                      | Rp                   |                                  |
| (1)     | (2)                                                             | (3)                                                                    | (4)                                        | (5)                                            | (6)                | (7)        | (8)                | (9)        | (10)               | (11)                                   | (12)                 | (13)                             |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                        |                                            |                                                | 785.403.774.000,00 |            | 890.555.064.000,00 |            | 919.979.307.000,00 |                                        | 2.595.938.145.000,00 |                                  |
| 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                                        |                                            |                                                | 374.672.709.000,00 |            | 396.493.724.000,00 |            | 420.758.171.000,00 |                                        | 1.191.924.604.000,00 |                                  |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi              | 100%                                       | 100 %                                          | 355.270.372.000,00 | 100%       | 379.548.269.000,00 | 100%       | 405.648.485.000,00 | 100%                                   | 1.140.467.126.000,00 | DINAS PENDIDIKAN                 |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | APK PAUD                                                               | 91,13%                                     | 91,50%                                         | 19.228.084.000,00  | 92,00%     | 16.793.268.000,00  | 92,50%     | 14.973.988.000,00  | 92,50%                                 | 50.995.340.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                 |
|         |                                                                 | APK SD                                                                 | 106 %                                      | 105,90%                                        |                    | 105,50%    |                    | 105,00%    |                    | 105,00%                                |                      | DINAS PENDIDIKAN                 |
|         |                                                                 | APK SMP                                                                | 104,10%                                    | 104,10%                                        |                    | 104,00%    |                    | 103,00%    |                    | 103,00%                                |                      | DINAS PENDIDIKAN                 |
|         |                                                                 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                            | 100 %                                      | 100 %                                          |                    | 100%       |                    | 100%       |                    | 100%                                   |                      | DINAS PENDIDIKAN                 |
|         |                                                                 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                          | 100 %                                      | 100 %                                          |                    | 100%       |                    | 100%       |                    | 100%                                   |                      | DINAS PENDIDIKAN                 |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                  | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar | 99,00%                                     | 99,00%                                         | 125.127.000,00     | 99,50%     | 109.282.000,00     | 100%       | 97.442.000,00      | 100%                                   | 331.851.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                 |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                       | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|         |                                                                             |                                                                                                           |                                            | Tahun 2024                                     |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                        |                    |                                         |
|         |                                                                             |                                                                                                           |                                            | K                                              | Rp                 | K          | Rp                 | K          | Rp                 | K                                      | Rp                 |                                         |
| (1)     | (2)                                                                         | (3)                                                                                                       | (4)                                        | (5)                                            | (6)                | (7)        | (8)                | (9)        | (10)               | (11)                                   | (12)               | (13)                                    |
|         |                                                                             | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar | 70,00%                                     | 70,00%                                         |                    | 80,00%     |                    | 95,00%     |                    | 95%                                    |                    | DINAS PENDIDIKAN                        |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Rombel            | 87,00%                                     | 87,00%                                         | 49.126.000,00      | 88,00%     | 42.905.000,00      | 90,00%     | 38.256.000,00      | 90%                                    | 130.287.000,00     | DINAS PENDIDIKAN                        |
| 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                                                                                                           |                                            |                                                | 297.019.258.000,00 |            | 312.505.803.000,00 |            | 330.180.153.000,00 |                                        | 939.705.214.000,00 |                                         |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                 | 100 %                                      | 100 %                                          | 123.579.458.000,00 | 100%       | 128.809.832.000,00 | 100%       | 134.580.337.000,00 | 100%                                   | 386.969.627.000,00 | DINAS KESEHATAN                         |
|         |                                                                             | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                 | 100 %                                      | 100 %                                          | 93.072.084.000,00  | 100%       | 104.154.273.000,00 | 100%       | 115.568.505.000,00 | 100%                                   | 312.794.862.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN |
|         |                                                                             | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                 | 100 %                                      | 100 %                                          | 15.416.345.000,00  | 100%       | 16.081.659.000,00  | 100%       | 16.832.099.000,00  | 100%                                   | 48.330.103.000,00  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA       |
|         |                                                                             | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                 | 100 %                                      | 100 %                                          | 9.852.592.000,00   | 100%       | 10.928.399.000,00  | 100%       | 12.078.920.000,00  | 100%                                   | 32.859.911.000,00  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG   |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)                                | 66,98%                                     | 100%                                           | 44.710.534.000,00  | 100%       | 43.458.848.000,00  | 100%       | 43.030.411.000,00  | 100%                                   | 131.199.793.000,00 | DINAS KESEHATAN                         |
|         |                                                                             | Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar                                                          | 73,00%                                     | 80,00%                                         | 5.866.068.000,00   | 85,00%     | 5.123.258.000,00   | 90,00%     | 4.568.235.000,00   | 90,00%                                 | 15.557.561.000,00  | RUMAH SAKIT UMUM PURI                   |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode        | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                       | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                    |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|             |                                                                                |                                                                                           |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                   |                                        |                    |                                             |
|             |                                                                                |                                                                                           |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                 | K          | Rp                | K                                      | Rp                 |                                             |
| (1)         | (2)                                                                            | (3)                                                                                       | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)                | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)               | (13)                                        |
|             |                                                                                |                                                                                           |                                            |                                                |                   |            |                    |            |                   |                                        |                    | HUSADA<br>TEMBILAHAN                        |
|             |                                                                                | Persentase layanan kesehatan yang sesuai standar                                          | 73,00%                                     | 80,00%                                         | 1.461.058.000,00  | 85,00%     | 1.276.046.000,00   | 90,00%     | 1.137.800.000,00  | 90,00%                                 | 3.874.904.000,00   | RUMAH SAKIT<br>UMUM DAERAH<br>RAJA MUSA     |
|             |                                                                                | Persentase layanan kesehatan yang sesuai standar                                          | 73,00%                                     | 80,00%                                         | 1.477.434.000,00  | 85,00%     | 1.290.349.000,00   | 90,00%     | 1.150.548.000,00  | 90,00%                                 | 3.918.331.000,00   | RUMAH SAKIT<br>UMUM DAERAH<br>TENGGU SULUNG |
| 1.02.<br>03 | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA<br>KESEHATAN     | Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Memiliki Kompetensi                           | 69,72%                                     | 78,00%                                         | 1.149.922.000,00  | 85,00%     | 1.004.307.000,00   | 90,00%     | 895.508.000,00    | 90,00%                                 | 3.049.737.000,00   | DINAS KESEHATAN                             |
| 1.02.<br>04 | PROGRAM<br>SEDIAAN<br>FARMASI, ALAT<br>KESEHATAN<br>DAN MAKANAN<br>MINUMAN     | Cakupan Ketersediaan Obat Obatan, Alat Kesehatan dan makanan serta minuman sesuai Standar | 70,00%                                     | 80,00%                                         | 194.318.000,00    | 90,00%     | 169.709.000,00     | 100 %      | 151.322.000,00    | 100 %                                  | 515.349.000,00     | DINAS KESEHATAN                             |
| 1.02.<br>05 | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>BIDANG<br>KESEHATAN                   | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                                          | 66,72                                      | 80,00%                                         | 239.445.000,00    | 85,00%     | 209.123.000,00     | 90,00%     | 186.468.000,00    | 90,00%                                 | 635.036.000,00     | DINAS KESEHATAN                             |
| 1.03        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                   |                                                                                           |                                            |                                                | 58.890.257.000,00 |            | 104.829.979.000,00 |            | 98.462.342.000,00 |                                        | 262.182.578.000,00 |                                             |
| 1.03.<br>01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOT<br>A | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                 | 100 %                                      | 100 %                                          | 13.068.459.000,00 | 100%       | 12.810.494.000,00  | 100%       | 12.778.285.000,00 | 100%                                   | 38.657.238.000,00  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN TATA<br>RUANG   |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan     | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                                    | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab    |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                  |                                                                                                                        |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                    |                                     |
|         |                                                                  |                                                                                                                        |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                 |                                     |
| (1)     | (2)                                                              | (3)                                                                                                                    | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)               | (13)                                |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | 9,4 Ha                                     | 12,2 Ha                                        | 7.411.637.000,00  | 15 Ha      | 6.473.117.000,00  | 17,8 Ha    | 5.771.865.000,00  | 45 Ha                                  | 19.656.619.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Proporsi jumlah Peduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan                    | 27,68 %                                    | 29,55 %                                        | 2.318.023.000,00  | 30,67%     | 2.024.497.000,00  | 31,79%     | 1.805.177.000,00  | 31,79%                                 | 6.147.697.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan                             | 0 Unit                                     | 10 Unit                                        | 91.500.000,00     | 10 Unit    | 79.912.000,00     | 50 Unit    | 71.256.000,00     | 70 Unit                                | 242.668.000,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 | Jumlah PBG Bangunan Gedung yang diterbitkan Tahun                                                                      | 74 Unit                                    | 80 Unit                                        | 1.846.381.000,00  | 85 Unit    | 1.612.578.000,00  | 90 Unit    | 1.437.883.000,00  | 255 Unit                               | 4.896.842.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN                                      | Proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap                                                                            | 56,00%                                     | 57,25 %                                        | 32.597.220.000,00 | 57,50%     | 80.469.515.000,00 | 57,75%     | 75.385.328.000,00 | 57,75%                                 | 188.452.063.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             | Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih                                                                           | 50 %                                       | 50 %                                           | 152.500.000,00    | 50%        | 133.188.000,00    | 50%        | 118.759.000,00    | 50%                                    | 404.447.000,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGAAN PENATAAN RUANG                             | Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang                                                                      | 2,00%                                      | 5,00%                                          | 1.404.537.000,00  | 10,00%     | 1.226.678.000,00  | 15,00%     | 1.093.789.000,00  | 15%                                    | 3.725.004.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| 1.04    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN      |                                                                                                                        |                                            |                                                | 14.104.402.000,00 |            | 36.212.914.000,00 |            | 29.649.670.000,00 |                                        | 79.966.986.000,00  |                                     |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                               | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                   |                                        |
|         |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                |                                        |
| (1)     | (2)                                                                                                            | (3)                                                                                                               | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)              | (13)                                   |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                    | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                         | 85 %                                       | 100 %                                          | 5.118.132.000,00  | 100%       | 5.364.589.000,00  | 100%       | 5.651.567.000,00  | 100%                                   | 16.134.288.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                 | Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan                                                                       | 0,79 %                                     | 0,90%                                          | 596.384.000,00    | 1,10%      | 520.852.000,00    | 1,50%      | 464.424.000,00    | 1,50%                                  | 1.581.660.000,00  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                     | Persentase Areal Kawasan Kumuh                                                                                    | 0,57 %                                     | 0,54 %                                         | 545.161.000,00    | 0,49%      | 476.111.000,00    | 0,45%      | 424.543.000,00    | 0,45%                                  | 1.445.815.000,00  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                 | Persentase Luas Kawasan Permukiman yang tertangani                                                                | 8,96 %                                     | 13,65 %                                        | 127.441.000,00    | 20,70%     | 111.301.000,00    | 27,74%     | 99.245.000,00     | 27,74%                                 | 337.987.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                  | Persentase peningkatan PSU                                                                                        | 0,23%                                      | 0,28%                                          | 7.703.124.000,00  | 0,28%      | 29.727.695.000,00 | 0,28%      | 22.998.864.000,00 | 0,28%                                  | 60.429.683.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.04.06 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0                                          | 0,33%                                          | 14.160.000,00     | 0,33%      | 12.366.000,00     | 0,33%      | 11.027.000,00     | 0,33%                                  | 37.553.000,00     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1.05    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN                                                         |                                                                                                                   |                                            |                                                | 31.214.044.000,00 |            | 31.405.285.000,00 |            | 32.024.470.000,00 |                                        | 94.643.799.000,00 |                                        |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (outcome)                                          | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                           |                                                                              |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                   |                                          |
|         |                                                                                           |                                                                              |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                |                                          |
| (1)     | (2)                                                                                       | (3)                                                                          | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)              | (13)                                     |
|         | UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                        |                                                                              |                                            |                                                |                   |            |                   |            |                   |                                        |                   |                                          |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                    | 100 %                                      | 100 %                                          | 13.711.942.000,00 | 100 %      | 14.423.805.000,00 | 100 %      | 15.237.056.000,00 | 100 %                                  | 43.372.803.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
|         |                                                                                           | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                    | 100 %                                      | 100 %                                          | 4.475.584.000,00  | 100 %      | 4.667.470.000,00  | 100 %      | 4.898.037.000,00  | 100 %                                  | 14.041.091.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |
|         |                                                                                           | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                    | 100 %                                      | 100%                                           | 5.880.540.000,00  | 100 %      | 6.072.940.000,00  | 100 %      | 6.324.419.000,00  | 100 %                                  | 18.277.899.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | -52 %                                      | 3 %                                            | 2.302.163.000,00  | 4%         | 2.010.639.000,00  | 5%         | 1.792.821.000,00  | 5%                                     | 6.105.623.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA               |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            | Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan                                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.581.341.000,00  | 100 %      | 2.254.459.000,00  | 100 %      | 2.010.228.000,00  | 100 %                                  | 6.846.028.000,00  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |
| 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.262.474.000,00  | 100 %      | 1.975.972.000,00  | 100 %      | 1.761.909.000,00  | 100 %                                  | 6.000.355.000,00  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.06    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                                                                              |                                            |                                                | 9.503.104.000,00  |            | 9.107.359.000,00  |            | 8.904.501.000,00  |                                        | 27.514.964.000,00 |                                          |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                     | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                    | 100 %                                      | 100 %                                          | 4.949.193.000,00  | 100 %      | 5.130.128.000,00  | 100 %      | 5.358.141.000,00  | 100 %                                  | 15.437.462.000,00 | DINAS SOSIAL                             |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan          | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|         |                                                                       |                                                                                    |                                            | Tahun 2024                                     |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                        |                    |                                  |
|         |                                                                       |                                                                                    |                                            | K                                              | Rp                 | K          | Rp                 | K          | Rp                 | K                                      | Rp                 |                                  |
| (1)     | (2)                                                                   | (3)                                                                                | (4)                                        | (5)                                            | (6)                | (7)        | (8)                | (9)        | (10)               | (11)                                   | (12)               | (13)                             |
|         | DAERAH KABUPATEN/KOT A                                                |                                                                                    |                                            |                                                |                    |            |                    |            |                    |                                        |                    |                                  |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                           | Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial                          | 100 %                                      | 100 %                                          | 618.575.000,00     | 100 %      | 540.242.000,00     | 100 %      | 481.715.000,00     | 100 %                                  | 1.640.532.000,00   | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN        | Persentase Korban Tindak Kekerasan yang Menerima Bantuan Sosial                    | 100 %                                      | 100 %                                          | 90.219.000,00      | 100 %      | 78.794.000,00      | 100 %      | 70.258.000,00      | 100 %                                  | 239.271.000,00     | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                           | Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial                                | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.308.029.000,00   | 100 %      | 2.015.754.000,00   | 100 %      | 1.797.378.000,00   | 100 %                                  | 6.121.161.000,00   | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                               | Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial                          | 100 %                                      | 100 %                                          | 700.645.000,00     | 100 %      | 611.920.000,00     | 100 %      | 545.629.000,00     | 100 %                                  | 1.858.194.000,00   | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                            | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | 100 %                                      | 100 %                                          | 657.540.000,00     | 100 %      | 574.273.000,00     | 100 %      | 512.060.000,00     | 100 %                                  | 1.743.873.000,00   | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                              | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola                                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 178.903.000,00     | 100 %      | 156.248.000,00     | 100 %      | 139.320.000,00     | 100 %                                  | 474.471.000,00     | DINAS SOSIAL                     |
| 2       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                    |                                            |                                                | 108.036.916.000,00 |            | 107.237.925.000,00 |            | 105.121.801.000,00 |                                        | 320.396.642.000,00 |                                  |
| 2.07    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |                                                                                    |                                            |                                                | 6.699.192.000,00   |            | 6.725.824.000,00   |            | 6.846.295.000,00   |                                        | 20.271.311.000,00  |                                  |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                                                 | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                                                                                     |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                                                                |
|         |                                                                         |                                                                                                                                     |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                                                                |
| (1)     | (2)                                                                     | (3)                                                                                                                                 | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                                                                           |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                                           | 90 %                                       | 90%                                            | 5.528.154.000,00 | 90%        | 5.703.083.000,00 | 98%        | 5.934.354.000,00 | 98%                                    | 17.165.591.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI                                         |
| 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                        | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun                                                                              | 0 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                      | 69.360.000,00    | 1 Dokumen  | 60.576.000,00    | 1 Dokumen  | 54.013.000,00    | 1 Dokumen                              | 183.949.000,00    | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI                                         |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                  | Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan                                                                                    | 94,66 %                                    | 83,00%                                         | 445.065.000,00   | 83,01%     | 388.706.000,00   | 83,02%     | 346.595.000,00   | 83,02%                                 | 1.180.366.000,00  | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI                                         |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                         | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | 6,50%                                      | 6,50%                                          | 556.041.000,00   | 6,70%      | 485.625.000,00   | 6,80%      | 433.015.000,00   | 6,80%                                  | 1.474.681.000,00  | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI                                         |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                             | Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial                                                               | 28,00%                                     | 35,00%                                         | 100.572.000,00   | 36,00%     | 87.834.000,00    | 40,00%     | 78.318.000,00    | 40%                                    | 266.724.000,00    | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI                                         |
| 2.08    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                                                                     |                                            |                                                | 5.228.068.000,00 |            | 5.466.777.000,00 |            | 5.748.661.000,00 |                                        | 16.443.506.000,00 |                                                                                |
| 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                                           | 100 %                                      | 100 %                                          | 4.913.606.000,00 | 100 %      | 5.192.141.000,00 | 100 %      | 5.503.778.000,00 | 100 %                                  | 15.609.525.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                             | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                                 |                                            | Tahun 2024                                     |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                        |                |                                                                                                  |
|         |                                                              |                                                                                                 |                                            | K                                              | Rp            | K          | Rp            | K          | Rp            | K                                      | Rp             |                                                                                                  |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                             | (4)                                        | (5)                                            | (6)           | (7)        | (8)           | (9)        | (10)          | (11)                                   | (12)           | (13)                                                                                             |
|         |                                                              |                                                                                                 |                                            |                                                |               |            |               |            |               |                                        |                | PERLINDUNGAN ANAK                                                                                |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   | Cakupan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                            | 30,00%                                     | 40,00%                                         | 91.493.000,00 | 60,00%     | 79.906.000,00 | 80,00%     | 71.249.000,00 | 0,8                                    | 242.648.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                               | Cakupan Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan                               | 67,00%                                     | 71,00%                                         | 50.613.000,00 | 73,00%     | 44.203.000,00 | 75,00%     | 39.414.000,00 | 75%                                    | 134.230.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                        | Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga | 40,00%                                     | 70,00%                                         | 27.992.000,00 | 80,00%     | 24.446.000,00 | 90,00%     | 21.797.000,00 | 90%                                    | 74.235.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (outcome)                                          | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                  | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                 |                                                                              |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                        |                  |                                                                                                  |
|         |                                                                                 |                                                                              |                                            | K                                              | Rp             | K          | Rp             | K          | Rp             | K                                      | Rp               |                                                                                                  |
| (1)     | (2)                                                                             | (3)                                                                          | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)            | (9)        | (10)           | (11)                                   | (12)             | (13)                                                                                             |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                 | Cakupan Kuantitas Penyajian Data Gender dan Anak                             | 100 %                                      | 100 %                                          | 10.694.000,00  | 100 %      | 9.339.000,00   | 100 %      | 8.328.000,00   | 100 %                                  | 28.361.000,00    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                | Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak                                        | 75,00%                                     | 80,00%                                         | 46.623.000,00  | 85,00%     | 40.719.000,00  | 90,00%     | 36.308.000,00  | 0,9                                    | 123.650.000,00   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                | Cakupan Pendampingan dan Perlindungan Anak                                   | 60,00%                                     | 80,00%                                         | 87.047.000,00  | 90,00%     | 76.023.000,00  | 90,00%     | 67.787.000,00  | 90%                                    | 230.857.000,00   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.09    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                               |                                                                              |                                            |                                                | 464.355.000,00 |            | 405.552.000,00 |            | 361.607.000,00 |                                        | 1.231.514.000,00 |                                                                                                  |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 74,00%                                     | 76,00%                                         | 157.550.000,00 | 78,00%     | 137.598.000,00 | 80,00%     | 122.692.000,00 | 80,00%                                 | 417.840.000,00   | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN                                       |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan      | Indikator Kinerja Program (outcome)                                            | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                  |                   |                 |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|         |                                                                   |                                                                                |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025       |                   | Tahun 2026      |                   |                                        |                   |                                                            |
|         |                                                                   |                                                                                |                                            | K                                              | Rp                | K                | Rp                | K               | Rp                | K                                      | Rp                |                                                            |
| (1)     | (2)                                                               | (3)                                                                            | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)              | (8)               | (9)             | (10)              | (11)                                   | (12)              | (13)                                                       |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan (Jumlah Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan) | 80,00%                                     | 83,50%                                         | 232.177.000,00    | 83,70%           | 202.776.000,00    | 83,90%          | 180.802.000,00    | 83,90%                                 | 615.755.000,00    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
|         |                                                                   | Produktivitas Padi                                                             | 40,92 Kuintal/Ha                           | 41 Kuintal/Ha                                  |                   | 41,25 Kuintal/Ha |                   | 41,5 Kuintal/Ha |                   | 41,5 Kuintal/Ha                        |                   | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               | Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                 | 20,00%                                     | 30,00%                                         | 33.168.000,00     | 35,00%           | 28.968.000,00     | 40,00%          | 25.828.000,00     | 40,00%                                 | 87.964.000,00     | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan                                       | 44,83 %                                    | 50,00%                                         | 41.460.000,00     | 60,00%           | 36.210.000,00     | 70,00%          | 32.285.000,00     | 70,00%                                 | 109.955.000,00    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 2.11    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                       |                                                                                |                                            |                                                | 11.798.186.000,00 |                  | 11.297.050.000,00 |                 | 11.036.710.000,00 |                                        | 34.131.946.000,00 |                                                            |
| 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                      | 22 %                                       | 100 %                                          | 6.146.868.000,00  | 100%             | 6.361.351.000,00  | 100%            | 6.635.713.000,00  | 100%                                   | 19.143.932.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN                      |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                              | Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun                                         | 3 Dokumen                                  | 1 Dokumen                                      | 236.028.000,00    | 1 Dokumen        | 206.140.000,00    | 1 Dokumen       | 183.808.000,00    | 3 Dokumen                              | 625.976.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN                      |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU                          | Indeks Kualitas Air (IKA)                                                      | 53,78 Indeks                               | 54,89 Indeks                                   | 370.973.000,00    | 53,99 Indeks     | 323.996.000,00    | 54,09 Indeks    | 288.896.000,00    | 54,09 Indeks                           | 983.865.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN                      |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                                 | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |              |                |              |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                  | Perangkat Daerah Penanggungjawab      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|         |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025   |                | Tahun 2026   |                |                                        |                  |                                       |
|         |                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                            | K                                              | Rp             | K            | Rp             | K            | Rp             | K                                      | Rp               |                                       |
| (1)     | (2)                                                                                                                     | (3)                                                                                                                 | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)          | (8)            | (9)          | (10)           | (11)                                   | (12)             | (13)                                  |
|         | KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                              | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                                                                         | 90,61 Indeks                               | 91 ,71 Indeks                                  |                | 90,81 Indeks |                | 90,91 Indeks |                | 90,91 Indeks                           |                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)                                                                     | Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar                                                                      | 35 %                                       | 35 %                                           | 615.084.000,00 | 35%          | 537.197.000,00 | 35%          | 478.999.000,00 | 35%                                    | 1.631.280.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3                                                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 36.390.000,00  | 100%         | 31.782.000,00  | 100%         | 28.338.000,00  | 100%                                   | 96.510.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang diterbitkanoleh Pemerintah Daerah | 100 %                                      | 100 %                                          | 107.265.000,00 | 100 %        | 93.681.000,00  | 100 %        | 83.533.000,00  | 100 %                                  | 284.479.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           | Persentase Peningkatan Masyarakat/Kelomp ok Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup                           | %                                          | 100 %                                          | 36.390.000,00  | 100 %        | 31.782.000,00  | 100 %        | 28.338.000,00  | 100 %                                  | 96.510.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                               | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                         | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|         |                                                                                            |                                                                                                             |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                         |
|         |                                                                                            |                                                                                                             |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                         |
| (1)     | (2)                                                                                        | (3)                                                                                                         | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                                    |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari Lingkungan Hidup/ Pameran Lingkungan Hidup | %                                          | 100 %                                          | 36.390.000,00    | 100 %      | 31.782.000,00    | 100 %      | 28.338.000,00    | 100 %                                  | 96.510.000,00     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN   |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                      | Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup                                                               | 100 %                                      | 100 %                                          | 61.804.000,00    | 100 %      | 53.977.000,00    | 100 %      | 48.130.000,00    | 100 %                                  | 163.911.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN   |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Persentase Pengaduan Masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti                                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 25.469.000,00    | 100 %      | 22.243.000,00    | 100 %      | 19.834.000,00    | 100 %                                  | 67.546.000,00     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN   |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                            | Persentase Timbunan Sampah yang ditangani                                                                   | 100 %                                      | 100 %                                          | 4.125.525.000,00 | 100 %      | 3.603.119.000,00 | 100%       | 3.212.783.000,00 | 100 %                                  | 10.941.427.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN   |
| 2.12    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                  |                                                                                                             |                                            |                                                | 7.732.313.000,00 |            | 8.004.331.000,00 |            | 8.351.395.000,00 |                                        | 24.088.039.000,00 |                                         |
| 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                   | 97,2 %                                     | 19,44 %                                        | 7.391.402.000,00 | 19,44 %    | 7.706.599.000,00 | 19,44 %    | 8.085.922.000,00 | 19,44 %                                | 23.183.923.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                               | Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk                                                                     | 98,79%                                     | 99,90%                                         | 137.670.000,00   | 99,50%     | 120.234.000,00   | 100%       | 107.206.000,00   | 100%                                   | 365.110.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                   | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab        |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                       |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                   |                                         |
|         |                                                              |                                                                                       |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                |                                         |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                   | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)              | (13)                                    |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                     | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil                                                   | 83,64%                                     | 97,00%                                         | 113.682.000,00    | 95,00%     | 99.283.000,00     | 100%       | 88.527.000,00     | 100%                                   | 301.492.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN      | Cakupan ketersediaan database kependudukan                                            | 99,00%                                     | 99,00%                                         | 58.906.000,00     | 99,00%     | 51.444.000,00     | 99,00%     | 45.870.000,00     | 99,00%                                 | 156.220.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|         |                                                              | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | 9 OPD                                      | 27 OPD                                         |                   | 38 OPD     |                   | 45 OPD     |                   | 110 OPD                                |                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                      | Jumlah Penerbitan Data Kependudukan                                                   | 145 Buku                                   | 170 Buku                                       | 30.653.000,00     | 170 Buku   | 26.771.000,00     | 170 Buku   | 23.870.000,00     | 510 Buku                               | 81.294.000,00     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.13    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |                                                                                       |                                            |                                                | 12.159.926.000,00 |            | 11.419.425.000,00 |            | 10.957.963.000,00 |                                        | 34.537.314.000,00 |                                         |
| 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                             | 90 %                                       | 90 %                                           | 6.191.966.000,00  | 90 %       | 6.207.174.000,00  | 90 %       | 6.310.383.000,00  | 90 %                                   | 18.709.523.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA                                        | Persentase Desa yang Tertata dengan Baik                                              | 73,10%                                     | 80,71 %                                        | 272.925.000,00    | 91,37 %    | 238.365.000,00    | 100%       | 212.541.000,00    | 100 %                                  | 723.831.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                        | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                              | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                     |                                                                                                  |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                                                                                  |
|         |                                                                                     |                                                                                                  |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                                                                                  |
| (1)     | (2)                                                                                 | (3)                                                                                              | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                                                                                             |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 | Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa                                                         | 100%                                       | 100%                                           | 145.560.000,00   | 100%       | 127.128.000,00   | 100%       | 113.354.000,00   | 100 %                                  | 386.042.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                           |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi dengan baik                                      | 73,10%                                     | 80,71%                                         | 4.785.285.000,00 | 91,37%     | 4.179.336.000,00 | 100%       | 3.726.570.000,00 | 100 %                                  | 12.691.191.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                           |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa | 100%                                       | 100%                                           | 764.190.000,00   | 100%       | 667.422.000,00   | 100%       | 595.115.000,00   | 100 %                                  | 2.026.727.000,00  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                           |
| 2.14    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA             |                                                                                                  |                                            |                                                | 1.641.365.000,00 |            | 1.433.513.000,00 |            | 1.278.213.000,00 |                                        | 4.353.091.000,00  |                                                                                                  |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       | Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK                       | 17,50%                                     | 21,50%                                         | 30.862.000,00    | 22,50%     | 26.953.000,00    | 23,50%     | 24.031.000,00    | 23,50%                                 | 81.846.000,00     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           | Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                        | 36,92%                                     | 46,92%                                         | 836.900.000,00   | 56,92%     | 730.918.000,00   | 66,92%     | 651.735.000,00   | 66,92%                                 | 2.219.553.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (outcome)                                | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                               |                                                                    |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                   |                                                                                                  |
|         |                                                               |                                                                    |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                |                                                                                                  |
| (1)     | (2)                                                           | (3)                                                                | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)              | (13)                                                                                             |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)  | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga             | 60%                                        | 100%                                           | 773.603.000,00    | 100%       | 675.642.000,00    | 100%       | 602.447.000,00    | 100%                                   | 2.051.692.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.15    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                        |                                                                    |                                            |                                                | 16.885.462.000,00 |            | 18.425.217.000,00 |            | 16.998.789.000,00 |                                        | 52.309.468.000,00 |                                                                                                  |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi          | 90 %                                       | 98,24 %                                        | 7.870.821.000,00  | 98,94 %    | 8.101.060.000,00  | 99,94 %    | 8.414.134.000,00  | 99,94 %                                | 24.386.015.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar | 80,00%                                     | 80,29 %                                        | 2.885.021.000,00  | 85,10%     | 2.519.672.000,00  | 90,17%     | 2.246.718.000,00  | 90,17%                                 | 7.651.411.000,00  | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                |
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan              | 70,00%                                     | 75,00%                                         | 6.129.620.000,00  | 81,84 %    | 7.804.485.000,00  | 92,47%     | 6.337.937.000,00  | 92,47%                                 | 20.272.042.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                |
| 2.16    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA         |                                                                    |                                            |                                                | 11.363.029.000,00 |            | 10.725.374.000,00 |            | 10.341.017.000,00 |                                        | 32.429.420.000,00 |                                                                                                  |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                               | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                        |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                |                                                                                                   |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                                         |
|         |                                                                |                                                                                                   |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                                         |
| (1)     | (2)                                                            | (3)                                                                                               | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                                                    |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                         | 21,00 %                                    | 100 %                                          | 5.557.922.000,00 | 100 %      | 5.655.361.000,00 | 100 %      | 5.820.260.000,00 | 100 %                                  | 17.033.543.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK            | Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi                                   | 62,00 %                                    | 100 %                                          | 3.833.613.000,00 | 100 %      | 3.348.168.000,00 | 100 %      | 2.985.450.000,00 | 100 %                                  | 10.167.231.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                       | Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. inhil | 74,00 %                                    | 74,00%                                         | 1.971.494.000,00 | 92,00%     | 1.721.845.000,00 | 100%       | 1.535.307.000,00 | 100 %                                  | 5.228.646.000,00  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
|         |                                                                | Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK                                   | 84,00 %                                    | 50,00%                                         |                  | 75,00%     |                  | 100 %      |                  | 100 %                                  |                   | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.17    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                                                   |                                            |                                                | 6.388.212.000,00 |            | 6.586.857.000,00 |            | 6.851.091.000,00 |                                        | 19.826.160.000,00 |                                                         |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                         | 76 %                                       | 78,81 %                                        | 5.575.478.000,00 | 79,81 %    | 5.877.046.000,00 | 81,5 %     | 6.218.176.000,00 | 81,5 %                                 | 17.670.700.000,00 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH             |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                     | Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin                                       | 43,00%                                     | 43,00%                                         | 36.771.000,00    | 44,00%     | 32.114.000,00    | 45,00%     | 28.634.000,00    | 45,00%                                 | 97.519.000,00     | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH             |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Kinerja Program (outcome)                                     | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|         |                                                                          |                                                                         |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                             |
|         |                                                                          |                                                                         |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                             |
| (1)     | (2)                                                                      | (3)                                                                     | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                                        |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | Persentase Koperasi yang aktif                                          | 71,00%                                     | 71,00%                                         | 25.394.000,00    | 73,00%     | 22.177.000,00    | 75,00%     | 19.775.000,00    | 75,00%                                 | 67.346.000,00     | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha             | 15 UMKM                                    | 15 UMKM                                        | 28.187.000,00    | 16 UMKM    | 24.617.000,00    | 18 UMKM    | 21.950.000,00    | 49 UMKM                                | 74.754.000,00     | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N                            | Cakupan Koperasi yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing                 | 75,00%                                     | 75,00%                                         | 100.461.000,00   | 76,00%     | 87.738.000,00    | 78,00%     | 78.234.000,00    | 78,00%                                 | 266.433.000,00    | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Jumlah Koperasi yang Mandiri                                            | 5 Koperasi                                 | 5 Koperasi                                     | 35.349.000,00    | 6 Koperasi | 30.872.000,00    | 8 Koperasi | 27.528.000,00    | 19 Koperasi                            | 93.749.000,00     | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentese Usaha Mikro dan Kecil                                        | 72,00%                                     | 72,00%                                         | 351.760.000,00   | 74,00%     | 307.215.000,00   | 75,00%     | 273.933.000,00   | 75,00%                                 | 932.908.000,00    | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM                                               | Persentase Jumlah Unit Usaha Yang Di Fasilitas Dalam Pengembangan Usaha | 65,00%                                     | 65,00%                                         | 234.812.000,00   | 66,00%     | 205.078.000,00   | 68,00%     | 182.861.000,00   | 68,00%                                 | 622.751.000,00    | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.18    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                               |                                                                         |                                            |                                                | 8.307.555.000,00 |            | 8.266.860.000,00 |            | 8.352.675.000,00 |                                        | 24.927.090.000,00 |                                             |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (outcome)                                        | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |                 |                  |                 |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|         |                                                               |                                                                            |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025      |                  | Tahun 2026      |                  |                                        |                   |                                                        |
|         |                                                               |                                                                            |                                            | K                                              | Rp               | K               | Rp               | K               | Rp               | K                                      | Rp                |                                                        |
| (1)     | (2)                                                           | (3)                                                                        | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)             | (8)              | (9)             | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                                                   |
| 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                  | 100 %                                      | 35%                                            | 6.952.626.000,00 | 35%             | 7.083.507.000,00 | 30%             | 7.297.520.000,00 | 100%                                   | 21.333.653.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                    | Tingkat Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                 | 50,00%                                     | 10,00%                                         | 304.167.000,00   | 10,00%          | 265.650.000,00   | 10,00%          | 236.871.000,00   | 80%                                    | 806.688.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                               | Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi                      | 170 Pelaku Usaha                           | 20 Pelaku Usaha                                | 221.213.000,00   | 20 Pelaku Usaha | 193.201.000,00   | 20 Pelaku Usaha | 172.271.000,00   | 60 Pelaku Usaha                        | 586.685.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | Persentase Kesesuaian Waktu Layanan Izin                                   | 80,00%                                     | 85,00%                                         | 373.297.000,00   | 90,00%          | 326.026.000,00   | 95,00%          | 290.706.000,00   | 95,00%                                 | 990.029.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              | Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal yang Terlaksana    | 80,00%                                     | 85,00%                                         | 179.735.000,00   | 90,00%          | 156.974.000,00   | 95,00%          | 139.968.000,00   | 95,00%                                 | 476.677.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Sistem Informasi Penanaman Modal | 90,15%                                     | 90,20 %                                        | 276.517.000,00   | 90,30 %         | 241.502.000,00   | 91,00%          | 215.339.000,00   | 91,00%                                 | 733.358.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                       | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                        |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                              |                                                           |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                   |                                                         |
|         |                                                              |                                                           |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                |                                                         |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                       | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)              | (13)                                                    |
| 2.19    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA           |                                                           |                                            |                                                | 12.868.774.000,00 |            | 12.267.602.000,00 |            | 11.936.595.000,00 |                                        | 37.072.971.000,00 |                                                         |
| 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 50 %                                       | 55 %                                           | 6.505.903.000,00  | 60 %       | 6.710.451.000,00  | 65 %       | 6.981.468.000,00  | 65 %                                   | 20.197.822.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN   |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGKAP KEPEMUDAAN       | Jumlah Wirausaha Muda yang Berkembang                     | Orang                                      | 10 Orang                                       | 325.587.000,00    | 15 Orang   | 284.358.000,00    | 20 Orang   | 253.551.000,00    | 45 Orang                               | 863.496.000,00    | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN   |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGKAP KEOLAHRAAGAN     | Persentase Atlet yang berprestasi                         | 718%                                       | 25,00%                                         | 5.868.460.000,00  | 280%       | 5.125.347.000,00  | -63 %      | 4.570.104.000,00  | -63 %                                  | 15.563.911.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN   |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                   | Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina                | 100 %                                      | 100 %                                          | 168.824.000,00    | 100 %      | 147.446.000,00    | 100 %      | 131.472.000,00    | 100 %                                  | 447.742.000,00    | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN   |
| 2.20    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                         |                                                           |                                            |                                                | 394.299.000,00    |            | 344.368.000,00    |            | 307.060.000,00    |                                        | 1.045.727.000,00  |                                                         |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL                     | Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu | 100 %                                      | 100 %                                          | 394.299.000,00    | 100 %      | 344.368.000,00    | 100 %      | 307.060.000,00    | 100 %                                  | 1.045.727.000,00  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.21    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                        |                                                           |                                            |                                                | 447.719.000,00    |            | 391.022.000,00    |            | 348.663.000,00    |                                        | 1.187.404.000,00  |                                                         |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (outcome)                               | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                        |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                |                                                                   |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                                         |
|         |                                                                |                                                                   |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                                         |
| (1)     | (2)                                                            | (3)                                                               | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                                                    |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah     | 100 %                                      | 37,00%                                         | 447.719.000,00   | 74,00%     | 391.022.000,00   | 100 %      | 348.663.000,00   | 100 %                                  | 1.187.404.000,00  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| 2.22    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                          |                                                                   |                                            |                                                | 1.073.233.000,00 |            | 937.329.000,00   |            | 835.782.000,00   |                                        | 2.846.344.000,00  |                                                         |
| 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN                               | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan | 2 Objek                                    | 3 Objek                                        | 651.177.000,00   | 3 Objek    | 568.719.000,00   | 3 Objek    | 507.107.000,00   | 3 Objek                                | 1.727.003.000,00  | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN   |
| 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL                     | Jumlah kesenian tradisional yang berkembang                       | 2 Jenis                                    | 2 Jenis                                        | 192.942.000,00   | 2 Jenis    | 168.510.000,00   | 2 Jenis    | 150.254.000,00   | 6 Jenis                                | 511.706.000,00    | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN   |
| 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA               | Jumlah cagar budaya yang dilindungi                               | 1 Objek                                    | 2 Objek                                        | 149.528.000,00   | 2 Objek    | 130.593.000,00   | 2 Objek    | 116.444.000,00   | 6 Objek                                | 396.565.000,00    | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN   |
| 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                | Persentase kepuasan masyarakat terhadap museum                    | %                                          | 80,00%                                         | 79.586.000,00    | 82,00%     | 69.507.000,00    | 85,00%     | 61.977.000,00    | 85,00%                                 | 211.070.000,00    | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN   |
| 2.23    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                        |                                                                   |                                            |                                                | 4.345.803.000,00 |            | 4.331.720.000,00 |            | 4.382.833.000,00 |                                        | 13.060.356.000,00 |                                                         |
| 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi         | 66,5 %                                     | 67 %                                           | 3.887.021.000,00 | 68,45 %    | 3.931.037.000,00 | 70 %       | 4.025.556.000,00 | 70 %                                   | 11.843.614.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH                     |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                            | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |             |                   |             |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab    |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025  |                   | Tahun 2026  |                   |                                        |                    |                                     |
|         |                                                              |                                                                                |                                            | K                                              | Rp                | K           | Rp                | K           | Rp                | K                                      | Rp                 |                                     |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                            | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)         | (8)               | (9)         | (10)              | (11)                                   | (12)               | (13)                                |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                               | Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan                          | 41,00%                                     | 43,00%                                         | 444.445.000,00    | 47,00%      | 388.162.000,00    | 50,00%      | 346.112.000,00    | 50,00%                                 | 1.178.719.000,00   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH |
| 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO         | Peningkatan jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan          | Eksemplar                                  | 3 Eksemplar                                    | 14.337.000,00     | 1 Eksemplar | 12.521.000,00     | 1 Eksemplar | 11.165.000,00     | 1 Eksemplar                            | 38.023.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH |
| 2.24    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                         |                                                                                |                                            |                                                | 239.425.000,00    |             | 209.104.000,00    |             | 186.452.000,00    |                                        | 634.981.000,00     |                                     |
| 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                    | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.                  | 3,20%                                      | 19,40%                                         | 213.620.000,00    | 35,50%      | 186.567.000,00    | 51,60%      | 166.357.000,00    | 51,60%                                 | 566.544.000,00     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH |
| 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                  | Persentase Arsip sesuai dengan Standar Baku yang dikelola pada tahun berkenaan | %                                          | 100%                                           | 10.035.000,00     | 100%        | 8.764.000,00      | 100%        | 7.814.000,00      | 100%                                   | 26.613.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH |
| 2.24.04 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                           | Persentase perizinan penggunaan arsip yang diberikan sesuai SOP                | %                                          | 100%                                           | 15.770.000,00     | 100%        | 13.773.000,00     | 100%        | 12.281.000,00     | 100%                                   | 41.824.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH |
| 3       | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                  |                                                                                |                                            |                                                | 44.638.623.000,00 |             | 44.780.889.000,00 |             | 45.553.155.000,00 |                                        | 134.972.667.000,00 |                                     |
| 3.25    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN            |                                                                                |                                            |                                                | 7.570.675.000,00  |             | 7.550.034.000,00  |             | 7.642.418.000,00  |                                        | 22.763.127.000,00  |                                     |
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                 | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                      | 100 %                                      | 100 %                                          | 5.420.210.000,00  | 100 %       | 5.671.884.000,00  | 100 %       | 5.967.738.000,00  | 100 %                                  | 17.059.832.000,00  | DINAS PERIKANAN                     |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                      | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |                 |                  |                 |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                  | Perangkat Daerah Penanggungjawab                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|         |                                                                 |                                                                                          |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025      |                  | Tahun 2026      |                  |                                        |                  |                                                       |
|         |                                                                 |                                                                                          |                                            | K                                              | Rp               | K               | Rp               | K               | Rp               | K                                      | Rp               |                                                       |
| (1)     | (2)                                                             | (3)                                                                                      | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)             | (8)              | (9)             | (10)             | (11)                                   | (12)             | (13)                                                  |
|         | KABUPATEN/KOTA                                                  |                                                                                          |                                            |                                                |                  |                 |                  |                 |                  |                                        |                  |                                                       |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                           | Jumlah produksi perikanan tangkap                                                        | 70.895,01 Ton                              | 72.000 Ton                                     | 1.415.685.000,00 | 73.000 Ton      | 1.236.418.000,00 | 74.000 Ton      | 1.102.472.000,00 | 74.000 Ton                             | 3.754.575.000,00 | DINAS PERIKANAN                                       |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                          | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya                                                 | 4831,75 Ton                                | 5.000 Ton                                      | 673.028.000,00   | 5.200 Ton       | 587.800.000,00   | 5.400 Ton       | 524.120.000,00   | 5.400 Ton                              | 1.784.948.000,00 | DINAS PERIKANAN                                       |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                | Ketersediaan pangan dan konsumsi ikan perkapita pertahun (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Tahun) | 40,15 Kg/KAP/TH                            | 40,15 Kg/KAP/TH                                | 61.752.000,00    | 40,20 Kg/KAP/TH | 53.932.000,00    | 40,25 Kg/KAP/TH | 48.088.000,00    | 40,25 Kg/KAP/TH                        | 163.772.000,00   | DINAS PERIKANAN                                       |
| 3.26    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                           |                                                                                          |                                            |                                                | 1.114.237.000,00 |                 | 973.142.000,00   |                 | 867.717.000,00   |                                        | 2.955.096.000,00 |                                                       |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             | Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan                             | 20,00%                                     | 40,00%                                         | 390.704.000,00   | 50,00%          | 341.229.000,00   | 60,00%          | 304.261.000,00   | 60 %                                   | 1.036.194.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    | Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dipromosikan                              | 40,00%                                     | 50,00%                                         | 699.416.000,00   | 60,00%          | 610.850.000,00   | 70,00%          | 544.675.000,00   | 70 %                                   | 1.854.941.000,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkembang                            | 23,33%                                     | 25 %                                           | 24.117.000,00    | 30,00%          | 21.063.000,00    | 40,00%          | 18.781.000,00    | 40,00%                                 | 63.961.000,00    | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                          | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD                     |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                              |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                                            |                   |                                                            |
|         |                                                              |                                                                                              |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                                          | Rp                |                                                            |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                          | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                                       | (12)              | (13)                                                       |
| 3.27    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                         |                                                                                              |                                            |                                                | 27.429.947.000,00 |            | 27.809.588.000,00 |            | 28.536.071.000,00 |                                                            | 83.775.606.000,00 |                                                            |
| 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                    | 100 %                                      | 100 %                                          | 12.660.112.000,00 | 100 %      | 13.464.872.000,00 | 100 %      | 14.342.897.000,00 | 300 %                                                      | 40.467.881.000,00 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
|         |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                    | 66,24 %                                    | 68,53 %                                        | 9.206.199.000,00  | 68,53 %    | 9.485.607.000,00  | 100 %      | 9.860.469.000,00  | 68,53 %                                                    | 28.552.275.000,00 | DINAS PERKEBUNAN                                           |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN         | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan | 20,00%                                     | 15,00%                                         | 174.136.000,00    | 15,00%     | 152.083.000,00    | 15,00%     | 135.609.000,00    | 15,00%                                                     | 461.828.000,00    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
|         |                                                              | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  | 20,00%                                     | 15,00%                                         |                   | 15,00%     |                   | 15,00%     |                   | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |                   |                                                            |
|         |                                                              | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | 20,00%                                     | 15,00%                                         |                   | 15,00%     |                   | 15,00%     |                   | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |                   |                                                            |
|         |                                                              | Persentase ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan                                   | 42,50%                                     | 42,50%                                         | 556.511.000,00    | 50,00%     | 486.039.000,00    | 50,00%     | 433.385.000,00    | 50,00%                                                     | 1.475.935.000,00  | DINAS PERKEBUNAN                                           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (outcome)                                    | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD                     |                  | Perangkat Daerah Penanggungjawab                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
|         |                                                                         |                                                                        |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                            |                  |                                                            |
|         |                                                                         |                                                                        |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                                          | Rp               |                                                            |
| (1)     | (2)                                                                     | (3)                                                                    | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                                       | (12)             | (13)                                                       |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian                            | 5,00%                                      | 2,00%                                          | 3.696.446.000,00 | 2,00%      | 3.228.367.000,00 | 2,00%      | 2.878.630.000,00 | 2,00%                                                      | 9.803.443.000,00 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
|         |                                                                         | Persentase Ketersediaan Prasarana Perbenihan                           | 15,00%                                     | 15,00%                                         |                  | 15,00%     |                  | 15,00%     |                  | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |                  |                                                            |
|         |                                                                         | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB             | 60,00%                                     | 62,00%                                         |                  | 65,00%     |                  | 70,00%     |                  | DINAS PERKEBUNAN                                           |                  |                                                            |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular  | 5,00%                                      | 4,50%                                          | 62.190.000,00    | 4,00%      | 54.315.000,00    | 3,50%      | 48.428.000,00    | 3,50%                                                      | 164.933.000,00   | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Persentase Penurunan Serangan OPT                                      | 5,00%                                      | 10,00%                                         | 441.008.000,00   | 10,00%     | 385.162.000,00   | 10,00%     | 343.437.000,00   | 10,00%                                                     | 1.169.607.000,00 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
|         |                                                                         | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian           | 20,00%                                     | 25,00%                                         | 8.292.000,00     | 30,00%     | 7.242.000,00     | 35,00%     | 6.457.000,00     | 35,00%                                                     | 21.991.000,00    | DINAS PERKEBUNAN                                           |
| 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       | Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi | 80,00%                                     | 82,00%                                         | 63.001.000,00    | 85,00%     | 55.023.000,00    | 88,00%     | 49.062.000,00    | 88,00%                                                     | 167.086.000,00   | DINAS PERKEBUNAN                                           |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | Persentase Kelembagaan (Kelompok Tani) yang Meningkatkan Kapasitasnya  | 18,65%                                     | 20,00%                                         | 58.044.000,00    | 23,00%     | 50.694.000,00    | 26,00%     | 45.200.000,00    | 26,00%                                                     | 153.938.000,00   | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                    | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab    |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                     |                                                                                        |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                     |
|         |                                                                     |                                                                                        |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                     |
| (1)     | (2)                                                                 | (3)                                                                                    | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                                |
|         |                                                                     | Persentase cakupan bina kelompok tani                                                  | 65,00%                                     | 68,00%                                         | 504.008.000,00   | 70,00%     | 440.184.000,00   | 75,00%     | 392.497.000,00   | 75,00%                                 | 1.336.689.000,00  | DINAS PERKEBUNAN                    |
| 3.30    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                              |                                                                                        |                                            |                                                | 7.442.743.000,00 |            | 7.503.999.000,00 |            | 7.665.103.000,00 |                                        | 22.611.845.000,00 |                                     |
| 3.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                              | 100 %                                      | 100 %                                          | 5.841.583.000,00 | 100 %      | 6.105.592.000,00 | 100 %      | 6.418.201.000,00 | 100 %                                  | 18.365.376.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan                  | 100 %                                      | 100 %                                          | 65.502.000,00    | 100%       | 57.207.000,00    | 100%       | 51.009.000,00    | 100%                                   | 173.718.000,00    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif | 100%                                       | 100%                                           | 618.630.000,00   | 100%       | 540.294.000,00   | 100%       | 481.759.000,00   | 100%                                   | 1.640.683.000,00  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Stabilitasn dan jumlah ketersediaan Harga barang kebutuhan pokok            | 70,00%                                     | 75,00%                                         | 291.120.000,00   | 80,00%     | 254.256.000,00   | 80,50%     | 226.709.000,00   | 80,50%                                 | 772.085.000,00    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         | Ekspor Bersih Perdagangan                                                              | 483 US\$                                   | 490 US\$                                       | 371.178.000,00   | 500 US\$   | 324.176.000,00   | 510 US\$   | 289.056.000,00   | 510 US\$                               | 984.410.000,00    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                 | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                  | Perangkat Daerah Penanggungjawab        |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                                     |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                        |                  |                                         |
|         |                                                              |                                                                                                     |                                            | K                                              | Rp             | K          | Rp             | K          | Rp             | K                                      | Rp               |                                         |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                                 | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)            | (9)        | (10)           | (11)                                   | (12)             | (13)                                    |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN              | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 32,02%                                     | 50,00%                                         | 181.950.000,00 | 60,00%     | 158.910.000,00 | 70,00%     | 141.693.000,00 | 70,00%                                 | 482.553.000,00   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN     |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI         | Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                           | 55,00%                                     | 60,00%                                         | 72.780.000,00  | 70,00%     | 63.564.000,00  | 80,00%     | 56.676.000,00  | 80,00%                                 | 193.020.000,00   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN     |
| 3.31    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                     |                                                                                                     |                                            |                                                | 716.881.000,00 |            | 626.102.000,00 |            | 558.273.000,00 |                                        | 1.901.256.000,00 |                                         |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                 | Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina                                                     | 85,00%                                     | 100%                                           | 394.831.000,00 | 100%       | 344.833.000,00 | 100%       | 307.477.000,00 | 100%                                   | 1.047.141.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN     |
| 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                     | Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri                                                     | 80,00%                                     | 100%                                           | 154.657.000,00 | 100%       | 135.073.000,00 | 100%       | 120.439.000,00 | 100%                                   | 410.169.000,00   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN     |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL       | Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional                                              | 100%                                       | 100%                                           | 167.393.000,00 | 100%       | 146.196.000,00 | 100%       | 130.357.000,00 | 100%                                   | 443.946.000,00   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN     |
| 3.32    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                      |                                                                                                     |                                            |                                                | 364.140.000,00 |            | 318.024.000,00 |            | 283.573.000,00 |                                        | 965.737.000,00   |                                         |
| 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                     | Cakupan Bina Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi                                               | 100 %                                      | 100 %                                          | 289.000.000,00 | 100 %      | 252.400.000,00 | 100 %      | 225.058.000,00 | 100 %                                  | 766.458.000,00   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN TRANSMIGRASI |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                                                               | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab       |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|         |                                                              |                                                                                                                                                   |                                            | Tahun 2024                                     |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                        |                    |                                        |
|         |                                                              |                                                                                                                                                   |                                            | K                                              | Rp                 | K          | Rp                 | K          | Rp                 | K                                      | Rp                 |                                        |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                                                                                               | (4)                                        | (5)                                            | (6)                | (7)        | (8)                | (9)        | (10)               | (11)                                   | (12)               | (13)                                   |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                    | Cakupan Bina Transmigrasi                                                                                                                         | 100 %                                      | 100 %                                          | 75.140.000,00      | 100 %      | 65.624.000,00      | 100 %      | 58.515.000,00      | 100 %                                  | 199.279.000,00     | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
| 4       | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                          |                                                                                                                                                   |                                            |                                                | 159.144.069.000,00 |            | 148.453.318.000,00 |            | 141.552.602.000,00 |                                        | 449.149.989.000,00 |                                        |
| 4.01    | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                                                                                                   |                                            |                                                | 73.923.260.000,00  |            | 68.217.876.000,00  |            | 64.374.956.000,00  |                                        | 206.516.092.000,00 |                                        |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                                                         | 100 %                                      | 100 %                                          | 48.202.725.000,00  | 100 %      | 45.754.274.000,00  | 100 %      | 44.344.903.000,00  | 100 %                                  | 138.301.902.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH                     |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                | Persentase Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 100 %                                      | 100 %                                          | 21.837.745.000,00  | 100 %      | 19.072.484.000,00  | 100 %      | 17.006.306.000,00  | 100 %                                  | 57.916.535.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH                     |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                         | Persentase Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan          | 100 %                                      | 100 %                                          | 3.882.790.000,00   | 100 %      | 3.391.118.000,00   | 100 %      | 3.023.747.000,00   | 100 %                                  | 10.297.655.000,00  | SEKRETARIAT DAERAH                     |
| 4.02    | SEKRETARIAT DPRD                                             |                                                                                                                                                   |                                            |                                                | 85.220.809.000,00  |            | 80.235.442.000,00  |            | 77.177.646.000,00  |                                        | 242.633.897.000,00 |                                        |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan       | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                     | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                      | Perangkat Daerah Penanggungjawab     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|         |                                                                    |                                                                                                         |                                            | Tahun 2024                                     |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                        |                      |                                      |
|         |                                                                    |                                                                                                         |                                            | K                                              | Rp                 | K          | Rp                 | K          | Rp                 | K                                      | Rp                   |                                      |
| (1)     | (2)                                                                | (3)                                                                                                     | (4)                                        | (5)                                            | (6)                | (7)        | (8)                | (9)        | (10)               | (11)                                   | (12)                 | (13)                                 |
| 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                               | 100 %                                      | 100 %                                          | 54.379.721.000,00  | 100 %      | 53.299.683.000,00  | 100 %      | 53.159.919.000,00  | 100 %                                  | 160.839.323.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 | Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi                                    | 100 %                                      | 100 %                                          | 30.841.088.000,00  | 100 %      | 26.935.759.000,00  | 100 %      | 24.017.727.000,00  | 100 %                                  | 81.794.574.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
| 5       | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                |                                                                                                         |                                            |                                                | 412.940.263.000,00 |            | 410.804.097.000,00 |            | 410.116.193.000,00 |                                        | 1.233.860.553.000,00 |                                      |
| 5.01    | PERENCANAAN                                                        |                                                                                                         |                                            |                                                | 12.915.810.000,00  |            | 12.443.454.000,00  |            | 12.223.413.000,00  |                                        | 37.582.677.000,00    |                                      |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                               | 100 %                                      | 100 %                                          | 8.540.113.000,00   | 100 %      | 8.620.836.000,00   | 100 %      | 8.814.709.000,00   | 100 %                                  | 25.975.658.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil                                              | 100 %                                      | 100 %                                          | 1.680.326.000,00   | 100 %      | 1.468.560.000,00   | 100 %      | 1.309.668.000,00   | 100 %                                  | 4.458.554.000,00     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.695.371.000,00   | 100 %      | 2.354.058.000,00   | 100 %      | 2.099.036.000,00   | 100 %                                  | 7.148.465.000,00     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                       | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                      | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|         |                                                              |                                                           |                                            | Tahun 2024                                     |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                        |                      |                                  |
|         |                                                              |                                                           |                                            | K                                              | Rp                 | K          | Rp                 | K          | Rp                 | K                                      | Rp                   |                                  |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                       | (4)                                        | (5)                                            | (6)                | (7)        | (8)                | (9)        | (10)               | (11)                                   | (12)                 | (13)                             |
|         |                                                              | RPD,RENSTRA RKPD dan RENJA)                               |                                            |                                                |                    |            |                    |            |                    |                                        |                      |                                  |
| 5.02    | KEUANGAN                                                     |                                                           |                                            |                                                | 386.628.182.000,00 |            | 385.790.862.000,00 |            | 385.840.577.000,00 |                                        | 1.158.259.621.000,00 |                                  |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 18.879.161.000,00  | 100 %      | 18.795.265.000,00  | 100 %      | 18.997.674.000,00  | 100 %                                  | 56.672.100.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
|         |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 95 %                                       | 100 %                                          | 13.547.934.000,00  | 100 %      | 13.590.454.000,00  | 100 %      | 13.824.271.000,00  | 100 %                                  | 40.962.659.000,00    | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 346.917.082.000,00 | 100 %      | 347.043.503.000,00 | 100 %      | 347.346.165.000,00 | 100 %                                  | 1.041.306.750.000,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                      | Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu | 100 %                                      | 100 %                                          | 3.286.596.000,00   | 100 %      | 2.870.421.000,00   | 100 %      | 2.559.459.000,00   | 100 %                                  | 8.716.476.000,00     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                        | Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah                          | -4,91 %                                    | 2 %                                            | 3.997.409.000,00   | 3 %        | 3.491.219.000,00   | 4 %        | 3.113.008.000,00   | 4 %                                    | 10.601.636.000,00    | BADAN PENDAPATAN DAERAH          |
| 5.03    | KEPEGAWAIAN                                                  |                                                           |                                            |                                                | 11.188.819.000,00  |            | 10.641.856.000,00  |            | 10.333.139.000,00  |                                        | 32.163.814.000,00    |                                  |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                       | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab                      |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|         |                                                              |                                                           |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                   |                                                       |
|         |                                                              |                                                           |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                |                                                       |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                       | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)              | (13)                                                  |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 6.296.831.000,00  | 100 %      | 6.369.332.000,00  | 100 %      | 6.523.472.000,00  | 100 %                                  | 19.189.635.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                   | Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan                 | 100 %                                      | 100 %                                          | 4.891.988.000,00  | 100 %      | 4.272.524.000,00  | 100 %      | 3.809.667.000,00  | 100 %                                  | 12.974.179.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| 5.04    | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                     |                                                           |                                            |                                                | 1.308.066.000,00  |            | 1.142.428.000,00  |            | 1.018.665.000,00  |                                        | 3.469.159.000,00  |                                                       |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                     | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 52,00%                                     | 52,00%                                         | 1.308.066.000,00  | 53,00%     | 1.142.428.000,00  | 54,00%     | 1.018.665.000,00  | 54,00%                                 | 3.469.159.000,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| 5.05    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                  |                                                           |                                            |                                                | 899.386.000,00    |            | 785.497.000,00    |            | 700.399.000,00    |                                        | 2.385.282.000,00  |                                                       |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                   | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                  | 100 %                                      | 100 %                                          | 899.386.000,00    | 100 %      | 785.497.000,00    | 100 %      | 700.399.000,00    | 100 %                                  | 2.385.282.000,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                  |
| 6       | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                           |                                            |                                                | 17.021.501.000,00 |            | 16.212.898.000,00 |            | 15.763.509.000,00 |                                        | 48.997.908.000,00 |                                                       |
| 6.01    | INSPEKTORAT DAERAH                                           |                                                           |                                            |                                                | 17.021.501.000,00 |            | 16.212.898.000,00 |            | 15.763.509.000,00 |                                        | 48.997.908.000,00 |                                                       |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                         | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                             |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                    |                                  |
|         |                                                              |                                                                             |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                 |                                  |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                         | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)               | (13)                             |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                   | %                                          | 100 %                                          | 11.540.953.000,00 | 100 %      | 11.426.343.000,00 | 100 %      | 11.495.496.000,00 | 100 %                                  | 34.462.792.000,00  | INSPEKTORAT DAERAH               |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN                             | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan yang diselesaikan         | %                                          | 70,00%                                         | 4.519.996.000,00  | 80,00%     | 3.947.637.000,00  | 85,00%     | 3.519.978.000,00  | 85,00%                                 | 11.987.611.000,00  | INSPEKTORAT DAERAH               |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI      | Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan | %                                          | 71,00%                                         | 960.552.000,00    | 73,00%     | 838.918.000,00    | 75,00%     | 748.035.000,00    | 75,00%                                 | 2.547.505.000,00   | INSPEKTORAT DAERAH               |
| 7       | UNSUR KEWILAYAHAN                                            |                                                                             |                                            |                                                | 78.306.707.000,00 |            | 79.993.265.000,00 |            | 82.586.970.000,00 |                                        | 240.886.942.000,00 |                                  |
| 7.01    | KECAMATAN                                                    |                                                                             |                                            |                                                | 78.306.707.000,00 |            | 79.993.265.000,00 |            | 82.586.970.000,00 |                                        | 240.886.942.000,00 |                                  |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                   | 100 %                                      | 100 %                                          | 8.237.120.000,00  | 100 %      | 8.767.860.000,00  | 100 %      | 9.345.291.000,00  | 100 %                                  | 26.350.271.000,00  | KECAMATAN TEMBILAHAN             |
|         |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                   | 100 %                                      | 100 %                                          | 3.768.850.000,00  | 100 %      | 4.010.531.000,00  | 100 %      | 4.273.880.000,00  | 100 %                                  | 12.053.261.000,00  | KECAMATAN TEMBILAHAN HULU        |
|         |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                   | 100 %                                      | 100 %                                          | 4.500.201.000,00  | 100 %      | 4.784.748.000,00  | 100 %      | 5.095.559.000,00  | 100 %                                  | 14.380.508.000,00  | KECAMATAN TEMPULING              |
|         |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                   | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.829.911.000,00  | 100 %      | 2.984.557.000,00  | 100 %      | 3.159.195.000,00  | 100 %                                  | 8.973.663.000,00   | KECAMATAN BATANG TUAKA           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                       | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|      |                                                              |                                                           |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                  |
|      |                                                              |                                                           |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                  |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                       | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                             |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 1.831.780.000,00 | 100 %      | 1.913.925.000,00 | 100 %      | 2.011.407.000,00 | 100 %                                  | 5.757.112.000,00  | KECAMATAN CONCONG                |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 3.593.686.000,00 | 100 %      | 3.784.622.000,00 | 100 %      | 4.001.529.000,00 | 100 %                                  | 11.379.837.000,00 | KECAMATAN ENOK                   |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.582.565.000,00 | 100 %      | 2.733.595.000,00 | 100 %      | 2.901.383.000,00 | 100 %                                  | 8.217.543.000,00  | KECAMATAN GAUNG                  |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 3.398.041.000,00 | 100 %      | 3.590.995.000,00 | 100 %      | 3.806.796.000,00 | 100 %                                  | 10.795.832.000,00 | KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA       |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.915.701.000,00 | 100 %      | 3.068.351.000,00 | 100 %      | 3.242.387.000,00 | 100 %                                  | 9.226.439.000,00  | KECAMATAN KATEMAN                |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 3.202.316.000,00 | 100 %      | 3.406.054.000,00 | 100 %      | 3.628.301.000,00 | 100 %                                  | 10.236.671.000,00 | KECAMATAN KEMPAS                 |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.626.986.000,00 | 100 %      | 2.788.000.000,00 | 100 %      | 2.965.044.000,00 | 100 %                                  | 8.380.030.000,00  | KECAMATAN KEMUNING               |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.871.862.000,00 | 100 %      | 3.045.551.000,00 | 100 %      | 3.237.089.000,00 | 100 %                                  | 9.154.502.000,00  | KECAMATAN KERITANG               |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.471.182.000,00 | 100 %      | 2.571.335.000,00 | 100 %      | 2.693.647.000,00 | 100 %                                  | 7.736.164.000,00  | KECAMATAN KUALA INDRAGIRI        |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.911.104.000,00 | 100 %      | 3.077.894.000,00 | 100 %      | 3.264.052.000,00 | 100 %                                  | 9.253.050.000,00  | KECAMATAN MANDAH                 |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                       | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                   | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|      |                                                              |                                                           |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                   |                                  |
|      |                                                              |                                                           |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp                |                                  |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                       | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)              | (13)                             |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.739.283.000,00 | 100 %      | 2.894.859.000,00 | 100 %      | 3.068.853.000,00 | 100 %                                  | 8.702.995.000,00  | KECAMATAN PELANGIRAN             |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.512.506.000,00 | 100 %      | 2.642.335.000,00 | 100 %      | 2.790.834.000,00 | 100 %                                  | 7.945.675.000,00  | KECAMATAN PULAU BURUNG           |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 3.466.453.000,00 | 100 %      | 3.664.172.000,00 | 100 %      | 3.885.074.000,00 | 100 %                                  | 11.015.699.000,00 | KECAMATAN RETEH                  |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.356.434.000,00 | 100 %      | 2.475.833.000,00 | 100 %      | 2.613.074.000,00 | 100 %                                  | 7.445.341.000,00  | KECAMATAN SUNGAI BATANG          |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.418.523.000,00 | 100 %      | 2.536.841.000,00 | 100 %      | 2.674.042.000,00 | 100 %                                  | 7.629.406.000,00  | KECAMATAN TANAH MERAH            |
|      |                                                              | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100 %                                      | 100 %                                          | 1.896.141.000,00 | 100 %      | 1.993.255.000,00 | 100 %      | 2.104.720.000,00 | 100 %                                  | 5.994.116.000,00  | KECAMATAN TELUK BELENGKONG       |
|      | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan             | 100 %                                      | 100 %                                          | 8.647.000,00     | 100 %      | 7.551.000,00     | 100 %      | 6.733.000,00     | 100 %                                  | 22.931.000,00     | KECAMATAN TEMBILAHAN             |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan             | 65 %                                       | 70 %                                           | 272.430.000,00   | 80 %       | 237.932.000,00   | 100 %      | 212.156.000,00   | 90 %                                   | 722.518.000,00    | KECAMATAN TEMBILAHAN HULU        |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan             | 100 %                                      | 100 %                                          | 116.541.000,00   | 100 %      | 101.782.000,00   | 90 %       | 90.757.000,00    | 100 %                                  | 309.080.000,00    | KECAMATAN TEMPULING              |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan             | 100 %                                      | 100 %                                          | 95.679.000,00    | 100 %      | 83.562.000,00    | 100 %      | 74.510.000,00    | 100 %                                  | 253.751.000,00    | KECAMATAN BATANG TUAKA           |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan             | 100 %                                      | 100 %                                          | 18.755.000,00    | 100 %      | 16.379.000,00    | 100 %      | 14.604.000,00    | 100 %                                  | 49.738.000,00     | KECAMATAN CONCONG                |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)           | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|      |                                                              |                                               |                                            | Tahun 2024                                     |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                        |                |                                  |
|      |                                                              |                                               |                                            | K                                              | Rp            | K          | Rp            | K          | Rp            | K                                      | Rp             |                                  |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                           | (4)                                        | (5)                                            | (6)           | (7)        | (8)           | (9)        | (10)          | (11)                                   | (12)           | (13)                             |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 36.371.000,00 | 100 %      | 31.765.000,00 | 100 %      | 28.324.000,00 | 100 %                                  | 96.460.000,00  | KECAMATAN ENOK                   |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 10.638.000,00 | 100 %      | 9.289.000,00  | 100 %      | 8.282.000,00  | 100 %                                  | 28.209.000,00  | KECAMATAN GAUNG                  |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 37.957.000,00 | 100 %      | 33.150.000,00 | 100 %      | 29.559.000,00 | 100 %                                  | 100.666.000,00 | KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA       |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 23.733.000,00 | 100 %      | 20.726.000,00 | 100 %      | 18.481.000,00 | 100 %                                  | 62.940.000,00  | KECAMATAN KATEMAN                |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 76.661.000,00 | 100 %      | 66.953.000,00 | 100 %      | 59.698.000,00 | 100 %                                  | 203.312.000,00 | KECAMATAN KEMPAS                 |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 59.181.000,00 | 100 %      | 51.686.000,00 | 100 %      | 46.087.000,00 | 100 %                                  | 156.954.000,00 | KECAMATAN KEMUNING               |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 71.280.000,00 | 100 %      | 62.253.000,00 | 100 %      | 55.508.000,00 | 100 %                                  | 189.041.000,00 | KECAMATAN KERITANG               |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 11.134.000,00 | 100 %      | 9.724.000,00  | 100 %      | 8.670.000,00  | 100 %                                  | 29.528.000,00  | KECAMATAN KUALA INDRAGIRI        |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 36.439.000,00 | 100 %      | 31.824.000,00 | 100 %      | 28.376.000,00 | 100 %                                  | 96.639.000,00  | KECAMATAN MANDAH                 |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 9.006.000,00  | 100 %      | 7.865.000,00  | 100 %      | 7.013.000,00  | 100 %                                  | 23.884.000,00  | KECAMATAN PELANGIRAN             |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 649.000,00    | 100 %      | 566.000,00    | 100 %      | 505.000,00    | 100 %                                  | 1.720.000,00   | KECAMATAN PULAU BURUNG           |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 78.433.000,00 | 100 %      | 68.501.000,00 | 100 %      | 61.079.000,00 | 100 %                                  | 208.013.000,00 | KECAMATAN RETEH                  |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 82.865.000,00 | 100 %      | 72.371.000,00 | 100 %      | 64.530.000,00 | 100 %                                  | 219.766.000,00 | KECAMATAN SUNGAI BATANG          |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                          | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                  | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|      |                                                              |                                                              |                                            | Tahun 2024                                     |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                        |                  |                                  |
|      |                                                              |                                                              |                                            | K                                              | Rp               | K          | Rp               | K          | Rp               | K                                      | Rp               |                                  |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                          | (4)                                        | (5)                                            | (6)              | (7)        | (8)              | (9)        | (10)             | (11)                                   | (12)             | (13)                             |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan                | 100 %                                      | 100 %                                          | 20.372.000,00    | 100 %      | 17.792.000,00    | 100 %      | 15.864.000,00    | 100 %                                  | 54.028.000,00    | KECAMATAN TANAH MERAH            |
|      |                                                              | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan                | 100 %                                      | 100 %                                          | 21.901.000,00    | 100 %      | 19.127.000,00    | 100 %      | 17.055.000,00    | 100 %                                  | 58.083.000,00    | KECAMATAN TELUK BELENGKONG       |
|      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 2.301.200.000,00 | 100 %      | 2.009.805.000,00 | 100 %      | 1.792.076.000,00 | 100 %                                  | 6.103.081.000,00 | KECAMATAN TEMBILAHAN             |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 726.800.000,00   | 100 %      | 634.767.000,00   | 100 %      | 566.001.000,00   | 100 %                                  | 1.927.568.000,00 | KECAMATAN TEMBILAHAN HULU        |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 935.423.000,00   | 100 %      | 816.971.000,00   | 100 %      | 728.467.000,00   | 100 %                                  | 2.480.861.000,00 | KECAMATAN TEMPULING              |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 252.633.000,00   | 100 %      | 220.642.000,00   | 100 %      | 196.739.000,00   | 100 %                                  | 670.014.000,00   | KECAMATAN BATANG TUAKA           |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 268.374.000,00   | 100 %      | 234.389.000,00   | 100 %      | 208.998.000,00   | 100 %                                  | 711.761.000,00   | KECAMATAN CONCONG                |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 879.000.000,00   | 100 %      | 767.694.000,00   | 100 %      | 684.527.000,00   | 100 %                                  | 2.331.221.000,00 | KECAMATAN ENOK                   |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 240.795.000,00   | 100 %      | 210.302.000,00   | 100 %      | 187.520.000,00   | 100 %                                  | 638.617.000,00   | KECAMATAN GAUNG                  |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 812.345.000,00   | 100 %      | 709.479.000,00   | 100 %      | 632.619.000,00   | 100 %                                  | 2.154.443.000,00 | KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA       |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                          | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                  | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|      |                                                              |                                                              |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                        |                  |                                  |
|      |                                                              |                                                              |                                            | K                                              | Rp             | K          | Rp             | K          | Rp             | K                                      | Rp               |                                  |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                          | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)            | (9)        | (10)           | (11)                                   | (12)             | (13)                             |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 766.876.000,00 | 100 %      | 669.767.000,00 | 100 %      | 597.209.000,00 | 100 %                                  | 2.033.852.000,00 | KECAMATAN KATEMAN                |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 732.114.000,00 | 100 %      | 639.408.000,00 | 100 %      | 570.138.000,00 | 100 %                                  | 1.941.660.000,00 | KECAMATAN KEMPAS                 |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 371.795.000,00 | 100 %      | 324.714.000,00 | 100 %      | 289.537.000,00 | 100 %                                  | 986.046.000,00   | KECAMATAN KEMUNING               |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 369.584.000,00 | 100 %      | 322.783.000,00 | 100 %      | 287.815.000,00 | 100 %                                  | 980.182.000,00   | KECAMATAN KERITANG               |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 241.519.000,00 | 100 %      | 210.935.000,00 | 100 %      | 188.084.000,00 | 100 %                                  | 640.538.000,00   | KECAMATAN KUALA INDRAGIRI        |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 241.000.000,00 | 100 %      | 210.482.000,00 | 100 %      | 187.680.000,00 | 100 %                                  | 639.162.000,00   | KECAMATAN MANDAH                 |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 349.431.000,00 | 100 %      | 305.182.000,00 | 100 %      | 272.121.000,00 | 100 %                                  | 926.734.000,00   | KECAMATAN PELANGIRAN             |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 34.890.000,00  | 100 %      | 30.471.000,00  | 100 %      | 27.170.000,00  | 100 %                                  | 92.531.000,00    | KECAMATAN PULAU BURUNG           |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 865.600.000,00 | 100 %      | 755.991.000,00 | 100 %      | 674.092.000,00 | 100 %                                  | 2.295.683.000,00 | KECAMATAN RETEH                  |
|      |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan | 100 %                                      | 100 %                                          | 285.792.000,00 | 100 %      | 249.602.000,00 | 100 %      | 222.562.000,00 | 100 %                                  | 757.956.000,00   | KECAMATAN SUNGAI BATANG          |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                             | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                 |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                        |                |                                  |
|         |                                                              |                                                                 |                                            | K                                              | Rp             | K          | Rp             | K          | Rp             | K                                      | Rp             |                                  |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                             | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)            | (9)        | (10)           | (11)                                   | (12)           | (13)                             |
|         |                                                              | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan    | 100 %                                      | 100 %                                          | 293.150.000,00 | 100 %      | 256.028.000,00 | 100 %      | 228.292.000,00 | 100 %                                  | 777.470.000,00 | KECAMATAN TANAH MERAH            |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM           | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 63.909.000,00  | 100 %      | 55.816.000,00  | 100 %      | 49.769.000,00  | 100 %                                  | 169.494.000,00 | KECAMATAN TEMBILAHAN             |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 10.000.000,00  | 100 %      | 10.000.000,00  | 100 %      | 10.000.000,00  | 100 %                                  | 30.000.000,00  | KECAMATAN TEMBILAHAN HULU        |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 9.000.000,00   | 100 %      | 9.000.000,00   | 100 %      | 9.000.000,00   | 100 %                                  | 27.000.000,00  | KECAMATAN BATANG TUAKA           |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 34.725.000,00  | 100 %      | 30.327.000,00  | 100 %      | 27.042.000,00  | 100 %                                  | 92.094.000,00  | KECAMATAN GAUNG                  |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan | %                                          | 100 %                                          | 84.765.000,00  | 100 %      | 74.031.000,00  | 100 %      | 66.011.000,00  | 100 %                                  | 224.807.000,00 | KECAMATAN KATEMAN                |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 51.414.000,00  | 100 %      | 44.903.000,00  | 100 %      | 40.039.000,00  | 100 %                                  | 136.356.000,00 | KECAMATAN KEMUNING               |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 35.640.000,00  | 100 %      | 31.127.000,00  | 100 %      | 27.754.000,00  | 100 %                                  | 94.521.000,00  | KECAMATAN KERITANG               |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                    | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                        |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                        |                |                                  |
|         |                                                              |                                                                        |                                            | K                                              | Rp             | K          | Rp            | K          | Rp            | K                                      | Rp             |                                  |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                    | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)           | (9)        | (10)          | (11)                                   | (12)           | (13)                             |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan        | 100 %                                      | 100 %                                          | 9.279.000,00   | 100 %      | 8.104.000,00  | 100 %      | 7.226.000,00  | 100 %                                  | 24.609.000,00  | KECAMATAN KUALA INDRAGIRI        |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan        | 100 %                                      | 100 %                                          | 102.205.000,00 | 100 %      | 89.263.000,00 | 100 %      | 79.592.000,00 | 100 %                                  | 271.060.000,00 | KECAMATAN MANDAH                 |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan        | 100 %                                      | 100 %                                          | 64.925.000,00  | 100 %      | 56.703.000,00 | 100 %      | 50.560.000,00 | 100 %                                  | 172.188.000,00 | KECAMATAN PULAU BURUNG           |
|         |                                                              | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan        | 100 %                                      | 100 %                                          | 10.000.000,00  | 100 %      | 10.000.000,00 | 100 %      | 10.000.000,00 | 100 %                                  | 30.000.000,00  | KECAMATAN TELUK BELENGKONG       |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 102.734.000,00 | 100 %      | 89.725.000,00 | 100 %      | 80.004.000,00 | 100 %                                  | 272.463.000,00 | KECAMATAN TEMBILAHAN             |
|         |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 92.852.000,00  | 100 %      | 81.094.000,00 | 100 %      | 72.309.000,00 | 100 %                                  | 246.255.000,00 | KECAMATAN TEMPULING              |
|         |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 52.402.000,00  | 100 %      | 45.766.000,00 | 100 %      | 40.807.000,00 | 100 %                                  | 138.975.000,00 | KECAMATAN BATANG TUAKA           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                    | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|      |                                                              |                                                                        |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |               |                                        |                |                                  |
|      |                                                              |                                                                        |                                            | K                                              | Rp             | K          | Rp             | K          | Rp            | K                                      | Rp             |                                  |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                                    | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)            | (9)        | (10)          | (11)                                   | (12)           | (13)                             |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 122.323.000,00 | 100 %      | 106.833.000,00 | 100 %      | 95.259.000,00 | 100 %                                  | 324.415.000,00 | KECAMATAN CONCONG                |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 53.814.000,00  | 100 %      | 46.999.000,00  | 100 %      | 41.908.000,00 | 100 %                                  | 142.721.000,00 | KECAMATAN ENOK                   |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 58.204.000,00  | 100 %      | 50.833.000,00  | 100 %      | 45.326.000,00 | 100 %                                  | 154.363.000,00 | KECAMATAN GAUNG                  |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 99.601.000,00  | 100 %      | 86.988.000,00  | 100 %      | 77.565.000,00 | 100 %                                  | 264.154.000,00 | KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA       |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 21.613.000,00  | 100 %      | 18.876.000,00  | 100 %      | 16.831.000,00 | 100 %                                  | 57.320.000,00  | KECAMATAN KATEMAN                |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 62.745.000,00  | 100 %      | 54.799.000,00  | 100 %      | 48.862.000,00 | 100 %                                  | 166.406.000,00 | KECAMATAN KEMPAS                 |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan                         | 100 %                                      | 100 %                                          | 45.557.000,00  | 100 %      | 39.788.000,00  | 100 %      | 35.477.000,00 | 100 %                                  | 120.822.000,00 | KECAMATAN KEMUNING               |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                    | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|      |                                                              |                                                                        |                                            | Tahun 2024                                     |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                        |                |                                  |
|      |                                                              |                                                                        |                                            | K                                              | Rp            | K          | Rp            | K          | Rp            | K                                      | Rp             |                                  |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                                    | (4)                                        | (5)                                            | (6)           | (7)        | (8)           | (9)        | (10)          | (11)                                   | (12)           | (13)                             |
|      |                                                              | Umum yang di selesaikan                                                |                                            |                                                |               |            |               |            |               |                                        |                |                                  |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 36.304.000,00 | 100 %      | 31.706.000,00 | 100 %      | 28.271.000,00 | 100 %                                  | 96.281.000,00  | KECAMATAN KERITANG               |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 16.703.000,00 | 100 %      | 14.587.000,00 | 100 %      | 13.007.000,00 | 100 %                                  | 44.297.000,00  | KECAMATAN KUALA INDRAGIRI        |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 85.740.000,00 | 100 %      | 74.882.000,00 | 100 %      | 66.770.000,00 | 100 %                                  | 227.392.000,00 | KECAMATAN MANDAH                 |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 79.473.000,00 | 100 %      | 69.409.000,00 | 100 %      | 61.890.000,00 | 100 %                                  | 210.772.000,00 | KECAMATAN PELANGIRAN             |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 64.925.000,00 | 100 %      | 56.703.000,00 | 100 %      | 50.560.000,00 | 100 %                                  | 172.188.000,00 | KECAMATAN PULAU BURUNG           |
|      |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 74.016.000,00 | 100 %      | 64.643.000,00 | 100 %      | 57.640.000,00 | 100 %                                  | 196.299.000,00 | KECAMATAN RETEH                  |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                    | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                        |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                        |                |                                  |
|         |                                                              |                                                                        |                                            | K                                              | Rp             | K          | Rp             | K          | Rp             | K                                      | Rp             |                                  |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                    | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)            | (9)        | (10)           | (11)                                   | (12)           | (13)                             |
|         |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 80.189.000,00  | 100 %      | 70.034.000,00  | 100 %      | 62.447.000,00  | 100 %                                  | 212.670.000,00 | KECAMATAN SUNGAI BATANG          |
|         |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 107.298.000,00 | 100 %      | 93.711.000,00  | 100 %      | 83.559.000,00  | 100 %                                  | 284.568.000,00 | KECAMATAN TANAH MERAH            |
|         |                                                              | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan | 100 %                                      | 100 %                                          | 136.631.000,00 | 100 %      | 119.329.000,00 | 100 %      | 106.402.000,00 | 100 %                                  | 362.362.000,00 | KECAMATAN TELUK BELENGKONG       |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 30.506.000,00  | 100 %      | 26.642.000,00  | 100 %      | 23.756.000,00  | 100 %                                  | 80.904.000,00  | KECAMATAN TEMBILAHAN             |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 45.429.000,00  | 100 %      | 39.676.000,00  | 100 %      | 35.378.000,00  | 100 %                                  | 120.483.000,00 | KECAMATAN TEMBILAHAN HULU        |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 44.273.000,00  | 100 %      | 38.665.000,00  | 100 %      | 34.477.000,00  | 100 %                                  | 117.415.000,00 | KECAMATAN TEMPULING              |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 34.934.000,00  | 100 %      | 30.510.000,00  | 100 %      | 27.204.000,00  | 100 %                                  | 92.648.000,00  | KECAMATAN BATANG TUAKA           |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 11.823.000,00  | 100 %      | 10.325.000,00  | 100 %      | 9.206.000,00   | 100 %                                  | 31.354.000,00  | KECAMATAN CONCONG                |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan                                              | 100 %                                      | 100 %                                          | 30.515.000,00  | 100 %      | 26.650.000,00  | 100 %      | 23.763.000,00  | 100 %                                  | 80.928.000,00  | KECAMATAN ENOK                   |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|      |                                                              |                                                    |                                            | Tahun 2024                                     |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                        |                |                                  |
|      |                                                              |                                                    |                                            | K                                              | Rp             | K          | Rp             | K          | Rp             | K                                      | Rp             |                                  |
| (1)  | (2)                                                          | (3)                                                | (4)                                        | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)            | (9)        | (10)           | (11)                                   | (12)           | (13)                             |
|      |                                                              | yang Tertib Administrasi                           |                                            |                                                |                |            |                |            |                |                                        |                |                                  |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 152.951.000,00 | 100 %      | 133.581.000,00 | 100 %      | 119.111.000,00 | 100 %                                  | 405.643.000,00 | KECAMATAN GAUNG                  |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 62.922.000,00  | 100 %      | 54.953.000,00  | 100 %      | 49.000.000,00  | 100 %                                  | 166.875.000,00 | KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA       |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 50.768.000,00  | 100 %      | 44.338.000,00  | 100 %      | 39.534.000,00  | 100 %                                  | 134.640.000,00 | KECAMATAN KATEMAN                |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 161.815.000,00 | 100 %      | 141.322.000,00 | 100 %      | 126.011.000,00 | 100 %                                  | 429.148.000,00 | KECAMATAN KEMPAS                 |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 41.131.000,00  | 100 %      | 35.922.000,00  | 100 %      | 32.031.000,00  | 100 %                                  | 109.084.000,00 | KECAMATAN KEMUNING               |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 144.368.000,00 | 100 %      | 126.084.000,00 | 100 %      | 112.425.000,00 | 100 %                                  | 382.877.000,00 | KECAMATAN KERITANG               |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 11.599.000,00  | 100 %      | 10.130.000,00  | 100 %      | 9.032.000,00   | 100 %                                  | 30.761.000,00  | KECAMATAN KUALA INDRAGIRI        |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 34.524.000,00  | 100 %      | 30.151.000,00  | 100 %      | 26.885.000,00  | 100 %                                  | 91.560.000,00  | KECAMATAN MANDAH                 |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi | 100 %                                      | 100 %                                          | 155.146.000,00 | 100 %      | 135.498.000,00 | 100 %      | 120.820.000,00 | 100 %                                  | 411.464.000,00 | KECAMATAN PELANGIRAN             |
|      |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan                          | 100 %                                      | 100 %                                          | 43.469.000,00  | 100 %      | 37.964.000,00  | 100 %      | 33.851.000,00  | 100 %                                  | 115.284.000,00 | KECAMATAN PULAU BURUNG           |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                         | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                    | Perangkat Daerah Penanggungjawab  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|         |                                                              |                                                                             |                                            | Tahun 2024                                     |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                        |                    |                                   |
|         |                                                              |                                                                             |                                            | K                                              | Rp                | K          | Rp                | K          | Rp                | K                                      | Rp                 |                                   |
| (1)     | (2)                                                          | (3)                                                                         | (4)                                        | (5)                                            | (6)               | (7)        | (8)               | (9)        | (10)              | (11)                                   | (12)               | (13)                              |
|         |                                                              | yang Tertib Administrasi                                                    |                                            |                                                |                   |            |                   |            |                   |                                        |                    |                                   |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                          | 100 %                                      | 100 %                                          | 67.053.000,00     | 100 %      | 58.562.000,00     | 100 %      | 52.217.000,00     | 100 %                                  | 177.832.000,00     | KECAMATAN RETEH                   |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                          | 100 %                                      | 100 %                                          | 20.336.000,00     | 100 %      | 17.760.000,00     | 100 %      | 15.836.000,00     | 100 %                                  | 53.932.000,00      | KECAMATAN SUNGAI BATANG           |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                          | 100 %                                      | 100 %                                          | 10.729.000,00     | 100 %      | 9.370.000,00      | 100 %      | 8.354.000,00      | 100 %                                  | 28.453.000,00      | KECAMATAN TANAH MERAH             |
|         |                                                              | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                          | 100 %                                      | 100 %                                          | 95.792.000,00     | 100 %      | 83.660.000,00     | 100 %      | 74.597.000,00     | 100 %                                  | 254.049.000,00     | KECAMATAN TELUK BELENGKONG        |
| 8       | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                      |                                                                             |                                            |                                                | 84.814.147.000,00 |            | 14.964.544.000,00 |            | 14.687.463.000,00 |                                        | 114.466.154.000,00 |                                   |
| 8.01    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                  |                                                                             |                                            |                                                | 84.814.147.000,00 |            | 14.964.544.000,00 |            | 14.687.463.000,00 |                                        | 114.466.154.000,00 |                                   |
| 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                   | 90 %                                       | 90 %                                           | 8.289.591.000,00  | 95 %       | 8.113.701.000,00  | 100 %      | 8.082.697.000,00  | 100 %                                  | 24.485.989.000,00  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 100 %                                      | 100 %                                          | 1.040.753.000,00  | 100 %      | 908.963.000,00    | 100 %      | 810.491.000,00    | 100 %                                  | 2.760.207.000,00   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| Kode    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                            | Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |            |                      |            |                      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |                      | Perangkat Daerah Penanggungjawab  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|         |                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                            | Tahun 2024                                     |                      | Tahun 2025 |                      | Tahun 2026 |                      |                                        |                      |                                   |
|         |                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                            | K                                              | Rp                   | K          | Rp                   | K          | Rp                   | K                                      | Rp                   |                                   |
| (1)     | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                                                            | (4)                                        | (5)                                            | (6)                  | (7)        | (8)                  | (9)        | (10)                 | (11)                                   | (12)                 | (13)                              |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik                                                         | 100%                                       | 100%                                           | 73.923.764.000,00    | 100 %      | 4.579.386.000,00     | 100 %      | 4.579.386.000,00     | 100 %                                  | 83.082.536.000,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | Persentase Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Inhil | 100 %                                      | 100 %                                          | 181.950.000,00       | 100 %      | 158.910.000,00       | 100 %      | 141.694.000,00       | 100 %                                  | 482.554.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | Persentase penanganan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya                                                     | 100 %                                      | 100 %                                          | 177.219.000,00       | 100 %      | 154.778.000,00       | 100 %      | 138.010.000,00       | 100 %                                  | 470.007.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | Persentase penyelesaian konflik yang difasilitasi                                                              | 100 %                                      | 100 %                                          | 1.200.870.000,00     | 100 %      | 1.048.806.000,00     | 100 %      | 935.185.000,00       | 100 %                                  | 3.184.861.000,00     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|         |                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                            |                                                |                      |            |                      |            |                      |                                        |                      |                                   |
|         | JUMLAH                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                            |                                                | 1.690.306.000.000,00 |            | 1.713.002.000.000,00 |            | 1.735.361.000.000,00 |                                        | 5.138.669.000.000,00 |                                   |



# BAB VIII

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

#### 8.1.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

**Tabel VIII.1**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Makro**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| No. | Indikator                          | Kondisi Awal 2022 | Target |        |        |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|     |                                    |                   | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1   | IPM                                | 67.37             | 67.79  | 68.07  | 68.35  |
| 2   | Tingkat Kemiskinan (%)             | 5.98              | 5.47   | 5.24   | 5.00   |
| 3   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 1.50              | 1.44   | 1.41   | 1.38   |
| 4   | Indeks Gini                        | 0.296             | 0.286  | 0.28   | 0.275  |
| 5   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) | 5.31              | 5.55   | 5.81   | 6.09   |
| 6   | PDRB per Kapita (Juta Rp)          | 126.25            | 133.39 | 137.10 | 140.92 |

### 8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel VIII.2**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| No | Indikator Kinerja Utama                       | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target |       |       |
|----|-----------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------|-------|
|    |                                               |        |                   | 2024   | 2025  | 2026  |
| 1  | Indeks Kesehatan                              | Indeks | 0,743             | 0,750  | 0,754 | 0,758 |
| 2  | Indeks Pendidikan                             | Indeks | 0,581             | 0,582  | 0,583 | 0,585 |
| 3  | Indeks Pengeluaran                            | Indeks | 0,708             | 0,715  | 0,718 | 0,721 |
| 4  | Tingkat Kemiskinan                            | Persen | 5,98              | 5,47   | 5,24  | 5,00  |
| 5  | Tingkat Pengangguran Terbuka                  | Persen | 1,50              | 1,44   | 1,41  | 1,38  |
| 6  | LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Persen | 4,34              | 4.64   | 4.87  | 5.12  |
| 7  | LPE Sektor Industri Pengolahan                | Persen | 4,68              | 5.34   | 5.60  | 5.88  |
| 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup              | Indeks | 63,31             | 68,05  | 68,43 | 68,81 |
| 9  | Indeks Risiko Bencana                         | Nilai  | 168.4*            | 162    | 158   | 154   |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No | Indikator Kinerja Utama                   | Satuan   | Kondisi Awal 2022 | Target       |               |               |
|----|-------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|    |                                           |          |                   | 2024         | 2025          | 2026          |
| 10 | Indeks Infrastruktur                      | Persen   | 58,99             | 63,33        | 65,71         | 67,88         |
| 11 | Nilai AKIP                                | Prediket | B<br>(64.10)      | B<br>(68.01) | BB<br>(70.90) | BB<br>(71.23) |
| 12 | Indeks Profesionalitas ASN                | Indeks   | 57,06             | 58,10        | 58,12         | 58,15         |
| 13 | Indeks Integritas                         | Indeks   | 72,65             | 74,00        | 74,50         | 75,00         |
| 14 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah        | Nilai    | 75,47*            | 78,32        | 79,82         | 81,65         |
| 15 | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik | Persen   | 83,40             | 89,64        | 92,24         | 94,83         |

### 8.1.3. Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Tahun 2017. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel VIII.3**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026**

| No                                                  | Indikator Kinerja Daerah                                              | Satuan   | Kondisi Awal 2022 | Target       |               |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                     |                                                                       |          |                   | 2024         | 2025          | 2026          |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                      |                                                                       |          |                   |              |               |               |
| I.                                                  | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi                                  |          |                   |              |               |               |
| 1                                                   | Indeks Pembangunan Manusia                                            | Poin     | 67,37             | 67,79        | 68,07         | 68,35         |
| 2                                                   | Tingkat Kemiskinan                                                    | %        | 5,98              | 5,47         | 5,24          | 5,00          |
| 3                                                   | Indeks Gini                                                           | -        | 0,296             | 0,286        | 0,280         | 0,275         |
| 4                                                   | PDRB per Kapita                                                       | Juta Rp  | 126,25            | 133,39       | 137,10        | 140,92        |
| 5                                                   | Tingkat Pengangguran Terbuka                                          | %        | 1,50              | 1,44         | 1,41          | 1,38          |
| 6                                                   | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                              | %        | 4,44              | 5,14         | 5,40          | 5,67          |
| 7                                                   | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                       | %        | 4,01              | 4,64         | 4,87          | 5,12          |
| 8                                                   | LPE Kategori Industri Pengolahan                                      | %        | 4,61              | 5,34         | 5,60          | 5,88          |
| 9                                                   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                      | Indeks   | 63,31             | 68,05        | 68,43         | 68,81         |
| 10                                                  | Indeks Risiko Bencana                                                 | Nilai    | 168,40            | 162,00       | 158,00        | 154,00        |
| 11                                                  | Indeks Reformasi Birokrasi                                            | Prediket | B<br>(63.07)      | B<br>(64.08) | B<br>(65.13)  | B<br>(66.21)  |
| 12                                                  | Nilai AKIP                                                            | Prediket | B<br>(64.10)      | B<br>(68.01) | BB<br>(70.90) | BB<br>(71.23) |
| 13                                                  | Indeks Integritas                                                     | Indeks   | 76,77             | 81,71        | 83,35         | 85,00         |
| 14                                                  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                    | Nilai    | 75,47             | 82,28        | 84,55         | 86,83         |
| II.                                                 | Kesejahteraan Sosial                                                  |          |                   |              |               |               |
| 1                                                   | Indeks Kesehatan                                                      | Poin     | 0,743             | 0,750        | 0,754         | 0,758         |
| 2                                                   | Indeks Pendidikan                                                     | Poin     | 0,581             | 0,582        | 0,583         | 0,585         |
| ASPEK DAYA SAING                                    |                                                                       |          |                   |              |               |               |
| I.                                                  | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah                                        |          |                   |              |               |               |
| 1                                                   | Indeks Pengeluaran                                                    | Poin     | 0,708             | 0,715        | 0,718         | 0,721         |
| II.                                                 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur                                 |          |                   |              |               |               |
| 1                                                   | Indeks Infrastruktur                                                  | Persen   | 58,99             | 63,33        | 65,71         | 67,88         |
| III.                                                | Fokus Iklim Investasi                                                 |          |                   |              |               |               |
| 1                                                   | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik                             | persen   | 83,40             | 89,64        | 92,24         | 94,83         |
| 2                                                   | Persentase pertumbuhan investasi daerah sampai dengan tahun berkenaan | Persen   | 572,56            | 6            | 7             | 8             |
| IV.                                                 | Fokus Sumber Daya Manusia                                             |          |                   |              |               |               |
| 1                                                   | Rasio Ketergantungan                                                  | Persen   | 44,11             | 43,50        | 43,25         | 43,00         |
| ASPEK PELAYANAN UMUM                                |                                                                       |          |                   |              |               |               |
| Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar |                                                                       |          |                   |              |               |               |
| a) Pendidikan                                       |                                                                       |          |                   |              |               |               |
|                                                     | Rata-rata Lama Sekolah                                                | Persen   | 7,28              | 7,50         | 8,00          | 8,73          |
|                                                     | Harapan Lama Sekolah                                                  | Persen   | 12,00             | 12,50        | 13,00         | 13,50         |
|                                                     | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                          | Persen   | 98,70             | 98,75        | 98,77         | 99,00         |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                          | Indikator Kinerja Daerah                                                                                  | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                             |                                                                                                           |        |                   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                                             | Angka Kelulusan (AL) SD/MI                                                                                | Persen | 100,00            | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                                             | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                                                                              | Persen | 100,00            | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                                             | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                                                         | persen | 92,21             | 93,00  | 94,00  | 95,00  |
|                                             | Angka Partisipasi Sekolah (7-12)                                                                          | persen | 99,99             | 101,04 | 101,06 | 101,08 |
|                                             | Angka Partisipasi Sekolah (13-15)                                                                         | Persen | 85,57             | 92,55  | 92,69  | 92,83  |
|                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan                                                  | Indeks | B                 | B      | B      | B      |
|                                             | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi                                                       | Persen | 70,00             | 75,00  | 85,00  | 95,00  |
|                                             | Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi                                                           | Persen | 100,00            | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                                             | Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV                                                          | Persen | 85,00             | 89,00  | 92,00  | 95,00  |
|                                             | APK PAUD                                                                                                  | Persen | 91,13             | 91,50  | 92,00  | 92,5   |
|                                             | APK SD                                                                                                    | Persen | 106,00            | 105,90 | 105,50 | 105,00 |
|                                             | APK SMP                                                                                                   | Persen | 104,10            | 104,10 | 104,00 | 103,00 |
|                                             | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                                                               | Persen | 100               | 100    | 100    | 100    |
|                                             | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                                                             | Persen | 100               | 100    | 100    | 100    |
|                                             | Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar                                    | Persen | 99,00             | 99,00  | 99,5   | 100    |
|                                             | Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar | Persen | 70,00             | 70,00  | 80,00  | 95,00  |
|                                             | Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Rombel            | Persen | 87,00             | 87,00  | 88,00  | 90,00  |
| <b>b) Kesehatan</b>                         |                                                                                                           |        |                   |        |        |        |
|                                             | Angka Harapan Hidup                                                                                       | Tahun  | 68,31             | 68,77  | 69,01  | 69,25  |
|                                             | Angka Kematian Ibu                                                                                        | Orang  | 8                 | 7      | 6      | 5      |
|                                             | Angka Kematian Bayi                                                                                       | Orang  | 41                | 31     | 20     | 10     |
|                                             | Angka Kematian Balita                                                                                     | Orang  | 3                 | 3      | 2      | 1      |
|                                             | Persentase penerapan PHBS                                                                                 | Persen | 25,00             | 55,00  | 65,00  | 75,00  |
|                                             | Persentase FKTP yang terakreditasi                                                                        | Persen | 86,66             | 93,00  | 96,00  | 100,00 |
|                                             | Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)                                | Persen | 66,98             | 100    | 100    | 100    |
|                                             | Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar                                                          | Persen | 73,00             | 80,00  | 85,00  | 90,00  |
|                                             | Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Memiliki Kompetensi                                           | Persen | 69,72             | 78,00  | 85,00  | 90,00  |
|                                             | Cakupan Ketersediaan Obat Obatan, Alat Kesehatan dan makanan serta minuman sesuai Standar                 | Persen | 70,00             | 80,00  | 90,00  | 100,00 |
|                                             | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                                                          | Persen | 66,72             | 80,00  | 85,00  | 90,00  |
| <b>c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b> |                                                                                                           |        |                   |        |        |        |
|                                             | Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap.                                                              | Persen | 56,00             | 57,25  | 57,5   | 57,75  |
|                                             | Persentase penduduk berakses air bersih                                                                   | Persen | 27,68             | 29,55  | 30,67  | 31,79  |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                                                 | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                      | Satuan  | Kondisi Awal 2022 | Target |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------|-------|
|                                                                    |                                                                                                                               |         |                   | 2024   | 2025  | 2026  |
|                                                                    | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi                                                      | Persen  | 0,00              | 25,00  | 45,00 | 75,00 |
|                                                                    | Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Perkotaan                                                   | Unit    | 0                 | 10     | 10    | 50    |
|                                                                    | Jumlah Kepatuhan PBG pertahun per satuan bangunan                                                                             | Unit    | 74                | 80     | 85    | 90    |
|                                                                    | Jumlah bangunan ber-PBG per satuan bangunan pertahun                                                                          | Unit    | 74                | 80     | 85    | 90    |
|                                                                    | Persentase ketaatan pembangunan terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang                                                | Persen  | 20,00             | 25,00  | 35,00 | 40,00 |
|                                                                    | Jumlah Persetujuan/Konfirmasi/Rekomendasi KKPR(PKKPR/KKKPR/RKKPR) yang diterbitkan pada tahun N                               | Dokumen | 80                | 90     | 100   | 100   |
|                                                                    | Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik                                                                                      | Persen  | 12,00             | 12,25  | 12,50 | 12,75 |
|                                                                    | Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik                                                                               | Persen  | 11,00             | 11,25  | 11,50 | 11,75 |
|                                                                    | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota        | Ha      | 9,40              | 12,20  | 15,00 | 17,80 |
|                                                                    | Proporsi jumlah Peduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan                           | Persen  | 27,68             | 29,55  | 30,67 | 31,79 |
|                                                                    | Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan                                    | Unit    | 0                 | 10     | 10    | 50    |
|                                                                    | Jumlah PBG Bangunan Gedung yang diterbitkan Pertahun                                                                          | Unit    | 74                | 80     | 85    | 90    |
|                                                                    | Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih                                                                                  | Persen  | 50                | 50     | 50    | 50    |
|                                                                    | Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang                                                                             | Persen  | 2                 | 5      | 10    | 15    |
| <b>d) Perumahan Rakyat</b>                                         |                                                                                                                               |         |                   |        |       |       |
|                                                                    | Persentase luasan kawasan kumuh                                                                                               | Persen  | 0,65              | 0,54   | 0,5   | 0,46  |
|                                                                    | Rasio rumah layak huni                                                                                                        | Persen  | 89.88             | 89.93  | 89.95 | 89.99 |
|                                                                    | Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan                                                                                   | Persen  | 0,79              | 0,90   | 1,10  | 1,50  |
|                                                                    | Persentase Luas Kawasan Permukiman yang tertangani                                                                            | Persen  | 8,96              | 13,65  | 20,70 | 27,74 |
|                                                                    | Persentase peningkatan PSU                                                                                                    | Persen  | 0,23              | 0,28   | 0,28  | 0,28  |
|                                                                    | Persentase Peningkatan Palayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persen  | 0                 | 0,33   | 0,33  | 0,33  |
| <b>e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b> |                                                                                                                               |         |                   |        |       |       |
|                                                                    | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)                                                     | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                    | Persentase Penegakan PERDA (%)                                                                                                | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                    | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada                                 | Orang   | 100               | 100    | 100   | 100   |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                                               | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                                    | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------|-------|
|                                                                  |                                                                                                                                                             |        |                   | 2024   | 2025  | 2026  |
|                                                                  | (Orang)                                                                                                                                                     |        |                   |        |       |       |
|                                                                  | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran                                                                               | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | Cakupan penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran                                                                                | persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | Persentase penurunan kejadian kebakaran                                                                                                                     | persen | 28                | 29     | 30    | 32    |
|                                                                  | Luas wilayah terdampak bencana                                                                                                                              | Hektar | 92,5              | 80     | 60    | 50    |
|                                                                  | persentase kesadaran masyarakat peduli bencana                                                                                                              | Persen | 14,59             | 41,29  | 47,59 | 47,59 |
|                                                                  | persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap                                                                                             | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | persentase rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana                                                                                               | Persen | 86,7              | 88     | 90    | 92    |
|                                                                  | indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan wilayah terdampak bencana                                                                      | Persen | 80,97             | 82     | 85    | 88    |
|                                                                  | Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat                                                                                 | Persen | -52               | 3      | 4     | 5     |
|                                                                  | Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan                                                                                                                    | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran                                                                                | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
| <b>f) Sosial</b>                                                 |                                                                                                                                                             |        |                   |        |       |       |
|                                                                  | Tingkat Penurunan Jumlah PPKS                                                                                                                               | Persen | 64,33             | 75     | 85    | 100   |
|                                                                  | Persentase PPKS yang Tertangani                                                                                                                             | Persen | 60,85             | 75     | 90    | 100   |
|                                                                  | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Persen | 88,8              | 93     | 97    | 100   |
|                                                                  | Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                   | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | Persentase Korban Tindak Kekerasan yang Menerima Bantuan Sosial                                                                                             | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial                                                                                                         | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial                                                                                                   | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat                                                                          | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                                  | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola                                                                                                              | Persen | 100               | 100    | 100   | 100   |
| <b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b> |                                                                                                                                                             |        |                   |        |       |       |
| <b>a) Tenaga Kerja</b>                                           |                                                                                                                                                             |        |                   |        |       |       |
|                                                                  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                                                                          | Persen | 64,66             | 62,98  | 63,08 | 63,28 |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                                     | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                            | Satuan      | Kondisi Awal 2022 | Target |        |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                        |                                                                                                                                     |             |                   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                                                        | Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)                                                           | Persen      | 25,00             | 30,00  | 30,00  | 30,00  |
|                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun                                                                              | Dokumen     |                   | 1      | 1      | 1      |
|                                                        | Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan                                                                                    | Persen      | 94,66             | 83,00  | 83,01  | 83,02  |
|                                                        | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Persen      | 6,50              | 6,50   | 6,70   | 6,80   |
|                                                        | Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial                                                               | Persen      | 28,00             | 35,00  | 36,00  | 40,00  |
| <b>b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |                                                                                                                                     |             |                   |        |        |        |
|                                                        | Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)                                                                                        | Poin KLA    | 616,59            | 647,00 | 677,00 | 700,00 |
|                                                        | Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak Per 100.000 Penduduk Perempuan dan Anak                                                 | Per 100.000 | 10,37             | 10,27  | 10,18  | 10,08  |
|                                                        | Cakupan Pelayanan dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan                                                              | Persen      | 100               | 100    | 100    | 100    |
|                                                        | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                                     | Indeks      | 86,69             | 87,18  | 88,68  | 89,18  |
|                                                        | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                                                    | Indeks      | 65,78             | 67,78  | 68,78  | 69,78  |
|                                                        | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                                                                                | Persen      | 40,79             | 41,29  | 41,79  | 42,29  |
|                                                        | Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah                                                                               | Persen      | 0,76              | 0,86   | 0,91   | 0,95   |
|                                                        | Persentase keterwakilan Perempuan di Parlemen                                                                                       | Persen      | 8,89              | 11,11  | 11,11  | 11,11  |
|                                                        | Cakupan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                               | Persen      | 30,00             | 40,00  | 60,00  | 80,00  |
|                                                        | Cakupan Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan                                                                   | Persen      | 67,00             | 71,00  | 73,00  | 75,00  |
|                                                        | Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga                                     | Persen      | 40,00             | 70,00  | 80,00  | 90,00  |
|                                                        | Cakupan Kuantitas Penyajian Data Gender dan Anak                                                                                    | Persen      | 100               | 100    | 100    | 100    |
|                                                        | Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak                                                                                               | Persen      | 75,00             | 80,00  | 85,00  | 90,00  |
|                                                        | Cakupan Pendampingan dan Perlindungan Anak                                                                                          | Persen      | 60,00             | 80,00  | 90,00  | 90,00  |
| <b>c) Pangan</b>                                       |                                                                                                                                     |             |                   |        |        |        |
|                                                        | Produktivitas Padi                                                                                                                  | Kw/Ha       | 40,92             | 41     | 41,25  | 41,5   |
|                                                        | Cakupan Bina Kelompok Petani                                                                                                        | Persen      | 9,61              | 5      | 5      | 5      |
|                                                        | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                                                           | Skor        | 85,7              | 86     | 86,2   | 86,4   |
|                                                        | Jumlah Ketersediaan Pangan Utama                                                                                                    | Persen      | 101,1             | 104,5  | 104,7  | 104,9  |
|                                                        | Jumlah Produksi Tanaman Pangan                                                                                                      | Ton         | 287.361,07        | 80     | 81     | 82     |
|                                                        | Jumlah Produksi Ternak                                                                                                              | Ton         | 1742              | 558    | 568    | 578    |
|                                                        | Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                                        | Persen      | 74,00             | 76,00  | 78,00  | 80,00  |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                                       | Indikator Kinerja Daerah                                                                                             | Satuan  | Kondisi Awal 2022 | Target |       |       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------|-------|
|                                                          |                                                                                                                      |         |                   | 2024   | 2025  | 2026  |
|                                                          | Persentase Ketersediaan Pangan (Jumlah Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)                                       | Persen  | 80,00             | 83,50  | 83,70 | 83,90 |
|                                                          | Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                                                       | Persen  | 20,00             | 30,00  | 35,00 | 40,00 |
|                                                          | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan                                                                             | Persen  | 44,83             | 50,00  | 60,00 | 70,00 |
| <b>d) Pertanian</b>                                      |                                                                                                                      |         |                   |        |       |       |
| <b>e) Lingkungan Hidup</b>                               |                                                                                                                      |         |                   |        |       |       |
|                                                          | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                                                                          | Indeks  | 90,61             | 90,71  | 90,81 | 90,91 |
|                                                          | Indeks Kualitas Air (IKA)                                                                                            | Indeks  | 53,78             | 53,89  | 53,99 | 54,09 |
|                                                          | Indeks Kualitas Lahan (IKL)                                                                                          | Indeks  | 49,05             | 50,45  | 51,82 | 53,19 |
|                                                          | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                                                              | Indeks  | 67,66             | 68,05  | 68,43 | 68,81 |
|                                                          | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sumber Pencemar                                                         | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Persentase timbulan sampah dan limbah yang tertangani                                                                | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)                                                                            | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun                                                                               | Dokumen | 3                 | 1      | 1     | 1     |
|                                                          | Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar                                                                       | Persen  | 35,00             | 35,00  | 35,00 | 35,00 |
|                                                          | Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3                                                      | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Persentase Peningkatan Masyarakat/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup                             | Persen  |                   | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari Lingkungan Hidup/ Pameran Lingkungan Hidup          | Persen  |                   | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup                                                                        | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Persentase Pengaduan Masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti                                              | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                                          | Persentase Timbulan Sampah yang ditangani                                                                            | Persen  | 100               | 100    | 100   | 100   |
| <b>f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> |                                                                                                                      |         |                   |        |       |       |
|                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan                                              | Indeks  | 80,95             | 82,00  | 83,00 | 85,00 |
|                                                          | Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                        | Persen  | 80,30             | 85,00  | 90,00 | 95,00 |
|                                                          | Waktu Penyelesaian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                         | Hari    | 7                 | 7      | 7     | 7     |
|                                                          | Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk                                                                              | Persen  | 98,79             | 99,90  | 99,50 | 100   |
|                                                          | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil                                                                                  | Persen  | 83,64             | 97,00  | 95,00 | 100   |
|                                                          | Cakupan ketersediaan database kependudukan                                                                           | Persen  | 99,00             | 99,00  | 99,00 | 99,00 |
|                                                          | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan                                                                 | OPD     | 9,00              | 27,00  | 38,00 | 45,00 |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                                     | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                                                 | Satuan | Kondisi Awal 2022   | Target              |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                          |        |                     | 2024                | 2025                | 2026                |
|                                                        | berdasarkan janji kerjasama                                                                                                                                              |        |                     |                     |                     |                     |
|                                                        | Jumlah Penerbitan Data Kependudukan                                                                                                                                      | Buku   | 145                 | 170                 | 170                 | 170                 |
| <b>g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>             |                                                                                                                                                                          |        |                     |                     |                     |                     |
|                                                        | Indeks Desa Membangun                                                                                                                                                    | Indeks | Berkembang (0.6535) | Berkembang (0.6732) | Berkembang (0.6833) | Berkembang (0.6936) |
|                                                        | Indeks Ketahanan Sosial                                                                                                                                                  | Nilai  | 0,7572              | 0,7801              | 0,7918              | 0,8037              |
|                                                        | Indeks Ketahanan Ekonomi                                                                                                                                                 | Nilai  | 0,5528              | 0,5695              | 0,578               | 0,5867              |
|                                                        | Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan                                                                                                                                      | Nilai  | 0,6504              | 0,6701              | 0,6801              | 0,6903              |
|                                                        | Persentase Desa yang Tertata dengan Baik                                                                                                                                 | Persen | 73,10               | 80,71               | 91,37               | 100                 |
|                                                        | Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa                                                                                                                                 | Persen | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
|                                                        | Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi dengan baik                                                                                                              | Persen | 73,10               | 80,71               | 91,37               | 100                 |
|                                                        | Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa                                                                         | Persen | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana</b> |                                                                                                                                                                          |        |                     |                     |                     |                     |
|                                                        | Tingkat Angka Kelahiran Total (TFR)                                                                                                                                      | Angka  | 2,16                | 2,15                | 2,14                | 2,13                |
|                                                        | Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                                                                                                                   | Persen | 51,46               | 52,96               | 54,46               | 60,00               |
|                                                        | Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                    | Persen | 2,28                | 2,58                | 2,88                | 3,18                |
|                                                        | Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK                                                                                               | Persen | 17,50               | 21,50               | 22,50               | 23,50               |
|                                                        | Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                                | Persen | 36,92               | 46,92               | 56,92               | 66,92               |
|                                                        | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                                                   | Persen | 60,00               | 70,00               | 75,00               | 80,00               |
| <b>i) Perhubungan</b>                                  |                                                                                                                                                                          |        |                     |                     |                     |                     |
|                                                        | Rasio konektivitas kabupaten                                                                                                                                             | Persen | 69,2                | 70,5                | 71,39               | 72,8                |
|                                                        | Persentase Tingkat penurunan kecelakaan darat/perairan                                                                                                                   | Persen | -9                  | 20                  | 33                  | 44                  |
|                                                        | Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar                                                                                                       | Persen | 80,00               | 80,29               | 85,10               | 90,17               |
|                                                        | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan                                                                                                                    | Persen | 70,00               | 75,00               | 81,84               | 92,47               |
| <b>j) Komunikasi dan Informatika</b>                   |                                                                                                                                                                          |        |                     |                     |                     |                     |
|                                                        | Indeks SPBE                                                                                                                                                              | Indeks | 2,13                | 2,3                 | 2,5                 | 3                   |
|                                                        | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                            | Persen | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
|                                                        | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik | Persen | 42                  | 50                  | 75                  | 100                 |
|                                                        | Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi                                                                                                  | Persen | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                           | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                 | Satuan       | Kondisi Awal 2022 | Target |       |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|-------|-------|
|                                              |                                                                                                                          |              |                   | 2024   | 2025  | 2026  |
|                                              | Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah                                                         | Persen       | 30                | 37     | 74    | 100   |
|                                              | Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (Dengan Satuan:Persen)                                   | Persen       | 62                | 100    | 100   | 100   |
|                                              | Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. inhil (Dengan Satuan:Persen) | Persen       | 74                | 74     | 92    | 100   |
|                                              | Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK (Dengan Satuan:Persen)                                   | Persen       | 84                | 50     | 75    | 100   |
| <b>k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b> |                                                                                                                          |              |                   |        |       |       |
|                                              | Persentase UMKM dan Koperasi yang naik skala usaha                                                                       | Persen       | 61,78             | 63     | 65    | 67    |
|                                              | Persentase Koperasi yang aktif                                                                                           | Persen       | 67,2              | 70     | 72    | 75    |
|                                              | Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru                                                                                    | Persen       | 74                | 77     | 80    | 83    |
|                                              | Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin                                                              | Persen       | 43,00             | 43,00  | 44,00 | 45,00 |
|                                              | Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha                                                              | Persen       | 15                | 15     | 16    | 18    |
|                                              | Cakupan Koperasi yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing                                                                  | Persen       | 75,00             | 75,00  | 76,00 | 78,00 |
|                                              | Jumlah Koperasi yang Mandiri                                                                                             | Koperasi     | 5                 | 5      | 6     | 8     |
|                                              | Persentase Usaha Mikro dan Kecil                                                                                         | Persen       | 72,00             | 72,00  | 74,00 | 75,00 |
|                                              | Persentase Jumlah Unit Usaha Yang Di Fasilitas Dalam Pengembangan Usaha                                                  | Persen       | 65,00             | 65,00  | 66,00 | 68,00 |
| <b>l) Penanaman Modal</b>                    |                                                                                                                          |              |                   |        |       |       |
|                                              | Indeks Pelayanan Publik DPMPSTSP Kab Inhil                                                                               | Nilai        | 4,02              | 4,2    | 4,35  | 4,51  |
|                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penanaman Modal                                                               | Nilai        | 90,15             | 90,2   | 90,3  | 91    |
|                                              | Persentase pertumbuhan investasi daerah sampai dengan tahun berkenaan                                                    | Persen       | 572,56            | 6      | 7     | 8     |
|                                              | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                                                                             | Investor     | 170               | 2      | 2     | 2     |
|                                              | Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan                                                                  | Milyar Rp    | 12,706            | 762    | 889   | 1,016 |
|                                              | Tingkat Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                                               | Persen       | 50,00             | 10,00  | 10,00 | 10,00 |
|                                              | Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi                                                                    | Pelaku Usaha | 170               | 20     | 20    | 20    |
|                                              | Persentase Kesesuaian Waktu Layanan Izin                                                                                 | Persen       | 80,00             | 85,00  | 90,00 | 95,00 |
|                                              | Tingkat Kedisiplinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal yang Terlaksana                                                  | Persen       | 80,00             | 85,00  | 90,00 | 95,00 |
|                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Sistem Informasi Penanaman Modal                                               | Persen       | 90,15             | 90,20  | 90,30 | 91,00 |
| <b>m) Kepemudaan dan Olahraga</b>            |                                                                                                                          |              |                   |        |       |       |
|                                              | Persentase Peningkatan Pemuda Aktif                                                                                      | Persen       | 0                 | 5      | 4,5   | 4     |
|                                              | Persentase Peningkatan prestasi olahraga Tingkat Daerah                                                                  | Persen       | 564               | 106    | 181   | -59   |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                               | Indikator Kinerja Daerah                                                                 | Satuan          | Kondisi Awal 2022 | Target |       |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------|-------|
|                                  |                                                                                          |                 |                   | 2024   | 2025  | 2026  |
|                                  | Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah                                               | Medali          | 73                | 29     | 82    | 33    |
|                                  | Cakupan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan                                   | Persen          | 0                 | 2      | 2,2   | 2,5   |
|                                  | Jumlah Wirausaha Muda yang Berkembang                                                    | Orang           |                   | 10     | 15    | 20    |
|                                  | Persentase Atlet yang berprestasi                                                        | Persen          | 718               | 25,00  | 280   | -63   |
|                                  | Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina                                               | Persen          | 100               | 100    | 100   | 100   |
| <b>n) Statistik</b>              |                                                                                          |                 |                   |        |       |       |
|                                  | Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu                                | Persen          | 100               | 100    | 100   | 100   |
| <b>o) Persandian</b>             |                                                                                          |                 |                   |        |       |       |
|                                  | Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah                            | Persen          | 100               | 37,00  | 74,00 | 100   |
| <b>p) Kebudayaan</b>             |                                                                                          |                 |                   |        |       |       |
|                                  | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                  | Persen          | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                  | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan                                                    | Objek           | 1                 | 1      | 1     | 1     |
|                                  | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan                        | Objek           | 2                 | 3      | 3     | 3     |
|                                  | Jumlah kesenian tradisional yang berkembang                                              | Jenis           | 2                 | 2      | 2     | 2     |
|                                  | Jumlah cagar budaya yang dilindungi                                                      | Objek           | 1                 | 2      | 2     | 2     |
|                                  | Persentase kepuasan masyarakat terhadap museum                                           | Persen          |                   | 80,00  | 82,00 | 85,00 |
| <b>q) Perpustakaan</b>           |                                                                                          |                 |                   |        |       |       |
|                                  | Nilai SKM Pemustaka terhdap pelayanan                                                    | Nilai           | 91,89             | 92,30  | 93,63 | 95,00 |
|                                  | Persentase jumlah pengunjung perpustakaan                                                | Persen          | 60,75             | 62,45  | 64,75 | 65,70 |
|                                  | Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan                                    | Persen          | 41,00             | 43,00  | 47,00 | 50,00 |
|                                  | Peningkatan jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan                    | Persen          |                   | 3      | 1     | 1     |
| <b>r) Kearsipan</b>              |                                                                                          |                 |                   |        |       |       |
|                                  | INDEK KEARSIPAN                                                                          | Nilai           | 24,44             | 24,51  | 24,52 | 24,53 |
|                                  | Persentase Perangkat Daerah dengan pengelolaan Arsip yang tertib                         | Persent         | 0                 | 32     | 65    | 100   |
|                                  | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.                            | Persen          | 3,2               | 19,4   | 35,5  | 51,6  |
|                                  | Persentase Arsip sesuai dengan Standar Baku yang dikelola pada tahun berkenaan           | Persen          | 0                 | 100    | 100   | 100   |
|                                  | Persentase perizinan penggunaan arsip yang diberikan sesuai SOP                          | Persen          | 0                 | 100    | 100   | 100   |
| <b>Urusan Pilihan</b>            |                                                                                          |                 |                   |        |       |       |
| <b>a) Kelautan dan Perikanan</b> |                                                                                          |                 |                   |        |       |       |
|                                  | Jumlah produksi perikanan tangkap                                                        | Ton             | 70895,01          | 72000  | 73000 | 74000 |
|                                  | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya                                                 | Ton             | 4831,75           | 5000   | 5200  | 5400  |
|                                  | Ketersediaan pangan dan konsumsi ikan perkapita pertahun (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Tahun) | Kg/Kapita/Tahun | 40,15             | 40,15  | 40,20 | 40,25 |
| <b>b) Pariwisata</b>             |                                                                                          |                 |                   |        |       |       |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                       | Indikator Kinerja Daerah                                                                       | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target  |         |         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|
|                                          |                                                                                                |        |                   | 2024    | 2025    | 2026    |
|                                          | Jumlah Kunjungan Wisatawan                                                                     | Orang  | 42.127            | 88.000  | 95.500  | 100.000 |
|                                          | Tingkat Hunian Akomodasi                                                                       | Persen | 39,83             | 43      | 47      | 50      |
|                                          | Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan                                   | Persen | 20,00             | 40,00   | 50,00   | 60,00   |
|                                          | Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dipromosikan                                    | Persen | 40,00             | 50,00   | 60,00   | 70,00   |
|                                          | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkembang                                  | Persen | 23,33             | 25,00   | 30,00   | 40,00   |
| <b>c) Pertanian</b>                      |                                                                                                |        |                   |         |         |         |
|                                          | Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB (rekommendasi indikator tujuan perangkat daerah) | Persen | 43,73             | 44      | 44,5    | 45      |
|                                          | Produksi Komoditi Perkebunan                                                                   | Ton    | 632,789           | 634,789 | 636,789 | 638,789 |
|                                          | jumlah produktivitas tanaman perkebunan                                                        | Ton    | 1.165             | 1.170   | 1.175   | 1.180   |
|                                          | Nilai Tukar Petani Sub Sektor Pertanian                                                        | persen | 120               | 125     | 130     | 135     |
|                                          | Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan                                                          | Jenis  | 4                 | 4       | 4       | 4       |
|                                          | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan   | persen | 20,00             | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
|                                          | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan    | persen | 20,00             | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
|                                          | Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura   | persen | 20,00             | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
|                                          | Persentase ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan                                     | persen | 42,50             | 42,50   | 50,00   | 50,00   |
|                                          | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian                                                    | persen | 5,00              | 2,00    | 2,00    | 2,00    |
|                                          | Persentase Ketersediaan Prasarana Perbenihan                                                   | persen | 15,00             | 15,00   | 15,00   | 15,00   |
|                                          | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB                                     | persen | 60,00             | 62,00   | 65,00   | 70,00   |
|                                          | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular                          | persen | 5,00              | 4,50    | 4,00    | 3,50    |
|                                          | Persentase Penurunan Serangan OPT                                                              | persen | 5,00              | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
|                                          | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                                   | persen | 20,00             | 25,00   | 30,00   | 35,00   |
|                                          | Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi                         | persen | 80,00             | 82,00   | 85,00   | 88,00   |
|                                          | Persentase Kelembagaan (Kelompok Tani) yang Meningkatkan Kapasitasnya                          | persen | 18,65             | 20,00   | 23,00   | 26,00   |
|                                          | Persentase cakupan bina kelompok tani                                                          | persen | 65,00             | 68,00   | 70,00   | 75,00   |
| <b>d) Kehutanan</b>                      |                                                                                                |        |                   |         |         |         |
| <b>e) Energi dan Sumber Daya Mineral</b> |                                                                                                |        |                   |         |         |         |
| <b>f) Perdagangan dan Perindustrian</b>  |                                                                                                |        |                   |         |         |         |
|                                          | Tingkat Inflasi                                                                                | Persen | 4,82              | 3,9     | 3,7     | 3,5     |
|                                          | LPE Kategori Industri Pengolahan                                                               | Persen | 4,61              | 5,34    | 5,6     | 5,88    |
|                                          | Ekspor bersih perdagangan                                                                      | US\$   | 483               | 490     | 500     | 510     |
|                                          | Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)                                                      | Persen | 29,17             | 30,63   | 32,16   | 33,76   |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                          | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                          | Satuan    | Kondisi Awal 2022 | Target |       |       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|-------|-------|
|                                             |                                                                                                                                                   |           |                   | 2024   | 2025  | 2026  |
|                                             | Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga                                                                                    | Komoditas | 9                 | 7      | 6     | 5     |
|                                             | Pertumbuhan volume ekspor                                                                                                                         | Persen    | 12,18             | 12,35  | 12,66 | 12,9  |
|                                             | Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan                                                                             | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif                                                            | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan Harga barang kebutuhan pokok                                                                        | Persen    | 70,00             | 75,00  | 80,00 | 80,50 |
|                                             | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                               | Persen    | 32,02             | 50,00  | 60,00 | 70,00 |
|                                             | Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                         | Persen    | 55,00             | 60,00  | 70,00 | 80,00 |
|                                             | Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina                                                                                                   | Persen    | 85,00             | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri                                                                                                   | Persen    | 80,00             | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional                                                                                            | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
| <b>h) Transmigrasi</b>                      |                                                                                                                                                   |           |                   |        |       |       |
|                                             | Persentase Transmigran Mandiri                                                                                                                    | Persen    | 35,00             | 37,00  | 40,00 | 45,00 |
|                                             | Cakupan Bina Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi                                                                                             | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Cakupan Bina Transmigrasi                                                                                                                         | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
| <b>Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan</b> |                                                                                                                                                   |           |                   |        |       |       |
| <b>a) Sekretariat Daerah</b>                |                                                                                                                                                   |           |                   |        |       |       |
|                                             | Persentase Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Administrasi Umum                     | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Persentase pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Persentase pembinaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang perekonomian dan pembangunan          | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi                                                                                         | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Persentase Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
|                                             | Persentase Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan          | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |
| <b>b) Sekretariat DPRD</b>                  |                                                                                                                                                   |           |                   |        |       |       |
|                                             | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD                                                                      | Persen    | 100               | 100    | 100   | 100   |



# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                                          | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                             | Satuan   | Kondisi Awal 2022       | Target                  |                         |                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                             |                                                                                                                                      |          |                         | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
|                                             | Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan                                                                                       | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                             | Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi                                                                 | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b> |                                                                                                                                      |          |                         |                         |                         |                         |
| <b>a) Perencanaan</b>                       |                                                                                                                                      |          |                         |                         |                         |                         |
|                                             | Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah                                                                                   | Persen   | 96.84*                  | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                             | Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil                                                                           | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                             | Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPD, RENSTRA RKPD dan RENJA) | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>b) Keuangan</b>                          |                                                                                                                                      |          |                         |                         |                         |                         |
|                                             | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah                                                                                            | Persen   | 9,16                    | 8                       | 9                       | 10                      |
|                                             | Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD                                                                                                      | persen   | 25                      | 21                      | 22                      | 23                      |
|                                             | Opini BPK                                                                                                                            | Predikat | WTP                     | WTP                     | WTP                     | WTP                     |
|                                             | Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan tepat waktu                                              | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                             | Persentase SKPD yang menyusun laporan BMD secara akurat, akuntabel dan tepat waktu                                                   | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                             | Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu                                                                                                | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                             | Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu                                                                            | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                             | Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah                                                                                                     | Persen   | -4,91                   | 2,00                    | 3,00                    | 4,00                    |
| <b>c) Kepegawaian</b>                       |                                                                                                                                      |          |                         |                         |                         |                         |
|                                             | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                           | Nilai    | 57,06                   | 58,1                    | 58,12                   | 58,15                   |
|                                             | Indeks Sistem Merit                                                                                                                  | Nilai    | 281,5                   | 290,5                   | 291                     | 291,5                   |
|                                             | Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan                                                                                            | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>d) Pendidikan dan Pelatihan</b>          |                                                                                                                                      |          |                         |                         |                         |                         |
|                                             | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                               | Persen   | 52,00                   | 52,00                   | 53,00                   | 54,00                   |
| <b>e) Penelitian dan Pengembangan</b>       |                                                                                                                                      |          |                         |                         |                         |                         |
|                                             | Indeks Inovasi Daerah                                                                                                                | Prediket | Sangat Inovatif (75.98) | Sangat Inovatif (77.98) | Sangat Inovatif (78.98) | Sangat Inovatif (79.98) |
|                                             | Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah                                                                                                | Persen   | 82,5                    | 86                      | 87                      | 88                      |
|                                             | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                                                                                             | Persen   | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>Pengawasan</b>                           |                                                                                                                                      |          |                         |                         |                         |                         |
|                                             | Level Maturitas SPIP                                                                                                                 | Level    | Level 3                 | Level 3 (3.00)          | Level 3 (3.01)          | Level 3 (3.02)          |
|                                             | Level Kapabilitas APIP                                                                                                               | level    | Level 3                 | Level 3 (3.00)          | Level 3 (3.01)          | Level 3 (3.02)          |
|                                             | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan yang diselesaikan                                                                  | Persen   | 0                       | 70                      | 80                      | 85                      |



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

| No                       | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                   | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target |      |      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|------|------|
|                          |                                                                                                                            |        |                   | 2024   | 2025 | 2026 |
|                          | Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan                                                | Persen | 0                 | 71     | 73   | 75   |
| <b>Kewilayahan</b>       |                                                                                                                            |        |                   |        |      |      |
|                          | Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di Kecamatan                                                 | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan                                                                              | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan                                                               | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan                                                            | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan                                                     | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi                                                                         | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
| <b>Pemerintahan Umum</b> |                                                                                                                            |        |                   |        |      |      |
|                          | Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara.                               | Persen | 60                | 60     | 65   | 70   |
|                          | Persentase potensi konflik yang di fasilitasi                                                                              | Persen | 80                | 80     | 85   | 85   |
|                          | Persentase pembinaan terhadap aparatur dan komponen masyarakat tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara | Persen | 94                | 94     | 95   | 95   |
|                          | Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, dan Pilkades.                                      | Persen | 74                | 100    | 100  | 100  |
|                          | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                                | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik                                                                     | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Persentase Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Inhil             | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Persentase penanganan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya                                                                 | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |
|                          | Persentase penyelesaian konflik yang di fasilitasi                                                                         | Persen | 100               | 100    | 100  | 100  |



# BAB IX

## PENUTUP

Bab Penutup menguraikan pengoperasian Rencana Pembangunan Daerah agar mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten dengan jabatan Kepala daerah berakhir di tahun 2023. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah



## RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 - 2026

Berakhir Pada Tahun 2023. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2024-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN.

### 9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 hingga 2026;
3. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
4. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir wajib menyebarluaskan Perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan;

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ada dalam dokumen RPD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada masa yang akan datang.